

**PERAN *PUBLIC RELATIONS* DALAM  
MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF KRATON  
SURAKARTA**

(Studi Deskriptif tentang Perbandingan Peran Humas Hangabehi dan Tedjowulan  
dalam Mempertahankan Citra Positif terkait Konflik Perebutan Kekuasaan 2 Raja)



Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi

**Skripsi**

**Disusun Oleh:**

**Retno Wulan Dari  
D0204100**

**ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2009**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
dan siap diuji oleh Dewan Penguji Skripsi  
pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hari : Jumat  
Tanggal : 1 Mei 2009

Pembimbing Utama,

Dr. H. Widodo Muktiyo, SE, MComm

NIP. 131 884 420

## **PENGESAHAN**

Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Mei 2009

Susunan Panitia Penguji:

Ketua : Dra. Hj. Sofiah, M.Si .....

Sekretaris : Dra. Christina Tri Hendriyani, M.Si .....

Penguji : Dr. H. Widodo Muktiyo, SE, MComm .....

Mengetahui,

Dekan,

Drs. H. Supriyadi, SN, S.U.

NIP. 130 936 616

## MOTTO

*Life is like a box of chocolate, you never know what you gonna get*  
*(Forrest Gump)*

*Waktu, adalah jawaban bagi orang-orang yang sabar...*  
*(retno)*

*Berbahagiaalah sekarang, bukan esok hari!*  
*(anonim)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini persembahkan untuk :*

☞ *ibu.. ibu.. ibu..*

☞ *bapak..*

*Semoga hadiah kecil ini bisa memberikan berjuta  
kebahagian dan kebanggaan...*

## KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillah* atas limpahan rahmat dan kemudahan yang diberikan Allah SWT sehingga penyusunan skripsi berjudul PERAN PUBLIC RELATIONS DALAM MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF KRATON SURAKARTA (Studi Deskriptif tentang Perbandingan Peran Humas Hangabehi dan Tedjowulan dalam Mempertahankan Citra Positif terkait Konflik Perebutan Kekuasaan 2 Raja) dapat ini terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, perhatian, motivasi, dan bimbingan selama masa penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. H. Supriyadi S.N. S.U. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
2. Dr. Prahastiwi Utari, Ph. D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. H. Widodo Muktiyo, SE, MComm. selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Chatarani Heny Dwi S. S.sos selaku pembimbing akademik yang selama ini selalu memberikan dukungan dan kemudahan bagi Penulis.

5. Ibu, Bapak, dan seluruh keluargaku, untuk semua dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti mengalir untuk Penulis.
6. Seluruh narasumber, Bpk Bambang Ary, Bpk Tundjung W, Gusti Mung, Kanjeng Winarno, Bpk Bambang Irawan, Gusti Puger, Bpk Kalinggo, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bantuan kepada Penulis. Terima kasih, tanpa dukungan seluruh narasumber skripsi ini tidak akan pernah terwujud.
7. Sahabat-sahabatku, Kelompok makan (Mimi, Ratri, Rika, Nuri) terima kasih untuk persahabatan kita. Sahabat PG-ku (Nila, Cindar, Fikri, Dara, Rosina) yang untuk selalu ada buat aku. Sahabatku, Bayu Ervina, terima kasih.
8. Teman-teman Komunikasi 2004, untuk semua kenangan, suka duka, dan kebersamaan yang telah terjalin.
9. Teman-teman dan crew Fiesta 107.7 fm. Yang telah memberi warna dalam hidupku. Dari Fiesta, dengan cinta, kita bangun Indonesia!
10. Donny Satriawan, *the special one*, terima kasih untuk segalanya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan berbagai saran dan kritikan konstruktif dari pembaca. Terakhir, semoga skripsi ini akan mengalir kemanfaatannya. Amin

Surakarta, April 2009

Penulis

# DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Manfaat Penelitian .....	18
1. Manfaat Teoritis .....	18
2. Manfaat Praktis .....	19
E. Kerangka Teori.....	19
F. Kerangka Pikir .....	38
G. Konsepsualisasi .....	39
1. Public Relations .....	39
2. Citra.....	41
3. Konflik Perebutan Kekuasaan Kraton Surakarta .....	43
H. Metodologi .....	46
1. Jenis Penelitian.....	46
2. Lokasi Penelitian.....	47



3. Populasi dan Sampel .....	48
a. Populasi .....	48
b. Sampel.....	48
4. Validitas dan Reliabilitas Data.....	49
5. Teknik Pengumpulan Data.....	50
6. Analisis Data .....	51

## **BAB II. DESKRIPSI LOKASI**

A. Lingkungan Geografis.....	54
B. Lingkungan Fisik Kraton Surakarta .....	56
1. Lingkaran 1 : Kedhaton.....	57
2. Lingkaran 2 : Kompleks Bangunan di Baluwarti.....	62
3. Lingkaran 3 : Paseban .....	63
4. Lingkaran 4 : Alun-alun .....	64
C. Kontroversi Penetapan Pengganti Raja .....	66
1. Munculnya Kontroversi Penetapan Calon Raja .....	66
2. Tampilnya KGPH Tedjowulan .....	72
3. Penobatan KGPH Hangabehi.....	73
D. Lembaga Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi & Tedjowulan	74
1. Humas Paku Buwono XIII Hangabehi.....	74
2. Humas Paku Buwono XIII Tedjowulan.....	76

## **BAB III. PENYAJIAN DATA**

A. Awal Konflik.....	82
B. Humas PB XIII Tedjowulan dan Hangabehi .....	88
1. Humas PB XIII Tedjowulan.....	88
2. Humas PB XIII Hangabehi .....	92
C. Peranan Humas PB XIII Tedjowulan dan Hangabehi.....	98
1. Peranan Humas PB XIII Tedjowulan.....	98

a. Media.....	98
b. Hubungan dengan lembaga lain dan masyarakat.....	102
c. Kebudayaan.....	105
d. Selama Konflik.....	106
2. Peranan Humas PB XIII Hangabehi .....	111
a. Media.....	111
b. Hubungan dengan lembaga lain dan masyarakat.....	116
c. Kebudayaan.....	125
d. Selama Konflik.....	126

#### **BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Perebutan Kekuasaan 2 Raja sebagai Proses Komunikasi yang Mengandung Kemelut .....	132
B. Analisis Peran Humas Kraton Surakarta.....	156
1. Empat Kategori Peranan Humas dalam Organisasi .....	156
2. Ke-khas-an dalam Lembaga Humas Kraton dan Peranannya.....	171
3. Humas dalam Manajemen Krisis .....	176
4. Mekanisme Kerja Humas Kraton.....	183

#### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	192
B. Saran.....	195

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran .....	38
Gambar 1.2 <i>Flow Model of Analysis</i> .....	52
Gambar 2.1 Model Perintah ( <i>dawuh dhalem</i> ) kepada Humas .....	79
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kraton PB XIII Tedjowulan.....	80
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Humas PB XIII Tedjowulan .....	81
Gambar 4.1 Tabel Kategori Peranan Humas.....	158

## ABSTRAK

**Retno Wulan Dari, D0204100, PERAN PUBLIC RELATIONS DALAM MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF KRATON SURAKARTA (Studi Deskriptif tentang Perbandingan Peran Humas Hangabehi dan Tedjowulan dalam Mempertahankan Citra Positif terkait Konflik Perebutan Kekuasaan 2 Raja), Skripsi (S-1), Jurusan Ilmu Komunikasi, Program Studi Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan peninggalan sejarah dan kejayaan masa lampau. Salah satu peninggalan dari sisa-sisa kejayaan masa lalu adalah adanya kerajaan-kerajaan tradisional yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Salah satu kerajaan tradisional yang besar dan hingga sekarang masih dikenal masyarakat luas adalah Kraton Surakarta. Walaupun Keraton Surakarta sudah tidak menjadi pusat pemerintahan lagi, tapi keberadaannya masih tetap dipertahankan sebagai pusat kebudayaan, lembaga sejarah, dan potensi pendukung pariwisata.

Suksepsi silih berganti telah terjadi dan mewarnai kehidupan Kraton Surakarta. Bahkan intrik dan perseteruan tidak dapat dihindari pada sejumlah pergantian Paku Buwono. Hingga pada tahun 2004 Paku Buwono XII mangkat dan meninggalkan konflik perebutan kekuasaan.

Seiring perkembangan zaman, Kraton Surakarta pun juga berkembang. Kehadiran Humas dalam struktur kelembagaan Kraton Surakarta patut mendapatkan perhatian, apalagi di masa konflik, saat yang tepat bagi Humas Kraton untuk menunjukkan peranannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan membandingkan tindakan serta peranan Humas Keraton Kasunanan Surakarta untuk mempertahankan citra positif yang telah dimiliki Keraton, terkait dengan sengketa perebutan kekuasaan antara dua raja. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive sampling* atau pengambilan sample berdasarkan tujuan. Dengan informan kunci Pejabat Humas Tedjowulan dan Hangabehi serta kerabat Kraton dan budayawan kota Solo.

Setelah dilakukan analisa, diperoleh kesimpulan bahwa Humas Tedjowulan berperan lebih aktif dalam usaha mempertahankan citra positif di tengah konflik. Sementara Humas Hangabehi lebih condong ke arah Humas sebagai juru penerang kebudayaan. Namun, terlepas dari penilaian secara terpisah, kedua Humas tersebut belum bisa dikatakan berhasil menjalankan peranan mereka sebagai Humas yang sesuai dengan koridor kehumasan.

## ABSTRACT

**Retno Wulan Dari. D0204100. ROLE OF PUBLIC RELATIONS TO MAINTAIN POSITIVE IMAGE OF KRATON SURAKARTA (Descriptive Studies about Comparison Role of Hangabehi's and Tedjowulan's PRO to Maintain Positive Image Related to The Conflict Seizing Power Between The 2 Kings). Graduate (S-1). Communication Science Major. Program Study Mass Communication. Faculty Social and Political Science. Sebelas Maret University Surakarta. 2009.**

Indonesia is a country which is rich with ancient inheritance and glory in the past. One of inheritance from the ancient's glory is the existence of traditional kingdoms, spread all over the country. One of the biggest traditional kingdom and still famous among citizens until nowadays is Kraton Surakarta. Although Kraton Surakarta is no longer being the center of government, but its existence is still maintain as the center of culture, historical institution, and tourism potential support.

Succession happened all the time along the existence of Kraton Surakarta. Conflict can't be avoided in some of the Paku Buwono's succession. Until 2004 when Paku Buwono XII passed away and caused the conflict seizing power between his children.

As time goes by, so does Kraton Surakarta. The rise of Public Relations Department in Kraton Surakarta should gain some attention. This is the right time for PRO to show their role in this conflict conditions.

The purpose of this research is to get some description and to compare the role of Kraton Surakarta's Public Relations Department in order to maintain Kraton's positive image dealing with conflict seizing power. The type of research is qualitative with descriptive method. This research uses purposive sampling technique. The key informan is PRO of Hangabehi's and Tedjowulan's PR Department, royal families, and cultural expert in Solo.

After analysis, it can be concluded that Tedjowulan's PRO made more effort to maintain positive image. In the other hand, Hangabehi's PRO is tend to be cultural PR in order to give more explanation about Kraton's culture and heritage.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan peninggalan sejarah dan kejayaan masa lampau. Salah satu peninggalan dari sisa-sisa kejayaan masa lalu adalah adanya kerajaan-kerajaan tradisional yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan pada tahun 1945, kerajaan-kerajaan tradisional tersebut merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat kebudayaan dan perkembangan keagamaan di berbagai daerah di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia, mempunyai kerajaan tradisionalnya sendiri beserta raja yang memimpinya, sekaligus bertindak sebagai kepala pemerintahan.

Sejarah Indonesia, yang mencakupi kurun waktu panjang dan berdimensi banyak, dapat disederhanakan dengan mengkategorisasikan perkembangannya menjadi 3 bagian, yaitu : Masa Kerajaan Tradisional, Masa Kolonial, dan Masa Kemerdekaan Republik Indonesia. (Dept. P&K, 1999:1)

Salah satu kerajaan tradisional yang besar dan hingga sekarang masih dikenal masyarakat luas adalah Kraton Surakarta, yang juga adalah salah satu dari kota kerajaan peninggalan Kerajaan Mataram Islam, sekaligus sebagai kerajaan yang

tertua di antara 4 kerajaan penerus Dinasti Mataram yang lain. Maka tidak mengherankan jika keberadaan keraton masih tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, ajaran dan tradisi yang hidup di dalam tembok Keraton Surakarta juga masih dijalankan dan menjadi agenda rutin yang dapat mendukung sektor pariwisata di Kota Solo. Walaupun Keraton Surakarta sudah tidak menjadi pusat pemerintahan lagi, tapi keberadaannya masih tetap dipertahankan sebagai pusat kebudayaan, lembaga sejarah, dan potensi pendukung pariwisata.

Kerajaan tradisional Surakarta, atau yang disebut Keraton Surakarta Hadiningrat ini, didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II (PB II) pada tahun 1746. Berdirinya Kraton Surakarta ini dapat dikatakan sebagai pengganti Kraton Kartasura yang hancur akibat adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina.

Kelahiran Keraton Surakarta, tentunya tidak bisa dilepaskan dari adanya hubungan antara kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, dan tentu saja Mataram. Keruntuhan Kerajaan Majapahit pada pertengahan pertama abad ke-16 yang kemudian diikuti munculnya Dinasti baru, yaitu Kerajaan Demak, merupakan titik tolak perkembangan agama Islam di tanah Jawa. Namun, keberadaan Kerajaan Demak tidak berlangsung lama, hanya bertahan sekitar 40 tahun. Sepeninggal Raden Patah, keadaan Kerajaan Demak menjadi tidak tenang, intrik perebutan kekuasaan mulai terjadi. Hingga akhirnya muncul sosok Jaka Tingkir yang merupakan menantu raja terakhir Kerajaan Demak. Jaka Tingkir akhirnya mendirikan kraton di Pajang dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Naiknya Jaka Tingkir yang notabene hanya seorang menantu tersebut, mendorong dirinya untuk melakukan berbagai upaya legitimasi

agar tidak menimbulkan keragu-raguan di kalangan rakyat yang dipimpinnya sekaligus untuk mengamankan kedudukannya sebagai pewaris tahta.

Keberhasilan Jaka Tingkir untuk mendapatkan tahta Kerajaan Demak, mendapat bantuan dari Ki Penjawi dan Ki Pemanahan. Sebagai balas jasa, Jaka Tingkir memberikan tanah di daerah Pati untuk Ki Penjawi, sedangkan untuk Ki Pemanahan mendapatkan tanah di daerah Mataram. Ternyata seiring berjalannya waktu, Mataram yang tadinya hanya berupa hutan belantara berkembang menjadi daerah yang besar dan berpengaruh. Hal ini membuat Sultan Hadiwijaya khawatir, karena bisa mengancam eksistensi Kraton Pajang. Sepeninggal Ki Pemanahan, Mataram kemudian diserahkan kepada Sutawijaya, anak Ki Pemanahan yang diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya. Di bawah kekuasaan Sutawijaya, yang bergelar Panembahan Senapati inilah, Mataram kemudian menjadi dinasti besar yang menguasai tanah Jawa.

Pada tahun 1613, kekuasaan Mataram jatuh ke tangan Raden Mas Rangsang atau yang bergelar Sultan Agung. Beliau adalah cucu dari Panembahan Senapati sekaligus merupakan raja terbesar Dinasti Mataram. Sejak meninggalnya Sultan Agung, kondisi Kraton Mataram menjadi tidak terawat bahkan pernah mengalami kebakaran hebat, untuk itulah Sunan Amangkurat II akhirnya memindahkan pusat Kerajaan Mataram ke Pajang pada 11 September 1680.

Keadaan kerajaan Mataram Kartasura yang berdiri selama kurang lebih 60 tahun (1680-1746) mengalami pasang surut. Sejak Sunan Amangkurat II menduduki tahta, ia pun sering bersengketa dengan adiknya yaitu Pangeran Puger. Puncaknya



terjadi perebutan kekuasaan dari Amangkurat III (putra Sunan Amangkurat II) oleh Pangeran Puger yang terjadi tahun 1709. Pangeran Puger kemudian bergelar Sunan Paku Buwono I. (Dept. P&K, 1999:63)

Sepeninggal Paku Buwono I pada tahun 1719, intrik perebutan kekuasaan kembali hadir di Mataram, ketika anak-anak PB I berebut untuk menggantikan tahta ayahnya, bahkan saudara PB I yang bernama Pangeran Arya Mataram juga turut meramaikan intrik perebutan kekuasaan tersebut.

Pada masa PB II terjadi perpecahan dalam Kraton, kali ini melibatkan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkunegara yang terlibat pertarungan secara terbuka. Selain itu masa pemerintahan PB II juga diwarnai pemberontakan yang melibatkan kaum Tionghoa atau orang-orang Cina pada tahun 1740 yang lebih dikenal dengan nama Geger Pacinan. Raden Mas Garendi, orang yang dianggap paling berjasa dalam pemberontakan tersebut, kemudian diangkat menjadi raja baru di Kartasura, sebagai raja tandingan, menggantikan PB II yang melarikan diri. Namun, ternyata PB II berhasil kembali dan menguasai Kraton Pajang lagi. Sayangnya, keadaan kraton Pajang saat itu sudah rusak berat akibat pemberontakan Geger Pacinan, sehingga PB II memutuskan untuk memindahkan pusat Kraton Pajang ke Surakarta. Di tanah yang subur inilah, dinasti Mataram dengan rajanya yang bergelar Paku Buwono bertahta hingga PB XII yang mangkat pada pertengahan tahun 2004 yang lalu. Suksesi silih berganti telah terjadi dan mewarnai kehidupan Kraton Surakarta. Bahkan intrik dan perseteruan tidak dapat dihindari pada sejumlah pergantian Paku Buwono. Bahkan hingga saat ini, dimana kraton tidak lagi menjadi

pusat kekuasaan, masalah suksesi masih saja menimbulkan intrik dan perpecahan di dalam istana. Fakta sejarah inilah, yang seakan menjawab pertanyaan tentang mengapa suksesi di Kraton Surakarta mengarah ke konflik dan perpecahan.

Wacana suksesi di Kraton Surakarta, pasca mangkatnya PB XII perlahan tapi pasti berubah menjadi polemik yang berlarut-larut bahkan telah menjurus pada konflik dan intrik yang terus menajam di antara putera-puteri almarhum PB XII. (Mulyanto Utomo, 2004:4)

Perubahan zaman membawa kondisi Kraton Surakarta sampai pada keadaan dimana Kraton tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, namun hanya berfungsi sebagai cagar budaya dan penjaga nilai-nilai kebudayaan yang adi luhung. Bahkan sesuai Keppres No. 23 / 1988, tersirat bahwa seorang raja pun tidak lagi leluasa dan bebas menggunakan asset atau kelengkapan yang ada di Kraton kecuali untuk kepentingan upacara adat atau peringatan. (Mulyanto Utomo, 2004:4)

Perkembangan keadaan tersebut, bukannya tidak mungkin juga akan mempengaruhi dan merubah sistem suksesi yang ada di Kraton Surakarta, terutama tentang siapa yang berhak memilih, dipilih, dan berwenang untuk dinobatkan. (Mulyanto Utomo, 2004:4)

Namun, walau Kraton Surakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan dan kekuasaan, tidak bisa dipungkiri bahwa Kraton Surakarta masih mempunyai magnet dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat Kota Solo, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar Kraton (baca : Baluwarti). Masyarakat kota Solo masih percaya bahwa Kraton Surakarta masih mempunyai berkah bagi para abdi dalem serta

mereka yang percaya. Kondisi inilah yang mampu membuat Kraton Surakarta tetap bisa bertahan di antara kemajuan zaman dan globalisasi.

Fungsi keraton yang sudah berubah dari fungsi awalnya membuatnya juga harus berbenah untuk menghadapi perkembangan zaman. Kesan eksklusif yang ditampilkan oleh keraton belakangan ini mulai memudar seiring dibukanya keraton sebagai objek wisata yang terbuka untuk wisatawan umum.

Sebagai suatu entitas sosial, keraton adalah masyarakat atau komunitas yang mempunyai kebudayaan sendiri. Di dalam masyarakat atau komunitas itu terjadilah interaksi, baik secara individual ataupun secara kolektif. Dengan demikian, anggota masyarakat atau komunitas itu berhubungan secara kait-mengait satu dengan lainnya, sehingga terjadilah ketergantungan di antara mereka itu. Selain terjadi interaksi secara individual dan kolektif, berlangsung pula interaksi yang dilakukan lewat organisasi sosial. (Darsiti Soeratman, 2000:9)

Kedudukan kraton sebagai suatu komunitas atau masyarakat tersendiri tadi tidak lantas membuat kraton menjadi terasing. Sebagai suatu bentuk komunitas, kraton juga harus mengadakan hubungan dengan komunitas lain di luar dunia kraton sebagai cara untuk menyamai ritme perkembangan zaman.

Sesungguhnya Kraton Surakarta sudah tamat. Yang tersisa sekarang hanyalah bekas dari sebuah kerajaan Jawa. Walaupun masih disebut sebagai kraton maksudnya lebih mengacu kepada arti budaya, yaitu suatu bangunan tempat tinggal raja. Bukan lagi diartikan sebagai pusat kekuasaan. Pernyataan tersebut tentunya akan menimbulkan spekulasi tentang kelanjutan nasib Kraton Surakarta. Mungkinkah tidak

akan ada lagi PB XIII di masa yang akan datang? Atau , kemungkinan kedua, suksesi akan tetap berlanjut, tetapi status serta gelarnya bukan lagi sebagai raja atau sinuhun. Melainkan sekedar sebagai Kepala Kerabat dan Pimpinan Istana seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden No.23 / 1988. (Mulyanto Utomo, 2004:5)

Berbicara tentang intrik, konflik, bahkan perang untuk memperebutkan tahta kerajaan, memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kerajaan Mataram. Dalam sejarah berdirinya Kerajaan Mataram, tercatat tiga peristiwa besar yang terkait dengan perebutan kekuasaan raja, bahkan meluas menjadi perang suksesi hingga akhirnya menjadikan Kerajaan Mataram terpecah menjadi beberapa kerajaan. Perang suksesi tersebut masing-masing adalah perebutan tahta mangkatnya Amangkurat I (1705-1708), mangkatnya Paku Buwono I (1719-1728), dan mangkatnya Paku Buwono II (1746-1757). Raja yang baru bertahta selalu merasa terancam kedudukannya. Kekuasaan raja dianggap sebagai sesuatu yang harus utuh dan bulat, tidak boleh tersaingi, tidak boleh terkotak-kotak apalagi dibagi-bagi dengan orang lain. Alasan sejarah dan pandangan masyarakat Jawa akan kekuasaan inilah yang memicu terjadinya perebutan kekuasaan yang bisa melebar hingga ke perang suksesi yang pastinya membawa dampak yang tidak menyenangkan serta merugikan rakyat.

Kerajaan-kerajaan di Jawa mempunyai konsep bahwa kekuasaan raja adalah absolut atau mutlak, dimana seorang raja adalah segala-galanya. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar, tidak hanya pada seorang diri kawula-nya (masyarakat yang dipimpinnya), tetapi juga harta bendanya. Raja juga dianggap wenang wisesa

ing sanagari, artinya, yang berwenang tertinggi di seluruh negeri, sehingga seorang rakyat harus mengikuti apa kehendak raja (ndherek kersa dalem). Doktrin semacam inilah yang kemudian melahirkan system pemerintahan yang mengarah pada tiran. Setiap raja akan berusaha menurut caranya sendiri-sendiri untuk menghadapi pesaing yang datang dan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal inilah yang juga terjadi pada dinasti penerus kerajaan Mataram. (Mulyanto Utomo, 2004:7)

Dengan melihat kembali sejarah pergantian kekuasaan yang terjadi di Kerajaan Mataram, dapat disimpulkan bahwa banyak raja Mataram yang memperoleh kedudukan dengan melakukan pergeseran kekuasaan. Proses suksesi di Kerajaan Mataram memang cukup bervariasi, dengan berbagai latar belakang konflik yang mengiringinya. Namun, konflik tidak hanya datang dari internal kerabat kerajaan, tapi juga datang dari pihak luar yang tentunya ingin mengambil keuntungan dari konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam kerajaan.

Sebagai contoh, pada masa Amangkurat II, dimana kedudukan raja Mataram kala itu sangat tergantung pada pemerintah Belanda. Hal tersebut terus berlanjut hingga pada masa Amangkurat III, dimana Pangeran Puger (Paku Buwono I) dengan bantuan penuh dari Belanda dapat merebut kekuasaan dari tangan Amangkurat III. Campur tangan pihak luar, dalam hal ini penjajah Belanda, terus berlanjut hingga pada masa Paku Buwono III.

Dari fakta tersebut, tampak bahwa kerajaan Mataram belum sepenuhnya memiliki dan menerapkan sistem pewarisan tahta kekuasaan yang mantap. Di luar intrik yang terjadi, raja yang bertahta seringkali mengalami kebimbangan saat harus

menentukan siapa yang akan mewarisi kekuasaan kerajaan. Paku Buwono X yang dianggap sebagai raja terbesar di Keraton Surakarta pun, mengalami kebingungan saat harus menentukan siapa yang akan menggantikannya. (Mulyanto Utomo, 2004:8)

Silsilah raja di Mataram yang terjadi tidak selamanya terbentuk secara vertical lurus ke bawah. Ada kalanya terjadi penyimpangan alur silsilah karena tidak semua raja memiliki istri permaisuri yang melahirkan anak laki-laki, atau bahkan seorang raja tidak mempunyai permaisuri. Setidaknya hal tersebut terlihat sejak berdirinya Kerajaan Mataram, hingga akhirnya terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Di Keraton Surakarta pun, sampai raja terakhir PB XII, mekanisme pergantian kekuasaan tidak sepenuhnya berjalan lancar mengikuti hukum adat waris yang ada. (Mulyanto Utomo, 2004:9) Pada umumnya, yang berhak naik tahta adalah putera mahkota yang biasa disebut Kanjeng Pangeran Adipati Anom, yaitu putera raja yang dilahirkan dari permaisuri. Akan tetapi, sering terjadi juga ada banyak saudara-saudaranya, terutama yang dilahirkan dari para selir, yang mungkin usianya jauh lebih tua dan lebih cerdas yang juga merasa berhak akan tahta raja. Hal ini didasari bahwa mereka juga sama-sama mendapat pengakuan sebagai putera raja. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan raja yang berkuasa, terutama yang baru menduduki tahta, akan menghadapi pesaing yang sewaktu-waktu bisa menggeser kedudukannya. (Mulyanto Utomo, 2004:6)

Pamor Keraton Surakarta, juga tidak bisa lagi disamakan dengan beberapa tahun yang lalu. Di tangan Paku Buwono XII, pamor Keraton Surakarta semakin

surut, tidak lagi mempunyai hegemoni politik kekuasaan yang besar. Namun, hilangnya kekuasaan politik Kraton tidak turut serta menghancurkan struktur organisasi dalam Kraton yang sudah lama terbentuk. Di dalam Kraton masih terdapat seorang raja yang memerintah, para pejabat Kraton, Sentana, Abdi Dalem, maupun upacara-upacara adat yang masih tetap digelar seperti pada jaman dulu. Keraton juga masih menyimpan benda-benda kuno yang bernilai sejarah nilai. (Mulyanto Utomo, 2004:10)

Upaya PB XII untuk mendapatkan kembali hak monarkinya juga tidak pernah berhasil. Hierarki Keraton Surakarta hanya ditopang oleh Keputusan Presiden No.23 / 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Tentu saja legitimasi tersebut, masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki Kraton dua abad yang lalu. (Mulyanto Utomo, 2004:11)

Walaupun pada kenyataannya Keraton sudah tidak lagi mempunyai hegemoni kekuasaan, tapi yang jelas Pemerintah Republik Indonesia sampai sekarang masih mengakui eksistensi Kraton Surakarta.

Kelanjutan eksistensi Keraton Surakarta selepas mangkatnya Paku Buwono XII pada 11 Juni 2004 yang lalu, meninggalkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang masih peduli terhadap eksistensi Kraton Surakarta. Pertanyaan besar tentang bagaimanakah nantinya putera-puteri PB XII akan mewarisi alih kekuasaan dan menerapkannya di masa sekarang ini. Akankah mengacu pada sejarah yang selalu diwarnai intrik ataukah menjalaninya secara damai dan mulus? (Mulyanto Utomo, 2004:12)

Setelah PB XII mangkat, polemik seputar siapakah yang nantinya akan menggantikan atau siapa yang berhak menggantikan almarhum terus bergulir. Munculnya isu seputar suksesi, didorong oleh dua factor. Yang pertama bahwa almarhum PB XII tidak mempunyai permaisuri. Kedua, munculnya ide pembaruan system pewarisan tahta. Kedua factor inilah yang mengakibatkan pandangan masyarakat menjadi terbelah. Tidak terkecuali dengan kerabat dan sentana kalangan dalam. Sementara umumnya abdi dalem relatif netral, sebagian mencoba berpegang pada adat atau naluri. Dan jika melihat dan berpegang pada angger-angger Keraton, menurut pandangan tradisionalis, putera tertua almarhum dari selir-lah yang paling berhak mewarisi tahta. (KP. Edy Wirabhumi, 2004:13)

Pada sisi lain, muncul pendapat yang berlawanan, bahwa calon pengganti tidak harus putra sulung raja. Tetapi bisa salah satu putra yang dinilai memiliki kemampuan yang terukur, akses luas serta bisa diterima oleh semua kalangan. Dengan kata lain, pewarisan tahta sudah saatnya diposisikan dalam konteks kekinian sesuai dengan perkembangan jaman. Fakta bahwa masih tegaknya Keraton hingga sekarang, antara lain, karena dukungan masyarakat dan bantuan dana dari pemerintah memperkuat pendapat tersebut. beda pendapat tersebut semakin menajam ketika Pesan Tawangmangu di-blow up di media massa. (KP. Edy Wirabhumi, 2004:13)

Pesan Tawangmangu adalah pesan almarhum PB XII yang diutarakan pada tanggal 3 Juni 2004, saat almarhum beristirahat di villa pribadi milik Sososugiharso, menantu almarhum Jenderal (Pur) Soedjono Humardani, guru spiritual Keraton Surakarta. Pesan tersebut berisi bahwa Sinuhun PB XII meminta Hangabehi untuk



menggantikan dirinya serta berpesan agar putera-puterinya membantu dan mendukung jumenengnya (bertahtanya) Hangabehi sebagai PB XIII. Pesan almarhum tersebut direkam oleh KP Edy Wirabumi, suami GRAY Koes Moertiyah, dengan menggunakan handphone kemudian diketik ulang dan ditandatangani oleh almarhum PB XII pada 10 Juni 2004. (KP. Edy Wirabhumi, 2004:7)

Polarisasi di kalangan internal putera sentana, kerabat, dan abdi dalem yang semula tersamar mulai mengarah pada bentuk rivalitas. Hingga akhirnya, polemik tersebut mengerucut kepada dua nama yang masing-masing mempunyai kubu pendukung yang menganggap bahwa figure yang mereka dukung adalah yang paling berhak atau setidaknya yang paling tepat. Kedua figure tersebut adalah KGPB Hangabehi, yang merupakan putera tertua almarhum PB XII, dan KGPB Suryosutedjo atau yang lebih sering disebut KGPB Tedjowulan.

KGPB Hangabehi, yang merupakan putera tertua, dianggap oleh para pendukungnya sebagai sosok yang paling tepat untuk menggantikan almarhum PB XII. Pendukung Hangebehi menganggap bahwa calonnya tersebut telah ditunjuk oleh PB XII sebagai calon raja, karena secara garis keturunan dia dianggap sebagai orang yang paling berhak atas tahta Keraton Surakarta sesuai dengan angger-angger (aturan tidak tertulis yang dipatuhi secara turun temurun). Menurut angger-angger, memang putera tertua-lah yang berhak diangkat sebagai calon raja.

Namun kemudian muncul nama KGPB Tedjowulan, adik Hangabehi lain ibu. Tedjowulan dianggap oleh sebagian putera-puteri PB XII, sentana, dan abdi dalem sebagai orang yang paling tepat untuk menggantikan PB XII, karena dianggap

memiliki kemampuan baik secara fisik maupun intelektualitas. (Mulyanto Utomo, 2004:13)

Kemunculan dua nama calon raja yang sama-sama mempunyai pendukung tersebut, membuat perpecahan, seperti yang sudah diramalkan banyak kalangan terjadi. Keraton Surakarta seolah-olah terpecah menjadi dua kubu yang mendukung dua calon raja yang berbeda. Masing-masing kubu pendukung mengklaim mempunyai dasar yang jelas yang bisa melegalkan calonnya untuk naik tahta dan bergelar PB XIII.

Berdasar wawancara dengan Humas kubu Tedjowulan, KRHT. Bambang Pradotonagoro, SH. Kubu pendukung Tedjowulan meyakini bahwa PB XII secara tersirat memang menyiapkan Tedjowulan sebagai penggantinya, hal tersebut dilihat dari tindakan PB XII yang memasukkan Tedjowulan ke Akademi Militer. Dari sekian banyak putera PB XII, hanya Tedjowulan-lah yang dimasukkan ke Akademi Militer. Hal ini juga mengacu pada kerajaan-kerajaan atau monarki-monarki besar di seluruh dunia, dimana sang putra mahkota-lah yang dikirim untuk menempuh pendidikan di kemiliteran. Selain itu, Bambang Pradotonagoro juga mengatakan bahwa jika memang benar Hangabehi-lah yang telah ditunjuk almarhum PB XII, kenapa dia tidak dipersiapkan dari dulu?

Sementara itu, di pihak Hangabehi meyakini bahwa almarhum PB XII memang telah menunjuk Hangabehi sebagai penggantinya. Keyakinan tersebut, diperkuat dengan adanya pesan dari almarhum PB XII yang kemudian disebut sebagai Pesan Tawangmangu.

Namun ternyata, otensitas Pesan Tawangmangu termasuk cap jempol PB XII diragukan, karena hanya disaksikan putera-puteri almarhum dari sebuah garis keturunan seorang selir dan sekretaris pribadi Sinuhun. (KP. Edy Wirabhumi, 2004:14)

Permasalahan perebutan kekuasaan antara 2 raja ini, secara langsung atau tidak, akan mempengaruhi penilaian dan opini masyarakat terhadap kerabat Keraton dan citra positif Keraton Surakarta secara keseluruhan. Apalagi citra yang dijual oleh Keraton tentu saja sangat jauh berbeda dengan citra yang dijual oleh perusahaan atau instansi lain. Citra yang ada di Keraton berkaitan dengan adat, budaya, dan manusia yang ada di dalamnya. Inilah yang membuat Keraton harus selalu menjaga citra positif, baik citra lembaga ataupun citra personal para kerabat Keraton.

Namun, jika dilihat berdasarkan sejarah terkait dengan perebutan kekuasaan dan intrik yang selalu mewarnai suksesi sepanjang sejarah Kerajaan Mataram dan penerusnya, termasuk Keraton Surakarta, yang berlaku adalah citra yang melegenda. Dimana sudah hampir bisa dipastikan jika terjadi suksesi maka akan ada konflik yang menyertainya. Oleh karena itu, seakan-akan masyarakat sudah kebal dan tidak terpengaruh terhadap pemberitaan yang isinya bisa saja menjatuhkan citra positif Keraton.

Walaupun demikian, tetap saja sebagai sebuah institusi yang juga mempunyai tujuan dan publik-nya sendiri, Keraton tetap harus berjuang untuk mempertahankan citra positifnya di mata masyarakat. Apalagi di jaman sekarang ini, dimana eksistensi budaya-budaya asli Indonesia mulai tergerus oleh laju perkembangan jaman.

Seiring dengan perkembangan itulah, Keraton Kasunanan Surakarta juga mulai merasakan pentingnya peran Public Relations Officer atau pejabat Humas untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan pihak di luar keraton. Hal-hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah pariwisata dan kebudayaan saja tapi juga menyangkut bagaimana mempertahankan citra positif keraton di mata masyarakat Solo. Sangat penting bagi Keraton untuk selalu dapat mempertahankan citra yang positif di mata masyarakat Solo. Hal ini tentu erat kaitannya dengan eksistensi keraton itu sendiri di dalam masyarakat modern seperti sekarang ini. Walaupun bagi sebagian golongan masyarakat keberadaan keraton tetap penting, jelas tidak bisa dipungkiri bahwa di era kehidupan modern seperti sekarang ini sudah banyak orang yang melupakan asal – usul kebudayaannya. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa keraton harus selalu menjaga citra positifnya di mata masyarakat Solo. Karena keraton telah menjadi sumber ajaran budi pekerti yang luhur dan mempunyai banyak filosofi hidup yang sekarang mulai dilupakan oleh sebagian besar masyarakat.

Berbicara mengenai menjaga citra positif keraton di mata masyarakat Solo tentu tidaklah mudah. Sebagai sebuah institusi yang juga ditangani oleh banyak orang, seperti hal-nya organisasi atau institusi yang lain, tentu saja Keraton Kasunanan Surakarta tidak luput dari permasalahan internal yang sering kali harus dihadapi para penghuni yang ada di dalamnya. Permasalahan internal ini seringkali menjadi hambatan bagi keraton untuk mempertahankan citra positifnya di mata masyarakat Solo. Sebagai contoh peristiwa bulan September 1982, saat itu terjadi peristiwa penganiyaan terhadap *Pengageng Putra Sentana Dalem* GPH Hadiprabowo

yang dilakukan oleh KGPH Hangabehi, GPH Kusumoyudho, dan GPH Suryobandriyo berkaitan dengan hilangnya benda pusaka keraton. Peristiwa tersebut cukup untuk memancing reaksi dari masyarakat. Yang menjadi ketakutan utama dari orang dalam keraton adalah jika masalah internal seperti itu muncul lagi maka dikhawatirkan wibawa keraton di mata masyarakat Solo akan hilang.

Menurut *Pengageng Parentah Keraton Surakarta* GPH Dipokusumo, keraton harus memperbaiki citra positifnya di mata masyarakat Solo. Hal ini tentu saja terkait dengan permasalahan perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam Keraton Surakarta sejak tahun 2004 yang lalu. Sejarah Kerajaan Mataram pada masa lampau banyak diwarnai oleh sengketa di antara para pangeran, lebih-lebih jika masalah yang dihadapi menyangkut suksesi. Walaupun raja yang sedang memerintah telah menyiapkan calon penggantinya, tetapi sesudah raja mangkat, pergantian tahta itu sering berlangsung secara tidak mulus. Banyak factor yang menyebabkan terjadinya peristiwa di balik pergantian tahta tersebut, tetapi factor yang paling menonjol adalah konsep kekuasaan dalam pemikiran kebudayaan Jawa. Konsep kekuasaan yang berdasarkan wahyu cakraningrat atau wahyu keraton masih berakar kuat dalam pemikiran mengenai calon yang dapat menjadi pengganti raja.

Hal inilah yang kembali terjadi setelah Pakoe Boewono XII mangkat. Permasalahan yang melibatkan KGPH Hangabehi, putra tertua almarhum Pakoe Boewono XII, dengan KGPH Tedjowulan tersebut hingga saat ini belum ada jalan keluarnya. Permasalahan inilah yang bisa menjadi salah satu sebab hilangnya citra positif Keraton Surakarta di mata masyarakat Solo. Sudah menjadi rahasia umum

bahwa sekarang ini keraton terpecah menjadi dua, pihak pendukung KGPH Hangabehi dan pihak pendukung KGPH Tedjowulan. Permasalahan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah tambahan untuk pihak keraton. Di satu sisi keraton harus tetap bisa eksis di tengah globalisasi dunia, di sisi lain keraton juga harus bisa untuk tetap menjaga wibawa dan citra positif di mata masyarakat Solo walaupun di dalam dinding keraton sedang bergejolak, karena citra positif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Keraton Surakarta di mata masyarakat.

Inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat fenomena perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta terkait dengan fungsi Humasnya yang notabene menjadi penghubung antara pihak keraton dengan masyarakat Solo. Menjadi lebih menarik lagi, karena masing-masing raja yang mengklaim berkuasa tersebut mempunyai Humasnya masing-masing yang tentu saja strategi PR mereka sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menjadi tugas bagi Humas Keraton Surakarta untuk tetap menampilkan citra keraton yang positif walaupun permasalahan perebutan tahta tersebut belum berakhir hingga saat ini. Apalagi tentu saja, kerja Humas Keraton dan Humas seorang raja tentu saja akan sangat berbeda dengan Humas pada umumnya. Selain untuk mempertahankan eksistensi keraton itu sendiri, masih banyak golongan masyarakat yang mempercayai bahwa keraton adalah sumber kebaikan, kedamaian dan monumen yang abadi untuk tradisi dan kebudayaan klasik Jawa.

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan suatu perumusan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimanakah peranan Humas Keraton Surakarta, kubu Hangabehi dan Tedjowulan, dalam mempertahankan citra positif Keraton Surakarta terkait dengan krisis internal Keraton Surakarta yang berupa perebutan kekuasaan antara 2 raja.”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan membandingkan tindakan serta peranan Humas Keraton Kasunanan Surakarta untuk mempertahankan citra positif yang telah dimiliki Keraton, terkait dengan sengketa perebutan kekuasaan antara dua raja.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini akan diketahui bagaimana peranan dan langkah-langkah yang diambil oleh Humas Keraton Surakarta dalam menghadapi konflik, khususnya konflik yang mengancam meruntuhkan citra positif Keraton di mata masyarakat Kota Solo.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan implementasi manajemen konflik dalam dunia PR, khususnya di dalam sebuah lembaga yang menjadi sumber dari sebuah peradaban agung yang telah berusia ratusan tahun. Melalui penelitian ini, juga bisa ditunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara ilmu pengetahuan modern dengan ilmu pengetahuan “kejawen” dalam kaitannya untuk mempertahankan citra positif Keraton Surakarta. Lebih umumnya, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam.

## **E. KERANGKA TEORI**

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat dari mulai yang primitif sampai masyarakat yang modern mempertahankan tatanan dan aturan sosial mereka dengan proses komunikasi. Komunikasi dikatakan vital karena untuk berhubungan dengan individu lain cara yang digunakan adalah dengan melalui proses komunikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Everett M. Rogers bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. (Deddy Mulyana, 2004:62).

Komunikasi juga bukanlah suatu kegiatan yang pasif. Komunikasi lebih cenderung berupa proses yang terus-menerus terjadi dan berlangsung sepanjang



waktu. Sebagai sebuah proses, komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berusaha menyampaikan pikirannya kepada orang lain. Tanpa komunikasi manusia tidak akan dapat menyampaikan pikiran kepada orang lain dan pada gilirannya manusia tidak akan dapat mengembangkan dirinya.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, Ilmu Komunikasi juga mengalami perkembangan. Salah satu konsekuensi dari perkembangan sebuah ilmu pengetahuan adalah munculnya cabang dari ilmu pengetahuan tersebut. Demikian juga yang terjadi pada Ilmu Komunikasi yang akhirnya mempunyai cabang ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Diantara cabang Ilmu Komunikasi adalah ilmu tentang Public Relations, yang masih relatif baru terutama jika diterapkan di negara-negara berkembang.

Ilmu tentang Hubungan Masyarakat atau Public Relations sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1700-an, periode dimana Public Relations muncul dalam bentuk aktivitas yang tidak terorganisir dengan baik. (Rosady Ruslan, 2003:39). Kemudian baru diawal abad ke-20 Public Relations yang berperan menghadapi suatu krisis diterapkan. Ivy Ledbetter Lee menjadi orang pertama yang membuat prinsip dasar bahwa keterbukaan dalam informasi dan komunikasi timbal balik dua arah dengan khalayak tidak bisa diabaikan oleh pihak manajemen. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai Declarations Of Principles (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar). Inilah yang sekarang banyak dianut para Public Relations Officer dalam menangani krisis yang terjadi. (Rosady Ruslan, 1999:18).

Perkembangan Public Relations di Indonesia memang masih tergolong baru jika dibandingkan dengan negara yang lain, tetapi fungsi kehumasan sudah dikenal secara formal dan terorganisasi dengan baik serta mulai diterapkan pada tahun 1950-an. (Rosady Ruslan, 2003:40).

Menurut Dozier & Broom peranan Public Relation dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu :

1. Penasehat Ahli (Expert Prescriber)

Seorang praktisi PR yang sudah berpengalaman dan mempunyai kemampuan yang tinggi dapat membantu menyelesaikan masalah yang timbul dan berkaitan dengan publik suatu organisasi. Dalam hal ini, pihak management bersifat pasif, artinya tinggal menerima, mempercayai dan menjalankan apa yang sudah diusulkan oleh penasehat ahli tersebut untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

2. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator)

Dalam hal ini, PR bertindak sebagai seorang mediator yang membantu pihak manajemen mengetahui apa yang diinginkan publiknya sekaligus juga bisa bertindak yang sebaliknya, yaitu untuk bisa menjelaskan tujuan dari pihak manajemen kepada publiknya, agar tercipta saling pengertian antara kedua belah pihak.

3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator)

Dalam proses pemecahan masalah, praktisi PR adalah bagian dari tim manajemen, yang bertugas untuk membantu pimpinan, baik sebagai penasehat hingga proses pengambilan keputusan. Biasanya dalam menghadapi krisis yang menimpa

suatu perusahaan atau organisasi, akan dibentuk suatu tim yang dikoordinir oleh praktisi PR yang melibatkan berbagai departemen dan berbagai keahlian.

#### 4. Teknisi Komunikasi (Communication Technician)

Peranan PR sebagai teknisi komunikasi ini berbeda dengan tiga peranan lainnya. Peranan ini hanya menjadikan PR sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi.

Pada dasarnya, lingkup tugas dan fungsi Public Relations dalam aktivitas manajemen perusahaan atau organisasi akan berhadapan dengan dua situasi yang berbeda, bahkan terkadang bertentangan. Yang pertama adalah kegiatan Public Relations dalam situasi organisasi yang “normal”. Kemudian yang kedua adalah saat berhadapan dengan situasi krisis atau konflik. Dalam situasi organisasi atau perusahaan normal, fungsi dan tugas Public Relations sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, yaitu untuk membentuk persepsi atau opini publik terhadap organisasi atau perusahaan yang diwakilinya untuk memperoleh identitas dan citra yang baik. Sebaliknya dalam situasi konflik atau krisis, organisasi akan berhadapan dengan pandangan negatif dari masyarakat, ditambah lagi dengan tekanan pemberitaan pers yang menampilkan atau menyoroti berita-berita yang terkadang tidak menampilkan fakta dan data yang aktual serta obyektif tetapi lebih cenderung menampilkan pendapat secara subyektif. (Rosady Ruslan, 1999:13)

Mengutip dari Cutlip, Center & Bloom (2000:424) pelaksanaan strategi Public Relations dalam berkomunikasi menganut asas “7 Cs PR Communication” yaitu,

1. Credibility (Kredibilitas)

Komunikasi itu dimulai dari rasa saling percaya. Bagaimana komunikator mampu menanamkan kepercayaan terhadap diri komunikan sehingga mau mempercayai apa yang disampaikannya.

2. Context (Konteks)

Menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Pesan yang disampaikan harus efektif dan jelas.

3. Content (Isi)

Pesannya menyangkut kepentingan orang banyak/publik. Sehingga informasi dapat diterima sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

4. Clarity (Kejelasan)

Pesan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Mudah dimengerti dan menimbulkan pemahaman yang sama antara komunikator dengan komunikan.

5. Continuity & Consistency (Kontinuitas & konsistensi)

Komunikasi adalah proses yang tak pernah berakhir. Dengan demikian harus dilakukan berulang-ulang dan dengan variasi pesan.

6. Channel (Saluran)

Menggunakan saluran media komunikasi yang tepat dan dipercaya oleh publik yang menjadi sasaran. Penggunaan media yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda.

### 7. Capability of the audience (Kapabilitas khalayak)

Memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak yang menjadi target. Komunikasi dapat menjadi efektif bagi masyarakat jika berkaitan dengan faktor-faktor yang bermanfaat.

(Rosday Ruslan, 2003:99-100)

Proses komunikasi yang melibatkan individu yang berbeda latar belakang, pengalaman, dan juga kecenderungan psikologis yang tentu saja mampu memancing timbulnya konflik dalam proses komunikasi.

Setiap proses komunikasi yang mengandung kemelut, minimal mengindikasikan hal-hal seperti berikut ini :

1. Adanya perbedaan pendapat yang tajam dan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan untuk saling memahami. Dimana setiap pernyataan akan memancing pernyataan tandingan atau argumentasi yang berlawanan.
2. Masing-masing pihak tidak lagi melihat sisi positif atau maksud baik dari komunikasi, sebab dalam kondisi konflik komunikasi hanya digunakan sebagai alat untuk merendahkan posisi lawan.
3. Muncul kecenderungan, karena komunikator dan komunikan tidak berada dalam posisi yang sama.

(Redi Panuju, 2002:2)

Krisis kehumasan atau konflik yang terjadi dalam ranah Public Relations tentu saja mempunyai beberapa perbedaan dengan krisis atau konflik yang umumnya

terjadi. Penyebab awal munculnya krisis kehumasan juga beraneka ragam. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa menjadi awal mula munculnya krisis kehumasan :

1. Individu dalam internal organisasi

Orang yang kalah dalam suatu kompetisi bisa mempunyai kecenderungan untuk mencari kelemahan lawannya yang menang untuk menjatuhkannya atau untuk mendapatkan dukungan. Keadaan ini bisa menjadi krisis, jika dilakukan tanpa adanya fakta. Bahkan bisa mempertajam polarisasi kelompok. Apalagi jika konflik terjadi antara individu yang berada di lapisan atas dengan individu yang berada di lapisan bawah.

2. Individu dalam elit kekuasaan

Mereka yang berada di elit kekuasaan sering berebut pengaruh untuk menjadi top decision maker. Mereka sering menggunakan klik dan jaringan baik formal ataupun informal. Kompetisi antar elite ini sebenarnya bagus, karena bisa memacu kinerja masing-masing untuk memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Namun, akan menjadi konflik jika persaingan menjadi tidak sehat, keluar dari sistem yang sudah ditetapkan organisasi. Bahkan bisa juga terjadi over lap karena intervensi masing-masing individu, hal inilah yang bisa memacu krisis.

3. Keberadaan organisasi paranoide

Keberadaan organisasi paranoide adalah krisis bahkan sudah merupakan krisis itu sendiri. Ciri-ciri organisasi paranoide adalah :

- Mutu produk tidak konsisten
- Lambat menanggapi perubahan

- Kekurangan produk inovatif
- Struktur biaya boros
- Keterlibatan karyawan rendah
- Layanan pada konsumen tidak responsive
- Kurang alokasi sumber daya

#### 4. Penggunaan teknik propaganda yang berlebihan

Istilah propaganda selama ini berkonotasi negatif, bahkan cenderung jahat. Sebetulnya propaganda adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan teknik tertentu, digunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku individu agar tercapai kesamaan pendapat atau cita-cita. Kegiatan Public Relations mau tidak mau juga harus melakukan kegiatan propaganda, agar apa yang menjadi tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Jadi tidak mengherankan jika suatu perusahaan atau organisasi rela mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk kegiatan ini. Namun, akan menjadi masalah jika teknik propaganda yang digunakan adalah dengan cara menjatuhkan nama orang atau organisasi lain. Malah nantinya bisa menjadi bumerang yang akan balik menghancurkan organisasi atau individu yang semula memulai konflik.

#### 5. Press relation yang kurang baik

Kurang baiknya hubungan dengan pers merupakan potensi krisis. Seperti yang kita ketahui, media adalah pembentuk opini publik yang paling ampuh. Jadi wajib bagi seorang PRO untuk menjaga hubungan baik dengan media. Mengingat kekuatan

media yang bisa menjadi sarana untuk publikasi yang sangat efektif bagi perusahaan atau organisasi.

#### 6. Efek citra eksternal

Hal ini merupakan krisis yang sangat sulit untuk diatasi. Sebagai contoh, pemberitaan tentang bank yang dilikuidasi oleh pemerintah mengakibatkan penarikan besar-besaran uang para nasabah yang tersimpan di bank-bank lain yang sebetulnya tidak terkena likuidasi.

#### 7. Efek kepemimpinan otoriter

Ketika suatu organisasi yang dipimpin oleh orang yang otoriter mendapatkan masalah, akan sulit bagi PRO untuk merumuskan jalan keluar yang obyektif. Karena sifatnya yang egois, pemimpin seperti ini justru menganggap krisis sebagai tantangan untuk menguji eksistensinya.

#### 8. Efek anarkisme massa

Massa yang berada dalam kondisi marah dan tidak dapat berpikir logis menjadi krisis yang berat untuk ditangani. PRO dalam hal ini, harus bersiap-siap untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin muncul dari para wartawan.

(Redi Panuju, 2002:19-28)

Krisis kehumasan dapat dilihat dan dianalisis dari berbagai sudut pandang yang berbeda, yaitu :

#### 1. Sudut pandang keorganisasian

Kehumasan dikatakan mengalami krisis ketika sebagai institusi di dalam suatu organisasi tidak lagi mampu menjalankan fungsi kehumasan secara efektif. Ketika



seorang PRO sudah tidak mampu lagi menjadi penyedia informasi yang dibutuhkan publik yang ingin mengetahui keadaan organisasi, maka fungsi PR bisa dikatakan gagal. Jika hal tersebut terjadi, maka publik akan berusaha untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sumber-sumber lain, yang terkadang malah bisa menimbulkan rumor yang bisa merugikan organisasi.

Krisis juga dapat diketahui dari keengganan top management menggunakan informasi yang berasal dari institusi Humas dalam pengambilan keputusan yang penting. Jika top management sudah tidak percaya lagi pada kinerja PR maka institusi kehumasan berada dalam keadaan kritis, karena gagal menjalankan fungsi manajemen berkelanjutan.

## 2. Sudut pandang pencitraan

Citra adalah kesan organisasi yang berkembang dalam benak orang lain atau publik. Citra positif akan diikuti oleh sikap simpatik, citra negatif akan diikuti oleh sikap apriori dan antipati. Karena itu, tugas PR adalah untuk membangun citra positif yang sekuat-kuatnya. Banyak hal yang bisa menyebabkan citra negatif perusahaan atau organisasi, contohnya adanya skandal dalam manajemen. Jika hal tersebut sampai diketahui oleh khalayak, maka akan terjadilah krisis bagi PR.

## 3. Sudut pandang tugas dan fungsi humas

Tugas dan fungsi humas seringkali mengalami pergeseran atau perubahan yang tidak relevan dengan apa yang seharusnya menjadi tugas PR. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh PRO tentang apa saja yang menjadi fungsi dan tugas PR. Bahkan seringkali PRO hanya mengerjakan tugas-

tugas yang sifatnya teknis seperti membuat press release, kliping, dll. Padahal sebenarnya fungsi dan tugas PR jauh lebih rumit dan kompleks daripada hanya sekedar pekerjaan yang bersifat teknis. Hal ini tentu saja akan membuat pihak top management tidak lagi mempercayai institusi kehumasan.

#### 4. Sudut pandang SDM

Seorang PRO haruslah orang yang mempunyai kapabilitas tinggi mengingat tugasnya yang berat. Namun, masalahnya masih banyak perusahaan atau organisasi yang menempatkan sembarang orang untuk menduduki jabatan PRO, artinya banyak PRO yang sesungguhnya tidak mempunyai kapabilitas dan kualitas yang memadai untuk menjadi seorang PRO. Hal inilah yang seringkali membuat PR suatu instansi berjalan di tempat dan tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar. Kesalahan pada proses rekrutmen inilah yang menjadi awal dari krisis PR.

#### 5. Sudut pandang proses kehumasan

Proses kehumasan tidak boleh hanya mengandalkan feeling, semata-mata bereaksi jika ada stimulus dari lingkungan. Untuk itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan masalah, dan agar PR tidak dianggap sebagai pihak yang justru menciptakan masalah, ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dilakukan. Seperti yang diungkapkan Cutlip, Center & Bloom proses PR melalui tahapan sebagai berikut :

- Penemuan fakta
- Perencanaan
- Komunikasi
- Evaluasi

(Redi Panuju, 2002:3-13)

Konflik atau krisis yang melanda institusi kehumasan suatu organisasi memang berbeda dengan konflik atau krisis yang biasa. Tetapi, walaupun berbeda konflik atau krisis kehumasan juga tetap mempunyai tahapan terjadinya konflik. Ada tiga tahapan konflik yang dipaparkan oleh Dr. William Hendricks, yaitu :

1. Konflik tahap pertama (peristiwa sehari-hari)
2. Konflik tahap kedua (tantangan)
3. Konflik tahap ketiga (pertentangan)

Konflik pada tahap pertama tidak terlalu mengancam dan konflik pada tahap ini adalah yang paling mudah untuk dikelola. Namun, bila konflik sudah melalui tahap kedua dan ketiga, penanganannya pun akan menjadi lebih sulit dan akan berpotensi untuk menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Tiga tahapan konflik diatas membutuhkan strategi manajemen yang berbeda, yaitu :

- Konflik tahap pertama dan konflik yang disertai emosi paling baik diselesaikan dengan strategi pengelolaan yang cermat.
- Konflik tahap kedua membutuhkan lebih banyak pelatihan dan keahlian manajemen khusus.
- Sedangkan konflik tahap ketiga membutuhkan intervensi.

(Dr. William Hendricks, 1998:7-8)

Tiga tahapan konflik yang berbeda tersebut, tentu saja mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula. Karakteristik masing-masing tahapan konflik akan mempengaruhi cara untuk penanganannya.

#### 1. Karakteristik konflik tahap pertama

Konflik tahap pertama terjadi terus menerus dan biasanya hanya memerlukan sedikit perhatian. Cara yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik tahap ini adalah dengan ketelatenan individu untuk mengelola konflik. Walaupun intensitasnya rendah, tetapi konflik tahap pertama ini nyata ada di sekitar kita. Ketika individu saling bekerja sama, ada perbedaan dalam tujuan, nilai-nilai yang dianut dan kebutuhan. Pada tahap pertama ini individu biasanya akan langsung sadar dan bersedia untuk membuat solusi. Ada beberapa jalan untuk menangani konflik tahap pertama ini, yaitu :

- Membuat suatu proses yang menguji dari dua sisi. Dapatkah suatu kerangka kerja dibuat sehingga mampu meningkatkan pemahaman satu dengan yang lainnya?
- Bertanya jika reaksi tersebut proporsional dengan keadaan. Apakah kelompok tertentu membawa sisa emosi dari peristiwa lain?
- Identifikasi poin-poin kesepakatan dan bekerjalah menurut poin-poin tersebut, kemudian baru mengidentifikasi poin-poin ketidaksepakatan.

#### 2. Karakteristik konflik tahap kedua

Pada tahap ini, konflik diterima sebagai unsur kompetisi, ditandai dengan sikap kalah menang. Kekalahan tampaknya lebih besar pada tahap ini karena orang

diikat oleh masalah. Kepentingan pribadi dan bagaimana cara seseorang melihat menjadi penting, selain itu pada konflik tahap kedua ini sikap seseorang yang tersembunyi juga diamati. Masalah pada konflik tahap kedua ini lebih kompleks, masalah tidak dapat lebih lama dikelola dengan strategi penanganan konflik secara sabar dan hati-hati. Pada tahap ini, orang adalah masalah.

Konflik tahap kedua, jika diabaikan akan memperdayai dan memperbesar masalah yang sudah ada. Kelompok atau individu yang sedang terlibat konflik pada tahap ini menilai pihaknya lebih bijak jika dibandingkan dengan pihak lawan. Berikut ini, adalah cara untuk mengatasi konflik tahap kedua :

- Buatlah suasana aman, ciptakan lingkungan dimana setiap orang akan merasa aman.
- Tegastah terhadap fakta, tapi lunak terhadap individu.
- Buatlah pekerjaan resmi sebagai pekerjaan tim, bagilah tanggung jawab sehingga setiap individu memiliki alternatif untuk dapat menyesuaikan diri. Tekankan pentingnya kesamaan tanggung jawab.
- Carilah kesepakatan minimal, tapi tidak dianjurkan membuat kompromi, karena secara tidak langsung akan mengorbankan poin yang menjadi harapan.
- Berikan waktu untuk menarik kelompok yang bersaing menerima kesepakatan tanpa memberikan konsensi atau mengeluarkan tekanan.

### 3. Karakteristik konflik tahap ketiga

Konflik pada tahap ketiga ini, tujuannya berubah dari keinginan untuk menang menjadi keinginan untuk mencederai. Motivasi yang muncul adalah untuk menghilangkan keberadaan kelompok lain. Pihak dalam dan luar diidentifikasi oleh kelompok yang bersaing seperti orang yang memilih sisi “isu yang menjadi masalah”. Dalam pemikiran individu yang sedang berada dalam konflik tahap ketiga ini, kepentingan pribadi dan “organisasi yang baik” disamakan.

Negosiasi dan arbitrase adalah alat yang diperlukan untuk mengakhiri konflik tahap ketiga ini. Negosiasi mensyaratkan kelompok yang saling bertikai duduk bersama untuk menyelesaikan konflik dengan ditengahi oleh pihak yang berada di luar kelompok yang sedang bertikai.

Arbitrase membawa konflik melangkah ke proses negoisasi. Masing-masing pihak yang bertikai memaparkan cara penyelesaian yang terbaik. Pihak penengah kemudian memilih salah satu cara penyelesaian yang dianggap paling baik. Hal seperti ini tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pihak yang menang benar-benar jelas. Sedangkan kekurangannya ada pihak yang terpaksa harus menerima untuk menjadi kelompok yang kalah. Bila konflik meningkat menjadi tahap ketiga, strategi paling baik yang dapat digunakan adalah meminimalisir kerugian dan bersiap-siap untuk memfokuskan perhatian pada kelompok yang sedang bertikai.

Cara untuk menangani konflik tahap ketiga adalah :

- Campur tangan tim luar harus memperhatikan detail.

- Menyediakan waktu tambahan untuk wawancara dengan setiap individu yang terlibat konflik.
- Mengarahkan kembali individu yang bertikai dan memberikan mereka sumber alternatif untuk menyalurkan energinya.
- Jelaskan tujuan organisasi dan ciptakan suasana yang menumbuhkan rasa dituntun sehingga individu yang terlibat konflik itu kan mundur sebagai pemenang.

(Dr. William Hendricks, 1998:8-17)

Sebuah konflik atau krisis yang terjadi dalam sebuah organisasi atau lembaga, tidak bisa begitu saja diselesaikan dengan cara yang sembarangan. Seperti halnya organisasi, sebuah konflik pun menuntut untuk di-manage atau diatur sedemikian rupa agar menghasilkan jalan keluar terbaik untuk semua pihak.

Ada lima gaya dalam manajemen konflik, yaitu

1. Integrating (penyelesaian konflik dengan mempersatukan)

Gaya ini diasosiasikan dengan pemecahan masalah. Akan efektif bila isu konflik adalah sesuatu yang kompleks. Menyelesaikan konflik dengan cara ini, mendorong tumbuhnya cara berpikir kreatif.

2. Obliging (penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu)

Kerelaan membantu diartikan menempatkan nilai yang sangat tinggi untuk orang lain, sementara dirinya sendiri rendah. Hal ini akan membuat orang lain merasa lebih baik dan senang terhadap satu isu.

3. Dominating (penyelesaian konflik dengan mendominasi)

Ini adalah gaya penyelesaian konflik yang merupakan lawan dari obliging. Tekanannya pada diri sendiri. Gaya ini meremehkan kepentingan orang lain dan bisa menjadi solusi yang tepat jika dibutuhkan keputusan yang cepat atau bila isunya tidak terlalu penting.

4. Avoiding (penyelesaian konflik dengan cara menghindar)

Para penghindar tidak menempatkan suatu nilai pada diri sendiri atau orang lain. Dapat diasosiasikan dengan menghindari persoalan. Aspek negatifnya, individu bisa dianggap menghindari tanggung jawab jika memakai gaya ini untuk menyelesaikan masalah.

5. Compromising (penyelesaian konflik dengan kompromi)

Pada gaya ini, perhatian pada diri sendiri atau orang lain dalam tingkatan sedang. Dalam kompromi, setiap individu memiliki sesuatu untuk diberikan dan menerima sesuatu. Kompromi adalah jalan yang paling efektif jika itu kompleks atau jika terjadi keseimbangan kekuatan antara dua pihak yang saling bertikai.

(Dr. William Hendricks, 1998:48-51)

Ruang lingkup pekerjaan seorang PRO memang sangat luas, dari mulai hal yang bersifat teknis hingga ke masalah yang menyangkut top management dan berhubungan dengan publik. Namun, dari semua tugas dan kewajiban seorang PRO ada satu benang merah yang dapat kita ambil, yakni bahwa tugas utama seorang PRO adalah untuk membentuk citra positif dari publik atau masyarakat terhadap instansi atau organisasi dimana PRO tersebut bekerja.



Seperti halnya tujuan-tujuan yang lain, untuk mengetahui apakah tujuan utama PRO yaitu terbentuknya citra positif publik atau masyarakat terhadap organisasi tertentu sudah tercapai atau belum, ada beberapa tolok ukur yang dapat digunakan. Tolok ukur tersebut juga dikenal dengan lima target pokok *Circle PR Programming & Communication* (Rosady Ruslan, 1997:50) yaitu

#### 1. Citra

Citra merupakan tujuan pokok sebuah perusahaan atau lembaga. Terciptanya citra yang baik di mata khalayak adalah hal yang menguntungkan. Pengertian citra itu sendiri sebenarnya abstrak, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian, penerimaan, kesadaran, dan pengertian. Baik semacam tanda respek atau hormat dari khalayak sebagai sebuah lembaga ataupun terhadap orang-orang yang ada di dalamnya (personelnya).

#### 2. Kepercayaan

Suatu kepercayaan berkaitan erat dengan atau hampir sama dengan istilah citra. Jika citra dikatakan bersifat lebih abstrak mengenai suatu pandangan, persepsi, opini, penilaian secara umum. Sedangkan kepercayaan bersifat lebih konkret, lebih mengarah kepada kesan dan pendapat atau penilaian positif yang bersifat individu terhadap suatu lembaga, perusahaan, atau organisasi.

#### 3. Realitas

Tujuan atau sasaran pokok yang hendak dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan bukanlah tujuan khayalan atau tanpa hasil yang nyata. Tetapi tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan yang realistis, jelas berwujud, dapat diukur, dan hasil

dari program tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan perencanaan yang matang dan sistematis. Sehingga hasil dari apa yang sudah diupayakan dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### 4. Manfaat

Semua hasil kerjasama, saling mempercayai, saling menghargai dari berbagai pihak akan terasa bermanfaat bila tujuan pokok atau sasaran dari suatu lembaga atau perusahaan tersebut bisa tercapai dengan sukses dan menguntungkan semua pihak.

#### 5. Keterikatan

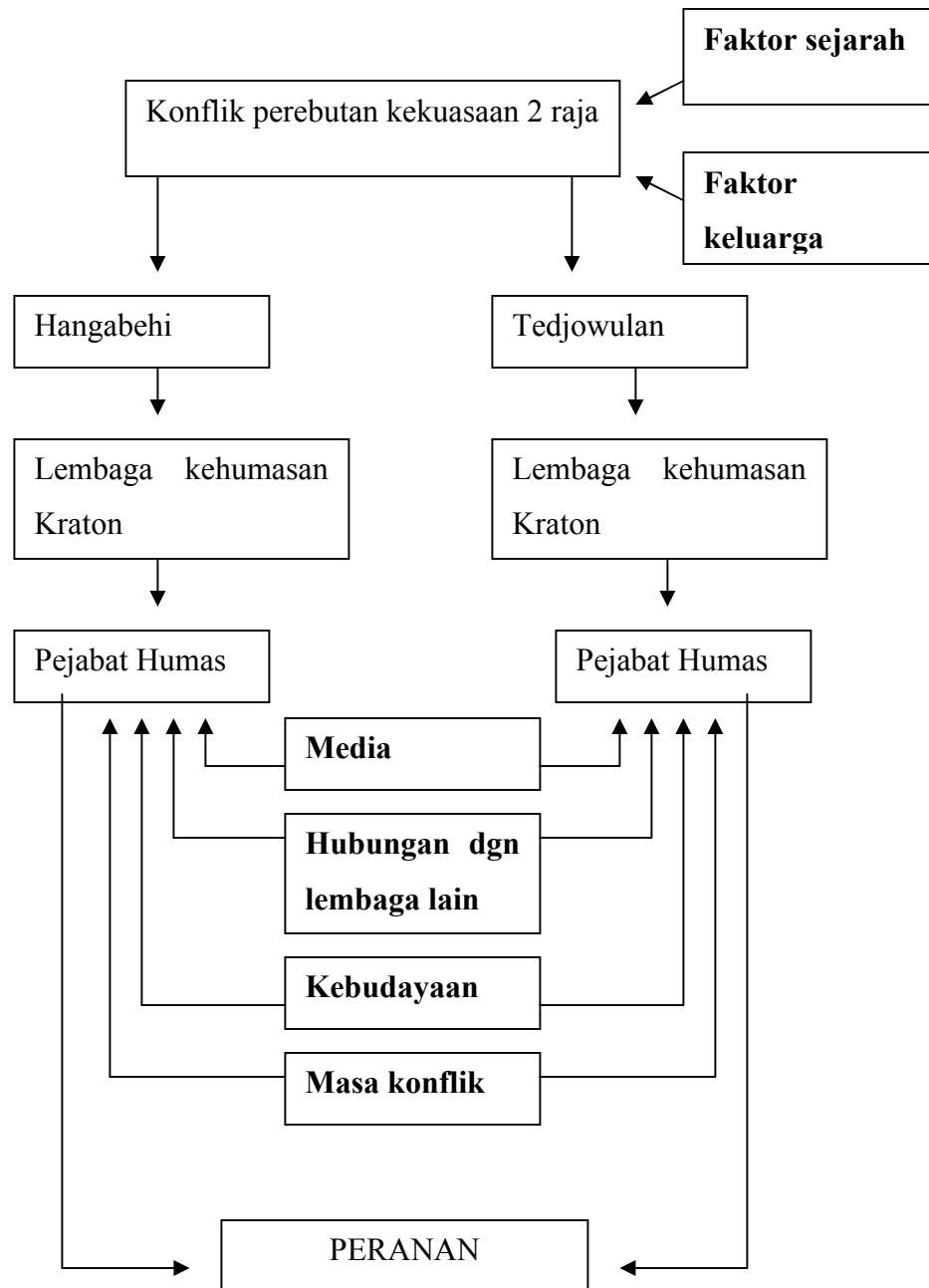
Suatu rencana yang telah dibuat dan disepakati harus konsisten dapat dilaksanakan sampai tuntas dan berhasil. Hal ini merupakan suatu komitmen yang seharusnya bisa mengikat semua pihak yang berkaitan dengan lembaga atau perusahaan tersebut. Sehingga dibutuhkan dukungan dari para personel atau anggota yang terlibat. Rencana juga harus berorientasi pada suatu tujuan tertentu dan menghasilkan sesuatu demi kepentingan bersama.

Jim Mcnamara dalam *“Public Relation Handbook for Managers and Executives”* mengungkapkan 6 langkah manajemen krisis, yaitu :

1. *Scenario Development*
2. *Preparation*
3. *Monitoring*
4. *Networking*
5. *Focusing*
6. *Implement a plan*

(Jim Mcnamara, 1996:171)

## F. KERANGKA PIKIR



Gambar 1.1  
(Kerangka berpikir)

## **G. KONSEPSUALISASI**

Ada beberapa hal yang perlu ditegaskan dan dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep tersebut adalah :

### **1. PUBLIC RELATIONS**

Definisi Public Relations sangat beragam, dan datang dari banyak ahli dengan latar belakang pengalaman yang berbeda-beda. Selain itu, Public Relations juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu definisi Public Relations yang dianggap dapat mencakup keseluruhan definisi yang ada adalah definisi Public Relations yang biasa disebut sebagai The Statement Of Mexico yang berbunyi

“ Praktik Public Relations adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau umum” (Rosady Ruslan, 2003 : 15)

Selain definisi di atas, masih ada juga definisi dari Frank Jefkins mengenai Public Relations, yaitu

“Public Relations adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam atau ke luar, antara suatu organisasi dengan semua

khalayaknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian” (Frank Jefkins, 1992:10)

Menurut Dozier & Broom peranan Public Relation dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu :

#### 1. Penasehat Ahli (Expert Prescriber)

Seorang praktisi PR yang sudah berpengalaman dan mempunyai kemampuan yang tinggi dapat membantu menyelesaikan masalah yang timbul dan berkaitan dengan publik suatu organisasi. Dalam hal ini, pihak management bersifat pasif, artinya tinggal menerima, mempercayai dan menjalankan apa yang sudah diusulkan oleh penasehat ahli tersebut untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

#### 1. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator)

Dalam hal ini, PR bertindak sebagai seorang mediator yang membantu pihak manajemen mengetahui apa yang diinginkan publiknya sekaligus juga bisa bertindak yang sebaliknya, yaitu untuk bisa menjelaskan tujuan dari pihak manajemen kepada publiknya, agar tercipta saling pengertian antara kedua belah pihak.

#### 2. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator)

Dalam proses pemecahan masalah, praktisi PR adalah bagian dari tim manajemen, yang bertugas untuk membantu pimpinan, baik sebagai penasehat hingga proses pengambilan keputusan. Biasanya dalam menghadapi krisis yang menimpa suatu perusahaan atau organisasi, akan dibentuk suatu tim yang dikoordinir oleh praktisi PR yang melibatkan berbagai departemen dan berbagai keahlian.

#### 3. Teknisi Komunikasi (Communication Technician)

Peranan PR sebagai teknisi komunikasi ini berbeda dengan tiga peranan lainnya. Peranan ini hanya menjadikan PR sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi.

## **2. CITRA**

Citra adalah tujuan utama sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia PR. Pengertian citra sendiri sebenarnya abstrak dan tidak dapat diukur secara matematis. Tapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. Seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya. (Rosady Ruslan, 2003:68)

Ada beberapa jenis citra yang sekarang lazim untuk digunakan, yaitu :

### **A. Citra Bayangan (mirror image)**

Citra ini adalah citra yang melekat pada orang dalam atau anggota suatu organisasi, biasanya adalah pemimpinnya, mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Dengan kata lain, citra bayangan adalah citra yang dianut anggota organisasi tentang pandangan orang luar terhadap organisasinya. Kekurangannya, citra ini kadang tidak tepat, bahkan hanya bisa jadi berupa ilusi, karena kurangnya pengetahuan anggota organisasi tentang pendapat orang lain seputar organisasi mereka.

### **B. Citra yang berlaku (current image)**

Citra ini adalah kebalikan dari citra bayangan. Citra yang berlaku adalah citra yang melekat pada pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini cenderung negatif

dan kadang juga tidak tepat, karena kurangnya pengetahuan masyarakat luas tentang organisasi tersebut, sehingga kadang menghadirkan penilaian yang salah.

C. Citra yang diharapkan (wish image)

Ini adalah citra yang diinginkan oleh pihak management. Citra yang diharapkan tersebut, biasanya dirumuskan dan diperjuangkan untuk menyambut sesuatu yang relatif baru, yaitu ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai tentang hal tersebut.

D. Citra Perusahaan (corporate image)

Adalah citra dari organisasi secara keseluruhan, jadi bukan citra atas produk atau pelayanannya, citra ini terbentuk karena banyak hal, dari mulai prestasi organisasi atau hal-hal tertentu yang pernah dilakukan organisasi untuk masyarakat luas dan khalayaknya.

E. Citra Majemuk (multiple image)

Citra ini bisa terbentuk karena setiap organisasi tentu saja mempunyai banyak anggota, dan tentu saja masing-masing anggota mempunyai kepribadian yang berbeda-beda juga. Dari kepribadian dan tingkah laku tersebut, tanpa disadari, mereka telah memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra yang dimiliki oleh organisasi pada umumnya.

(Frank Jeffkins, 1992:17-20)

### **3. KONFLIK PEREBUTAN KEKUASAAN KERATON SURAKARTA**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata krisis mempunyai dua arti, yaitu :

1.Kemelut, 2.Keadaan genting. (Redi Panuju, 2002:1-2)

Sedangkan menurut Djamaludin Ancok Ph.D., krisis adalah situasi yang merupakan titik balik (turning point) yang dapat membuat baik atau buruk, jika dipandang dari kaca mata bisnis. Titik krisis merupakan penentu untuk selanjutnya. (Rosady Ruslan, 1995:73)

Dalam suatu krisis atau konflik, terdapat perkembangan keadaan yang dapat dikategorikan menjadi empat menurut Steven Fink, yaitu :

#### 1. Masa Prakrisis

Suatu krisis atau konflik besar biasanya bermula dari konflik kecil yang menjadi tanda bahwa konflik tersebut akan berkembang menjadi besar di masa mendatang.

#### 2. Masa Krisis Akut

Jika dalam masa prakrisis, konflik yang terjadi tidak terdeteksi dan tidak segera ditangani dengan benar, maka akan timbul masalah yang lebih fatal. Masa krisis akut ini, jika dibandingkan dengan tahapan yang lain, memang tergolong singkat. Tetapi masa akut ini adalah masa yang paling menegangkan dan cukup menguras tenaga bagi tim yang bertugas untuk menanganinya.

#### 3. Masa Krisis Kronis

Masa ini adalah masa pemulihan citra dan merupakan upaya untuk meraih kembali kepercayaan dari masyarakat, selain itu juga merupakan masa untuk introspeksi ke dalam mengapa konflik tersebut dapat terjadi. Masa kronis ini



berlangsung panjang, tergantung dari seberapa berat konflik yang dihadapi dan seberapa sulit untuk mendapat kembali kepercayaan masyarakat.

#### 4. Masa Kesembuhan dari krisis

Masa ini adalah masa dimana organisasi yang terkena konflik akan bangkit kembali seperti sediakala. Setelah melalui perbaikan di dalam tubuh organisasi tersebut, maka mulai dipikirkan kembali bagaimana kelanjutan pemulihan citra organisasi tersebut di mata khalayak.

(Rosady Ruslan, 1995:73-76)

Konflik perebutan kekuasaan di keraton Surakarta, sebenarnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan menjadi besar ketika Sinuhun Pakubuwono XII mulai mengalami gangguan kesehatan sejak tahun 2002. Permasalahan tentang siapa yang nantinya akan menggantikan kedudukan beliau terus bergulir karena Sinuhun Pakubuwono XII tidak mengangkat salah satu selirnya untuk menjadi permaisuri, jadilah beliau tidak memiliki putra mahkota yang akan menggantikan kedudukannya sebagai raja.

Konflik menjadi semakin jelas ketika Sinuhun Pakubuwono XII akhirnya mangkat di usia yang ke-80 pada Jumat Wage, 11 Juni 2004 setelah beberapa hari sebelumnya membuat wasiat yang lebih dikenal dengan nama Pesan Tawangmangu.

Ditengah suasana duka, mulai beredar spekulasi tentang kelanjutan nasib Keraton Kasunana Surakarta. Munculnya isu suksesi tersebut, didorong oleh dua hal. Pertama, almarhum PB XII tidak mempunyai permaisuri. Kedua, munculnya ide pembaruan dalam sistem pewarisan tahta.

Polemik mengenai suksesi tersebut, bukanlah hal baru. Menjelang masa-masa akhir PB XII persoalan tersebut sudah berkembang dan bahkan sudah sering diperdebatkan. Namun, perbedaan pendapat baru benar-benar terlihat dan menajam ketika Pesan Tawangmangu diungkapkan di media massa. Polarisasi di kalangan internal keraton dan abdi dalem pun semakin jelas terlihat, dan mulai mengarah pada bentuk rivalitas.

Penyebutan nama KGPH Hangabehi menjadi calon raja yang dipilih saat keraton masih dalam suasana berduka, dinilai tidak etis serta menyalahi kesepakatan. Karena sebelumnya putra-putri Sinuhun PB XII sudah sepakat untuk tidak membicarakan masalah pewarisan tahta sebelum peringatan 40 hari meninggalnya beliau. Lebih dari itu, otensitas Pesan Tawangmangu, termasuk capa jempol PB XII diragukan karena hanya disaksikan putra-putri dari sebuah garis keturunan seorang garwa ampil (selir) dan sekretaris pribadi PB XII.

Ditengah suasana yang belum kondusif, pada tanggal 24 Juni 2004 KGPH Hangabehi, putra sulung PB XII dari garwa ampil atau selir yang bernama KRAy Pradapaningrum, ditetapkan sebagai pengganti PB XII. Hal ini seakan-akan menjadi penyulut berkobarnya konflik yang sudah ada. Bagi beberapa pihak yang tidak setuju, peristiwa tersebut dianggap illegal dan menyalahi prosedur.

Sebenarnya dalam hal calon, sejumlah abdi dalem yang tidak puas dan menolak sistem pencalonan tunggal, mengusulkan 4 calon lain yang mereka nilai memiliki akses luas, berkemampuan serta memiliki trackrecord yang tidak tercela, yaitu KGPH Hadiprabowo, KGPH Tedjowulan, KGPH Puger, KGPH Dipokusumo.

Inilah yang nantinya akan memicu terjadinya pengangkatan KGPH Tedjowulan sebagai raja di luar tembok keraton.

## **H. METODOLOGI**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Atherton&Klemmack, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survey.

Penelitian deskriptif ini bisa meliputi beberapa jenis penelitian yang lebih spesifik, yaitu:

1. Penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Contohnya, adalah penelitian yang menggambarkan distribusi umur urbanisan, jumlah keluarga mereka, kebutuhan-kebutuhannya, dan karakteristik lainnya.
2. Penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat. Misalnya penelitian tentang siapa saja yang menggunakan gelanggang olahraga di suatu kawasan, bagaimana karakteristik mereka, serta kapan saja mereka menggunakannya.

3. Penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat atau sikap, atau bertingkah laku tertentu. Sebagai contoh adalah penelitian yang akan menggambarkan persentase remaja yang mempunyai sikap positif terhadap pekerjaan tertentu.
4. Penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan.
5. Penelitian yang mencari hubungan antara dua variable atau lebih. Misalnya penelitian yang mencari hubungan antara “kondisi daerah kumuh” dan “penyakit jiwa”. Jenis penelitian semacam ini akan menguji apakah kejadian penyakit jiwa cenderung banyak terjadi di daerah kumuh. Penelitian ini tidak akan mempersoalkan apakah kondisi daerah kumuh menyebabkan penyakit jiwa, atau apakah penyakit jiwa menyebabkan orang tinggal di daerah kumuh. (Irawan Soehartono, 1998:35).

Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan tentang karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Penelitian ini relatif sederhana yang tidak memerlukan landasan teoritis yang rumit atau pengajuan hipotesis tertentu dan dapat meneliti hanya satu variable saja. (Rosady Ruslan, 2003:12)

Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suasana yang utuh. (Soerjono Soekanto, 1982:32)

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi di Keraton Kasunanan Surakarta didasarkan pada kenyataan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta merupakan keraton yang tertua diantara 4 keraton penerus dinasti Mataram Islam yang lainnya. Hal inilah yang membuat konflik perebutan kekuasaan antara 2 raja di Keraton Surakarta menjadi permasalahan yang mengundang keprihatinan dari banyak pihak. Sehingga bagaimana cara dan strategi yang ditempuh pihak Humas Keraton Surakarta untuk menyelesaikan konflik sekaligus menjaga citra positif Keraton Surakarta menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah bagian Humas Keraton Kasunanan Surakarta

#### **b. Sampel**

Dalam penelitian ini digunakan teknik Purposive sampling atau pengambilan sample berdasarkan tujuan. Dengan kata lain peneliti diberi kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan dijadikan sebagai sumber data atau informan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. (Irawan Soehartono, 1998:63).

Sebagai sample dalam penelitian ini yang bertindak sebagai informan dan responden adalah pejabat Humas Keraton Surakarta, baik dari pihak PB XIII Hngabehi maupun PB XIII Tedjowulan, Pengageng Kraton, Sentana Dhalem dan Budayawan kota Solo

#### **4. Validitas dan Reliabilitas Data**

Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan memang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini mengusahakan hal tersebut dilakukan dengan cara triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data. Ada empat macam teknik triangulasi yaitu pemeriksaan terhadap sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dilakukan dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang bersangkutan.

Sedangkan untuk reliabilitas data dilakukan dengan reduksi data, yang merupakan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada di dalam fieldnote.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Dokumentasi**

Tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk dan hendaknya menjadi obyek rencana-rencana pengumpulan data yang eksplisit. Yang termasuk data dokumenter adalah surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, notulen rapat, proposal, dokumen-dokumen administratif, hasil penelitian atau evaluasi yang pernah dilakukan di tempat yang sama, kliping dan artikel yang relevan yang muncul di media massa.

#### **2. Rekaman Arsip**

Rekaman arsip bisa meliputi data survey, rekaman yang bersifat pribadi, peta dan bagan karakteristik geografis suatu tempat, daftar nama dan komoditi lain yang relevan, rekaman layanan dalam suatu periode tertentu, rekaman keorganisasian seperti bagan dan anggaran organisasi. Terkadang rekaman arsip bisa bersifat sangat

kuantitatif, untuk itu peneliti harus sangat berhati-hati dalam menentukan keakuratannya.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah salah satu sumber bukti yang paling penting. Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk, tetapi dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara yang bersifat open ended dan wawancara terstruktur.

Wawancara yang bersifat open ended dilakukan dengan jalan bertanya kepada responden kunci tentang fakta suatu peristiwa disamping opini mereka tentang peristiwa yang terjadi. Sementara wawancara yang terstruktur adalah wawancara yang memerlukan pertanyaan yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu dan sifat pertanyaannya lebih terstruktur yang sejalan dengan survey.

### 4. Observasi langsung

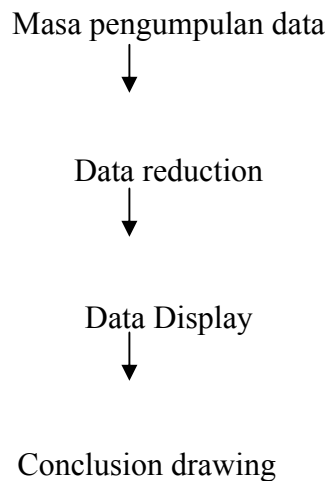
Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ke tempat penelitian akan dilakukan. Observasi semacam ini dapat dimulai dari kegiatan pengumpulan data yang formal hingga yang kausal. Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang permasalahan yang diteliti. (Robert K. Yin, 1997:103-118)



## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif, dalam artian data-data hanya dipaparkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan berdasarkan konsep-konsep yang ada.

Analisis data penelitian ini menggunakan Flow Model of Analysis



Gambar 1.2  
(Flow Model of Analysis)

Data reduction atau reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari fieldnote. Reduksi data dimulai sejak peneliti mengambil keputusan

tentang kerangka kerja konseptual, tentang pemilihan kasus, pertanyaan yang diajukan, dan tentang cara pengumpulan data yang dipakai. Pada saat pengumpulan data berlangsung, reduksi data berupa singkatan, coding, memusatkan tema, membuat batasan permasalahan, menulis memo. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

Data display merupakan suatu penyajian data yang meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja berkaitan dengan kegiatan dan tabel sehingga dapat membentuk suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

Conclusion drawing atau penarikan kesimpulan adalah proses konklusi yang terjadi selama pengumpulan data dari awal hingga akhir. Kesimpulan yang perlu diverifikasi yang dapat berupa suatu pengulangan, sebagai pemikiran kedua yang timbul dalam pikiran peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali fieldnote.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LOKASI**

#### **A. Lingkungan Geografis**

Kraton Surakarta yang beribukota di Sala merupakan penerus Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Susuhunan Paku Buwono II (PB II). Kraton Surakarta didirikan pada tahun 1746. Kraton Surakarta ini dapat disebut sebagai pengganti Keraton Kartasura yang telah hancur sebagai akibat dari peristiwa Geger Pacinan, yaitu pemberontakan bersenjata yang dilancarkan oleh orang-orang Cina sebagai perwujudan protes pada VOC yang telah membantai kaumnya di Batavia.

Setelah pindah dari Kartasura ke desa Sala, nama Sala-pun diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Seorang ahli filologi Belanda yang bernama J.Brandes dalam artikelnya yang berjudul “Yogyakarta” (1894) mengatakan bahwa ternyata nama Surakarta merupakan nama varian atau nama alias dari Jakarta yang pada masa lalu juga disebut Jayakarta. Surakarta berasal dari gabungan kata Sura yang berarti berani dan kata Karta yang berarti sejahtera. Nama Surakarta yang dipakai sebagai nama

kraton yang baru tersebut dimaksudkan sebagai retisi atau imbang dari nama Jayakarta. Nama ini digunakan sebab PB II mempunyai keinginan agar Surakarta nantinya bisa setara dengan Jayakarta yang dapat berkembang dengan pesat. (Dept. P&K, 1999:8)

Nama Sala juga tidak lagi digunakan oleh PB II. Karena konon, menurut kepercayaan rakyat, kata Sala berasal dari kata desa dan ala. Kedua kata tersebut berarti menunjukkan keadaan yang tidak baik dan tentu saja juga menunjukkan ketidakberuntungan.

Selain itu nama Surakarta nampaknya juga tidak berbeda dengan nama Salakarta yang disebut-sebut dalam Serat Salasilah Para leluhur ing Kadanurejan Yogya dan Babad Mataram Salakarta. Dari kedua sumber tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nama asli kraton dan kediaman PB II yang baru memang Salakarta, dan baru pada masa PB III nama kraton berganti menjadi Surakarta.

Luas ibukota Kerajaan Surakarta (kota Sala) adalah 24 km persegi. Dengan rincian 6 km membentang dari arah barat ke timur, dan 4 km dari arah utara ke selatan. Kota ini berada di dataran rendah di tepi sebelah barat sungai Bengawan Solo.

Luas wilayah Kraton Surakarta (sekarang eks Karesidenan Surakarta) seluruhnya adalah 6.215 km persegi. Separuh dari daerah itu adalah milik Kasunanan, sedang separuhnya adalah milik Mangkunegaran. Penduduk Surakarta dapat dikatakan homogen, artinya masing-masing etnik terkumpul dan menempati daerah-daerah tertentu secara terpisah dengan etnik yang lain. Beberapa etnik yang mendiami

di seputar wilayah ibukota kerajaan, yaitu Jawa yang paling dominan, kemudian terdapat juga etnis Cina, Arab, dan orang-orang Eropa. (Dept. P&K, 1999:9)

Di pusat ibukota terdapat bangunan inti kerajaan yang berupa kraton yang terdiri dari kompleks bangunan yang dikelilingi tembok, tempat kediaman raja dan istri-istrinya. Daerah inti tersebut dikelilingi oleh sepasang bangunan tembok yang tinggi. Di luar bangunan inti juga terdapat kompleks lain yang lebih luas. Di tempat inilah terdapat tempat tinggal para pegawai, pejabat, anggota istana, para pekerja dan tukang yang mempunyai kaitan langsung dengan pekerjaan yang ada di dalam istana.

Di sebelah utara dan selatan dari kompleks tersebut terdapat dua lapangan yang luas, yang dinamakan alun-alun. Pada masing-masing alun-alun terdapat dua pohon beringin besar yang merupakan simbol kekuasaan raja. Alun-alun utara berfungsi sebagai keraton Kraton, tempat berlangsungnya upacara-upacara yang besar. Di sebelah selatan alun-alun utara terdapat pagelaran, sebuah pendhopo besar tempat menerima dan menunggu tamu. Lebih ke selatan lagi terdapat sitinggil, yaitu pendhopo luar yang berfungsi sebagai tempat audiensi raja kepada rakyatnya saat berlangsung peristiwa besar atau upacara adat di kraton.

## **B. Lingkungan Fisik Kraton Surakarta**

Kraton Surakarta mulai dibangun pada masa pemerintahan Paku Buwono II (1728-1749) sebagai pengganti Kraton Kartasura yang telah rusak akibat pemberontakan orang-orang Cina di bawah pimpinan Sunan Kuning serta oleh pasukan Madura yang dipimpin oleh Cakraningrat IV. Peristiwa pendirian kota ini

dikisahkan dalam *Babad Giyanti*, sebuah babad bersajak yang ditulis kira-kira akhir abad ke-18 oleh pujangga Kraton Yogyakarta.

Paku Buwono II membangun kraton secara tergesa-gesa dan perpindahan ke Kraton Surakarta dilakukan ketika kraton baru tersebut belum sepenuhnya selesai dibangun. Hanya berselang tiga tahun setelah menempati kraton baru tersebut, Paku Buwono II wafat, sehingga penyelesaian pembangunan Kraton Surakarta ditangani oleh raja-raja selanjutnya. Meskipun hingga pemerintahan Paku Buwono X, bangunan kraton mengalami perkembangan secara terus-menerus, namun pembagian pelataran atau halaman tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini konsep konsentris (empat lingkaran) kerajaan Jawa dipakai sebagai dasar pembagian kraton. Lingkaran pertama yaitu kedhaton dan sekitarnya yang dikelilingi oleh benteng pertama. Lingkaran kedua, wilayah diantara dua benteng yang disebut baluwarti. Ketiga yaitu paseban, yang terletak di halaman luar pintu masuk (kori) Brajanala. Dan yang keempat yaitu alun-alun yang terdapat di depan paseban. (Dept. P&K, 1999:13)

### **1. Lingkaran 1 : Kedhaton**

Kedhaton merupakan tempat yang paling keramat. Hal ini dihubungkan dengan terdapatnya Prabasuyasa, yaitu tempat penyimpanan tanda-tanda kebesaran kerajaan. Prabasuyasa adalah sebuah bangunan dalem ageng (rumah besar) yang terletak di belakang pendapa sasana sewaka. Di Prabasuyasa ini terdapat empat buah kamar pribadi raja beserta ranjang kebesarannya (krobongan). Salah satu dari empat buah kamar tersebut, dipakai khusus untuk menyimpan benda-benda pusaka kerajaan. Prabasuyasa dibangun pada 1694 tahun Jawa, selain sebagai tempat pribadi raja, juga

digunakan sebagai tempat untuk menghadap para putera raja. Di belakang (sebelah barat) Prabasuyasa terdapat keputren.

Luas kedhaton mencapai  $\pm 92.230$  meter persegi, dibatasi oleh dua pintu yaitu Kori Kamandungan di sebelah utara dan selatan, serta jalan raya Baluwarti di sebelah barat dan timur. Untuk dapat mencapai kedhaton, seseorang harus melalui lima kori, yaitu kori gladag, amurakan, brajanala utara, kamandungan, dan sri manganti.

Kori Gladag terletak paling utara. Gladag artinya giring atau halau. Digladag artinya digiring atau dihalau. Jadi gladag adalah tempat berlalunya binatang hasil buruan yang akan digiring ke tempat penyembelihan hewan.

Kori berikutnya adalah Kori Pamurakan. Pamurakan adalah tempat untuk menyembelih hewan buruan, yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada abdi dalem dan kawula dalem yang punya hak untuk menerima.

Selanjutnya adalah Kori Brajanala. Braja artinya senjata tajam atau api. Sedangkan nala artinya hati atau perasaan. Jadi brajanala berarti tajamnya perasaan harus ditunjukkan apabila seseorang akan masuk atau keluar dari kompleks istana agar hati-hati jangan sampai kena salah. Di kanan kiri pintu brajanala terdapat bangsal brajanala yang dibangun oleh PB III tahun 1708 Jawa (1782 M) bersama-sama dengan pembangunan baluwarti.

Kori yang keempat adalah Kamandhungan. Mandhung berarti berhenti. Di belakang pintu kamandhungan ini terdapat cermin besar. Maknanya, bahwa sebelum masuk istana terlebih dahulu berhenti sejenak untuk bercermin melakukan koreksi

diri. Di atas pintu terdapat lambang kerajaan Jawa berupa gambar padi kapas dan mahkota raja. Maksudnya sebagai lambang sandang pangan dan keluhuran. Lambang raja ini disebut sri makutha raja. Kori kamandhungan ini dibangun tahun 1819 pada masa pemerintahan PB V.

Kori yang terakhir adalah Sri Manganti. Manganti artinya menunggu dan sri artinya raja. Jadi sri manganti berarti menunggu perintah raja. Kori ini dibangun tahun 1718 Jawa (1792 M). Di atas kori sri manganti juga terdapat gambar lambang kerajaan sri makutha raja.

Di dalam lingkaran tembok kedhaton terdapat tiga buah halaman. Yaitu, halaman sri manganti, plataran kedhaton dan halaman magangan. Halaman sri manganti terletak di sebelah utara plataran kedhaton, memiliki dua buah bangsal yang saling berhadapan, yaitu bangsal marakata di sebelah barat dan bangsal marcukandha di sebelah timur. Kedua bangsal tersebut berfungsi sebagai tempat abdi dalem yang akan raja. Bangsal marakata untuk abdi dalem lebet, sedangkan bangsal marcukandha untuk abdi dalem prajurit.

Berikutnya halaman magangan. Di tengah-tengah halaman magangan terdapat bangsal terbuka yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam barang seperti made rengga, yaitu peralatan khitan putera dan kerabat raja. Juga berfungsi untuk menyiapkan barisan prajurit yang akan bertugas, juga sebagai tempat untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan seremoni religius keraton seperti pembuatan gunung dan upacara grebeg, dan sebagai tempat magang bagi calon prajurit keraton.



Di seputar plataran kedhaton terdapat kompleks bangunan yang bermacam-macam bentuknya. Halaman luas di depan pendhapa sasana sewaka ditanami pohon sawo manila sebagai penyejuk dan memperindah pandangan. Jumlah pohon sawo manila sebanyak 88 buah yang mengingatkan angka tahun 1888 sebagai tahun didirikannya bangunan sasana sewaka.

Bangunan-bangunan yang terdapat di kompleks istana (kedhaton) antara lain :

a. Di Pusat Istana

1. Prabasuyasa yang menghadap ke selatan. Didirikan pada tahun 1694 Jawa. Di tengahnya terdapat krobongan berupa rumah kecil berpagar kaca keliling dan berpintu menghadap ke selatan. Jumlah kamar di Prabasuyasa ada empat, sebelah timur disebut kamar gading, kamar besar dan kamar pusaka. Sedangkan di sebelah barat terdapat kamar prabasana, tempat untuk menghadap putera raja.
2. Sasana parasdya, yaitu tempat untuk pertunjukkan wayang. Berbentuk bangunan joglo kepuhan jubungan (tanpa teras) membujur arah utara-selatan. Tempat ini merupakan tempat duduk raja sewaktu menyaksikan pagelaran wayang kulit.
3. Sasana sewaka, adalah pendapa yang berbentuk joglo pangrawit. Didirikan tahun 1698 Jawa (1888 M), merupakan tempat duduk raja dihadap oleh para abdi dalem lebet.

4. Sasana Handrawina, adalah tempat pesta / makan raja beserta keluarganya. Dibangun pada masa PB VI, berbentuk limasan sinom klabangan nyander.
  5. Paningrat, berupa teras dari pendapa sasana sewaka.
  6. Maligi, adalah tempat khitan putera raja. Dibangun tahun 1882 M, terletak di sebelah selatan sasana sewaka. Berbentuk limasan jubungan tanpa teras, bertiang delapan tanpa ander.
- b. Di sebelah timur halaman istana, terdapat tiga bangsal :
1. Bangsal Bujana, terletak di bagian selatan. Merupakan tempat untuk menjamu para pengiring tamu kerajaan. Berbentuk jubungan limasan, klabangan nyander.
  2. Bangsal pradangga kidul, terletak di sebelah utara bangsal bujana. Tempat gamelan dibunyikan ketika kraton mempunyai keperluan.
  3. Bangsal pradangga lor, terletak di sebelah utara bangsal pradangga kidul. Tempat alat-alat musik / orkestra.
- c. Sasana prabu, adalah tempat kantor raja. Letaknya di sebelah selatan parasdya. Adapun di sebelah utara parasdya adalah kantor wakil raja.
- d. Bangunan yang mengelilingi istana, antara lain :
1. Sasana Wilapa (kantor secretariat). Terletak di sebelah utara sasana parasdya. Dahulu digunakan para abdi dalem carik kesepuhan yang mengerjakan surat-surat raja. Sekarang berfungsi sebagai bagian muka dari keputren.

2. Panti Wardaya, adalah kantor perbendaharaan.
3. Reksa Handana, adalah kantor kas keraton
4. Bale Kretarta, adalah kantor perlengkapan.
- e. Panggung Sanggabuwana, adalah bangunan yang berbentuk menara persegi delapan, bertingkat empat dan tingginya 30 meter. Menurut kepercayaan, tempat tersebut digunakan sebagai tempat bertemunya raja dengan Ratu Selatan, permaisurinya yang beristana di Pantai Parangtritis. Nama Sanggabuwana sebenarnya merupakan sengkalan angka tahun saat didirikannya bangunan itu.

## **2. Lingkaran 2 : Kompleks Bangunan di Baluwarti**

Wilayah yang disebut baluwarti (benteng) ini terletak di luar tembok kedhaton di kawasan bersisi empat yang luas. Dikelilingi tembok berukuran tebal 2 meter dan tinggi 3-6 meter. Ruang bertembok tersebut melingkari wilayah seluas 180 hektar berada di antara dua alun-alun yang luas. Wilayah ini mempunyai dua buah pintu masuk yaitu kori brajanala utara dan kori brajanala selatan.

Kompleks bangunan di Baluwarti merupakan kediaman para pangeran, kerabat raja, dan para abdi dalem. Rumah-rumah kediaman yang berada di kompleks Baluwarti ini dapat diketahui status penghuninya antara lain dengan memperhatikan bentuk atau tipe rumah beserta alat perlengkapannya.

Perumahan para abdi dalem biasanya terkumpul dalam satu kompleks sehingga membentuk sebuah perkampungan yang ada dalam baluwarti. Antara lain seperti berikut :

1. Wirengan, terletak di sebelah barat daya keraton. Tempat tinggal para abdi dalem yang mengurus masalah tarian, wayang orang, dan hiburan yang lainnya.
2. Lumbung, terletak di sebelah timur keraton sebagai tempat menyimpan bahan makanan milik keraton.
3. Carangan, terletak di sebelah utara lumbung. Merupakan tempat tinggal para abdi dalem prajurit carangan yang terdiri dari beberapa pasukan.
4. Tamtaman, terletak di sebelah utara carangan. Merupakan tempat tinggal para abdi dalem tamtama, yaitu prajurit pengawal raja.
5. Ksatriyan, terletak di sebelah barat laut tamtaman. Merupakan tempat sentana dalem yang menjadi abdi dalem prajurit. Sekaligus tempat berkumpulnya para putera sentana dalem dan abdi dalem untuk melakukan kegiatan tertentu.
6. Sasanamulya, terletak di sebelah barat pintu gerbang utara. Merupakan tempat berkumpulnya para putera raja beserta bawahannya untuk mengadakan upacara bersama raja.
7. Gambuhan, terletak di sebelah barat laut keraton. Tempat tinggal abdi dalem niyaga keraton dan ahli gendhing.

### **3. Lingkaran 3 : Paseban**

Paseban merupakan lingkaran ketiga. Letaknya di sebelah utara pelataran kamandhungan. Ada dua tempat paseban, yaitu sasana sumewa atau tatag rambat yang menghadap ke utara dan sitihiinggil yang terletak menyatu di belakang sasana sumewa. Sasana sumewa atau yang juga disebut pagelaran merupakan tempat patih, abdi dalem bupati, dan abdi dalem yang lain menghadap raja. Mempunyai tiang pilar

berjumlah 48 buah sebagai peringatan bahwa ketika dibangun bertepatan dengan usia PB X yang ke 48 tahun.

Di depan sasana sumewa diletakkan 3 buah meriam. Meriam-meriam tersebut berjajar dari timur ke barat, masing-masing bernama Kyai Pancawarna, Kyai Brasta, Kyai Segara Wana.

Selanjutnya adalah sitihinggil. Nama sitihinggil diambil dari kata siti yang berarti tanah dan inggil yang artinya tinggi. Sitihinggil merupakan tempat yang tinggi dan keramat. Nama lengkapnya adalah sitihinggil binata warata, dibangun pada tahun 1701 Jawa atau 1774 M oleh PB III. Sitihinggil terletak di sebelah selatan dan menyatu dengan pagelaran, tetapi sitihinggil letaknya lebih tinggi dari pagelaran.

Antara pagelaran dengan sitihinggil dihubungkan dengan tangga berjumlah delapan buah dan dua buah pintu. Yaitu kori wijil I dan kori wijil II. Di tengah-tengah antara pagelaran dan sitihinggil terdapat sebuah tempat bernama sela pemecat yang konon menurut cerita digunakan untuk memenggal kepala bagi orang yang mendapat hukuman mati. Hingga saat ini tempat tersebut masih dianggap keramat.

#### **4. Lingkaran 4 : Alun-alun**

Alun-alun (lapangan) merupakan lingkaran ke-empat. Terdapat dua buah alun-alun, yaitu alun-alun lor (utara) dan alun-alun kidul (selatan).

Alun-alun lor merupakan halaman depan kraton, berbentuk segi empat, berukuran 300 meter di setiap sisinya. Di tempat masuk alun-alun lor sebelah utara terdapat dua patung raksasa, Cingkrabala dan Balaupata, yang juga dikenal sebagai penjaga pintu masuk khayangan. Di tengah alun-alun terdapat dua pohon beringin,

yaitu Jayandaru dan Dewandaru. Keduanya diapit oleh dua pasang pohon beringin yang lebih kecil yakni sepasang di depan pagelaran dan sepasang lainnya di sebelah utara alun-alun di dekat kori pamurakan, dikenal dengan nama ringin wak dan ringin jenggot.

Di seputar alun-alun lor yakni di sebelah utara, timur dan barat terdapat deretan bangunan yang disebut dengan kapalan. Berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para abdi dalem setelah melakukan latihan perang-perangan (*gladhen watangan*). Setelah tradisi tersebut tidak ada, yakni sejak PB XI, maka kapalan digunakan sebagai tempat istirahat para abdi dalem yang akan menghadap raja ke istana. Oleh karena itu nama kapalan kemudian disebut paseban.

Sebagai pasangan dari alun-alun lor adalah alun-alun kidul, yang berperan sebagai alun-alun pengkeran (belakang), terletak dalam lingkup tembok kraton. Alun-alun kidul ini keadaannya lebih sederhana daripada alun-alun lor. Hal ini dapat dilihat dengan adanya bangunan *sitihinggil* yang tidak dilengkapi dengan pagelaran. Sepasang pohon beringin yang berada di tengah alun-alun pun tidak diberi nama dan tidak diapit oleh dua pohon beringin yang lainnya. Adapun pintu terluar sebagai pintu masuk dari arah selatan hanya terdiri dari satu kori saja, yaitu kori gading. Sedangkan pintu masuk dari arah utara di alun-alun lor terdapat dua buah kori yaitu kori gladag dan kori pamurakan.

### **C. Kontroversi Penetapan Pengganti Raja**

#### **1. Munculnya Kontroversi Penetapan Calon Raja**

Jumat wage, 11 Juni 2004, Paku Buwono XII, raja Keraton Surakarta yang bertahta paling lama yaitu selama 60 tahun menghembuskan nafas terakhir di RS. Dr. Oen Surakarta.

Jenazah Paku Buwono XII kemudian disemayamkan di Masjid Pujosono yang terletak di dalam kompleks Kraton Kasunanan. Selama disemayamkan di Masjid Pujosono tersebut, kerabat Kraton memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Setelah disemayamkan selama dua hari, jenazah Paku Buwono XII kemudian dipindahkan ke Sasana Parasdy (Mulyanto Utomo, 2004:119)

Tiga hari setelah Paku Buwono XII wafat, tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2004, jenazah dimakamkan di Astana Raja-Raja Mataram di Pajimatan, Imogiri, Bantul DIY. Pelepasan jenazah menggunakan dua tradisi, yakni militer dan adapt Jawa yang dilakukan di Kompleks Kraton Surakarta. (Mulyanto Utomo, 2004:120)

Di tengah-tengah suasana duka, muncul spekulasi tentang siapakah nantinya yang akan menggantikan kedudukan almarhum sebagai Raja Kraton Kasunanan Surakarta. Mengingat selama beliau masih hidup tidak pernah menyebut secara jelas siapa diantara putra-putranya yang ditunjuk menjadi putra mahkota, selain itu Paku Buwono XII juga tidak pernah mengangkat seorang permaisuri. Inilah yang membuat

publik semakin menerka-nerka tentang siapakah calon pengganti yang sebenarnya diinginkan oleh Paku Buwono XII.

Munculnya isu seputar suksesi juga tidak terlepas dari tumbuhnya ide pembaruan sistem pewarisan tahta. Kedua isu tersebut, yaitu tidak adanya permaisuri dan tumbuhnya ide pembaruan system pewarisan tahta inilah yang membuat pandangan masyarakat, kerabat, dan sentana dalam terbelah. (KP. Edy Wirabhumi, 2004:13)

Sebagian ada yang berpegang teguh kepada angger-angger keraton, bahwa yang berhak mewarisi tahta adalah putera tertua almarhum. Sedangkan pada sisi lain muncul pendapat yang berlawanan bahwa calon pengganti tidak harus putera sulung raja, melainkan bisa salah satu putera raja yang dianggap memiliki kemampuan yang terukur, akses luas,serta diterima semua kalangan.

Keberadaan Pesan Tawangmangu yang disebut-sebut memuat nama calon pengganti raja membuat polarisasi di kalangan internal keraton semakin menajam. Penyebutan KGPH Hangabehi sebagai calon terpilih disaat keraton sedang berduka dinilai tidak etis dan menyalahi kesepakatan oleh beberapa pihak. Karena dalam pertemuan sebelumnya telah disepakati bahwa tidak akan dibicarakan masalah pewarisan tahta sebelum peringatan 40 hari meninggalnya almarhum. Lebih dari itu keaslian Pesan Tawangmangu beserta cap jempol PB XII diragukan, karena hanya disaksikan putera-puteri almarhum dari garis keturunan seorang selir dan sekretaris pribadi almarhum saja. (KP.Edy Wirabhumi, 2004:14)



Menjelang sholat Jumat, selang beberapa jam setelah meninggal Paku Buwono XII, spekulasi tentang pengganti Raja Kraton Kasunanan Surakarta tersebut sedikit terkuak. Bertempat di Pendapa Sasana Mulya, putera tertua almarhum dari isteri selir KRAy. Pradapaningrum, yaitu KGPH. Hangabehi dinyatakan sebagai penerus tahta yang berhak menggantikan Paku Buwono XII. (Mulyanto Utomo, 2004:119)

Dengan pengukuhan tersebut, terhitung sejak saat itu seluruh urusan di dalam maupun keluar keraton sepenuhnya menjadi tanggung jawab KGPH Hangabehi, dibantu oleh *Paran Nata Karsa* dan *Paran Para Nata* maupun lembaga lainnya yang akan ditetapkan kemudian. (KP.Edy Wirabhumi, 2004:14)

Dalam buku *Dibalik Suksesi Keraton Surakarta Hadiningrat*, GPH Dipokusumo berpendapat bahwa penetapan pengganti raja harus mempertimbangkan setidaknya sembilan komponen, masing-masing permintaan raja (yang akan digantikan), penghulu Keraton, pujangga Keraton, komandan prajurit, patih, penguasa (pemerintah kolonial), Pengageng Kasentanan, Pengageng Parentah, serta Pengageng Keputren. Tiga lembaga yang disebut terakhir merupakan institusi yang dibentuk PB X yang dilanjutkan penerusnya untuk membantu tugas-tugas raja. (Mulyanto Utomo, 2004:123)

Selain itu, calon raja harus pula melalui serangkaian ritual adat dalam rangka mencari wahyu sebelum menjadi raja. Hingga kemudian muncul sejumlah nama putera PB XII yang telah menyandang pangeran *sepuh* yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH), gelar tertinggi yang diberikan PB XII kepada putera

sentana yang secara adapt dianggap layak dan berhak menggantikan. Mereka adalah KGPH Hangabehi, KGPH Kusumayudha (dari istri selir KRAy Pradapaningrum), KGPH Tedjowulan (dari istri selir KRAy Retnodiningrum), serta KGPH Hadiprabowo (dari istri selir KRAy Rogasmoro).

Pada peringatan 7 hari meninggalnya PB XII, pada hari Kamis 17 Juni 2004, belum tampak adanya kesepakatan diantara pihak keluarga seputar penetapan pengganti PB XII. Dalam pertemuan tersebut, pihak keluarga juga meminta masyarakat supaya bersabar menunggu siapa yang nantinya akan ditetapkan sebagai pengganti almarhum untuk menjadi Raja di Kraton Kasunanan Surakarta. (Mulyanto Utomo, 2004:124)

Akhirnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2004, Kraton Surakarta mengeluarkan *biworo* (pengumuman) mengenai penetapan Hangabehi sebagai pengganti PB XII. Pengumuman tersebut KGPH Kusumayudha, salah satu putera PB XII. (Mulyanto Utomo, 2004:125)

Dihadiri oleh KRAy Retnodiningrum, satu-satunya garwa ampil PB XII yang masih hidup dan beberapa tamu undangan, upacara penetapan diakhiri dengan wilujengan atau selamatan oleh abdi dalem Sura. Sementara ketiga *pengageng* (pimpinan) tiga elemen Kraton, yaitu KGPH Hadiprabowo (Pengageng Kasentanan), KGPH Dipokusumo (Pengageng Parentah Karaton) dan GKR Alit (Pengageng Keputren) tidak terlihat hadir. (KP.Edy Wirabhumi, 2004:14)

Ketegangan dan polemik di antara putera-puteri PB XII kian memuncak setelah penyampaian *biworo* tersebut. Polemik tersebut semakin meruncing ketika

media massa salah mengartikan upacara pengumuman tersebut sebagai acara penetapan KGPH Hangabehi sebagai putera mahkota. (KP.Edy Wirabhumi, 2004:14)

Bagi mereka yang tidak bisa menerima, pengumuman tersebut atau apapun istilahnya, illegal dan menyalahi prosedur. Ada beberapa alasan yang membuat pihak-pihak tertentu menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap pengumuman tersebut, yaitu : *pertama* pengumuman yang dituliskan di atas selembar kertas berkop keraton dengan lambang Sri Radya Laksana tersebut tidak berstempel serta tidak ada ditandatangani sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. *Kedua*, calon pengganti raja berikut mekanismenya tidak melalui pembahasan intensif. *Ketiga*, walaupun harus berpegang pada angger-angger, suksesi di keraton pada jaman dulu selalu melibatkan peran sembilan elemen, yaitu permintaan raja (yang akan digantikan), penghulu Keraton, pujangga Keraton, komandan prajurit, patih, penguasa (pemerintah kolonial), Pengageng Kasentanan, Pengageng Parentah, serta Pengageng Keputren. Padahal dari keseluruhan elemen tersebut tinggal tiga elemen yang disebut terakhir yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh keraton. Dan seperti yang sudah dijelaskan di atas ketiga elemen keraton tersebut tidak ada satupun yang menghadiri upacara pengumuman penetapan KGPH Hangabehi sebagai calon pengganti PB XII. Inilah yang membuat polarisasi dan spekulasi semakin bertambah panas, tidak saja di dalam tembok kraton tapi juga melebar ke masyarakat luas.

Salah satu unsur masyarakat luar kraton yang ikut memberikan suara dalam polemik ini adalah Forum Bela Raos Abdidalem. Forum tersebut mengklaim beranggotakan sejumlah kelompok eksternal di luar struktural kraton, seperti Brayat

Ageng Surakarta, Trah Gagatan Surakarta, Paguyuban Lusanpura Surakarta, Paguyuban Mekar Kusuma Surakarta serta Himpunan Penghayat Kepercayaan Surakarta. Forum tersebut berlatar belakang keprihatinan yang terjadi di dalam keluarga kraton. Forum tersebut juga berkeinginan untuk memberikan masukan agar penetapan pengganti PB XII adalah seseorang yang memiliki kapabilitas dan kualitas sesuai dengan kondisi zaman. (Mulyanto Utomo, 2004:126)

Dalam perkembangan selanjutnya, masukan dari Forum Bela Raos Abdidalem berubah menjadi tuntutan yang meluas. Forum ini bahkan menetapkan criteria raja yang layak untuk meneruskan tahta Keraton Surakarta, dan menolak mekanisme penetapan KGPH Hangabehi serta menuntut agar penobatan raja ditunda untuk mengakomodasi aspirasi yang muncul. Forum ini juga mempertanyakan otentitas surat wasiat Paku Buwono XII yang lebih dikenal dengan nama Pesan Tawangmangu.

Tekanan yang datang tidak hanya dari pihak luar, tapi juga dari trah (keturunan) Paku Buwono yang berada di Jakarta, yang selama ini merasa selalu ditinggal dalam setiap pertemuan. Untuk itulah mereka mengeluarkan sejumlah opsi tentang suksesi kraton pada tanggal 27 Juni 2004. *Pertama*, proses suksesi dinilai tidak transparan. *Kedua*, pencalonan dan pengumuman penetapan KGPH Hangabehi cacat hukum. *Ketiga*, perlu diadakannya rembugan ulang secara lebih demokratis. *Keempat*, membentuk *Paran Nata*, semacam lembaga penasihat raja yang keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur termasuk masyarakat serta kelompok pengusaha. (KP.Edy Wirabhumi, 2004:16)

Sejumlah abdi dalem yang merasa tidak puas dengan pencalonan juga mengajukan empat nama lain selain Hangabehi untuk menjadi pengganti raja, yaitu KGPH Hadiprabowo, KGPH Tedjowulan, KGPH Dipokusumo dan GPH Puger.

## **2. Tampilnya KGPH Tedjowulan**

Sejak mangkatnya Paku Buwono XII dan munculnya polemik seputar suksesi serta banyaknya tekanan dari beberapa pihak terkait penetapan KGPH Hangabehi sebagai calon pengganti raja, nama Kol (Inf) Tedjowulan pun semakin sering disebut-sebut sebagai calon alternatif pengganti raja setelah para sentana tidak menyetujui KGPH Hangabehi.

Sejak itulah, KGPH Tedjowulan terus dipersiapkan menuju penobatan, dan pada Jumat Legi 27 Agustus 2004, tiga Pengageng Keraton, yaitu Pengageng Parentah, Pengageng Kasentanan, dan Pengageng Keputren akhirnya resmi mengukuhkan KGPH Tedjowulan sebagai pengganti Paku Buwono XII. Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan No. Kep/01/2004 yang ditandatangani oleh tiga pengageng. Keputusan tersebut, sebagaimana penjelasan GPH Dipokusumo, sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri kemelut isu suksesi yang terjadi di Keraton Surakarta. (Mulyanto Utomo, 2004:148)

Pada awalnya penobatan KGPH Tedjowulan akan dilakukan di Sasana Sewaka pada tanggal 31 Agustus 2004, tetapi karena bersamaan dengan diadakannya kerja bakti abdi dalem di Sasana Sewaka sebagai persiapan menuju penobatan KGPH Hangabehi maka penobatan KGPH Tedjowulan dipindahkan ke Badran. Pada saat-

saat menjelang penobatan perbedaan tersebut semakin menajam dan upaya negosiasi pun tidak menemukan titik temu.

Akhirnya pada Selasa pagi tanggal 31 Agustus 2004 bertempat di Dalem Purnama, Badran, Surakarta, KGPH Tedjowulan dinobatkan menjadi “Raja Rakyat” oleh para pendukungnya, yang ditandai dengan pengalungan janur oleh rakyat, sebagai tanda perjuangan dan wujud konsep *manunggaling kawula gusti* atau bersatunya raja dengan rakyat. Sedangkan di tempat yang sama, siang harinya prosesi penobatan KGPH Tedjowulan dengan adat keraton juga dilaksanakan. Prosesi penobatan dipindahkan ke Badran karena akses di Baluwarti tertutup rapat, sehingga tidak memungkinkan diadakan acara di dalam Keraton. Setelah sungkeman kepada ibunda, KRAy Retnodiningrum dan dua kakaknya KGPH Hadiprabowo dan GKR Alit, dibacakanlah Surat Keputusan No. Kep/01/2004 oleh KGPH Hadiprabowo. Sejak itulah KGPH Tedjowulan resmi menjadi Paku Buwono XIII yang dinobatkan di luar tembok Keraton. (Mulyanto Utomo, 2004:150)

### **3. Penobatan KGPH Hangabehi**

Pengangkatan KGPH Tedjowulan di luar tembok Keraton, tidak mempengaruhi persiapan di dalam Keraton menjelang *Jumenengan Nata* KGPH Hangabehi oleh para pengikutnya. Akhirnya pada Jumat Kliwon, 10 September 2004 dilaksanakanlah prosesi penobatan KGPH Hangabehi. Setelah prosesi penobatan selesai, Hangabehi pun menyampaikan pidato singkat yang intinya ia telah menggantikan PB XII bergelar Sampeyandalem Inkgang Sinuhun Kanjeng

Susuhunan Paku Buwono XIII Khalifatullah ing Tanah Jawi dengan segala kewenangannya. (Mulyanto Utomo, 2004:154)

Dengan dua peristiwa penobatan dua raja yang berbeda, maka sejarah pun terulang kembali di trah Mataram. Dengan demikian resmi-lah Keraton Surakarta memiliki dua raja yang sama-sama berkuasa. Langkah inilah yang rupanya dipilih oleh putera-puteri Paku Buwono XII sebagai jalan tengah terhadap konflik yang terjadi.

#### **D. Lembaga Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi dan PB XIII Tedjowulan**

##### **1. Humas Paku Buwono XIII Hangabehi**

Keberadaan Lembaga Humas Keraton Surakarta tidak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya Museum Kraton Surakarta dan Kantor Penerangan Kraton. Pada waktu itu, di tahun 1961 didirikan Museum Kraton Surakarta. Untuk memandu para wisatawan dan warga masyarakat yang berkunjung ke Museum Kraton, maka pihak Kraton pun menempatkan beberapa orang abdi dalem untuk menjadi guide atau pemandu wisata di Museum Kraton.

Keberadaan guide yang pada awal mulanya hanya sebagai pemandu wisata di dalam Museum Kraton, lama-kelamaan tugasnya melebar ke luar wilayah Kraton, yaitu untuk memberikan penerangan kepada masyarakat luas tentang kebudayaan dalam Kraton dan perayaan-perayaan yang akan dilaksanakan oleh Kraton. Oleh sebab itu, masyarakat luas menganggap seolah-olah Kraton mempunyai lembaga

Humas. Padahal yang sebenarnya, di masa itu Kraton belum mempunyai Lembaga Humas, yang ada hanyalah Kantor Penerangan Kraton yang bertugas untuk memberikan penerangan kepada masyarakat luas seputar kebudayaan dan perayaan-perayaan yang akan dilaksanakan oleh Kraton.

Menyinggung tentang keberadaan Kantor Penerangan Kraton, sebenarnya lembaga yang merupakan cikal bakal Humas Kraton ini sudah ada sejak PB II, namun baru ditertibkan lagi pada masa pemerintahan PB X. Pada masa sebelum PB X, seorang juru penerang kraton disebut *pujangga*, tugasnya disamping mencatat kegiatan-kegiatan adalah juga untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Namun, istilah *pujangga* tersebut tidak lagi digunakan pada masa PB X. Pada masa PB XII, keberadaan Kantor Penerangan Kraton sangat erat kaitannya dengan (alm) Kanjeng Yosodipuro. Beliau pada masa itu memang bertindak sebagai juru penerang di Kantor Penerangan Kraton, untuk menjelaskan tentang budaya-budaya Kraton kepada masyarakat luas. Apalagi beliau juga mengisi siaran kebudayaan di RRI sehingga predikat Humas Kraton secara tidak langsung melekat pada beliau, walaupun secara kelembagaan pada masa PB XII tidak ada Lembaga Humas Kraton.

Lembaga Humas Kraton yang secara resmi dilembagakan mulai ada pada awal masa pemerintahan PB XIII. Seperti yang diungkapkan Gusti Mung dalam wawancara dengan Penulis, PB XIII Hangabehi bersama-sama dengan kerabat Kraton menganggap perlu adanya Humas karena apa yang ada di dalam Kraton pun mengalami pergeseran, karena kebutuhan dari Kraton sendiri untuk disampaikan kepada masyarakat. Untuk itulah, mulai PB XIII dibentuklah Lembaga Humas Kraton



yang berada di bawah Sasana Wilapa Kraton Surakarta. Pejabat Humas Kraton Surakarta diambil sumpah sebagai pejabat Humas Kraton pada 26 Oktober 2004. Menurut pejabat Humas Kraton, Bambang Irawan, walaupun sudah dilembagakan secara resmi pada tahun 2004, tetapi hingga saat ini secara organisasional, Lembaga Humas Kraton belum mempunyai *job description* yang tertulis secara jelas. Karena Kraton adalah sebuah lembaga adat yang berbeda dengan lembaga lain. Berbeda disini mempunyai arti yang sangat luas, baik dari segi mengelola kelembagaan, tatanan organisasional, hingga alur kerja suatu lembaga yang ada di dalam Kraton

## **2. Humas Paku Buwono XIII Tedjowulan**

Seperti hal-nya Paku Buwono XIII Hangabehi, di kubu Paku Buwono XIII Tedjowulan juga memiliki Lembaga Humas yang juga dilembagakan secara resmi.

Menurut keterangan yang diperoleh Penulis dari wawancara dengan Paniteradalem (sekretaris pribadi) Paku Buwono XIII Tedjowulan, KRHT. Drs. Tundjung Tirtodipuro, MSi. , Humas PB XIII Tedjowulan mulai berdiri pada saat dinobatkannya PB XIII Tedjowulan sebagai raja di luar tembok Kraton Kasunanan, yaitu pada 30 Agustus 2004. Semenjak pertama kali dibentuk, Humas Kraton Surakarta versi PB XIII Tedjowulan berada di bawah Lembaga Pengageng Parentah Kraton.

Kerabat Kraton yang pertama kali dipercaya sebagai Pejabat Humas Kraton Surakarta versi PB XIII Tedjowulan adalah GPH. Suryowicaksono. Namun karena

Pejabat Humas yang pertama tersebut kurang efektif dan berperan, maka terhitung sejak Maret 2005 diangkatlah Pejabat Humas yang baru, yaitu Bambang Ari W, SH.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh pada saat wawancara, ada beberapa hal yang menjadi alasan PB XIII Tedjowulan membentuk Lembaga Humas yang saat ini dilembagakan di bawah Lembaga Pengageng Parentah Kraton. Adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi.
2. Untuk menjalin hubungan komunikasi dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan konsolidasi secara internal di pihak PB XIII Tedjowulan agar dapat memberikan satu citra bahwa eksistensi PB XIII Tedjowulan tersebut didukung oleh 3 Lembaga Pengageng, yaitu Pengageng Putro Sentono, Pengageng Parentah Kraton, Pengageng Keputren.
3. Paku Buwono XIII Tedjowulan membutuhkan pencitraan
4. Paku Buwono XIII Tedjowulan membutuhkan seseorang yang mampu manage konflik.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dirumuskanlah tugas dan fungsi Humas Kraton Surakarta versi PB XIII Tedjowulan, yaitu :

1. Memberikan justifikasi terutama terhadap eksistensi PB XIII Tedjowulan sebagai raja yang dinobatkan di luar tembok kraton.
2. Untuk menjaga eksistensi dan citra PB XIII Tedjowulan.

Sedangkan menurut pejabat Humas PB XIII Tejawulan, Bambang Ari W, SH dalam wawancaranya dengan Penulis, tugas pokok Humas meliputi hal-hal sebagai berikut :

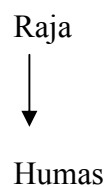
1. Mengelola kegiatan.
2. Mengelola media relation
3. Mengelola situasi dan kondisi terkini di Kota Solo terutama berkaitan dengan Kraton.
4. Mengelola konflik

Lebih lanjut, KRHT. Drs. Tundjung Tirtodipuro, MSi. juga menjelaskan bahwa pejabat Humas PB XIII Tedjowulan juga mempunyai ruang lingkup dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yaitu :

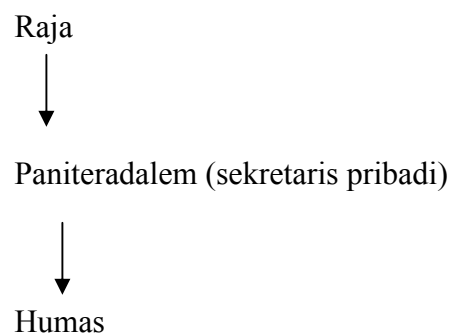
1. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan acara adapt yang dilakukan oleh PB XIII Tedjowulan beserta kelembagaannya yang berpusat di Sasana Purnama Badran.
2. Memberikan informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan PB XIII Tedjowulan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
3. Menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk kegiatan-kegiatan PB XIII Tedjowulan dan mewakili PB XIII Tedjowulan dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga yang mengundang PB XIII Tedjowulan.

Menurut Paniteradalem (sekretaris pribadi) Paku Buwono XIII Tedjowulan, KRHT. Drs. Tundjung Tirtodipuro, MSi. ada dua macam alur kerja Humas PB XIII Tedjowulan, yaitu :

**Model 1**



**Model 2**

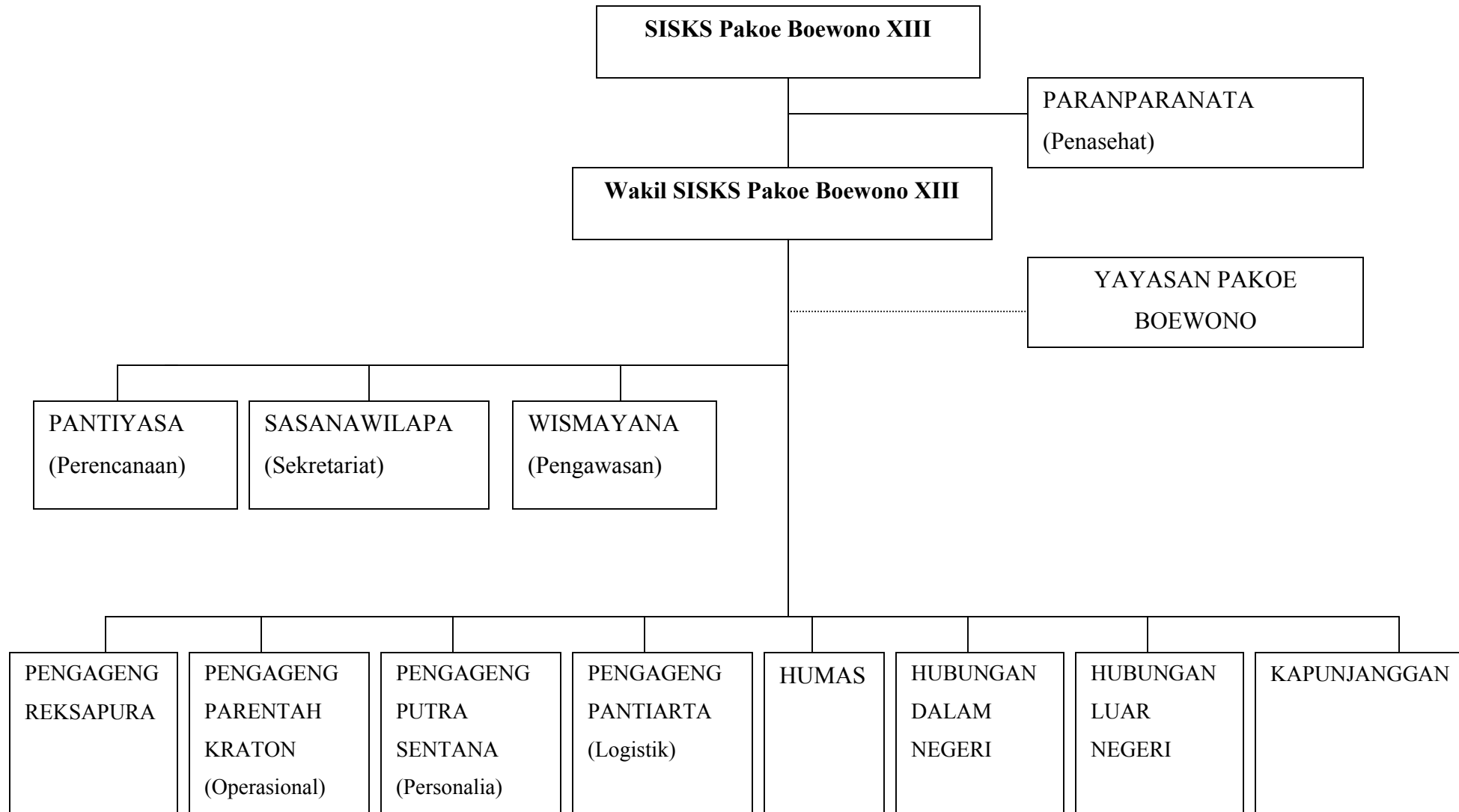


Gambar 2.1

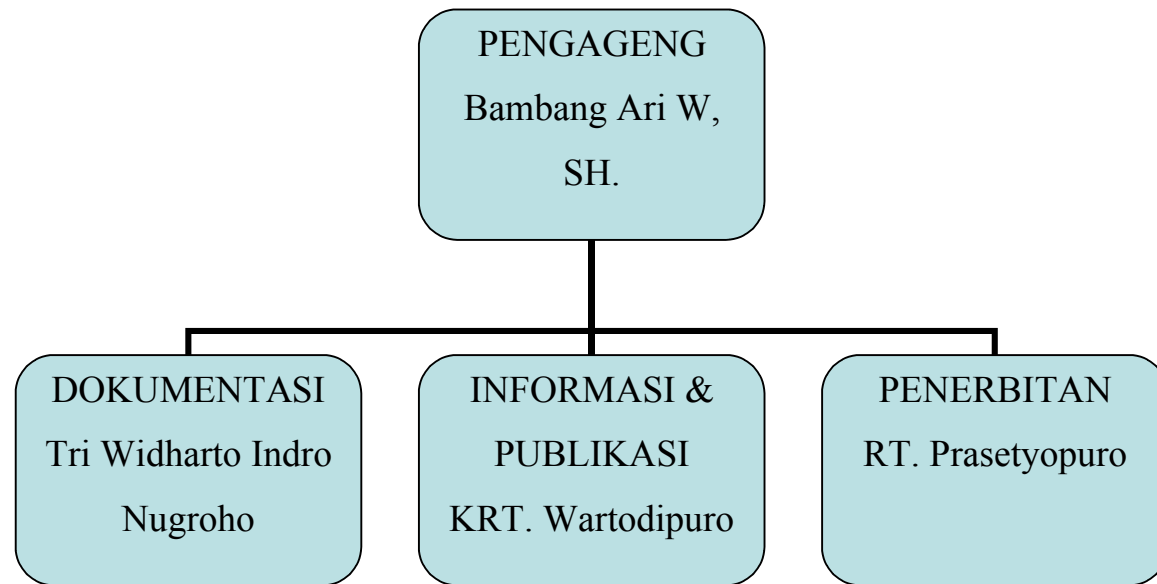
(Model perintah atau *dawuh dhalem* kepada Humas)

Model pertama, Raja memberikan *dawuh* atau perintah langsung kepada pejabat Humas tanpa melalui Paniteradalem (sekretaris pribadi). Biasanya terjadi ketika timbul suatu masalah mendadak yang memerlukan penyelesaian pada saat itu juga. Kemudian model kedua, Raja memberikan perintahnya melalui Paniteradalem (sekretaris pribadi) baru selanjutnya paniteradalem yang akan melanjutkan perintah Raja tersebut kepada pejabat Humas. Ini adalah model yang lazim dan sering digunakan.

## STRUKTUR LEMBAGA KARATON SURAKARTA HADININGRAT



**Gambar 2.2**

**STRUKTUR LEMBAGA HUMAS KARATON SURAKARTA HADININGRAT****Gambar 2.3**

### **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA**

Pada bab ini akan disajikan data-data yang telah didapatkan Peneliti terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Data-data tersebut didapatkan Peneliti dari berbagai Informan yang daftar serta Curicullum Vitae nya dapat dilihat pada halaman Lampiran.

Data-data yang didapatkan Peneliti untuk penelitian ini berasal dari sumber data primer yang berupa wawancara langsung dengan Informan serta sumber data sekunder yang berupa dokumen serta kliping media massa.

#### **A. AWAL KONFLIK**

Perpecahan dan konflik bukanlah hal baru yang terjadi di Trah Mataram, termasuk di Kraton Surakarta yang notabene adalah kerajaan tertua dari 4 kerajaan lain turunan Trah Mataram. Kraton Surakarta Hadiningrat sendiri pun lahir karena adanya perpecahan yang didahului oleh konflik. Seperti yang diungkapkan oleh Bambang Ary Wibowo, SH (KRHT. Bambang Pradotonagoro) yang selanjutnya akan disebut sebagai Informan 1 kepada Peneliti dalam sebuah wawancara berikut :

*“Ya gini, kalau kita melihat kenapa Kraton ada terjadi perpecahan, kita akan mencoba melihat dari sisi faktor sejarah ya. Kalau kita melihat dari sisi factor sejarah sejarah itu memang e.. apa ya, bukan kok sebagai suatu keharusan, tidak ya. Tetapi muncul beberapa peristiwa yang serupa pada, pada sejarah masa lampau dari leluhur trah Mataram, lha kita mengambil yang terdekat saja aja mulai dari trah Mataram pas Kraton Kartasura,*

*sejak dari Amangkurat saja sudah muncul perpecahan ketika e.. terjadi peralihan kekuasaan. Bahkan di zaman di PB II itu sempat muncul perpecahan Mas Garendi dengan bantuan pasukan orang Cina itu ya, yang dikenal dengan Kudeta Kuning itu ya, atau perebutan kekuasaan oleh orang-orang Cina. Yang mengakibatkan Kraton Kartasura pindah Surakarta”*

Bahkan menurut pendapat Informan 1, perpecahan tersebut bisa dikatakan adalah sebuah gen, seperti berikut ini :

*“Ini ni sudah terlihat sekali bahwa dari sisi factor sejarah, itu ada semacam apa namanya sebuah gen, kalau boleh dikatakan, selalu ketika terjadi pergantian kekuasaan memunculkan konflik baru.”*

Senada dengan yang diungkapkan oleh Informan 1, seorang budayawan Kota Solo, Winarso Kalinggo, yang selanjutnya disebut Informan 7, dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa permasalahan suksesi dari masa ke masa memang tidak pernah mulus. Seperti yang beliau ungkapkan berikut ini :

*“Ya.. dari dulu kan sebenarnya permasalahan e.. yang jumeneng itu kan tidak ada yang mulus. Kecuali dari PB IX ke PB X, karena memang sudah dipersiapkan sejak dini. Selebihnya pasti terjadi e.. apa, kepentingan-kepentingan yang, termasuk ayahandanya sendiri dulu kan juga ya ada saudaranya juga kan. Jadi untuk seperti, kenyataan seperti ini kalau melihat sejarahnya itu juga tidak apa e... yo ora nggumun meneh gitu.”*

Namun, melihat keadaan Kraton yang sekarang ini sudah bukan lagi sebagai Pusat pemerintahan dan kekuasaan, maka adanya konflik dua raja ini, disinyalir sarat dengan factor-faktor kepentingan pribadi, seperti yang terungkap pada wawancara dengan Informan 7 berikut ini :

*“O... jelas sekali ada. Kepentingan-kepentingan pribadi itu ada dan semua mempunyai kepentingan. Baik yang di dalam maupun yang di luar”*



Tanggapan yang datang dari kedua belah pihak yang berseberangan, yaitu pihak Tedjowulan dan pihak Hangabehi pun berbeda-beda terhadap kondisi yang sekarang terjadi. Satu pihak, mengakui bahwa keadaan ini merupakan konflik yang memang perlu adanya suatu penyelesaian sehingga akhirnya akan membawa kebaikan. Sementara satu pihak yang lain, menganggap keadaan ini bukanlah suatu konflik, melainkan hanya segelintir orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang memang bukan menjadi hak-nya.

Pihak raja yang berada di luar tembok Kraton, yaitu PB XIII Tedjowulan, melalui Humas-nya yang menjadi Informan 1 menyatakan bahwa keadaan ini memang sebuah konflik yang merugikan banyak pihak, tidak hanya Kraton sendiri, tetapi juga masyarakat dan Pemerintah. Seperti yang diungkapkan Informan 1 berikut ini :

*“Kalau saya boleh membuat satu pernyataan secara implicit, bahwa dengan adanya konflik dua raja itu sebenarnya yang rugi adalah kratonnya sendiri, lalu yang kedua pemerintah, dan yang ketiga adalah masyarakat.”*

Jika pihak PB XIII Tedjowulan mengakui bahwa keadaan yang terjadi saat ini adalah konflik yang merugikan, maka lain halnya dengan sikap yang diambil oleh pihak PB XIII Hangebehi, yang notabene adalah raja yang berkedudukan di dalam tembok Kraton. Dra. G.Ray. Koes Moertiyah, M.Pd, yang selanjutnya akan disebut Informan 3 menyatakan bahwa keadaan ini janganlah dianggap sebuah konflik yang melibatkan lembaga Kraton. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini :

*“Sebetulnya sejak semula itu saya selalu mengatakan bahwa Kraton itu tidak ada konflik. Makanya Kraton ber nopo ya.. apa ya harus menerangkan bahwa Kraton itu tidak ada konflik.”*

Bahkan Informan 3 juga menyatakan, bahwa message atau pesan yang ingin disampaikan Kraton kepada masyarakat luas juga bahwa di Kraton tidak terjadi konflik, walaupun ada, itu adalah konflik internal putra dhalem almarhum PB XII yang tidak menyangkut lembaga. Bagi pihak PB XIII Hangabehi, kondisi ini bukanlah konflik, karena yang berlaku di dalam Kraton adalah hukum adat. Dan hukum adat tersebut harus dipatuhi oleh semua kerabat Kraton tanpa terkecuali. Inilah yang disampaikan oleh Informan 3 pada sebuah wawancara dengan peneliti, berikut ini :

*“Ga ada konflik. Kalau ada yang ngomong konflik itu, karena ada apa muncul keinginan yang kandane katanya itu anaknya Sinuhun yang nggak punya hak, pengen punya hak, gitu lho. Ini kan aneh. Lha kalau sekarang terjadi konflik itu ya berearti internalnya anak-anak Sinuhun PB XII. Jangan dibawa ke lembaga. Karena lembaga nggak pernah punya konflik. Karena semua harus tunduk pada aturan adat, siapapun. Sinuhun juga gitu, karena Sinuhun ini pun juga tidak membikin dan mengisi Kraton gitu.”*

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh salah satu *Putra Dhalem* Paku Buwono XII, KGPH Puger, yang selanjutnya akan disebut sebagai Informan 6, yang menyatakan bahwa keadaan yang terjadi saat ini, terkait dengan kenyataan bahwa ada dua orang yang meng-klaim sebagai raja, beliau menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah konflik, melainkan hanya kesalahpahaman saja. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 6 sebagai berikut :

*“..Jadi kalau kita ditanya, kita itu tidak menganggap konflik kok. Jadi hanya salah pemahaman saja. Kalau orang memang tetap dibilang itu konflik, wong*

*itu terjadi salah persepsi kan terjadi konflik itu. Kalau saya menganggap tidak konflik, hanya suatu e.. kesalahan berpikir saja..”.*

Munculnya konflik dua raja ini, menurut Informan 6 juga tidak terlepas dari ego-ego pribadi yang muncul di kalangan dalam Kraton sendiri, terkait dengan adanya angger-angger yang selama ini menjadi hukum yang tidak tertulis di Kraton selama beratus-ratus tahun.

*“...Tapi keburu ada semacam rasa yang e.. terprovokasi dengan ego kolo wau. Ya sehingga terjadilah prasangka-prasangka yang tidak murni, sebab semua pun itu kalau kita bersama dalam satu titik angger-angger yang ada ini bisa diatur, gitu lho sebetulnya. Lha ini, ke-khawatiran itu kan muncul dulu...”*

Informan 6 juga menyatakan bahwa kesenjangan dalam men-transfer adanya angger-angger tersebut di tiap level birokrasi Kraton menjadikan Kraton tidak punya birokrasi yang mapan.

*“...Kraton tidak punya birokrasi yang mapan. Nah terprovokasi. Mungkin ada semacam ego dsbnya. Akhirnya tidak pernah jalan mulus. Nah terjadilah masalah. Karena ego-ego yang muncul ‘aku iyo, aku iyo’. Semua juga berhak tapi ada aturannya...”*

Masalah angger-angger inilah yang menjadi sorotan dan hal yang dipertanyakan oleh pihak PB XIII Tedjowulan. Seperti yang diutarakan oleh Informan 1 berikut ini :

*“...Kenapa kalau emang betul si Hangabehi menjadi putra pertama, kenapa ayahanda tidak mempersiapkan dari dulu? Pasti kan ada sesuatu kan? saya tidak mau mengatakan apa sesuatu itu, tapi pasti ada sesuatu kan? Lha kalau mau ya mbok sudah dari jauh-jauh hari. Dan saya sendiri sudah membuktikan mbak, kepada apa beberapa e.. apa namanya orang-orang yang selama ini di lingkaran satu, ring satu-nya PB XII dulu. Itu semuanya sudah bercerita bahwa ketika muncul gagasan untuk mencari kembang Wijayakusuma, kata orang Jawa kan untuk menjadi raja harus mencari kembang wijayakusuma di Cilacap, itu yang disuruh adalah Tedjowulan. Itu*

*yang ngomong adalah sekretaris pribadi PB XII.... Hanya saja itu tidak bisa berjalan karena beliau, Sinuhun Tedjowulan pada saat itu bersamaan ditugaskan ke Aceh. Nah sebetulnya fakta-fakta sejarah udah ada kan? jadi siapa yang sebenarnya the right man in the right place-nya itu kan sebetulnya sudah kelihatan, bukan bicara angger-angger.”*

Informan 1 juga memberikan pernyataan yang menyebutkan bahwa pengangkatan Tedjowulan menjadi raja, mendapat dukungan dari 3 lembaga Pengageng Kraton. Seperti kutipan dalam wawancara berikut:

*“...lalu yang kedua, yang juga perlu diingat bahwa di dalam kraton itu ada semacam deputi atau pengageng. Deputi inilah yang selama ini menjalankan roda pemerintahan di Kraton Surakarta Hadiningrat. Nah justru ketika raja mangkat, yang diangkat oleh ketiga deputi ini adalah Tedjowulan, bukan disini...”*

Inilah yang menjadikan kenapa konflik dua raja ini menjadi semakin meluas. Karena memang masing-masing pihak mempunyai alasan yang menurut mereka adalah benar. Persengketaan ini menjadi semakin luas, karena tidak hanya melibatkan masalah adat, tetapi juga kepentingan pribadi seperti yang sudah diutarakan Informan 7 di atas. Sehingga bukan malah menjadi selesai, tetapi persoalan ini semakin meluas dan akhirnya melahirkan dua raja yang sama-sama bergelar Paku Buwono XIII.

Adanya perbedaan pandangan yang akhirnya melahirkan konflik dua raja ini, membuat masing-masing pihak yang berseteru berusaha untuk memberikan pernyataan dan membangun kesadaran di masyarakat maupun kalangan keluarga Kraton sendiri tentang keberadaan masing-masing raja tersebut. Berbagai upaya yang mereka tempuh untuk membuat pernyataan dan membangun kesadaran masyarakat dan kerabat Kraton, akan dibahas pada poin di bawah ini tentang Humas dari masing-masing raja, PB XIII Hangabehi dan PB XIII Tedjowulan.

## **B. HUMAS PB XIII TEDJOWULAN DAN HANGABEHI**

Pada bagian ini akan disajikan data tentang sejarah atau awal berdirinya Lembaga Kehumasan baik dari PB XIII Hangabehi maupun PB XIII Tedjowulan. Selain itu akan disajikan juga data tentang latar belakang pendirian, tugas serta fungsi Lembaga Kehumasan dari masing-masing raja.

### **1. Humas PB XIII Tedjowulan**

Humas PB XIII Tedjowulan merupakan lembaga Kehumasan yang dibentuk PB XIII Tedjowulan sesaat setelah dinobatkan sebagai raja di luar tembok Kraton, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2004. Seperti yang diungkapkan oleh *Panitera Dhalem* (Sekretaris Raja) Paku Buwono XIII Tedjowulan, Drs. Tundjung W Sutirto, MSi. yang selanjutnya akan disebut sebagai Informan 2 berikut ini :

*“Sejarah tentang Humas dari pihak PB XIII Tedjowulan, kapan. Itu dimulai sejak dinobatkannya PB XIII Tedjowulan sebagai raja yang berada di luar e.. Kraton. Tepatnya tanggal 30 Agustus 2004. Sejak saat itulah tersusun sebuah struktur organisasi yang di dalamnya ada fungsi e.. kehumasan atau fungsi pejabat Humas...”*

Keberadaan sebuah lembaga Kehumasan dalam sebuah organisasi atau lembaga atau institusi, dewasa ini memang dipandang sangat penting. Karena selain tugas dan deskripsinya yang sangat luas, banyak organisasi atau instansi yang sadar bahwa menampilkan citra yang baik atau positif adalah modal yang sangat berharga untuk mendapatkan dukungan, respect, maupun mempertahankan eksistensi. Hal inilah yang rupanya disadari betul oleh pihak PB XIII Tedjowulan, seperti yang dijelaskan oleh Informan 1 berikut :

*“...Ya karena pencitraan, satu. Dibutuhkan pencitraan karena kan ini terjadi sengketa. Lalu kedepannya, dalam konteks kedepannya, itu setelah berjalan, setelah berlangsung yang muncul adalah dibutuhkan seseorang yang mampu me-manage konflik atau manajemen konflik. Dan itu dipercaya pada bidang kehumasan.”*

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Informan 2 yang memberikan penjelasan tentang alasan pembentukan Lembaga Kehumasan PB XIII Tedjowulan, yaitu :

*“...Alasannya dibentuk kehumasan itu karena untuk memberikan informasi, untuk menjalin hubungan komunikasi dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan konsolidasi secara internal di pihak PB XIII Tedjowulan agar dapat memberikan satu citra bahwa eksistensi PB XIII Tedjowulan itu didukung oleh 3 Lembaga Pengageng. Yaitu, Pengageng Putra Sentana, Pengageng Parentah Kraton dan Pengageng Keputren. Sehingga fungsi Humas disini itu memberikan justifikasi terutama terhadap eksistensi PB XIII Tedjowulan sebagai raja yang dinobatkan di luar tembok Kraton. Sehingga fungsi Humas disini sangat sentral sekali.”*

Dalam perkembangannya Lembaga Kehumasan PB XIII Tedjowulan mengalami pergantian Humas dan juga perluasan tugas, seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 sebagai berikut :

*“Nah kemudian pada tahun 2005, karena sesuai dengan e.. apa.. aksesibilitasnya dari PB XIII Tedjowulan itu semakin e.. berkembang untuk mempertahankan eksistensinya maka dibuat dua e.. lokasi yang pertama ada di Jakarta dan di Solo. Di Solo yang semula dijabat oleh GPH Suryowicaksono akhirnya dijabat oleh KRHT Bambang Pradotonagoro, SH yang itu memfungsikan Humas secara definitif untuk Solo dan definitif untuk Jakarta dipegang oleh GPH Suryowicaksono. Keduanya melakukan koordinasi dalam bidang kehumasan yang fungsi dan tugasnya sama e.. untuk apa kegiatan-kegiatan menjaga eksistensi dan citra PB XIII Tedjowulan...”*

Sebagai petugas Humas yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi Kehumasan, Informan 1 juga menjelaskan bahwa Lembaga Kehumasan PB XIII

Tedjowulan, dalam menjalankan tugasnya juga berdasarkan oleh tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Seperti yang dijelaskan oleh Informan 1 berikut ini :

*“...Kita pun ada tupoksinya, tugas pokoknya, diantaranya satu, mengelola kegiatan. Kedua, mengelola media relationship. Ketiga, e.. apa mengelola situasi dan kondisi terkini di Kota Solo terutama berkaitan dengan Kraton. Keempat, ya mengelola konflik, permasalahan...”*

Struktur kelembagaan Kraton sebagai lembaga adat yang berbeda dengan struktur kelembagaan lainnya, ternyata juga memberi pengaruh terhadap keberadaan Lembaga Kehumasan yang dimiliki oleh PB XIII Tedjowulan. Banyak aspek berbeda yang bisa ditemukan dalam struktur Lembaga Humas PB XIII, salah satu diantaranya adalah aspek pengangkatan petugas Humas itu sendiri. Sedangkan aspek-aspek yang lain akan dijelaskan di poin selanjutnya.

Berbicara tentang mekanisme pengangkatan dan atau penunjukkan seorang PRO (Public Relations Officer) atau petugas Humas, Lembaga Kehumasan di dalam struktur lembaga Kraton, khususnya dalam poin ini yang dibahas adalah Humas PB XIII Tedjowulan, memiliki mekanisme yang berbeda jika dibandingkan dengan mekanisme pengangkatan petugas Humas yang biasanya diketahui di instansi atau lembaga yang menggunakan struktur organisasi modern. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 berikut ini :

*“...Nah dengan demikian kalau ditanyakan mengenai SK pengangkatannya, di dalam satu struktur dan sistem kekuasaan di Kraton, yang namanya SK itu bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tertulis. Secara tertulis itu sudah ada dalam satu struktur yang di tandatangani langsung oleh Raja. Secara lisan itu juga merupakan dawuh bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugas kehumasan...”*

Keterangan Informan 2 tersebut juga diperkuat oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Informan 1 mengenai mekanisme pengangkatan seorang petugas Humas dalam struktur kelembagaan Kraton, sebagai berikut :

*“...Jadi gini di kelembagaan Kraton ada yang namanya perintah atau dawuh dhalem. Dawuh dhalem itu sudah menjadi SK. Lalu yang kedua secara kelembagaan memang kemudian di Kraton sendiri dibikin e.. lembaga kehumasan, itu ada. Dari dulu belum ada. Baru sekarang ada lembaga kehumasan...”*

Lembaga Kehumasan PB XIII Tedjowulan, berada dibawah struktur lembaga Pengageng Parentah Kraton, dengan fungsi dan ruang lingkup kerja Humas PB XIII Tedjowulan sebagai berikut, seperti yang dijelaskan oleh Informan 2 :

*“..E.. itu berada di bawah struktur Lembaga Pengageng Parentah Kraton... Tugas dan ruang lingkup kerja Humas PB XIII Tedjowulan itu, satu, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan acara adat yang dilakukan oleh PB XIII Tedjowulan beserta lembaganya yang berpusat di Sasana Purnama Badran. Kedua, memberikan informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan PB XIII Tedjowulan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ketiga, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk kegiatan-kegiatan PB XIII Tedjowulan dan mewakili PB XIII Tedjowulan dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang mengundang PB XIII Tedjowulan...”*

Aspek lain yang menjadikan Lembaga Kehumasan dalam struktur Kraton menjadi berbeda adalah, sebenarnya fungsi Humas itu sangat luas, tergantung dari perintah dan kehendak raja itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 berikut :

*“...Sehingga fungsi Humas disini bukan hanya sebagai fungsi Public Relations tapi juga sebagai protokoler, juga sebagai wakil dari Raja. Semuanya tergantung dari e.. apa perintah dan kehendak raja itu sendiri. Dan sistemnya bisa melalui sekretaris atau berdasarkan e.. perintah langsung kepada pejabat Humas tersebut. Jadi fungsinya sangat luas sekali.”*



## 2. Humas PB XIII Hangabehi

Keberadaan Lembaga Kehumasan di dalam Kraton yang notabene adalah sebuah struktur lembaga adat, tidak hanya dimiliki oleh pihak PB XIII Tedjowulan. Pihak PB XIII Hangabehi juga memiliki Lembaga Kehumasan yang mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan PB XIII Hangabehi atau sejak dinobatkannya PB XIII Hangabehi menjadi raja Kraton Surakarta Hadiningrat.

Keberadaan Lembaga Kehumasan yang ada di dalam tembok Kraton, sebenarnya bukanlah suatu hal baru, sebelum masa pemerintahan PB XIII Hangabehi keberadaan Humas di dalam Kraton Surakarta Hadiningrat pun sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum. Hanya saja pada waktu itu keberadaannya bukan sebagai Humas melainkan hanya sebagai juru penerang Kraton.

Seperti yang diungkapkan oleh Humas Kraton Surakarta, BRM. Bambang Irawan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Informan 4 berikut seputar awal mula keberadaan Humas Kraton :

*“ Oke begini, jadi sebetulnya dulu itu tidak ada kantor PR ya mbak, yang ada hanya Kantor Penerangan Kraton, jadi itu tahun 1961 itu ketika Museum Kraton didirikan, didirikan Kantor Penerangan Kraton karena berkaitan dengan guide. Mulai itu seolah-olah Kraton memiliki PR. Padahal sebetulnya Kraton sendiri, bukan PR itu, tapi juru penerang. Karena perlu menerangkan kepada masyarakat apa-apa yang perlu diketahui masyarakat tentang Kraton. Terutama tata cara upacara adat.”*

Keberadaan juru penerang Kraton yang dijelaskan oleh Informan 4 diatas, diperjelas oleh keterangan Wakil Pengageng Sasana Wilapa Kraton Surakarta, KRA Winarnokusuma, yang selanjutnya akan disebut sebagai Informan 5 yang menyatakan

bahwa terdapat beberapa kali pergantian juru penerang Kraton hingga akhirnya dinamakan Humas Kraton Surakarta Hadiningrat.

*“Humas Kraton Surakarta Hadiningrat, setahu saya dulu pada waktu almarhum Sinuhun PB XII itu yang menjadi juru penerang Kraton itu RT Taryokusumo, itu yang pertama. Kemudian setelah RT Taryokusumo meninggal dunia, digantikan KRMH Yosodipuro. Lha KRMH Yosodipuro itu kemudian meninggal dunia, sebenarnya yang di-SK-ni ya itu Kanjeng Lintang Sasongko itu, mas Bambang Irawan...”*

Keberadaan juru penerang Kraton yang pada masa lalu seolah-olah menjadi “Humas” Kraton Surakarta, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Kantor Penerangan Kraton yang menjadi induk dari juru penerang Kraton tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 5 berikut :

*“O.. Itu sejak dulu memang ya secara resmi memang sejak jaman PB II itu sudah ada. Hanya strukturnya memang tidak bagus setelah disusun secara tertib oleh PB X. Jadi PB X itu yang melengkapi segala-galanya...”*

Berbicara tentang keberadaan juru penerang Kraton yang merupakan cikal bakal adanya Humas Kraton tersebut, tidak bisa lepas dari sosok KRMH Yosodipuro. Karena beliau-lah keberadaan juru penerang Kraton menjadi sangat terkenal di masyarakat luas, sehingga masyarakat luas pada waktu itu sering menganggap bahwa juru penerang adalah Humas Kraton. Padahal yang sebenarnya terjadi, pada saat itu belum ada Humas Kraton yang seperti sekarang ini. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 3 berikut ini :

*“...Lha sebetulnya kan apa yang ada di dalam kraton sendiri pasti ada pergeseran, ada e.. karena kebutuhan dari kraton itu sendiri untuk e.. disampaikan kepada public kan gitu. Jadi e.. akhirnya kan, kalau zaman bapak saya dulu (PB XII) e.. ada KRMH Yosodipuro karena beliau juga ini kan disamping juru penerang Kraton itu juga bertugas dari Kraton untuk mengisi e.. ceramah atau siaran tentang kebudayaan kraton di RRI gitu...”*

Pernyataan Informan 3 tersebut juga diperkuat oleh keterangan Informan 4 yang mengatakan bahwa pada masa itu keberadaan juru penerang Kraton identik dengan Kanjeng Yosodipuro. Sehingga seakan-akan pada masa itu KRMH Yosodipuro adalah Humas Kraton yang sebenarnya.

*“Humas ya, iya. Dulu orang luar menyebut Humas Kraton, waktu sebelum ini PB XIII. Tapi sebetulnya itu adalah Kantor Penerangan Kraton, yang menyebut orang luar karena identik dengan Kanjeng Yosodipuro itu. Karena Kanjeng Yosodipuro kebetulan mantan penyiar RRI...”*

Informan 5 juga menyatakan bahwa secara tidak langsung keberadaan Kantor Penerangan Kraton dan juru penerang Kraton yang ada pada zaman dulu merupakan cikal bakal adanya Humas Kraton yang sekarang. Karena sebagian tugas dan fungsi Humas Kraton sekarang, adalah tugas dan fungsi juru penerang Kraton pada masa lalu. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 5 berikut ini :

*“Iya, karena istilahnya dulu itu Pujangga. Pujangga itu kan disamping juga mereka mencatat apa kegiatan dan memberikan penjelasan-penjelasan itu memang Pujangga pada saat itu berkompeten. Lha sekarang sejak zaman setelah PB X kan sudah tidak ada lagi yang namanya Pujangga, lha Humas itu. Tapi sejak awal sudah ada, karena Pujangga itu sekarang fungsinya ini Humas, juru penerang. Lha monggo istilahnya apa itu.”*

Sekarang, dibawah pemerintahan PB XIII Hangabehi keberadaan juru penerang Kraton, yang sudah tidak lagi dijabat oleh KRMH Yosodipuro, dilembagakan secara resmi di bawah Sasana Wilapa dan disebut sebagai Humas Kraton Surakarta Hadiningrat. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 sebagai berikut :

*“Jadi mulai disitu, sampai sekarang Kantor Penerangan Kraton ternyata tidak ada. Karena guide sudah melebur jadi satu di apa namanya loket*

*Kraton. Itu yang terjadi dan ketika setelah PB XIII ini baru PR dilembagakan dibawah Kantor Sasana Wilapa ya...”*

Penjelasan Informan 4 juga sama dengan keterangan yang diberikan oleh Informan 3 yang menjelaskan bahwa baru pada PB XIII ini-lah Humas dilembagakan secara resmi, tidak seperti yang terjadi pada masa PB XII yang memang belum ada lembaga yang berfungsi dan diberi nama sebagai Humas Kraton Surakarta. Seperti penjelasan Informan 3 berikut ini :

*“...Ya mulai pemerintahannya Sinuhun yang sekarang gitu. Kalau dulu e.. seperti Kanjeng Yosodipuro itu juga secara kelembagaan tidak, tidak menjadi abdi dhalem di-dinas gitu, kalau di Kraton di salah satu kadipaten. Tapi dia juga berhubungan langsung dengan Sasana Wilapa dan dengan Sinuhun pada waktu itu.”*

Seperti penjelasan pada poin Lembaga Kehumasan PB XIII Tedjowulan diatas, keberadaan Kraton sebagai lembaga adat tentu juga mempengaruhi mekanisme pengangkatan dan atau penunjukan seseorang menjadi juru penerang atau Humas. Seperti itulah juga yang terjadi di dalam mekanisme pengangkatan dan penunjukan juru penerang ataupun petugas Humas di dalam Kraton Surakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 berikut ini :

*“Ya belum. Belum tapi sudah, sudah seperti tugas itu sendiri secara lisan gitu. Karena dianggap Kanjeng Yosodipuro ini menguasai permasalahan apa saja yang diinginkan informasi dari Kraton oleh masyarakat gitu.”*

Di dalam struktur lembaga Kraton yang memang berdasarkan adat, pengangkatan seseorang atau penunjukan seseorang untuk menjalankan tugas tertentu atau menempati posisi / jabatan tertentu di dalam Kraton memang tidak harus selalu di wujudkan dalam bentuk SK tertulis. Dalam struktur lembaga Kraton, dawuh

dhalem atau perintah lisan dari raja sudah bisa dikategorikan sebagai SK yang harus ditaati oleh seseorang yang sudah diberi tugas tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Informan 7 yang memang pernah mennjadi juru penerang budaya Kraton Surakarta setelah KRMH Yosodipuro meninggal dunia. Seperti yang dikatakan oleh Informan 7 dalam wawancara dengan Peneliti berikut ini :

*“...Setelah juru penerang budaya-nya kraton, Kanjeng Yosodipuro sedo. Pertanyaaan-pertanyaan itu dilontarkan kepada saya. Maka sejak itulah saya sering memberikan keterangan-keterangan kehumasan. Lha hal itu tanpa ada SK, tapi diakui...”*

Keberadaan Humas Kraton yang mulai dilembagakan di masa PB XIII Hagabehi ini, bukanlah tanpa alasan. Adanya hal-hal yang perlu diluruskan dan disampaikan kepada masyarakat luas menjadi salah satu alasan kenapa Humas akhirnya dilembagakan di masa pemerintahan PB XIII Hangabehi ini. seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 berikut ini :

*“Ya sebetulnya begini, kalau itu kan jelas. Jadi apa yang sudah berjalan e.. mulai ada Sinuhun baru tahun 2004 itu kan karena terjadi permasalahan yang memerlukan penerangan yang sejelas-jelasnya dari Kraton kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dan tentang apa yang harus di e.. dilakukan oleh lembaga Kraton ini sendiri kan akhirnya kan kita butuh untuk menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada di dalam Kraton ngaten...”*

Selain itu, pergeseran kebudayaan yang terjadi baik di dalam ataupun di luar Kraton juga membuat Kraton harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 berikut :

*“...Lha sebetulnya kan apa yang ada di dalam kraton sendiri pasti ada pergeseran, ada e.. karena kebutuhan dari kraton itu sendiri untuk e.. disampaikan kepada public kan gitu...”*

Kebutuhan akan suatu lembaga yang menjalankan fungsi Kehumasan membuat PB XIII Hangabehi bersama-sama dengan lembaga Kraton tersebut memutuskan untuk melembagakan Humas yang tugasnya berbeda dengan juru penerang yang saat ini terdapat di Museum Kraton. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 3 berikut ini :

*“Ya bersama lembaga ini gitu. Jadi apa yang kita butuhkan itu apa dalam satu e.. badan yang di dalam Kraton itu apa saja ini o.. berarti perlu ada PR-nya gitu. Juru penerang disini lain dengan juru penerang yang ada di Museum gitu.”*

Informan 4 juga memberikan pernyataan seputar alasan di-lembagakan-nya Humas pada masa pemerintahan PB XIII Hangabehi, berikut ini kutipannya :

*“Ya, lebih baik kan itu supaya, supaya maksudnya ke depan nanti fungsinya bisa dijalankan lebih optimal gitu. Meskipun sekarang, belum optimal juga.”*

Seperti juga struktur yang lain yang ada di Kraton, Humas juga mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh petugas Humas. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 5 berikut :

*“Ya yang penting memberikan penjelasan tentang keberadaan Kraton. Mungkin melayani siapapun yang datang meminta penjelasan tentang keberadaan Kraton gitu. Penjelasan tentang bangunan-bangunan, tentang sejarah Kraton secara singkat dan lain sebagainya...”*

Informan 4 juga memberikan keterangan yang hampir sama seputar tugas dan fungsi Humas Kraton, berikut kutipannya :

*“Ya tadi sebagai juru penerang. Kadang-kadang di Kratom diundang untuk memberikan penerangan dimana-mana. Seminar dimana gitu. Ya seperti itu, sekedar kebudayaan seperti itu.”*

Namun, Informan 4 juga memberikan keterangan tambahan bahwa secara organisasional sebenarnya belum ada job description untuk Humas Kraton ini.

*“Jadi job descriptionnya, belum ada secara organisasional. Yang jelas bahwa kalau apa namanya yang perlu e.. yang kita share kepada masyarakat itu sebetulnya bahwa ini harus dipahami...”*

### **C. PERANAN HUMAS TEDJOWULAN DAN HANGABEHI**

Dalam bagian ini akan disajikan data seputar peranan dan kegiatan yang dilakukan Humas kedua raja, baik Tedjowulan maupun Hangabehi semasa konflik maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang masih mempunyai kaitan dengan keberadaan Kraton dan eksistensi kedua raja tersebut. Akan ada empat pokok pembahasan terkait dengan peranan Humas tersebut, dan keempatnya akan disajikan berdasarkan peranan per Humas masing-masing raja.

#### **1. Peranan Humas PB XIII Tedjowulan**

##### **a. Media**

Poin pertama yang akan disajikan dalam bagian pembahasan ini, adalah peranan Humas, dalam bagian ini khususnya PB XIII Tedjowulan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan media.

Tugas PR yang berkaitan dengan media, yang paling lazim dijumpai selama ini adalah tugas untuk mengkliping atau mendokumentasikan isi dari media-media yang ada, yang tentunya memuat berita yang mempunyai kaitan dengan keberadaan lembaga yang menaungi Humas tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Humas

PB XIII Tedjowulan, apalagi dalam menghadapi keadaan konflik yang sedang berlangsung seperti sekarang ini. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 1 berikut :

*“Yang pasti kami pasti mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan Kraton, baik dalam bentuk foto, kliping, ataupun film ya. Itu pasti. Karena itu, satu memang bagian dari tugas Humas, kedua juga untuk evaluasi. Jadi kita mencoba untuk melakukan evaluasi-evaluasi apalagi dengan, hmm... bagian dari manajemen konflik. Makanya fungsi dokumentasi semua kegiatan itu menjadi perlu.”*

Untuk kategori berita yang kemudian di-kliping atau di dokumentasikan juga adalah berita yang mempunyai keterkaitan dengan lembaga Kraton dan tentunya juga yang berkaitan dengan eksistensi “lawan politik” mereka. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 1 berikut :

*“Ya, yang berkaitan dengan kegiatan Kraton ya. Baik itu kegiatan Kraton secara hubungan internal, maupun kegiatan Kraton dalam arti luas. Contoh arti luas, umpamanya saingan kita membuat kegiatan apa, saingan kita membuat statement apa, saingan kita dapat apa. Dapat apa maksudnya gini, karena dia di Kraton, tau-tau dapat bantuan dsb-nya. Itu tetap kita akan awasi berita-berita itu dan kita akan kliping. Karena kan kaitannya, hmm.. tentu butuh pertanggungjawaban ya...”*

Informan 1 juga menyatakan bahwa, keberadaan dokumentasi berita atau kliping tersebut juga berguna sebagai salah satu alat untuk menyusun sebuah strategi langkah-langkah apa yang nantinya harus diambil oleh Humas PB XIII Tedjowulan dalam menghadapi situasi konflik ini.

*“...Dari evaluasi berita itulah kemudian hmm.. menjadikan sebuah strategi, ini contoh. Sehingga pada saat titik tertentu kami membuat opini juga. Kami membuat berita juga yang kemudian ditangkap pemerintah bahwa kedua Kraton ini harus dilibatkan konsorsium itu...”*



Selain digunakan sebagai salah satu alat untuk menyusun strategi, adanya kliping juga digunakan sebagai sarana evaluasi serta bentuk pelaporan Humas kepada raja. Seperti keterangan Informan 1 berikut :

*“Sudah kan. Untuk evaluasi dan sebagai bentuk pelaporan kita.”*

Seperti Humas lembaga yang lain, Humas PB XIII Tedjowulan juga berusaha untuk menjalin kerjasama dengan media-media yang ada, dengan tujuan untuk memperluas jaringan.

*“...Kami menggunakan semua jaringan media. Karena kalau saya menggunakan satu media, jelas itu bertentangan dengan konsep-konsep atau kaidah pemberitaan. Jadi saya harus membuat jaringan seluas mungkin. Karena yang namanya PR itu kan semakin banyak jaringan semakin bagus...”*

Salah satu tugas Humas yang berkaitan dengan pers adalah menyelenggarakan pers conference atau konferensi pers. Seperti lembaga yang lain, Humas Kraton PB XIII Tedjowulan juga mengadakan konferensi pers, walaupun hanya sebatas pada acara-acara rutin yang digelar oleh Kraton, seperti malem 1 Suro dan sebagainya. Namun, tidak hanya mengandalkan pers conference, Humas juga seringkali membuat release yang nantinya digunakan sebagai pengganti pers conference. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 berikut :

*“...Jelas kita akan mengadakan konferensi pers, sesuai dengan kebutuhan... Yang tentu kan untuk kegiatan-kegiatan adat, itu pasti ya ada penjelasan ya. Pasti ya, temen-temen sendiri juga menanyakan kan, ‘pak ada 1 suro?’ katakanlah seperti kemarin ya, 1 suro kemarin pas, ini off the record sedikit, saya tidak ada di Solo ya. Saya ada di Jakarta, temen-temen media kan telfon saya, lha daripada saya pusing-pusing, saya bikin release, saya ketik, saya sms-kan, saya kirimkan. Ini kan sebetulnya bagian dari bentuk penjelasan juga kan.”*

Terkait dengan pers conference dan pers release, dalam hal memberikan penjelasan ke media, memang menjadi tanggung jawab Humas. Tetapi terkadang Humas juga memberikan kesempatan kepada PB XIII Tedjowulan untuk memberikan statement sendiri ke media atau Pengageng yang lain. Karena memang tidak harus selalu Humas yang memberikan statement ke media. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Ya otomatis saya sebagai Humas ya. Tetapi ya, tidak harus bahwa Humas langsung yang memberi statement atau pernyataan atau penjelasan. Kadang kala, saya juga minta Sinuhun sendiri, PB XIII Tedjowulan sendiri yang memberi. Jadi kan melihat peran saya, Humas itu kan sebenarnya hanya mengatur ya. Hmm.. karena kan arahan dari atau tujuan dari Humas itu kan bagaimana membuat pencitraan. Nah, jadi pada saat tertentu wah ini biarkanlah saya yang bicara, tapi pada titik tertentu, untuk sebuah pencitraan yang menjadi tujuan saya, target saya, maka saya akan meminta langsung PB XIII untuk bicara dengan teman-teman wartawan.”*

Masih terkait dengan masalah statement di media, waktu konflik 2 raja ini masih hangat dan menjadi headline di surat kabar, perang statement antara pihak Tedjowulan dan Hangabehi pun otomatis terjadi. Namun, masing-masing pihak mengambil kebijakan yang berbeda terkait permasalahan ini.

*“O..iya. jelas perang statement itu pasti. Pernah... Karena gini ya, prinsip saya sebagai Humas Keraton, saya itu tidak mau ber.. bukan berpolemik ya, atau beropini bukan. Tapi saya tidak mau ketika e.. statement yang bikin itu dipakai untuk menjatuhkan pihak lain secara kasar ya. Jadi saya lebih menghindar ketika mereka sudah emotional statement, kalau saya boleh membuat sebuah pernyataan baru ya, emotional statement. Mereka muncul, saya lebih baik tidak akan memberi komentar apapun. Tapi ketika bicara opini, pasti saya akan memberi opini. Dan opini yang saya bikin sejauh mungkin untuk menghindarkan pada emotional statement, walaupun kadang itu juga tidak bisa ya. Tapi saya tetep berusaha untuk tidak melakukan emotional statement.”*

### **b. Hubungan dengan lembaga lain dan masyarakat**

Peranan Humas dalam suatu lembaga, tentu juga tidak bisa dipisahkan dari bagaimana Humas tersebut menjalin kerjasama dengan lembaga lain dan juga masyarakat yang menjadi publicnya. Hal ini juga yang coba Penulis sajikan dalam bagian berikut ini.

Humas Kraton PB XIII Tedjowulan, menurut keterangan Informan 1, juga berusaha menjalin kerjasama dengan semua unsur yang ada.

*“Iya. Kita pasti menjalin kerjasama dengan lembaga lain... tentu salah satu peran Humas itu adalah menjaga hubungan atau menjalin relasi dengan semua pihak ya, semua unsure ya. Termasuk masyarakat juga. Ya kadangkala kami juga diundang e.. diskusi dsb.”*

Kerjasama dengan semua unsur, tentunya juga termasuk kerjasama dengan Pemerintah. Satu hal yang membedakan peranan Humas PB XIII Tedjowulan dalam hal ini adalah apa yang kejar sehubungan dengan kerjasama dengan pemerintah. Sebagai raja yang bertahta di luar tembok Kraton, maka tentu saja pengakuan dari semua pihak adalah hal yang paling dikejar untuk memperkuat eksistensi mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 berikut ini :

*“Baik-baik saja, buktinya kita masih diakui. Kita masih dapat bantuan dari Pemerintah Provinsi. Tapi bagi kami bukan nilai rupiahnya, tapi nilai pengakuannya. Itu saja. Karena bagaimanapun juga, kan kita orang yang di luar Kraton kan... Kami kan di luar kraton. Kami butuh pengakuan. Nah ketika teman-teman, baik itu pemerintah dsb-nya, lembaga-lembaga memberi pengakuan pada kami, itu lebih dari cukup. Lha buktinya kraton sendiri juga diundang oleh Presiden pada saat jamuan makan malam. Mereka tidak, kita malah yang diundang. Yang setelah selesai dari Bali. Saya pribadi diundang mewakili kraton ke pak Yusuf Kalla, untuk berdiskusi dengan pak Yusuf Kalla. Berarti kan ada pengakuan kan? Termasuk juga kami diundang MK masih pak Jimly, tepatnya satu tahun yang lalu. Persisnya tanggal 26 Desember 2008. Solo banjir itu pas saya ada di ruangan pak Jimly dsb. Ini contoh.”*

Demikian juga dengan hubungan yang terjalin dengan LSM atau paguyuban masyarakat, Humas juga secara aktif menjalin kerjasama dengan LSM maupun paguyuban masyarakat. Bahkan terkadang hubungan ini juga merembet ke ranah politik Nasional yang melibatkan PB XIII Tedjowulan.

*“...Umpamanya ya contoh kasus saja, e.. apa namanya beberapa waktu lalu ada satu kelompok masyarakat ya, entah itu sebuah LSM atau paguyuban atau apa. E... meminta kita untuk berperan secara aktif. Contoh kemarin pada saat, kelompok apa ya? Lupa namanya. E.. forum lintas agama itu seringkali meminta kita untuk berpartisipasi secara aktif... Contoh kasus juga, e.. saat ini menjelang PEMILU. Sinuhun kan sering didatangi partai-partai politik untuk berdiskusi. Saya tidak mengatakan minta restu. Supaya diresmikan dsbnya secara langsung. Tetapi setidaknya e... saya dan teman-teman yang membantu Sinuhun berusaha agar posisi Sinuhun, menjaga kenetralisasi Sinuhun dalam menjelang PEMILU ini memang kita coba berusaha. Jadi semua partai kita terima...”*

Peranan Humas dalam mempertahankan eksistensi PB XIII Tedjowulan sebagai raja yang ada di luar tembok Kraton juga terlihat dari bagaimana Humas berusaha menjalin kerjasama dengan lembaga yang lain dalam usaha untuk mempertahankan kebudayaan. Seperti yang diungkapkan Informan 1 berikut :

*“...Bahwa kita, bentuknya banyak, bisa beranekaragam. Kita bisa dimintai pandangan, pendapat. Kita juga bisa dimintai berperan serta. Mengirim delegasi seperti kita diminta ke, baru-baru ini sih Denpasar. Kita mengirim delegasi penari ke sana. Lalu juga ke Indra Giri Hilir, kita juga mengirimkan delegasi penari kesana,dsb. Salah satu bentuk saja ya”*

Pada bagian sebelumnya, dijelaskan bahwa konflik 2 raja ini mempunyai potensi konflik yang sangat besar di masyarakat. Dan tidak hanya pihak Kraton yang dirugikan, Pemerintah dan masyarakat pun juga bisa merasakan dampak dan kerugian karena konflik 2 raja ini. Salah satu contoh yang terjadi adalah contoh pada kasus

penyelenggaraan Festival Kraton Nusantara yang terancam tertunda karena 2 raja yang ada tersebut mendukung 2 paguyuban kraton Nusantara yang berbeda.

*“Justru itukan, saya katakan siapa yang rugi? Diawal tadi, yang rugi pemerintah... Tercatat ada 3 asosiasi. Ada Forum Komunikasi Kraton Nusantara (FKKN) yang dipimpin salah satu diantaranya adalah kratonnya Hangabehi. Lalu yang kedua ada Forum Silaturahmi Kraton Nusantara (FSKN) itu salah satu penasehatnya adalah Sinuhun Tedjowulan... Karena masing-masing punya pasukan. Masing-masing punya pengikut. FKKN punya pengikut, walaupun mungkin hanya belasan. FSKN punya pengikut karena di bawah Depdagri... Terus akibatnya apa? Akibatnya ketika mereka menyelenggarakan atau ketika Pemkot menyelenggarakan itu ya berhubung kami tidak diundang, ya akhirnya kelompok kami tidak ada yang datang. Demikian juga sebaliknya, ketika penyelenggaraannya di Bali melibatkan FSKN maka kelompoknya FKKN nggak mau datang dsb-nya. Seperti itu.”*

Peranan Humas dalam menjalin hubungan dengan lembaga lain, tidak hanya sebatas pada misi kebudayaan saja. Humas juga berperan dalam menyampaikan pada Pemerintah terkait apa dan bagaimana konflik tersebut terjadi. Semuanya dilakukan Humas berdasarkan tupoksi-nya (tugas pokok dan seksi). Seperti penjelasan Informan 1 berikut :

*“Ya, sesuai tupoksinya aja. Tugas pokok dan seksinya ya. Jadi e.. Humas dalam hal ini memberikan penjelasan ya apa adanya. Jadi kita ga usah mengada-ada lah... Hanya saja yang kami, atau pribadi saya menyayangkan adalah ketidakinginan membuka diri dan berusaha untuk apa namanya menyelesaikan konflik ini. Karena semua punya dasar, mereka bicara bahwa ‘saya punya hak’ itu juga punya dasar. Kita bicara dan mengatakan punya hak juga punya dasar. Justru kenapa sih kita tidak mau mendengarkan, barang semenit...”*

Tugas seorang Humas untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain juga menuntut seorang petugas Humas untuk menjalankan fungsi eksternal PR atau berhubungan dengan public-nya. Menurut Informan 1, Humas PB XIII Tedjowulan juga melakukan hal tersebut, salah satu usaha untuk menjalankan fungsi eksternal PR

adalah dengan ikut serta berperan dalam persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat yang masih memiliki keterkaitan dengan Kraton.

Salah satu yang menjadi focus perhatian dari pihak PB XIII Tedjowulan adalah permasalahan pasar Cinderamata yang pembangunannya menimbulkan polemic diantara pihak kedua raja tersebut. Selain itu, selama masa konflik, menurut Informan 1, pihak PB XIII Tedjowulan melalui Humasnya juga menoba untuk menangkap persoalan-persoalan apa saja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Selain contoh kasus Pasar Cinderamata, kasus Radya Pustaka yang sempat menggemparkan masyarakat Solo juga menjadi satu persoalan yang diperhatikan oleh pihak PB XIII Tedjowulan. Seperti kutipan dengan informan 1 berikut :

*“Ya, setidaknya-tidaknya keterwakilan ya. Jadi keterwakilan itu kita masih berusaha untuk menangkap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, memang kita coba tangkap. Contoh ketika keprihatinan masalah hilangnya arca-arca Museum Radya Pustaka ya, kita mencoba untuk tanggap. Ikut serta secara tidak langsung, ini sebetulnya bagian dari program kerja. E... untuk mengembalikan barang-barang yang hilang itu, apa namanya di Museum Radya Pustaka dan bagaimana membangun image terhadap museum itu menjadi lebih baik. Kan sekarang ini lagi terpuruk. Salah satu diantaranya. Dan sebetulnya masih banyak lagi persoalan-persoalan yang kemarin kita masuk secara langsung di tengah-tengah masyarakat.”*

### **c. Kebudayaan**

Kraton adalah lembaga adat yang sarat dengan nilai-nilai budaya adiluhung yang harus dilestarikan. Hal ini juga yang menjadi focus perhatian dan salah satu peran yang dijalankan oleh Humas PB XIII Tedjowulan. Walaupun PB XIII Tedjowulan berkedudukan di luar tembok Kraton, kegiatan-kegiatan kebudayaan

yang menjadi rutinitas Kraton tetap dijalankan. Namun, menurut Informan 1 pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang menjadi rutinitas Kraton tersebut memang dilakukan dalam konteks yang lain, karena berkaitan dengan keberadaan mereka yang ada di luar. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 1 berikut :

*“Masih. Semua upacara adat masih ya. Kecuali satu-dua yang berkaitan dengan pusaka ya. Karena pusaka kita tidak pegang ya. Ada di kraton sini... Cuma dalam konteks yang lain ya. Kalau Suro, di sini bisa ngirabke kebo, mosok saya ya meh ngirabke kebo, kan jadi lucu kan. Tapi kita buat dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin saat ini e.. kraton lebih.. lebih apa ya, lebih menitikberatkan pada tingkat peningkatan nilai-nilai spiritualitas. Jadi ketika Suro kemarin ya, yo wis kita pake untuk berdzikir ya...”*

Aktivitas dan peranan Humas PB XIII Tedjowulan dalam hal kebudayaan memang hanya sebatas pada ranah-ranah yang sederhana. Karena memang kebudayaan Kraton dan semua upacara-upacara ritual yang ada sudah merupakan rutinitas Kraton sejak awal Kraton berdiri, sehingga tidak memerlukan lagi campur tangan Humas yang terlalu jauh. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 berikut :

*“Meluruskan, salah satu diantaranya. Apabila ada persoalan-persoalan yang muncul ya, termasuk diantaranya munculnya persoalan pasar cinderamata... “Ya kita hanya menyebarluaskan informasi-informasi kepada masyarakat...”*

#### **d. Selama Konflik**

Aktivitas dan peranan yang paling besar dari Humas PB XIII Tedjowulan adalah pada bagaimana usaha-usaha Humas untuk bekerja menjalankan fungsi-fungsi kehumasannya selama masa konflik untuk tetap mempertahankan eksistensi PB XIII Tedjowulan sebagai raja yang berkedudukan di luar tembok Kraton.

Pihak PB XIII Tedjowulan sendiri, menurut pernyataan Informan 1 tetap berusaha untuk mencari penyelesaian konflik ini, dengan tetap mengedepankan citra dan eksistensi PB XIII Tedjowulan.

*“Ya, berusaha untuk membantu menyelesaikan konflik itu dengan membuat manajemen konflik ya. Tapi kalau sampai sekarang belum ya, kita hanya, mungkin bagaimana mengedepankan pencitraan dan eksistensi dari Kraton sendiri. Itu saja.”*

Informan 1 juga menambahkan bahwa, Humas dalam Kraton mempunyai ke-khas-an dan perbedaan jika dibandingkan dengan Humas instansi lain. Apalagi dalam masa konflik ini, dimana yang di-manage tidak hanya konfliknya tetapi juga manusia dan adat yang ada di dalamnya.

*“...Cuma kan, perbedaannya adalah apa ya namanya di dalam kenyataannya, kalau mungkin kita bicara pada konflik kedua raja ini, ada ke-khas-an yaitu kan disini lebih banyak me-manage tentang manajemen konflik, ketimbang PR yang sebelumnya. Lalu yang kedua, kalau kita bicara yang lebih biasa, atau yang lebih ke-PR-an pada umumnya, bahwa di dalam PR Kraton sendiri sebetulnya kan yang dipegang adalah manusia dan adat. Bukan sebuah struktur, beda dengan kalau PR perusahaan ya...”*

Tidak bisa dipungkiri selama konflik berlangsung, keadaan baik di dalam ataupun di luar tembok Kraton sendiri tentu mengalami perubahan. Ini sebetulnya menjadi tanggung jawab Humas untuk mengendalikan keadaan yang ada di dalam ataupun luar tembok Kraton selama konflik agar tidak muncul potensi-potensi konflik yang lain. Tetapi tentu saja, seorang petugas Humas tidak bisa sendirian dalam menghadapi hal seperti ini. Ketika pertanyaan tersebut, ditanyakan kepada Informan 1, beliau mengatakan bahwa sebenarnya ada yang mendapat tugas seperti itu dalam



struktur pemerintahan PB XIII Tedjowulan, namun untuk informasi yang satu ini beliau tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya kepada Penulis.

*“E.. Ya ini ya susah jawabnya. E.. gini ya mbak, e..kalau boleh digaris besar bahwa e.. pimpinan itu kan pasti punya anak buah. Dan tentu dari sekian banyak anak buah pasti ada yang dipercaya. Lha sehingga mungkin lebih baiknya adalah persoalan-persoalan yang panjenengan tanyakan tadi diserahkan kepada masing-masing pembantu. Pembantu dalam hal ini adalah yang membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari dari kraton, e.. untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya...”*

Salah satu fungsi kehumasan yang juga dijalankan Humas PB XIII Tedjowulan semasa konflik adalah forecasting, seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 berikut :

*“Iya, dampak yang timbul ya pasti ya itu, sudah jelas. Di awal kita bicara tadi, kan nggak hanya kraton yang terkena, pemerintah dan masyarakat juga. Itu sudah menjadi hitungan kita sendiri. Forecasting kita atau konsep kita kedepan, e.. kalau boleh mengambil bahasa komunikasi, planning kita kedepan, justru saat ini kita berpikir bagaimana menyelesaikan. Terus yang kedua, kalau seandainya itu sudah terselesaikan, otomatis kita akan berpikir kraton kedepan. Ini yang saat ini sedang kita pikirkan. Jadi kita, karena kan gini mbak, untuk menyelesaikan konflik kan alami ya, nggak bisa nggak, kecuali kita mencoba kekerasan ya, kita duduki dsbnya. Tapi kalau kita mencoba secara alami, itu kan ada sebuah proses ya. Proses dimana masyarakat akan menjadi dewasa. Kalau di dalam politik kan, ada teori V ya. Bahwa saat ini yang terjadi adalah degradasi dari Kraton ya. Kalau dulu kan Kraton dipuja-puja, ini terjadi degradasi. Degradasi di mana arahnya adalah menuju ke bawah. Dan ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan / dijalani oleh Kraton. Sehingga pada titik tertentu dia akan balik lagi, semacam itu. Lha ini yang terjadi. Dan samapai kapan? Lha ini yang sayangnya kita tidak bisa memprediksi secara jelas. O.. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Karena ini bicara adalah watak, bicara emosi, bicara psikologi, bicara manusia. Tidak bisa ditebak. Siapa yang bisa menebak Hangabehi besok bangun tidur, o.. yo wis tak damai. Kan nggak ada yang tahu kan?”*

Selain memfokuskan program kehumasan mereka dalam upaya penyelesaian konflik, Humas PB XIII Tedjowulan juga berupaya untuk mengusahakan pertemuan damai melalui pihak ketiga yang menjadi mediator konflik tersebut.

*“...Jadi gini, tidak hanya direncanakan, tapi sudah dilaksanakan. Baik melalui pihak ketiga, terutama memang kecenderungan kita adalah melalui pihak ketiga. Soalnya kalau kita direct atau langsung tu ya susah ya. Karena dengan situasi masing-masing bersikukuh dengan argumentasinya yang paling bener bakal susah. Kita sudah banyak melakukan mediasi. Di-mediiasi, di-mediatori baik itu oleh tokoh-tokoh Nasional ya. Jangan salah Gusdur, Amien Rais, Wiranto itu udah mencoba semua untuk mediator. Malah terakhir pak Yusuf Kalla minta mencoba untuk menjadi mediator penyelesaian kasus ini. E.. jadi bagi kami ya, kita dari dulu sampai sekarang kita mencoba untuk menawarkan penyelesaian konflik ini dengan jalan duduk bersama. Saya sebagai Humas selalu mengedepankan, bahwa sekali-sekali kita mau mendengarkan...”*

Dalam wawancara yang lain, Informan 1 juga menyatakan bahwa Humas berusaha untuk menciptakan pencitraan yang positif terkait dengan keberadaan PB XIII Tedjowulan tersebut.

*“Seperti tadi di awal saya jelaskan, bahwa bicara konflik maka bicara manajemen konflik. Maka tugas saya sebagai PR adalah bagaimana manage konflik itu dengan sebaik-baiknya, tentu untuk kepentingan kelompok kami gitu ya, tidak bisa tidak. Tapi sebetulnya tidak berpikir pada kelompok kami, bagaimana ke-PR-an yang kami munculkan itu bisa memberi pengaruh yang positif bagi masyarakat juga. Jadi selama ini kita mencoba untuk mengkonsep bagaimana gerak langkah Kraton yang ada di luar, atau raja yang ada di luar Kraton ini itu memberi nilai yang positif... Jadi yang pasti kan kita berusaha untuk memberikan pencitraan yang positif kepada masyarakat terhadap peranan atau keberadaan raja yang di luar. Banyak lah yang bisa kita lakukan, salah satu diantaranya, sebetulnya konsep ini munculnya dari Sinuhun sendiri, PB XIII Tedjowulan, bagaimana Kraton ke depan itu mampu menjawab semua permasalahan dan tantangan di masyarakat. Lha ini yang kami sebagai PR itu mengolah keinginan dari PB XIII Tedjowulan. Karena kan, kalau kita boleh bicara jujur, kita ini kan di awal sudah saya katakana, yang kita manage ini adalah orang dan adat, system atau budaya... Yang jelas kami e.. apa namanya berusaha agar pencitraan yang muncul adalah pencitraan yang positif. Sebagai contoh e..*

*kita mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah dan pelaksanaan rencana pemerintah dengan Solo World Heritage. Nah yang mana tentu kapasitas yang kita miliki karena kita berada di luar tembok Kraton ya kita mencoba untuk membangkitkan kembali, menunjukkan kembali, menumbuhkan kembali bahwa budaya Kraton atau budaya Surakarta itu nilainya sangat tinggi. Nah karena itu, bagaimana kita nguri-uri, merawat untuk tidak menjual barang-barang pusaka, tidak menghancurkan peradaban lama. Lha ini yang coba kita soundingkan, kita keluarkan.”*

Terkait dengan masalah pencitraan, Humas PB XIII Tedjowulan juga berupaya untuk membangun image sosok PB XIII Tedjowulan di masyarakat luas yang disesuaikan dengan karakter dari pribadi Tedjowulan sendiri. Seperti keterangan Informan 1 berikut :

*“...Maka muncul-lah kemudian dalam konsep kehumasan kami, bagaimana mengubah karakter dari seorang Sinuhun Tedjowulan yang notabene adalah seorang tentara, militer. Kita mencoba karakter yang dia miliki yang sudah ada. Kita nggak mungkin membangun sebuah karakter baru, orang karakternya memang dia sudah ada. Itu memberi nilai positif dan menunjukkan bahwa sebenarnya mohon maaf ya karena posisi kami sebagai PR raja yang diluar dan saat ini konfliknya kan bagaimana menjadikan dua raja ini menjadi satu raja kan? Ya kita wujudkan itu dalam pembentukan karakter dari Sinuhun Tedjowulan untuk kemudian tadi image building ya tadi. Sebuah pencitraan karakter yang pertama adalah bahwa yang namanya militer itu selalu disiplin ya, lalu karakter yang kedua yang dimiliki dalam seorang militer adalah jalur komando. Karakter yang dimiliki militer yang ketiga itu hierarki. Ya karakter yang keempat yang dimiliki oleh seorang militer lagi adalah ketika dia mendapat belajar, itu dia mendapatkan semua pendidikan yang tidak diberikan kepada masyarakat. Nah ini yang keunggulan-keunggulan komparasinya ini yang akan coba kita olah...”*

Sesuai penjelasan di atas, program kehumasan yang dibuat oleh Humas PB XIII Tedjowulan dibuat berdasarkan karakter Tedjowulan sendiri. Tentunya untuk memperoleh pencitraan yang positif yang berguna untuk kepentingan kelompok mereka. Citra yang dicoba untuk ditampilkan pihak PB XIII Tedjowulan, menurut Informan 1 adalah citra jangka pendek dan jangka panjang.

*“Citra itu ada atau target ada jangka pendek ada jangka panjang. Kraton target jangka pendek jelas saya harus memberikan pencitraan yang positif ya. Terutama bagaimana kami diakui keberadaannya. Sementara jangka panjang bagaimana menyelesaikan konflik ya. Saat ini yang sudah kita upayakan dan masih terus kita lakukan adalah pencitraan yang jangka pendek tadi ya. Untuk bukan jadi jangka pendek ya, akhirnya jadi jangka menengah. Karena kan kalau konflik ini nggak selesai-selesai kan kita tetap harus menjaga citra kita kan? Tentu tanpa meninggalkan jangka panjangnya, bagaimana penyelesaian konflik ini.”*

## **2. Peranan Humas PB XIII Hangabehi**

### **a. Media**

Berkaitan dengan media, tugas untuk mendokumentasikan atau kliping yang dijalankan oleh petugas Humas, agak berbeda dengan apa yang terjadi di Humas PB XIII Tedjowulan. Seperti penjelasan pada bagian awal, bahwa cikal bakal Humas Kraton Surakarta sudah ada sejak dulu, tetapi baru dilembagakan pada masa PB XIII Hangabehi ini. Sehingga hal ini juga mempengaruhi dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi kehumasan yang dijalankan.

Seperti yang diungkapkan Informan 6 berikut ini :

*“Kalau ditanya apakah Humas Kraton juga menjalankan fungsi mendokumentasikan kegiatan Kraton ya, seperti kliping atau foto-foto peristiwa, e.. itu pada.. pada dasarnya e.. pada waktu itu terjadi Humas Kraton itu e.. apa namanya dipegang Kanjeng Yosodipuro, itu sudah meninggal. Jadi dibawahnya itu belum diaktifkan sebetulnya. Jadi secara umum, apa namanya, e.. seperti kliping itu dijalankan melalui pribadi-pribadi, kemauan pribadi. Mungkin Gusti Mung itu memerintahkan anak buahnya, siapa lagi, siapa lagi. Gitu.. Jadi dulu malah belum terbentuk kan. Masih jalan, tapi kan Humasnya tidak aktif pada waktu itu. Sehingga tidak ada kegiatan dokumentasi itu sendiri.”*

Seperti kutipan wawancara di atas, bahwa kegiatan kliping dan dokumentasi kegiatan selama ini memang dilakukan atas inisiatif pribadi dari putra dhalem yang bersangkutan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pernyataan Informan 3 berikut :

*“Sebetulnya sejak PB XII, saya sendiri tidak pernah melihat. Jadi dokumentasi itu sendiri banyak dilakukan perorangan, seperti saya sendiri juga e.. melakukan karena saya merasa e.. apa ya membutuhkan informasi itu. Membutuhkan dokumen upacara itu terus seperti gendhing-gendhing saya mendokumen sendiri gitu. Itu lebih pada perorangan dan itu lebih pada e.. kesadaran daripada tanggung jawab sebagai anggota keluarga raja itu.”*

Sehingga tanggung jawab untuk mendokumentasikan dan meng-kliping media memang menjadi tanggung jawab perseorangan, sebelum Humas Kraton Surakarta dilembagakan seperti sekarang ini. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 6 berikut ini :

*“Yang bertanggung jawab siapa?... Akhirnya ya setelah itu menjadi sebagai e.. apa namanya, umpamanya ada saya, ada Gusti Wandan, ada gusti yang lain itu. Tanggung jawab sebagai ya sebagai orang Kraton, apalagi sebagai putro dhalem atau sebagai apa namanya.. melihat bahwa ini ada peristiwa Kraton semua kerabat kerajaan berhak untuk mengkliping itu. Andaikata itu digunakan untuk informasi ke kerajaan nantinya, itu nomer dua, Iha itu.”*

Terkait dengan fungsi mendokumentasikan kegiatan Kraton ataupun berita seputar Kraton, Informan 4 memberikan keterangan bahwa fungsi mendokumentasikan tersebut biasanya dilakukan oleh Sasana Pustaka atau Perpustakaan Kraton. Namun, untuk saat ini yang berperan aktif dalam mendokumentasikan kegiatan atau berita yang berhubungan dengan Kraton adalah Kantor Badan Pengelola Kraton, sedangkan Humas Kraton sendiri tidak melakukan fungsi dokumentasi seperti itu. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 dalam kutipan wawancara berikut ini :

*“Dulu fungsi dokumentasi itu biasanya dilakukan oleh Sasana Pustaka, perpustakaan Kraton. Tapi kenyataannya yang mendokumentasikan Kraton ini adalah Kantor Badan Pengelola Kraton, ya. Jadi sekarang ini Humas Kraton tidak melakukan fungsi kliping koran dsbnya itu. Karena fungsi itu ada sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Kraton.”*

Informan 4 juga menyatakan bahwa sejak beliau mulai diangkat menjadi Humas Kraton, tidak pernah ada kegiatan mendokumentasikan atau kliping berita seperti Humas pada umumnya. Karena itulah Informan 4 menyebutkan bahwa sebenarnya belum ada penataan fungsi Kehumasan di dalam Kraton. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Ndak ada. Belum, belum ada. Jadi istilahnya e.. belum ada penataan fungsi kehumasan yang ada di Kraton. Karena dari dulu Humas itu, Kraton hanya identik dengan, sebenarnya dulu Humas tidak ada dik, yang ada hanya Kantor Penerangan ya. Kantor Penerangan Kraton itu mulai ada sejak berdirinya Museum Kraton. Jadi kalau tidak salah tahun 1961, kalau tidak salah ya.. Jadi sejak berdirinya Museum itu, Kraton itu kemudian, jadi e.. Kraton itu dulu Kantor Penerangan, lalu Kantor Penerangan itulah kemudian dianggap sebagai Humasnya Kraton...”*

Masih terkait dengan kegiatan mendokumentasikan Kraton, Informan 3 menyatakan bahwa berita-berita yang dikliping adalah yang mempunyai hubungan dengan kejadian atau permasalahan yang sekarang ini menuntut penjelasan yang benar dari pihak Kraton.

*“Ya berita yang mengenai Kraton dan mungkin kalau yang diluar Kraton yang ada hubungannya dengan Kraton itu kalau perlu ditindaklanjuti atau perlu diluruskan yang tidak benar informasi tentang Kraton ya kita akan luruskan...”*

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Informan 6 yang menyatakan bahwa berita yang dikumpulkan adalah yang menyangkut tentang perkembangan birokrasi dan adat. Sehingga pihak Kraton akan langsung bisa memberikan pernyataan atau

keterangan jika memang terjadi hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Seperti yang diungkapkan Informan 6 berikut ini :

*“Ya tentang budaya, tentang birokrasi tentu. Ya to? Perkembangan birokrasi pemerintah dengan kebijakan-kebijakan adat itu, tentu sedikit kita kliping untuk nanti dalam perjalanan Kraton dan pemerintahan ini kan punya sejarah tersendiri gitu. Itulah yang nanti untuk mencoba kalau ada yang tidak lurus kita luruskan atau kalau ada yang terlalu over ya kita berikan rambu-rambu. Supaya adat dengan birokrasi yang jalan sekarang ini diperjelas kembali. Itu gunanya itu.”*

Selain itu, kliping dan dokumentasi kegiatan yang ada juga digunakan untuk mendata bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada serta digunakan sebagai upaya untuk meluruskan permasalahan yang sedang terjadi.

*“...Digunakan sebagai apa kliping-kliping tersebut oleh Humas Kraton? Ya tadi, digunakan untuk mendata bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada. Ketika ada satu kebijakan birokrasi atau ada permasalahan dengan kraton dengan luar. Nanti untuk meluruskan atau apa namanya untuk merembug bagaimana peristiwa itu terjadi. Sebelum kita dapat kesempatan ya kita sebagai dokumen saja. Kan begitu?...”*

Terkait dengan tugas Humas yang seharusnya memberikan keterangan yang dibutuhkan atau diminta public, Informan 3 menyatakan hal sebagai berikut :

*“Sekarang itu saya tidak bisa mengatakan e.. lebih kepada Humas ya. Karena semua secretariat sini itu e.. kita yang ada disini itu kan kebanyakan kan seperti saya dengan Kanjeng Win itu kan memang mau tidak mau menjadi PR-nya Kraton gitu. Dan kalau saya nggak bisa memberi keterangan ya Kanjeng Win, kalau tidak bisa ya Gusti Puger. Nah berdasarkan kita memberikan apa keterangan pada per situ berdasarkan apa kebutuhan dan apa bidangnya masing-masing gitu.”*

Menurut pernyataan Informan 3 diatas, bahwa kegiatan memberikan penjelasan selama ini masih banyak diambil alih oleh Kesekretariatan Kraton atau Sasana Wilapa dibandingkan dengan Humas Kraton sendiri. Senada dengan Informan

3, Informan 6 juga memberikan pernyataan yang sama seputar kegiatan memberikan penjelasan ke luar.

*“Biasanya dari secretariat, tapi itu pun ada musyawarah dulu biasanya. Musyawarah, pendapat itu bagaimana cari data dulu. Akhirnya semua masuk, kita olah baru secretariat udah ada datanya, begini begitu... Iya, dari secretariat. Karena Humas ada disana juga.”*

Peran Sasana Wilapa atau kesekretariatan dalam menangani tugas-tugas

Humas Kraton Surakarta juga tercermin dari pernyataan Informan 3 berikut :

*“...Tapi kalau Sasana Wilapa itu kan kesekretariatan, jadi meliputi keseluruhan apa kegiatan di dalam Kraton itu, semua yang melakukan, semua yang menekel, yang dhawuh-dhawuh itu semua, surat-menyurat, semua di Sasana Wilapa. Ya otomatis Sasana Wilapa sendiri harus mampu menjadi apa Humas juga, walaupun kemarin juga ada Kanjeng Lintang itu, tapi Kanjeng Lintang karena keberatan apa e.. tugasnya di Fakultas, kan jadi tidak efektif. Jadi ini kalau ada ini terus ndadak ‘o.. dhakem mboten saget’ gitu kan ya sudah, yang bisa saja siapa gitu. Jadi semua serba dilakukan siapa yang mampu, siapa yang ada.”*

Masih berkaitan dengan peranan Humas di bidang media, ketika ditanyakan tentang strategi khusus yang dijalankan untuk menghadapi media pada masa konflik, secara tidak langsung Informan 6 menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada strategi khusus yang disiapkan. Langkah yang diambil oleh pihak Kraton hanya sebatas memberi penjelasan dan penerangan kepada masyarakat mana yang memang benar berdasarkan aturan yang ada di Kraton. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 6 berikut :

*“Kalau strategi khusus dibilang tentu orang akan mengatakan ‘iya’ begitu. Strateginya ya kita itu e.. sebetulnya ingin e.. menjaga supaya Kraton ini tetep apa namanya utuh dulu. Ada semacam yang menjaga dulu. Perkara ini ada ketimpangan, ada apa, nanti sambil jalan kita benarkan, kita luruskan. Semua kan begitu. Nah kita jelaskan permasalahannya, penjelasan it uterus kita*



*upayakan supaya e.. yang pemimpin dan yang dipimpin terus keluarga terus kawula ini nanti secara berkala kita berikan pemahaman sebetulnya...”*

#### **b. Hubungan dengan lembaga lain dan masyarakat**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian peranan Humas PB XIII Tedjowulan, bahwa salah satu tugas Humas adalah bagaimana menjalin hubungan baik dengan lembaga lain dan juga dengan masyarakat yang menjadi public-nya. Di bagian ini, juga akan disajikan data tentang bagaimana Humas PB XIII Hangabehi menjalin atau membina hubungan dengan lembaga lain dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 berikut :

*“Kalau Kraton menjalankan e.. apa namanya menjalin kerjasama dengan lembaga lain, iya. Banyak sekali, tetapi dalam konteks Humas itu diberdayakan ikut di dalam apa namanya negoisasi, ikut dalam e.. pembuatan kontrak, ikut dalam pengambilan keputusan itu tidak.”*

Sebagai lembaga adat yang masih menjunjung tinggi dan melestarikan kebudayaan, maka bentuk kerjasama yang terjalin antara Kraton dengan lembaga lain pun tidak jauh dari ranah kebudayaan. Bentuk kerjasama yang terjalin antara Kraton dengan lembaga lain di luar Kraton adalah dalam rangka melestarikan kebudayaan. Seperti yang diungkapkan Informan 6 berikut :

*“Jadi lembaga yang lain itu sifatnya adalah hanya pelestarian budaya. Jadi nggak ada hal-hal yang lain. Untuk membina mereka yang dulu pernah terbina, dia merasa dulu kedekatan dengan kerajaan itu. Ya e.. kita bina kembali untuk mereka bisa tetap menjalankan sebagai orang Jawa. Inilah, jangan sampai dia kehilangan gitu. Fungsinya kan itu tadi didepan...”*

Informan 3 juga memberikan keterangan bahwa hubungan yang dijalin adalah dengan Pemerintah, karena berkaitan dengan birokrasi. Sedangkan untuk lembaga lain di luar Kraton yang dijalin adalah kerjasama untuk pelestarian kebudayaan.

Dalam kutipan wawancaranya Informan 3 juga menyebutkan bagaimana pihak Kraton berhubungan dengan masyarakat sebagai public-nya. Seperti yang diungkapkan Informan 3 berikut :

*“Kalau birokrasi yang jelas wong hubungannya dengan pemerintah. Begini kalau dalam melestarikan itu tinggal manusianya itu membutuhkan nggak gitu. Lha sekarang yang saya lakukan, saya memberikan tentang opo kuwi budaya. Opo kuwi wewangunan Kraton, opo kuwi jenenge paes iki. Itu disetiap desa-desa, setiap masyarakat ndeso itu malah masih membutuhkan kawruh seperti itu. Terus masih menjalankan laku budayanya, dalam arti apa dia itu juga sebagai masyarakat adat, gitu lho. Itu yang dilakukan Kraton untuk ajak-ajak untuk melestarikan apa kebudayaan. Nah itu kita langsung dengan masyarakat yang memang dia menginginkan begitu. Nah kalau dengan lembaga, sebuah lembaga itu umpamanya kalau sekarang tarian, kita mementaskan tarian lha itu baru kita berhubungan dengan lembaga lain.”*

Hubungan dengan lembaga lain tidak hanya menjadi tanggung jawab Humas.

Menurut Informan 6, biasanya jika menyangkut hal-hal semacam itu maka terlebih dahulu akan dihadapkan kepada Sinuhun PB XIII. Seperti penjelasan Informan 6 berikut ini :

*“Jadi begini, kalau itu sangat khusus ya, tentu sebenarnya kita hadapkan kepada Sinuhun ya, dalam hal ini ketua umum ya. Untuk diberitahu bahwa ini ada apa namanya, mau dari lembaga pemerintah atau apa dsbnya, supaya dipahami dsbnya. Akhirnya nanti kan dirembug di birokrasi, kan harusnya seperti itu...”*

Informan 6 juga menjelaskan tentang wewenang Humas Kraton dalam hal hubungan dengan lembaga lain ini, menurut beliau yang paling berkepentingan dalam hal semacam ini adalah sekretariat sebetulnya, jadi Humas hanya sekedar untuk memberikan penerangan saja. Seperti yang dikatakan oleh Informan 6 berikut :

*“Ya. e.. apa namanya masih jalan, gitu. Cuma yang paling berkepentingan sekretariat. Humas itu kalau sekretariat semua jadi baru dia penerangan saja.”*

Pernyataan Informan 6 bahwa Humas hanya didudukkan sebagai juru penerang saja dan bahwa kesekretariatan-lah yang berkepentingan dalam hal menjalin hubungan dengan lembaga lain, diperkuat oleh pernyataan Informan 4 bahwa selama ini memang Humas tidak diberdayakan dalam hal-hal yang menyangkut kerjasama dengan pihak lain, apapun itu bentuknya. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 4 berikut ini :

*“Kalau Kraton menjalankan e.. apa namanya menjalin kerjasama dengan lembaga lain, iya. Banyak sekali, tetapi dalam konteks Humas itu diberdayakan ikut di dalam apa namanya negoisasi, ikut dalam e.. pembuatan kontrak, ikut dalam pengambilan keputusan itu tidak.”*

Namun, Informan 4 juga menambahkan bahwa keadaan seperti itu memang sudah merupakan turunan dari dulu, bahwa peranan Humas di dalam Kraton memang baru sebatas sebagai juru penerang kebudayaan.

*“He’em, tidak diberdayakan. Karena itu memang turunan dari dulu. Jadi Humas itu ya mung di-nggo wong sing nerangke yen ono wong takon tentang gunungan itu apa. Jadi masih tradisional.”*

Hubungan dengan lembaga lain ini juga tidak bisa dipisahkan dari permasalahan hubungan Kraton dengan Pemerintahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, otomatis Kraton dengan segalanya isinya menjadi bagian dari NKRI, dan sebagai Negara seharusnya NKRI pun memberikan perhatian kepada kelangsungan hidup Kraton yang notabene adalah awal dari sebuah Negara yang sekarang. Hubungan dengan pemerintahan yang kadang tidak berjalan mulus ini, terutama pada masa terjadi konflik yang memanas diantara kedua kubu raja, diungkapkan oleh Informan 6 sebagai berikut :

*“Ya kalau hubungan itu tentu ada beberapa sector yang berjalan ya. Cuma pemerintah belum bisa maksimal karena e.. apa namanya pemerintah itu menganggapnya itu mungkin ada kekeliruan nggih. E.. jadi kebijakan pemerintah ini mungkin ada kekeliruan anggapan yang perlu ini nanti kedepannya kita amandemen, dalam tanda petik. Tentu e.. kerjasama dengan apa namanya pemerintah atau hubungan seperti itu lebih bisa terpadu sehingga hak-hak adat, masyarakat ulayat ini juga dihormati. Sehingga hubungan ini saya rasakan agak tersingkir ya setelah kemerdekaan itu sampai sekarang itu juga begitu...”*

Terkait dengan adanya konflik dua raja yang masih ada hingga saat ini, Informan 6 mengatakan bahwa tidak seharusnya Pemerintah lepas tangan begitu saja. Karena selama ini, apa yang ada di Kraton juga menjadi milik Pemerintah. Tapi ternyata begitu ada konflik, Pemerintah malah lepas tangan dan menganggap hal tersebut konflik intern. Seperti yang diungkapkan Informan 6 berikut ini :

*“...Seperti konflik itu sendiri, pemerintah harus tanggung jawab. Wong hasil tanahnya juga diminta pemerintah. Iya to? Tapi begitu ada konflik dia lepas tangan. ‘itu urusan intern’. Kan ga bisa? nggih to? Harusnya kan mereka turun tangan bagaimana ini penyelesaiannya, kan gitu. Golekki kuwipiye to angger-angger’e, ayo dirembug bareng kan gitu. Tapi ternyata lepas tangan. Seperti Gubernur juga begitu, ya malah marah-marah dia. Kalau saya anggapannya dia tidak berhak marah to? Wong saya datang hanya untuk memberi pemahaman, ya harusnya lha bagaimana enakanya, ya sudah kita upayakan atau kita rembug bersama. Atau kita bina mereka. Lha yang salah ya kita sadarkan yang keliru. Yang benar jangan merasa benar. Kalau semua salah ya ayo kita benarkan, kan harusnya begitu. Jadi nggak bisa pemerintah itu apatis, ‘serahkan itu konflik intern’. Intern yang mana kalau begitu?...”*

Namun ternyata pernyataan yang berkebalikan justru diungkapkan Informan 3 seputar hubungan dengan Pemerintah di masa konflik ini. Jika Informan 6 mengatakan bahwa Pemerintah tidak seharusnya lepas tangan, tapi Informan 3 justru mengatakan bahwa konflik ini bukanlah urusan Pemerintah. Seperti yang diungkapkan Informan 3 berikut :

*“Ya pemerintah itu sebetulnya, seharusnya ngerti, negoro itu dulunya punya sopo gitu. Ya kalau saya dibilang bekerjasama e.. dalam hal ini ya kita melakukan itu sudah kewajibannya Kraton kok... Kalau kemarin Yusuf Kalla itu nanyain ini, tak ke'i surat, tak ke'i bukune kuwi. Rampung. Pelajarono dhewe kono. Dan itu bukan urusan Yusuf Kalla, bukan urusannya pemerintah.”*

Hubungan yang dijalin antara pihak Kraton dengan Pemerintah selama masa konflik, bukan berupa kerjasama yang ditujukan untuk mencari dukungan, melainkan apa yang dituntut oleh pihak Kraton adalah apa yang menjadi kewajiban Pemerintah terhadap lembaga-lembaga adat yang masih eksis seperti Kraton ini. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 6 berikut :

*“Ya, saya kira nggak. Nggak ada dukung-mendukung. Ini sifatnya kan hanya memberi penjelasan bahwa e.. kewajiban pemerintah terhadap tanah adat itu yang ditulis di UU adalah e.. supaya itu dijalankan. Jadi budaya dilindungi dengan UU. Ketika itu dilindungi dengan UU, ketika budaya itu mengajukan suatu permasalahan atau kegiatan, berdasarkan UU itulah pemerintah memberitahu kepada DPR untuk uang pemerintah membantu kegiatan itu kan. Jadi kita hanya sifatnya mengacu kepada UU...”*

Informan 6 juga menjelaskan fungsi menjalin kerjasama dengan lembaga lain dan Pemerintah selama masa konflik ini, yaitu agar penjelasan tentang apa yang terjadi di dalam Kraton bisa disampaikan ke lembaga-lembaga yang ada.

*“Kalau fungsinya jelas e.. bahwa e.. kita apa namanya memberikan suatu e.. penjelasan melalui lembaga yang ada. Itu fungsinya. Terus apa namanya e.. keberuntungannya adalah mereka itu akan tahu dan akhirnya mengagendakan dan kalau ada perembugan disana ya akan mengagendakan itu saja. Keberuntungan dia sudah mencatat dan kita sudah memberi tahu kalau ada apa-apa kita tidak disalahkan.”*

Ketika ditanyakan bagaimana Humas Kraton memberikan penjelasan kepada lembaga lain dan Pemerintah terkait dengan konflik yang terjadi, Informan 6 mengatakan bahwa usaha yang dilakukan hanyalah memberikan penerangan dan

penjelasan kepada lembaga lain dan Pemerintah bahwa seperti itulah tatanan yang sudah ada di Kraton sejak dulu. Seperti yang diungkapkan Informan 6 berikut :

*“Ya kalau kita menjelaskan pada lembaga atau pemerintah terkait konflik itu ya kita mencoba menjelaskan bahwa tatanan yang ada di Kraton itu sudah ada. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang diluar tatanan itu tentu kita jelaskan bahwa itu perlu diluruskan, supaya kegiatan ini tidak menjadi liar begitu. Maksud saya, nanti setiap ada pergantian terjadi begitu, kan ada tatanannya. Sebetulnya ya kita rembugan saja selesai kok. Kalaupun kita menganggap ini tidak pas ya wong ini.. lungguhke dulu yang berhak dulu. Udah selesai. Nanti aturan itu kita sampaikan. Kalau dia nggak mempermasalahkan aturan yang sudah nanti kita pahami. ‘kamu bisa mengikuti aturan nggak, kalau nggak ya sudah.’ Mohon untuk tidak disitu. Kan gitu gampang. Ini yang kedepan kan begitu...”*

Seperti juga lembaga lain yang menggunakan sistem organisasi modern, di dalam lembaga Kraton sendiri juga mengenal adanya evaluasi terhadap kerjasama yang selama ini dijalin oleh Kraton dengan pihak luar, seperti yang diungkapkan oleh Informan 6 berikut ini :

*“Ya kalau evaluasi tentu ada yang perlu e.. ditindaklanjuti secara garis tebal, ada yang perlu ya biar gitu aja dulu. Kan gitu. Karena melihat satu ya nggak mungkin dananya barangkali, atau mungkin kepentingannya barangkali. Iya to? Waktunya mungkin, dsbnya. Ini evaluasinya. Supaya nanti dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga atau kerjasama dengan lembaga pemerintah itu bisa terschedule e.. dengan baik dan schedule yang ada di Kraton ini tidak goyang, gitu. Karena Kraton punya schedule sendiri juga. Agenda yang sudah jalan, tinggal didukung-dukung...”*

Selain menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan lembaga lain dan Pemerintah, Humas Kraton tentunya juga tidak menutup mata terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat yang masih ada kaitannya dengan Kraton.

Informan 4 memberikan keterangan, bahwa persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang terkait dengan Kraton, seperti persoalan Pasar

Cinderamata dan Museum Radyapustaka, memang menjadi permasalahan yang juga mendapatkan perhatian khusus dari Kraton. Tapi yang disayangkan, bahwa keberadaan permasalahan ini ternyata dibelokkan konteksnya sehingga tidak sesuai lagi dengan apa yang sebenarnya menjadi inti persoalannya. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 4 berikut :

*“Nah itu, kalau saya memang mendudukan permasalahannya dalam koridor yang benar. Artinya positioning-nya mesti benar dulu lokasinya. Kalau lokasinya nggak benar, kita ngomong juga ikut nggak benar. Ya kan? oke misalnya masalah cinderamata. Ini sebenarnya masalahnya hanya kecil, tapi dibesarkan. Masalahnya apa to? Pembagian hak pendapatan, ya itu. Kemudian dibesarkan dalam konteks untuk mencari isu, karena itu sudah keluarga. Kalau sudah mencari isu keluarga, sing salah keluarga kono, itu saya sudah tidak mau. Tapi kalau dari Kraton mestinya dikembalikan ke Kraton dulu to?... Radyapustaka juga demikian, beberapa kali saya diajak rapat dengan Gusti Mung. Di situ kita juga ingin tahu, sebetulnya dari sisi manajemen Gusti Mung ingin tahu sebenarnya duduk masalahnya. Emang begitu harusnya, setelah itu baru tergeser. Lha kalau sudah tergeser, seolah-olah Radyapustaka dikuasai Gusti Mung. Bukan, bukan dikuasai Gusti Mung. Itu Gusti Mung sebagai representative dari Kraton, gitu lho. Tetapi karena latar belakang konflik sing wis kebacut antar pribadi, ngono lho.”*

Namun ketika Informan 4 ditanya mengenai bagaimana peranan Humas Kraton dalam permasalahan tersebut, beliau menyatakan bahwa pendekatan pihak Kraton dalam upaya ikut menyelesaikan permasalahan tersebut tidak melibatkan Humas secara intens. Informan 4 juga memberikan alasan bahwa ketidakterlibatan Humas Kraton secara intens dalam usaha untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut dikarenakan bahwa permasalahan itu sudah bergeser ranahnya. Seperti yang diungkapkan Informan 4 berikut ini :

*“O ada.. ada. Tapi kan tidak dilakukan Humas..... Yang terjadi karena kan kemudian arahnya sudah tidak konsepsional, kemudian akhirnya kepentingannya sudah tidak hanya antar keluarganya Tedjowulan dan*

*keluarganya Sinuhun lalu ada kepentingan Pemkot.... “Intens, ya. dalam arti karena itu sudah digeser. Jadi ketidakterlibatan bukan karena tidak mau, tapi karena ranahnya sudah digeser kepada konflik itu, gitu lho. Jadi repot.”*

Pernyataan tentang bagaimana peranan Humas dalam keikutsertaannya di usaha penyelesaian masalah yang muncul seperti di atas juga diungkapkan oleh Informan 3, seperti berikut :

*“Gini ya, kalau Panjenengan mengatakan Humas, itu yang tahu persis permasalahan dan berani bicara tentang kebenaran yang ada dalam Kraton itu kan? Lha itu. Jadi ya kalau saya karena Pengageng disini dan bertanggung jawab ya terus jadi dobel-dobel kan? Jadi untuk ditunjuk sebagai Humas itu sendiri, tidak bisa. Karena kemampuan yang kita tunjuk itu belum tentu seperti yang kita inginkan. Karena kita kan selalu berunding, kita selalu belajar, kita mengalami kehidupan itu. Saya kebetulan Sastra Jawa dan banyak diberi pesan dari bapak, itu kan jadi tahu gitu lho aturan Kraton seperti apa. Lha yang perlu disampaikan kepada masyarakat itu seperti apa gitu. Batasan-batasan jug ada gitu.”*

Keterangan tambahan yang lain tentang peranan Humas dalam menangani permasalahan eksternal yang masih berkaitan dengan Kraton juga disampaikan oleh Informan 6 berikut :

*“...Dengan Humasnya itu juga kadang-kadang dilakukan, e.. namun tidak kerep sekali. Jadi secara e.. internal juga mencatat kegiatan Kraton untuk nantinya persiapan ke eksternal, sehingga itu apa namanya e.. tentu dilakukan Humas itu. Sehingga dia mencatat.”*

Informan 6 juga menjelaskan sekali lagi bahwa Humas Kraton tetap berperan untuk masalah-masalah eksternal, walaupun kapasitasnya masih bergabung dengan Sekretariat.

Ketika ditanyakan mengenai masalah apa di masyarakat yang menjadi focus perhatian Humas Kraton, Informan 6 tidak menjawab secara jelas permasalahan apa yang menjadi focus perhatian Humas Kraton sejauh ini, beliau hanya menjelaskan



bagaimana sejauh ini Humas Kraton bekerja di bawah struktur lembaga Sasana Wilapa atau kesekretariatan. Serta Humas Kraton sementara ini sifatnya hanya menunggu, jika sampai ada kejadian yang emergency atau darurat. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 6 berikut ini :

*“Jadi begini, Humas, hubungan masyarakat itu kan e.. biasanya dikaitkan dengan juru bicara. Padahal Humas itu tidak hanya itu. Humas itu ya mengupayakan bagaimana dia itu e.. menyentuh pada mereka atau disentuh oleh mereka untuk melaksanakan itu. Akhirnya e.. hal itu akan disodorkan oleh sekretariat. Sekretariat akan muncul menjadi control titik yang paling besar sehingga terjadilah sesuatu kegiatan yang terpadu antara e.. luar dan dalam. Jadi apa namanya e.. aktivitasnya yang dilakukan oleh Humas itu tentu harus , disamping mencatat kegiatan-kegiatan Kraton untuk memberi penjelasan, dia juga harus aktif sebetulnya untuk e.. berbicara di luar untuk menjalin kebersamaan. Ya sekarang ini focus yang paling dilakukan sementara dia menunggu sifatnya, jadi menunggu kalau ada emergency dia berbicara.”*

Masih terkait dengan focus perhatian Humas terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, Informan 6 juga memberikan penjelasan tentang bagaimana peranan yang sejauh ini telah dilakukan oleh Humas Kraton terutama peranan ke internal Kraton sendiri terkait dengan permasalahan-permasalahan eksternal, seperti berikut :

*“Tindakannya adalah satu, e.. juga memberikan suatu penerangan ke intern, supaya kalau bikin statement itu yang kompak, supaya nanti Humas itu juga bisa menjelaskan yang tidak di-amandemen lagi oleh pihak lain, kan gitu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah sehingga agendanya Humas adalah e.. tetap melihat atau mencari data dari e.. sekretariatan. Karena semua terpusat di sekretariatan. Supaya nanti Humas itu bisa memberikan suatu penilaian sehingga walaupun ini ada tidak kekompakan, bisa segera e.. untuk mengadakan konsolidasi. Sehingga Humas bisa e.. menghubungkan dengan masyarakat itu tidak mindo gaweni atau tidak berulang-ulang.”*

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat yang juga menyangkut Kraton akhir-akhir ini, Informan 3 memberikan penjelasan yang

berbeda seputar bagaimana Humas berperan dalam hal tersebut, seperti yang dijelaskan Informan 3 berikut ini :

*“Ya kita tidak mau beropini di pers. Kita menjalankan e.. aturan hukum perundang-undangan di Republik ini yang berlaku. Karena bagaimana pun Kraton sudah ada di dalam NKRI, tapi Kraton sendiri kan punya aturan yang tidak bisa e.. begitu saja diintervensi dari pihak manapun gitu. Ya monggo kalau Kraton aturannya seperti ini mau nggak...”*

### **c. Kebudayaan**

Seperti juga Humas PB XIII Tedjowulan, peranan Humas PB XIII Hangabehi juga tidak bisa dilepaskan dari ranah kebudayaan. Apalagi PB XIII Hangabehi adalah raja yang bertahta di dalam tembok Kraton, sehingga nilai-nilai kebudayaan yang dipegang masih sangat tinggi. Karena itulah, mau tidak mau peranan Humas pun memang akan jauh lebih dominan ke hal-hal yang sifatnya kebudayaan.

Keterangan seputar peranan Humas Kraton dalam hal kebudayaan dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan Informan 6 berikut ini :

*“E.. kalau kita lihat perannya, ya dia menjelaskan bagaimana agenda budaya itu dilakukan oleh Kraton. Kalaupun dia tahu tentang item yang ditanyakan dari e.. penanya tentu dijawab. Kalau nggak tahu tentu dia pasti nanya dari yang berkepentingan...dia juga menjadi juru penerang global sebetulnya. Tapi kalau media ingin bertanya pada praktisi-praktisi tadi ya boleh saja, tapi global dia yang menerangkan...”*

Peranan Humas Kraton dalam bidang kebudayaan sebagai seorang yang ditunjuk menjadi juru penerang kebudayaan juga ditegaskan oleh Informan 4 sebagai berikut :

*“Oiya, iya di bidang kebudayaan. Tapi kan karena sekarang ini informasi kan sudah lebih terbuka, lalu banyak orang yang sudah mendapatkan terpaan dari informasi tentang tata cara upacara Kraton.... Yo wong wit mbiyen gunung ki dari tahun ke tahun ya seperti itu, misalnya ya. gunung itu kan*

*memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, yow is gari semangatnya syiar Islam, kan begitu. Ya sekarang kalau terjadi inovasi, misale gunungane jadi 12, ini kan inovasi di dalam itu kan kalau saya melihat nilai instrumental... Lha itu yang orang sudah banyak tahu. Jadi kalau sekarang ini Humas tidak perlu ngomong lagi, memberikan penjelasan. Yo wis sak mestine."*

Dalam kesempatan wawancara yang lain, Informan 4 kembali menegaskan peranan Humas Kraton, bahwa pada masa sebelum konflik ataupun setelah konflik mereda, yang dilakukan Humas Kraton tetap sama, yaitu sebagai Humas kebudayaan. Seperti yang diungkapkan Informan 4 berikut :

*"...Kadang-kadang di Kraton diundang untuk memberikan penerangan dimana-mana. Seminar dimana gitu. Ya seperti itu, sekedar kebudayaan seperti itu... tetep kebudayaan masih. Dan kami e.. kan biasa diundang kemana-mana. Kebetulan kami yang berbicara tentang kebudayaan Kraton. Saya belum pernah melihat humasnya e.. Gusti Tedjo itu bicara tentang kebudayaan ya. jadi makanya saya kadang-kadang mengatakan, dalam konteks ini marilah kita menempatkan sebagai Humas budaya, bukan sebagai jubir-nya orang konflik gitu lho. Saya kalau diharapkan menjadi jubir-nya orang konflik, saya tidak akan melakukan. Anda tahu, saya lebih banyak diam dan lebih tidak bicara di mass media tentang konflik, tapi kalau ada bicara tentang budaya silakan tanya saya."*

#### **d. Selama Konflik**

Penyajian data peranan Humas Kraton selama konflik, tidak bisa dilepaskan dari penyajian data pada bagian sebelumnya yang menyajikan pernyataan-pernyataan dari pihak PB XIII Hangabehi yang menganggap konflik munculnya dua raja ini bukanlah konflik.

Pernyataan dari pihak PB XIII Hangabehi bahwa mereka tidak menganggap hal ini adalah konflik bisa dilihat dari kutipan wawancara dengan Informan 6 ketika ditanyakan seputar peranan Humas Kraton di masa awal konflik terjadi, seperti berikut :

*“Ya, disampaikan ya apa namanya Humas Kraton tentu yang disampaikan mencoba jelaskan bahwa e.. kejelasan atau sementara yang dianggap sah itu ya yang lenggah disini. E.. jadi karena berdasarkan angger-angger yang ada itu. walaupun ada penyimpangan tentu e. perlu kita rembug bersama gitu. Itu langkah-langkah yang dijelaskan begitu. Supaya orang memahami bahwa berdasarkan aturan adapt itu kaya gitu. Walaupun ada penyimpangan yang perlu diluruskan dan memang harus ada kebijakan, kebijakan apa yang harus dilakukan untuk bisa begitu. Apakah ada sesuatu yang bisa menjadikan penggantinya dari kebijakan itu.”*

Namun ketika ditanyakan tentang bagaimana peran Humas dalam mensiasati situasi eksternal atau di luar Kraton terkait dengan konflik ini, beliau secara tidak langsung menjawab bahwa hal tersebut bukan-lah hal yang khusus dibebankan kepada Humas, seperti kutipan wawancara dengan Informan 6 berikut ini :

*“Ya kita ada berbagai kewajiban. Jadi instruksinya itu tidak ada yang khusus ya. Jadi semua sudah didoktrinkan untuk memberikan pemahaman itu supaya apa namanya tidak simpang siur satu terus dari Lembaga Hukum Kraton juga ikut menerangkan. Juga apa namanya dalam menjelaskan keluar itu juga Humas. Jadi semua bahu-membahu untuk e.. apa namanya mengatasi masalah ini, dengan pemahaman yang sama. Walaupun ya tadi saya mengatakan, ada sesuatu yang kurang pas, tentu kita sampaikan dengan cara-cara yang ada. Jadi kalau khususnya itu tidak kita tunjuk. Cuma instruksi itu semuanya bisa memberikan pembinaan eksternal dan internal untuk menjaga keutuhan Kraton.”*

Walaupun pihak PB XIII Hangabehi tidak menganggap keadaan adanya 2 raja yang bertahta tersebut sebagai keadaan konflik, tetapi tetap saja ada langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak Kraton yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat sekaligus sebagai media untuk memelihara citra positif Kraton. Salah satu cara yang dilakukan pihak PB XIII Hangabehi adalah dengan jalan menerbitkan buku yang berjudul *“Yang Sah & Yang Resmi Susuhunan Paku Buwono XIII”*. Buku tersebut berisi hal-hal dan fakta-fakta

yang ada seputar polemik 2 raja tersebut dilihat dari kacamata pihak PB XIII Hangabehi. Keberadaan buku tersebut sebagai sarana penunjang juga dijelaskan oleh Informan 3 berikut ini :

*“Oiya. Itu karena memang kita perlu dibukukan, karena itu tidak tertulis. Yang tertulis disitu itu bahwa sopo sing ketitik, bakal dadi jumeneng ratu kuwi, emapt nama itu. Itu di Sasana Pustaka ada. Terus aturan-aturan apa tata cara upacara apa yang tercatat disana kan bisa dilihat...Yo ben ngerti. Karena pemberitaan kan tidak benar. Ya kita membikin buku ya untuk komunitas itu sendiri. Ini lho yang bener. Kalau kemarin Yusuf Kalla itu nanyain ini, tak ke'i surat, tak ke'i bukune kuwi. Rampung. Pelajarono dhewe kono...”*

Pernyataan yang serupa tentang bagaimana Humas bekerja untuk memberi penerangan kepada masyarakat terkait permasalahan ini juga disampaikan oleh Informan 6 berikut ini :

*“E.. apa namanya cara-cara yang untuk Humas itu ya apa namanya adanya surat-surat dhawuh itu, dari secretariat itu. Itu yang disampaikan kepada masyarakat, dengan cara-cara yang ada di Kraton... Ya kalau menerbitkan buku sih e.. apa namanya e.. tidak untuk umum ya. tapi dulu khusus itu. dulu diterbitkan melalui kesekretariatan ya...”*

Informan 4 juga turut memberikan keterangan apa yang dilakukan Humas Kraton semasa konflik 2 raja tersebut masih menghangat di tahun-tahun kemarin. Beliau menyatakan bahwa humas ini adalah Humas kelembagaan Kraton, sehingga apa yang dilakukan bukan untuk menjadi humas yang bertugas memenangkan salah satu pihak, tetapi menurut beliau Humas Kraton didudukkan sesuai dengan angger-angger yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 berikut ini :

*“Kalau saya begini, e.. saya selalu mendudukan bahwa Humas ini adalah Humas kelembagaan Kraton. Kalau ketika bicara mengenai konflik pertanyaannya kemudian, pertanyaan yang paling mendasar kan siapa sih yang sah, kan? Itu sudah ada bukunya yang menjawab. Kalau Humas Kraton*

*akan berpegang, kalau saya berpegang pada yang namanya angger-angger. Ya itu, sudah. Angger-anggernya begitu ya harus dijalankan.... Nah, ketika bicara tentang angger-angger ini lalu yang terjadi konflik itu bicara tentang organisasi Kraton, konflik itu adalah kepemimpinan di Kraton. Karena kepemimpinan-nya tradisional berdasarkan keturunan, keturunannya banyak itu yang menjadi konflik gitu. Jadi saya sebagai Humas, tetep harus membawa jarak bahwa Humas Kraton itu tetap didudukkan dalam konteks tidak memenangkan konflik ini atau memenangkan pihak ini, kedua pihak ini. tapi mendudukkan bahwa Kraton punya aturan yang namanya angger-angger. Angger-angger itu hukum adat, sejauh mana adat itu dipenuhi...”*

Berbicara tentang akibat dari timbulnya konflik ini, sama seperti yang juga dirasakan oleh pihak PB XIII Tedjowulan, akibat dari konflik inipun juga dirasakan oleh pihak PB XIII Hangabehi, seperti terpecahnya sentana dan kawula serta rusaknya citra Kraton, seperti yang disampaikan oleh Informan 6 berikut :

*“Ya dampak dari konflik itu sendiri, akhirnya juga sentana sendiri sudah terpecah-pecah, kawula juga begitu. Sehingga merusak citra Mataram dalam tanda petik e.. karena apa namanya dia tidak paham betul tentang tatanan atau angger-angger itu sendiri. Karena kesenjangan pembinaan yang sejak awal pun tidak pernah disampaikan di grass root atau level bawah. Itu hanya diketahui birokrasi tertentu sehingga kesannya, penasbihan itu hanya orang di atasan. Lha ini yang akhirnya ini mudah terprovokasi.... Sehingga banyak kekuatan-kekuatan yang e.. berbicara lain, dalam tanda petik ya dengan kekuatan finansialnya, kekuatan dananya, kekuatan politisnya, membuat orang ini berkolaborasinya juga bervariasi untuk kepentingan teman dsbnya. Sehingga akhirnya kacau. Dampaknya juga akan e.. akan menjadi dampak sosial secara nasional tentu. Disamping secara intern Kraton ada dampak tersendiri.”*

Humas Kraton PB XIII Hangabehi pun mem-fokuskan peranannya untuk mencari penyelesaian dari konflik ini, hal ini lebih mengarah ke usaha-usaha untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya aturan Kraton tersebut dijalankan, seperti yang diungkapkan oleh Informan 6 berikut :

*“Ya fokusnya penyelesaiannya itu adalah e.. kalau itu bisa diselesaikan, ya harus e.. semua memberikan suatu pemahaman. Karena tidak seorang pun /*

*siapa pun yang bisa mengesahkan raja. Itu nggak ada. Ya bisa itu angger-angger. Tapi raja sendiri juga bisa memberikan suatu symbol sehingga itulah sudah disepakati. Nah aturannya harus dilaksanakan, kalau tidak ya sudah. Berarti kita bisa menganggap bahwa ini sak-karepe dhewe. Akhirnya kita bisa memberikan pelurusan.”*

Ketika ditanya lebih lanjut tentang rencana kedepan terkait konflik ini, langkah-langkah apa saja yang sudah disiapkan dan direncanakan oleh Humas Kraton, Informan 6 kembali menegaskan bahwa mereka yang ada di dalam Kraton menganggap bahwa keadaan ini bukanlah merupakan suatu konflik, sehingga Humas pun tidak ada planning kedepan terkait dengan apa yang akan mereka lakukan untuk me-manage konflik ini. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 6 berikut ini :

*“Kalau direncanakan itu memang ndak ada. Tapi kita itu sudah menganggap nggak ada konflik. Kita anggap nggak ada, lha daripada ngurut-ngurutke. Ya udah kita jalan terus. Pokoknya warisan leluhur kita jalankan, kalau apa namanya, mau omongan ya kita tanggepin baik-baik. Lha ini kewajibannya dua sisi. Di luar juga harus kita tanggepin, di dalam juga pembenahan dsbnya. Nah ini kan berat ya. Cuma kita harus kuat.”*

Seperti yang sudah diungkapkan oleh beberapa Informan diatas, pihak Kraton pun melakukan berbagai upaya untuk memberikan penjelasan ke masyarakat seputar konflik 2 raja tersebut. Namun, sejauh ini yang nampak begitu berperan bukanlah Humas Kraton sendiri. Untuk hal ini Informan 4 memberikan pernyataan sebagai berikut :

*“E.. Begini memang e.. itu juga salah satu alasan mengapa kami tidak terlalu aktif. Itu karena saya masih bekerja disini jadi saya tidak mempunyai cukup waktu untuk involve secara penuh waktu disana. Dan itu menyebabkan memang kontribusi saya sangat sedikit...”*

Informan 4 juga menjelaskan bahwa keberadaan konflik ini yang sudah dibelokkan arahnya ke arah konflik keluarga, membuat Humas sulit berperan karena

tidak bisa begitu saja masuk ke ranah pribadi seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 berikut ini :

*“...Sehingga kemudian yang saya sangka kemudian konflik itu tidak bicara pada angger-angger tapi bumbunya kemudian bergeser pada konflik keluarga ya. Nah ketika konflik keluarga terjadi kemudian tereduksi lagi menjadi konflik antar pribadi-pribadi dalam keluarga gitu. Ini yang kemudian menjadi e..saya tidak bisa, Humas terutama itu akan sangat sulit berperan karena tidak bisa kita masuk ke pribadinya, begitu. E.. dalam konteks misalnya permasalahan antara keluarga Gusti Mung dalam arti adik-adiknya Sinuhun, dan kemudian e.. Tedjowulan dan adik-adiknya. Itu kemudian muncul statement-statement yang itu sangat pribadi, yang sebetulnya tidak terkait dengan kehumasan. Nah mestinya kalau bicara kehumasan ya sudah ini angger-angger. Kalau angger-angger sudah, udah tidak ada alasan lain lagi... “*

Semua langkah-langkah dan usaha yang telah dilakukan oleh pihak PB XIII Hangabehi beserta Humas Kraton yang telah disajikan datanya diatas merupakan usaha untuk mengembalikan kembali penilaian orang banyak tentang Kraton, inilah yang diungkapkan oleh Informan 6 sebagai berikut :

*“...Sebetulnya e.. mengembalikan lagi e.. citra itu kan apa namanya penilaian ya. Mengembalikan lagi penilaian warna warga masyarakat supaya dia tidak meninggalkan apa namanya kegiatan budaya itu sendiri...”*

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Informan 3 terkait dengan pencitraan yang ingin disampaikan oleh Kraton kepada kawula-nya selaku public dari lembaga Kraton itu sendiri, seperti berikut :

*“E..Saya selalu menjaga kewibawaan Kraton, itu yang utama yang disampaikan oleh bapak saya. ‘koe tugas pertama dadai anak ratu kudu isoh njogo kawibawaanne Kraton’ nah itu kawibawaanne Kraton itu apa? Jangan membikin corengan e.. Kraton menjadi image orang itu jelek, begitu. Nah karena apa? Kraton itu sendiri kan tempat tatanan, aturan, unggah-ungguh, tatakrama... Tapi ini adalah kewajiban. Lha itu adalah bentuk salah satu cara saya untuk apa? Melestarikan dan menjaga kewibawaan Kraton. Itu Kraton itu seperti ini.”*



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perebutan Kekuasaan 2 Raja sebagai Proses Komunikasi yang Mengandung Kemelut**

Seperti yang sudah banyak dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa awal mula terjadinya konflik ini adalah adanya perebutan kekuasaan antara dua individu yang sama-sama mengklaim berhak dan pantas menjadi raja di Kraton Surakarta dengan gelar PB XIII. Terkait hal tersebut, satu pihak mengakui bahwa memang terjadi konflik, sedangkan satu pihak yang lain menganggap bahwa hal tersebut bukanlah konflik.

Sebenarnya, ada beberapa indikator yang dapat menjadi acuan apakah proses komunikasi tersebut dapat dikatakan sedang dalam masa konflik atau tidak. Seperti yang dijelaskan oleh Redi Panuju tentang indikator proses komunikasi yang mengandung kemelut. Dibawah ini adalah indikator-indikator tersebut :

1. Adanya perbedaan pendapat yang tajam dan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan untuk saling memahami. Dimana setiap pernyataan akan memancing pernyataan tandingan atau argumentasi yang berlawanan.
2. Masing-masing pihak tidak lagi melihat sisi positif atau maksud baik dari komunikasi, sebab dalam kondisi konflik komunikasi hanya digunakan sebagai alat untuk merendahkan posisi lawan.

3. Muncul kecenderungan, karena komunikator dan komunikan tidak berada dalam posisi yang sama.

(Redi Panuju, 2002:2)

Jika suatu proses komunikasi yang sedang berlangsung, mengindikasikan minimal tiga hal tersebut diatas, maka proses komunikasi tersebut bisa dikatakan sedang berada dalam masa konflik atau mengandung kemelut.

Seperti yang juga terjadi diantara dua pihak yang terlibat dalam perebutan kekuasaan di Kraton Surakarta, yaitu pihak KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan, kedua belah pihak selama konflik tersebut terjadi, saling mengeluarkan statement melalui media massa yang tujuannya untuk melawan statement dari pihak yang berseberangan. Pernyataan tentang adanya perang statement ini dijelaskan oleh Informan 1 yang mengatakan bahwa memang sempat ada perang statement antara pihak Hangabehi dengan Tedjowulan yang dimuat di media massa dan berkaitan dengan konflik tersebut. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 1 berikut ini :

*“O..iya. jelas perang statement itu pasti. Pernah.... Tapi saya tidak mau ketika e.. statement yang bikin itu dipakai untuk menjatuhkan pihak lain secara kasar ya.”*

Tidak hanya Informan 1 yang memberikan pernyataan seputar perang statement di media massa, Informan 3 juga menyatakan bahwa memang benar ada usaha untuk saling membuat pernyataan di media massa. Hanya saja Informan 3 menjelaskan lebih lanjut bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Kraton hanya semata-mata untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana hal yang sebenarnya. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 3 berikut ini :

*“Ya pasti itu. Karena itu kan kalau apa media itu kan membangun opini gitu. Jadi memang untuk memanjangkan masalah, jangan mandeg itu kan mesti dibikin. Ya kadang-kadang saya bilang ‘A’ malah digawe ‘B’ yang supaya disini muncul begini, kan selalu begitu. Tapi akhirnya kan itu semua yang kita lakukan itu adalah aturan Kraton...”*

Lebih lanjut lagi, Peneliti juga menemukan beberapa bukti perang statement yang terjadi di media massa antara kedua belah pihak. Jika dilihat dari pemilihan kata yang digunakan dan isi dari statement kedua belah pihak tersebut, statement yang dikeluarkan di media massa tersebut merupakan satu usaha untuk “menyerang” pihak yang lain sehingga akan muncul tanggapan atau reaksi dari pihak yang satunya. Salah satu contoh statement yang muncul di media massa yang akhirnya memancing statement tandingan atau berlawanan adalah statement yang muncul di Harian Solopos pada kolom Surat Pembaca tanggal 16 Februari 2006. Statement yang dikirimkan atas nama Pengageng Sasana Wilapa Kraton Surakarta tersebut berisi tentang penjelasan Kraton Surakarta mengenai pengganti PB XII yang sah dan resmi. Statement tersebut juga berisi himbauan kepada masyarakat luas agar tidak melayani dan terjebak oleh pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Kraton Surakarta serta mengatasnamakan PB XIII, karena di statement tersebut dijelaskan hanya ada satu PB XIII yang sah yaitu yang dijelaskan dalam 3 point statement yang dikeluarkan di media massa tersebut.

Munculnya statement dari pihak PB XIII Hangabehi ini, kemudian mendapat tanggapan dari pihak PB XIII Tedjowulan. Dimuat pada media massa yang sama pada tanggal 20 Februari 2006, pihak PB XIII Tedjowulan melalui Humas Kraton Surakarta versi PB XIII Tedjowulan, memberikan pernyataan resmi sekaligus

penjelasan atas statement yang dibuat oleh Pengageng Sasana Wilapa Kraton Surakarta. Dalam statement-nya tersebut, Humas Kraton versi PB XIII Tedjowulan membuat 8 point pernyataan yang isinya antara lain menyatakan bahwa adanya fakta pada tahun 2004 telah muncul dua raja di Kraton Surakarta yang bergelar PB XIII serta kenyataan adanya pengakuan resmi dari pemerintah baik Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terhadap adanya dua raja tersebut. Dalam statement yang dikeluarkan oleh Humas Kraton Surakarta versi PB XIII Tedjowulan tersebut juga disinggung agar masyarakat luas memberikan dukungan agar konflik tersebut bisa diselesaikan dengan jalan damai. Lebih lanjut, Humas Kraton Surakarta versi PB XIII Tedjowulan juga menyatakan bahwa statement yang sebelumnya dibuat oleh pihak PB XIII Hangabehi sebenarnya telah memberikan opini negative kepada pribadi PB XIII Tedjowulan yang dapat dituntut dengan pasal 310 dan 311 KUHP sebagai delik penghinaan dan pencemaran nama baik.

Kemunculan dua statement dari dua pihak yang berseberangan tersebut membuat lebih banyak lagi munculnya statement yang akhirnya saling memancing reaksi dan tanggapan yang justru menambah rumit persoalan perebutan kekuasaan antara dua raja ini. Sesuai dengan salah satu indikator yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap pernyataan akan memancing pernyataan tandingan atau argumentasi yang berlawanan.

Selain munculnya pernyataan yang akan memancing reaksi atau tanggapan dari pihak yang berseberangan, proses komunikasi yang mengandung konflik juga mengindikasikan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara kedua pihak yang

berseberangan. Hal ini nampak pada sikap yang ditunjukkan kedua belah pihak dalam menanggapi adanya peristiwa ini. Satu pihak mengakui bahwa memang terjadi konflik, sehingga merasa perlu ada upaya penyelesaian atau jalan keluar. Sementara pihak yang lain menganggap tidak ada konflik karena memang aturan adatnya atau angger-angger sudah mengatur sedemikian rupa sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Seperti yang dijelaskan oleh Informan 3 dalam suatu wawancara dengan Peneliti, bagi kalangan Kraton, peristiwa yang mulai terjadi PB XIII wafat di tahun 2004 tersebut bukanlah suatu hal yang bisa dikatakan konflik. Beliau juga mengatakan bahwa apa yang terjadi sudah sesuai dengan angger-angger Kraton sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

*“Sebetulnya sejak semula itu saya selalu mengatakan bahwa Kraton itu tidak ada konflik... Ya Kraton menjalankan aturan Kraton ya seperti itu, kalau ada yang di luar Kraton itu nggegeri itu bukan urusan Kraton itu lho. Sebetulnya seperti itu... kita memberi penerangan itu sebetulnya menyampaikan bahwa ini aturan Kraton seperti ini gitu. Jadi ini tidak perlu di-konflik-i gitu. Karena ini bukan konflik gitu. Kalau toh ada yang pengen jadi raja itu urusan dia, ngaten lho. Sebetulnya seperti itu...”*

Perbedaan sikap yang tajam dalam menanggapi peristiwa tersebut juga tampak dalam beberapa statement yang muncul di media massa yang dikirimkan oleh kedua pihak raja yang berseberangan tersebut. Dari contoh statement di atas, terlihat bahwa pihak PB XIII Tedjowulan menilai bahwa pihak PB XIII Hangabehi tidak mau mengakui kenyataan bahwa memang ada 2 individu yang telah sama-sama dinobatkan menjadi raja Kraton Surakarta dengan sebutan Paku Buwono XIII.

Keengganan pihak PB XIII Hangabehi untuk mengakui kenyataan bahwa ada dua raja dan tidak menganggap hal tersebut sebagai konflik, juga terlihat dari beberapa sesi wawancara dengan Peneliti. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 6 berikut ini :

*“Jadi kalau kita ditanya, kita itu tidak menganggap konflik kok. Jadi hanya salah pemahaman saja. Kalau orang memang tetap dibilang itu konflik, wong itu terjadi salah persepsi kan terjadi konflik itu. Kalau saya menganggap tidak konflik, hanya suatu e.. kesalahan berpikir saja. Ya kedepan tentu e.. penjalinan-penjalinan akan menjadikan suatu kedewasaan, sehingga semua yang terlibat itu sadar bahwa kita semua ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan...”*

Jika pihak PB XIII Hangabehi menganggap peristiwa tersebut bukanlah sebagai konflik, berbeda halnya dengan pihak PB XIII Tedjowulan yang memang mengakui adanya konflik terkait peristiwa perebutan kekuasaan ini. Fenomena seperti ini sebenarnya wajar. Pihak PB XIII Hangabehi yang bertahta di dalam Kraton, tentu sangat memegang teguh angger-angger atau hukum adat yang berlaku, yaitu hanya putra tertua dari permaisuri atau selir-lah yang berhak untuk menggantikan raja yang telah mangkat. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun mereka yang berada di pihak PB XIII Hangabehi tetap menganggap peristiwa tersebut bukan konflik karena sesuai dengan angger-angger.

Seperti yang dijelaskan oleh Informan 6 bahwa selama angger-angger itu masih ada dan masih digunakan sebagai dalil atau acuan maka sudah kewajiban bagi kerabat Kraton untuk menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan angger-angger tersebut. Berikut kutipan wawancara Peneliti dengan Informan 6 :

*“...memberikan suatu pemahaman bagaimana e.. apa namanya terjadinya e.. perjalanan apa namanya tatanan atau aturan, atau disebut angger-angger di Kraton bagaimana. Itu saja. Kalau ini mau diretorika-i atau di silat lidah-i, itu bisa saja, kan dalilnya ada. Ketika dalilnya ada, itu masih utuh dan belum diamandemen ya ini untuk acuan dulu. Karena dalilnya untuk itu ada...”*

Sementara jika pihak PB XIII Tedjowulan mau mengakui adanya konflik yang menyertai suksesi tersebut, hal itu juga wajar. Karena sebagai raja yang dinobatkan dan bertahta di luar tembok Kraton, tentu pengakuan dan penerimaan dari masyarakat luas serta pihak Pemerintah adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan eksistensi. Sehingga pihak PB XIII Tedjowulan tidak berusaha untuk mengingkari adanya konflik tersebut. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa pihak mereka-lah yang berada di luar Kraton, maka pihak PB XIII Tedjowulan pun benar-benar mempersiapkan langkah-langkah untuk membangun citra positif bagi PB XIII Tedjowulan.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 berikut ini :

*“...Karena apa? Karena ke depan Kraton itu tidak bisa dipersiapkan oleh seseorang yang tidak punya basic yang nyata. Tidak punya pemahaman atau pandangan yang lebih luas, karena orang militer selalu punya pandangan yang lebih luas gitu. Kalau kita coba ungkap lebih jauh, bahwa yang namanya angger-angger, lha ini kita bicara mereka, apakah yang namanya angger-angger itu sudah dijalankan secara penuh? Atau sudah dijalankan secara hukum wajib di dalam pergantian pergantian kekuasaan di Kraton Surakarta Hadiningrat. Ayahandanya saja bukan putra nomer satu kok. Itu yang nomer satu, lalu yang kedua, yang juga perlu diingat bahwa di dalam kraton itu ada semacam deputi atau pengageng. Deputi inilah yang selama ini menjalankan roda pemerintahan di Kraton Surakarta Hadiningrat. Nah justru ketika raja mangkat, yang diangkat oleh ketiga deputi ini adalah Tedjowulan, bukan disini. Sebetulnya disini kudeta, kalau kita mau bicara dalam konteks pemerintahan, apa yang dilakukan mereka kudeta dengan menutup pintu pada saat pelantikan Sinuhun Tedjowulan, dsbnya. Mungkin mbak masih ingat tahun 2004? Kami merasakan sekali. Mohon maaf waktu itu posisi saya memang belum menjadi seorang Humas mbak. Karena apa yang dilakukan*

*oleh mereka sudah melanggar dari angger-angger Kraton sendiri. Itu yang harus diingat itu. Mereka sudah melanggar angger-anggernya Kraton sendiri, mereka tidak sah untuk menjadi raja kok berani mengatakan sah. Wong ayahanda tidak pernah mempersiapkan kok. Kenapa kalau emang betul si Hangabehi menjadi putra pertama, kenapa ayahanda tidak mempersiapkan dari dulu? Pasti kan ada sesuatu kan? saya tidak mau mengatakan apa sesuatu itu, tapi pasti ada sesuatu kan? Lha kalau mau ya mbok sudah dari jauh-jauh hari...”*

Dari kutipan wawancara dengan Informan 1 diatas, nampak bahwa gejala proses komunikasi yang mengandung konflik sudah nampak dari pernyataan Informan diatas. Dengan berdasarkan fakta bahwa tidak selalu Putra pertama yang menjadi raja, dan keputusan tiga Pengageng Kraton untuk mengangkat Tedjowulan menjadi raja serta tidak dipersiapkannya Hangabehi untuk menjadi raja sejak dahulu, membuat pihak PB XIII Tedjowulan mengeluarkan statement bahwa pihak yang di dalam Kraton-lah atau pihak PB XIII Hangabehi yang justru melanggar angger-angger yang ada. Informan 1 juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa dikatakan kudeta dalam pemerintahan.

Pernyataan Informan 1 yang menuding bahwa justru pihak PB XIII Hangabehi lah yang tidak mematuhi angger-angger serta tidak sah karena tidak diangkat oleh Pengageng, mendapat tanggapan dari pihak PB XIII Hangabehi. Seperti yang dikutip dari pernyataan salah satu Mantudalem KP Satryo Hadinagoro yang dimuat di Harian Solopos pada 1 September 2004, bahwa Pengangeng tidak berhak untuk mengangkat raja.

Saling beradu argument melalui media massa antara kedua belah pihak, membuat suasana makin rumit. Bahkan jika diamati dengan seksama, statement yang



muncul di media massa terkadang sudah keluar dari kaidah Public Relations, karena statement yang muncul tidak berusaha untuk menampilkan image positif dari Kraton tetapi lebih seringnya memunculkan pembelaan terhadap masing-masing individu yang terlibat konflik. Masing-masing pihak, baik PB XIII Tedjowulan maupun PB XIII Hangabehi, sama-sama lebih sering mengeluarkan statement yang cenderung saling menyerang antar individu sehingga semakin memperkeruh konflik.

Perbedaan sikap dalam melihat peristiwa ini juga tercermin dari dasar pembentukan lembaga Kehumasan yang dimiliki oleh PB XIII Tedjowulan. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 1 berikut ini :

*“Ya karena pencitraan, satu. Dibutuhkan pencitraan karena kan ini terjadi sengketa. Lalu kedepannya, dalam konteks kedepannya, itu setelah berjalan, setelah berlangsung yang muncul adalah dibutuhkan seseorang yang mampu me-manage konflik atau manajemen konflik. Dan itu dipercaya pada bidang kehumasan.”*

Dari pernyataan diatas, yang perlu dicermati adalah pernyataan Informan 1 bahwa memang dibutuhkan pencitraan karena munculnya sengketa, bahkan lebih lanjut dikatakan dibutuhkan seseorang untuk me-manage konflik. Ini menunjukkan keseriusan pihak PB XIII Tedjowulan dalam menghadapi keadaan ini, serta menunjukkan bahwa pihak PB XIII Tedjowulan mengakui bahwa apa yang sedang terjadi sekarang adalah konflik yang perlu diselesaikan. Selain itu dari statement Informan 1 diatas, dapat dilihat tujuan awal dibentuknya Lembaga Humas PB XIII Tedjowulan. Dengan tujuan yang seperti itu, bisa dilihat bahwa tujuan awal atau latar belakang pendirian Lembaga Kehumasan PB XIII Tedjowulan memang jelas untuk

menghadapi konflik ini, baik untuk memberikan pencitraan positif maupun untuk meng-cover keberadaan PB XIII Tedjowulan dari pihak lawan.

Hal ini tentu berbeda dengan alasan dibentuknya lembaga Kehumasan versi PB XIII Hangabehi. Kemunculan Humas di dalam Kraton sudah ada jauh sebelum munculnya konflik antara pihak Tedjowulan dan Hangabehi. Walaupun memang dahulu belum secara resmi dikatakan sebagai Humas Kraton, tetapi sudah menjalankan fungsi sebagai lembaga yang memberikan penerangan. Bahkan, setelah munculnya konflik ini pun, alasan dibentuknya lembaga Humas Kraton juga bukan didasari oleh adanya konflik. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 4 berikut :

*“Ya, lebih baik kan itu supaya, supaya maksudnya ke depan nanti fungsinya bisa dijalankan lebih optimal gitu. Meskipun sekarang, belum optimal juga.”*

Selain pernyataan dari Informan 4, beberapa pernyataan dari Informan pihak PB XIII Hangabehi juga menunjukkan bahwa latar belakang pendirian Humas, dari sejak awal yang belum resmi dilembagakan hingga sekarang yang sudah resmi dilembagakan dengan nama Humas, bukan semata-mata dibentuk karena munculnya konflik ini, tetapi memang lebih condong ke Humas yang bersifat sebagai penerang kebudayaan Kraton kepada masyarakat luas.

Perbedaan sikap dalam menyingkapi peristiwa ini membuat tidak adanya jalan keluar yang dapat diambil untuk penyelesaiannya. Sehingga muncul pemikiran dari salah satu pihak, bahwa pihak yang lainnya tidak mempunyai itikad baik untuk berdamai.

Seperti kutipan wawancara dengan Informan 1 berikut :

*"...Kan selama ini kita mencoba untuk mengkomunikasikan kepada mereka dengan jalan 'ayolah kita islah' mereka berdua-lah tanpa perlu direcoki orang lain. Nggak perlu ada saya, nggak perlu ada siapa saja. Ndilalah kok ya PR-nya Gusti Behi itu namanya Bambang juga gitu lho. Nggak perlu ada dia, nggak perlu ada saya. Demikian juga nggak perlu ada seluruh keluarga yang lain. Biarkan kedua raja itu ping suit kek, apa kek untuk menetapkan rajanya siapa. Itu akan lebih baik mbak. Perlu saya tegaskan ya mbak, bahwa potensi konflik dari munculnya dua raja ini di masyarakat sangat tinggi. Dan itu bisa membahayakan kepentingan masyarakat-nya. Kalau kita tidak mau hati-hati, karena munculnya dua raja ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang maksudnya tidak baik, dan itu sudah kami cium gelagatnya. Kita melihat sekali potensi konfliknya luar biasa berbahaya. Masyarakat yang kasihan. Contoh kasus, masyarakat Baluwarti terbelah menjadi dua kan?"*

Sebenarnya yang terjadi disini adalah perbedaan pola pikir dan sikap dalam memandang peristiwa ini. Bermula dari hal tersebut, salah satu pihak akhirnya menganggap bahwa pihak yang lain tidak mempunyai itikad baik untuk mediasi. Inilah yang membuat konflik menjadi semakin berlarut-larut.

Munculnya perang statement di media massa antara dua pihak yang berseberangan tersebut juga digunakan sebagai alat untuk merendahkan posisi pihak yang lain. Bahkan Informan 7 menganggap hal tersebut sudah tidak bisa dikategorikan masuk ke fungsi Kehumasan. Pernyataan Informan 7, juga senada dengan pernyataan Informan 4 yang menilai bahwa bagi pihak yang bertikai, statement yang ada sudah keluar dari koridor fungsi Kehumasan. Sebab bagaimana pun juga konflik dan kepentingan keluarga masing raja sudah ikut berbicara di ranah yang seharusnya tidak dimasuki oleh kepentingan lain selain kepentingan bersama untuk membangun dan mempertahankan Kraton.

Perbedaan yang sangat principal di antara kedua pihak raja yang bertikai tersebut, membuat pemikiran-pemikiran negative di antara kedua pihak makin

berkembang. Pihak PB XIII Hangabehi berprinsip bahwa suksesi yang terjadi sudah sesuai dengan angger-angger yang sudah dijalankan sejak dulu, sehingga mematuhi angger-angger tersebut adalah harga mati, sehingga bagi mereka yang tidak setuju maka dianggap tidak mematuhi angger-angger. Sedangkan pihak PB XIII Tedjowulan tentu kebalikannya. Perbedaan yang principal seperti itu membuat usaha-usaha perdamaian seakan menjadi tidak berguna lagi.

Seperti kutipan wawancara dengan Informan 1 yang mengaku bahwa pihaknya sudah seringkali menawarkan islah atau perdamaian.

*“Hanya saja memang dari kami upaya untuk semacam islah itu sudah kita upayakan berkali-kali. Tapi mereka selalu bicara yang angger-angger dsbnya, nah itu.”*

Dalam kesempatan wawancara yang lain, Informan 1 juga mengaku bahwa sudah berulang kali menyampaikan undangan kepada pihak yang berada di dalam Kraton untuk bertemu dan membicarakan konflik ini, tentu saja dengan bantuan pihak ketiga atau mediator, yang memang menjadi salah satu cara penyelesaian konflik yang paling sering digunakan dalam kondisi seperti konflik perebutan kekuasaan dua raja ini.

Berikut penjelasan Informan 1 :

*“ Jadi gini, tidak hanya direncanakan, tapi sudah dilaksanakan. Baik melalui pihak ketiga, terutama memang kecenderungan kita adalah melalui pihak ketiga. Soalnya kalau kita direct atau langsung tu ya susah ya. Karena dengan situasi masing-masing bersikukuh dengan argumentasinya yang paling bener bakal susah. Kita sudah banyak melakukan mediasi. Di-mediasi, di-mediatori baik itu oleh tokoh-tokoh Nasional ya. Jangan salah Gusdur, Amien Rais, Wiranto itu udah mencoba semua untuk mediator. Malah terakhir pak Yusuf Kalla minta mencoba untuk menjadi mediator penyelesaian kasus ini. E.. jadi bagi kami ya, kita dari dulu sampai sekarang*

*kita mencoba untuk menawarkan penyelesaian konflik ini dengan jalan duduk bersama. Saya sebagai Humas selalu mengedepankan, bahwa sekali-sekali kita mau mendengarkan. Kami akan mau mendengarkan kok argumentasi mereka. Tapi cobalah mereka juga bisa mendengarkan argumentasi kita. Lepaskan semua atribut, lepaskan semua kepentingan-kepentingan sesaat.... Kami merencanakan dengan semua jalan. Bagaimana cara mempertemukan kedua raja itu dsbnya. Secara langsung dsbnya. Ya tapi sampai sejauh ini belum ada. Bahkan melalui beberapa kerabat, itu kita juga melakukan upaya-upaya terakhir kemarin e.. pas syawalan atau halal bihalal, kita mengundang mereka. Jadi bukan kita ya, melalui pihak ketiga mereka diundang, kita diundang di Jakarta untuk duduk bersama. Tapi faktanya yang datang? Pokoknya kalau sepanjang masih ada factor kepentingan, itu yang kami percaya tidak pernah akan terselesaikan.”*

Konflik yang terjadi, baik secara langsung atau tidak, menimbulkan krisis dalam Lembaga Kehumasan yang berada baik di pihak PB XIII Hangabehi ataupun PB XIII Tedjowulan. Meskipun satu pihak tidak mengakui keberadaan konflik yang terjadi, tetapi fakta dan statement yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa krisis kehumasan memang terjadi di Lembaga Kehumasan kedua pihak raja.

Mengutip Redi Panuju dalam “*Krisis PR, wawasan memahami macam krisis menuju organisasi yang sehat*” krisis kehumasan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, adalah sudut pandang keorganisasian. Dalam sudut pandang ini kehumasan dikatakan mengalami krisis ketika sebagai institusi di dalam suatu organisasi tidak lagi mampu menjalankan fungsi kehumasan secara efektif. Dengan kata lain, kondisi yang terjadi adalah ketika PRO atau Petugas Humas tidak mampu lagi menjadi penyedia informasi yang dibutuhkan public, sehingga public akan mencari informasi dari sumber-sumber yang lain. Dalam kasus ini, fungsi PR bisa dikatakan gagal.

Terkait dengan konflik yang terjadi, keberadaan Lembaga Kehumasan Kraton Surakarta pihak PB XIII Hangabehi bisa dikatakan mengalami krisis kehumasan, jika dilihat dari sudut pandang yang pertama tersebut. Dikatakan mengalami krisis, bukan berarti Lembaga Kehumasan PB XIII Hangabehi tidak berperan sama sekali, tetap memiliki peran, hanya saja jika dihubungkan dengan keberadaan konflik dan proses keorganisasian di Kraton secara langsung, Humas tidak terlalu diberdayakan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 berikut ini dalam suatu kesempatan wawancara dengan Peneliti :

*“He’em, tidak diberdayakan. Karena itu memang turunan dari dulu. Jadi Humas itu ya mung di-nggo wong sing nerangke yen ono wong takon tentang gunung itu apa. Jadi masih tradisional... juga pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan di Kraton juga e.. tidak melibatkan Humas secara maksimal gitu.”*

Melihat pernyataan yang diberikan oleh Informan 4 diatas, maka tidak menutup kemungkinan yang terjadi selama ini, ada beberapa tugas dan wewenang yang seharusnya dilakukan atau dikerjakan oleh Humas ternyata berpindah tangan ke pihak yang lain. Fakta bahwa ada beberapa hal yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang Humas, ternyata berpindah tangan menjadi peranan pihak yang lain, mendapat tanggapan dari Informan 4 berikut ini :

*“Tidak penyimpangan, ada ketidakberdayaan. Bukan penyimpangan mbak, ketidakberdayaan. Pada saat itu, ketika konflik itu terjadi. Iya kan? karena ketika, anu media kan lebih tertarik statement-nya gusti-gusti daripada statement-nya saya iya kan? Saya juga tidak tertarik lagi, karena sudah tidak ada yang bisa dijual dari statement saya. Kalau statement saya kan jelas, kalau angger-angger ya seperti itu ya sudah. Lha kalau bicara itu nanti, yen wis ono waktu. Kalau sekarang ya bagaimana prose situ gitu lho. Kalau saya gitu. Lha proses itu kan tidak dilalui.”*

Melihat pernyataan diatas, Informan 4 menekankan pada kata *ada ketidakberdayan*, hal tersebut menimbulkan pemaknaan bahwa apa yang seharusnya menjadi peranan Humas, ternyata sudah ditangani oleh pihak lain. Dalam konteks konflik perebutan kekuasaan antar 2 raja ini, fakta yang ada di lapangan jelas memberikan gambaran bahwa peranan Humas memang diabaikan dan diambil alih oleh pihak yang lain. Sehingga public yang ingin mendapatkan informasi berusaha untuk mendapatkannya dari pihak yang lain tersebut.

Keadaan ini tentu terjadi bukan tanpa sebab, selain masalah konflik yang semakin melebar ke arah masing-masing individu yang bertikai sehingga membuat Humas kesulitan untuk berperan, ada beberapa kondisi lain yang juga membuat Humas Kraton PB XIII Hangabehi berada pada krisis kehumasan sudut pandang keorganisasian. Diantaranya adalah ketidakmampuan Petugas Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi untuk menjalankan peranannya secara optimal karena kesibukan dan berbagai aktivitas beliau di luar Kraton. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 berikut :

*“Sekarang itu saya tidak bisa mengatakan e.. lebih kepada Humas ya. Karena semua sekretariat sini itu e.. kita yang ada disini itu kan kebanyakan kan seperti saya dengan Kanjeng Win itu kan memang mau tidak mau menjadi PR-nya Kraton gitu. Dan kalau saya nggak bisa memberi keterangan ya Kanjeng Win, kalau tidak bisa ya Gusti Puger. Nah berdasarkan kita memberikan apa keterangan pada pers itu berdasarkan apa kebutuhan dan apa bidangnya masing-masing gitu.”*

Bisa dilihat, bahwa sejauh ini selama masa konflik, yang justru banyak berperan untuk memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh public adalah nama-nama yang telah disebutkan dalam kutipan wawancara di atas.

Krisis kehumasan juga dapat dilihat dari sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang pencitraan. Yang dimaksud dengan citra disini adalah kesan organisasi yang berkembang dalam benak orang lain atau public. Oleh karena itulah tugas PR atau Humas adalah untuk membangun citra positif yang sekuat-kuatnya. Suatu lembaga yang sedang mengalami konflik atau masalah tentu akan sangat berpengaruh terhadap citra positif yang dimiliki oleh lembaga tersebut, tidak terkecuali Kraton Surakarta yang juga mengalami permasalahan serupa. Kemunculan 2 raja yang memicu konflik berkepanjangan seperti ini, baik secara langsung ataupun tidak ternyata memang berpengaruh terhadap citra positif yang dulunya melekat pada Kraton Surakarta.

Pengaruh tersebut tidak bisa diukur secara matematis seperti contohnya jumlah wisatawan yang berkunjung atau hal-hal semacam itu. Tetapi lebih cenderung tampak pada sikap dan tindakan yang diambil oleh individu atau lembaga yang mempunyai hubungan dengan Kraton. Fakta yang diperoleh Peneliti di lapangan menunjukkan bahwa munculnya kecenderungan untuk saling menjadi pengikut diantara kedua raja tersebut. Bagi pihak yang mempercayai PB XIII Hangabehi maka akan membela PB XIII Hangabehi, demikian juga sebaliknya. Dengan munculnya blok-blok seperti itu, maka sikap antipati yang ada diantara para pembela 2 raja tersebut, otomatis juga akan terlihat oleh public.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Informan 7 diperoleh keterangan bahwa memang citra Kraton Surakarta menurun sejak adanya konflik tersebut. Bahkan Informan 7 menyebut bahwa citra Kraton “anjlok” karena



sudah tidak bisa lagi dijadikan panutan oleh masyarakat luas. Ketika ditanyakan apa yang menjadi indikatornya, Informan 7 menjelaskan bahwa aura Kraton memang meredup sejak konflik terjadi. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 7 berikut ini :

*“Karena ketidakrukunan dan tidak bisa dibuat panutan. Sementara termasuk ini yang kraton itu kan ketemunya yang nalar dengan yang tidak nalar... Aura. Aura itu memang redup.”*

Sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang tugas dan fungsi Humas. Lembaga Kehumasan bisa mengalami krisis jika tugas dan fungsi Humas mengalami pergeseran yang tidak relevan dengan apa yang seharusnya menjadi tugas PR. Ataupun juga PR atau Humas tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. Keadaan ini mungkin terjadi apabila Petugas Humas yang bersangkutan kurang mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya atau bisa juga disebabkan oleh hal-hal lain yang berada di luar kuasanya sebagai seorang Humas.

Di tengah konflik antara 2 raja ini, tugas dan fungsi Humas Kraton pun mengalami pergeseran. Di satu pihak, fungsi Kehumasan memang masih berjalan walaupun kadang juga keluar dari jalur Kehumasan, sementara di pihak yang lain fungsi dan tugas Humas seakan-akan berpindah tangan.

Memang tidak mudah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam Lembaga Kehumasan Kraton, karena yang dihadapi adalah organisasi adat yang sudah hidup dan bertahan selama ratusan tahun. Sehingga jika ada penyimpangan atau ketidaktepatan dalam memetakan fungsi dan tugas suatu bagian seakan-akan menjadi suatu hal yang bisa dimaklumi.

Pergeseran fungsi Kehumasan pun juga mempunyai latar belakang yang kompleks, karena terkait erat dengan konflik yang memang sudah melebar ke ranah keluarga. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 7 berikut ini :

*“Tidak hanya sepanjang konflik, jauh sebelum anu pun e... artinya tidak begitu tertopang. Karena gini e.. kapasitas Humas ini sebagai juru penerang budaya apa kehumasannya? Menyuarakan kraton? Karena ini tidak jelas. Kalau itu menyuarakan kraton, Humas tidak berfungsi, jelas. Tapi kalau hanya sebatas juru penerang budaya, mungkin masih bisa. Nah di kraton seperti itu. Jadi lebih dominan pengagengnya. Kalau dulu ya pengageng parentah kratonnya, kalau sekarang ya pengageng sasana wilapa-nya, atau wakilnya gitu. Jadi Humasnya tidak berfungsi sama sekali... “Yang di dalam. Yang di luar pun sebatas kalau itu ada kegiatan. Ya misalnya menjelang kegiatan apa, Humas baru menyampaikan. Kalau tidak ya udah, vakum.”*

Melihat statement yang dikeluarkan oleh Informan 7 diatas, tampak bahwa memang terjadi pergeseran yang tidak jelas akan berakhir dimana. Dari awal berdiri, Humas Kraton PB XIII Hangabehi memang tidak secara langsung ditujukan untuk menghadapi konflik, berbeda dengan Humas Kraton PB XIII Tedjowulan yang memang ditujukan untuk menghadapi konflik ini. Tetapi walaupun berdiri dengan tujuan yang berbeda, faktanya sekarang keadaan kedua Humas Kraton tersebut juga tidak jauh berbeda.

Krisis kehumasan juga dapat dilihat dari sudut pandang SDM. Seorang PRO atau Petugas Humas haruslah seseorang yang mempunyai kapabilitas tinggi. Kedua Petugas Humas, baik dari pihak PB XIII Hangabehi ataupun PB XIII Tedjowulan jelas merupakan individu dengan kapabilitas tinggi yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun terkadang, yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan atau kapabilitas

tetapi juga ketersediaan waktu dan tenaga PRO atau Petugas Humas untuk menjalankan tugas dan fungsi Humas.

Kendala waktu dan tenaga inilah yang memang menjadi hambatan Humas Kraton PB XIII Hangabehi untuk bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Seperti yang diungkapkan Informan 4 dalam kutipan wawancara berikut :

*“E.. Begini memang e.. itu juga salah satu alasan mengapa kami tidak terlalu aktif. Itu karena saya masih bekerja disini jadi saya tidak mempunyai cukup waktu untuk involve secara penuh waktu disana. Dan itu menyebabkan memang kontribusi saya sangat sedikit. Dan itu saya juga merasa bersalah karena itu...”*

Pernyataan Informan 4 diatas diperkuat oleh Informan 3 yang mengatakan bahwa landasan kurang diberdayakannya Petugas Humas bukan karena tidak *capable* tetapi lebih cenderung kepada ketidakmampuan dalam hal waktu dan tenaga.

*“Ya akhirnya juga dia sendiri juga tidak bisa memenuhi apa yang menjadi apa ya jabatannya begitu. Karena juga e.. banyak sekali yang dia... kegiatannya di kampus-nya itu terlalu banyak yang tidak bisa di-sambi gitu lho. Nah akhirnya kan juga setiap e.. permasalahan yang dbutuhkan penerangan dari Kraton ya pada waktu itu siapa yang ada, siapa yang bisa itanya itu jadinya juga lepas lagi dari.. tapi tetep pasti e.. pejabat di Kraton.”*

Seperti konflik pada umumnya, krisis kehumasan pun juga mempunyai tahapan konflik. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. William Hendricks, ada tiga tahapan konflik yaitu, 1. Konflik tahap pertama (peristiwa sehari-hari); 2. Konflik tahap kedua (tantangan); 3. Konflik tahap ketiga (pertentangan)

(Dr. William Hendricks, 1998:7-8)

Masing-masing tahapan konflik tentu saja mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jika dilihat dari ciri-ciri dan karakteristik tiga tahapan konflik tersebut,

maka konflik yang terjadi di Kraton Surakarta sudah mulai memasuki konflik tahap kedua. Seperti yang juga dijelaskan, konflik tahap kedua ini diterima sebagai unsur kompetisi, ditandai dengan sikap kalah menang. Bagian yang penting dari konflik ini adalah adanya kepentingan pribadi dan cara seseorang melihat yang ikut mempengaruhi. Selain itu pada tahap kedua ini, sikap seseorang yang tersembunyi juga ikut diamati. Dengan karakteristik tersebut, maka sudah jelas jika masalah yang ada pada konflik tahap kedua ini semakin kompleks.

Pada tahapan ini, kelompok yang terlibat cenderung menilai pihaknya lebih bijak jika dibandingkan dengan pihak lawan. Fakta yang muncul di lapangan selama konflik Kraton Surakarta, juga mengarah pada mulai munculnya konflik tahap yang kedua. Karakteristik konflik tahap kedua yang dominan muncul dalam konflik Kraton Surakarta adalah kepentingan pribadi yang banyak bermunculan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 berikut :

*“Hmm, begini e.. karena saya itu melihat juga ini sudah tidak disalahkan dari sisi orangnya sendiri kan, misalnya keluarganya e.. Gusti Mung dalam satu ibu dengan keluarganya Tedjowulan yang satu ibu. Karena juga ada pengaruh media. Jadi bagaimanapun juga media memberi ruang untuk apa namanya berkembangnya konflik itu. Dan tidak hanya memberi ruang, tapi juga e.. memberi stimulus bagi berkembangnya konflik. Nah e.. di lain pihak SDM-nya sendiri e.. memang ada potensi konflik yang besar di masa lalu ya. Lalu yang kedua, itu saja kadang tidak menyadari bahwa e.. terbawa oleh sebuah apa namanya ruang tadi, terbawa ke dalam ruang yang itu. Sehingga kemudian yang saya sangka kemudian konflik itu tidak bicara pada angger-angger tapi bumbunya kemudian bergeser pada konflik keluarga ya. Nah ketika konflik keluarga terjadi kemudian tereduksi lagi menjadi konflik antar pribadi-pribadi dalam keluarga gitu. Ini yang kemudian menjadi e..saya tidak bisa, Humas terutama itu akan sangat sulit berperan karena tidak bisa kita masuk ke pribadinya, begitu. E.. dalam konteks misalnya permasalahan antara keluarga Gusti Mung dalam arti adik-adiknya Sinuhun, dan kemudian e.. Tedjowulan dan adik-adiknya. Itu kemudian muncul statement-statement*

*yang itu sangat pribadi, yang sebetulnya tidak terkait dengan kehumasan. Nah mestinya kalau bicara kehumasan ya sudah ini angger-angger. Kalau angger-angger sudah, udah tidak ada alasan lain lagi.*

Dari pernyataan Informan 4 diatas, dapat dilihat bahwa kepentingan pribadi menjadi dominan dalam konflik ini. Bahkan hal tersebut menjadi sesuatu yang memancing statement-statement yang sudah tidak bisa lagi dihubungkan dengan ranah kehumasan.

Selain mulai munculnya kepentingan pribadi, cara pandang seseorang dalam melihat masalah juga menjadi penting pada konflik tahap kedua ini. Seperti yang terjadi pada konflik Kraton Surakarta, cara pandang yang berbeda diantara kedua pihak yang berseberangan membuat masalah yang ada semakin besar dan berkembang.

Sudah menjadi fakta yang diketahui oleh banyak kalangan, jika pihak PB XIII Hangabehi menganggap bahwa kondisi yang sedang terjadi saat ini bukanlah konflik, melainkan sesuatu yang wajar dan sudah berjalan sesuai dengan angger-angger. Jadi bukan hal yang harus dipermasalahkan. Sementara pihak PB XIII Tedjowulan menganggap kondisi yang sedang terjadi saat ini adalah konflik yang harus dicari pemecahannya dan tidak bisa hanya bersembunyi di balik kata “angger-angger”.

Pihak PB XIII Hangabehi pun selama ini cenderung mengeluarkan statement yang menolak jika dikatakan di Kraton terjadi konflik. Seperti pernyataan Informan 3 berikut ini :

*“Itu, itu jangan dibilang itu konfliknya Kraton ya. Itu wong edan sing ora ngerti nggone begitu. Lha iya no? Dia bukan konflik dengan Kraton, wong*

*Kraton itu aturannya seperti itu kok. Dia aja yang nggak mau mengikuti aturan Kraton.”*

Dengan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti itu, konflik Kraton Surakarta ini sudah menunjukkan karakteristik munculnya konflik tahap kedua. Perbedaan kedua pihak dalam melihat permasalahan ini, menjadikan konflik semakin besar. Pihak PB XIII Hangabehi memegang angger-angger sebagai prinsip yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga tidak perlu dipermasalahkan siapa yang menjabat asalkan sesuai angger-angger. Sementara pihak PB XIII Tedjowulan dan pendukungnya menganggap yang menjabat haruslah seseorang yang capable atau mampu menjawab perkembangan zaman karena Kraton hidup di masa sekarang, walaupun itu berarti tidak sesuai dengan angger-angger dan aturan adat.

Seperti yang dijelaskan Informan 4 berikut tentang pandangan angger-angger melawan pandangan modern yang menginginkan pembaharuan di Kraton.

*“Tidak ada alasan you capable atau tidak, you mampu atau tidak. Yang terjadi kalau capable seperti apa, kalau tidak capable ada inovasi apa di dalam lembaga adat gitu lho. Harusnya begitu, gitu lho. Jadi e.. kemarin kan kemudian bergeser, bergesernya itu yang mampu yang mana gitu, yang pantes yang mana gitu. Kalau adat kan tidak bilang begitu. Adat yo wis putra tertua, kalau tidak ada yang dari permaisuri, laki-laki dari permaisuri, yo dah putra tertua. Nah urut-urutannya waktu itu KGPH Hangabehi ya sudah itu yang dijadikan raja, selesai. Nah sekarang permasalahannya kalau itu dianggap mampu atau tidak dsbnya kemudian derivatifnya seperti apa? Mestinya begitu kalau bicara Humas Kraton. Tapi ini kan sudah bergeser, yang terjadi kan perang seperti itu kan?...”*

Sementara pandangan modern menginginkan adanya perubahan dalam Kraton yang seharusnya bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 7 berikut :

*“Malah langsung. Justru pendukung-pendukungnya yang di belakang latar itu yang justru menolak dan menganggap saya tidak sejalan. Sebenarnya kita pernah mengusulkan pada saat itu, karena dari ibu enam. Kalau waton memang Hangabehi, terus apa salahnya Tedjowulan pada waktu itu diangkat sebagai adipati anom. Wong kenyataan adipati anom yang sudah itu juga belum tentu jadi raja. Terus dari ibu yang lain ini menempatkan posisi pos pengageng masing-masing. Itu saran yang pernah saya lontarkan pada tahun 2004.”*

Karakteristik konflik tahap kedua yang terjadi di dalam konflik perebutan kekuasaan 2 raja ini juga tercermin dari semakin kompleksnya masalah. Permasalahan yang awalnya “hanyalah” seputar perebutan kekuasaan antara pihak 2 raja, dari hari ke hari ternyata melebar hingga kemana-mana. Konflik ini semakin melebar hingga ke ranah luar Kraton, sehingga pihak yang merasa terganggu dan dirugikan juga semakin banyak. Tidak hanya dari kalangan internal Kraton tetapi juga masyarakat ikut menanggung akibat yang kurang menyenangkan akibat semakin melebarnya konflik tersebut.

Bukti yang menguatkan semakin melebarnya konflik ini adalah banyaknya statement yang bermunculan di media massa lokal Solo maupun media massa Nasional antara tahun 2004-2008. Statement-statement tersebut, ada yang benar-benar masih berada dalam koridor kehumasan, tetapi juga tidak sedikit yang berada di luar koridor kehumasan. Yang menarik, sebagian besar statement yang dikeluarkan oleh pihak PB XIII Hangabehi bukanlah statement yang dikeluarkan oleh Petugas Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi. Lain halnya dengan statement dari pihak PB XIII Tedjowulan yang memang hampir keseluruhan merupakan statement

yang dikeluarkan oleh Petugas Humasnya. Terkait fenomena ini akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan selanjutnya.

Sesuai dengan karakteristik konflik tahap kedua yang melebar, konflik 2 raja inipun juga melebar ke permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Yang juga menarik dari fakta ini adalah, pihak-pihak luar yang sedang mengalami masalah, seakan-akan memihak salah satu raja untuk mencari dukungan agar permasalahan mereka bisa diselesaikan. Humas kedua raja pun, baik dari pihak PB XIII Hangabehi maupun PB XIII Tedjowulan, juga menjadi tertarik untuk memberikan statement terkait permasalahan yang sebenarnya bisa dikatakan tidak sejalan dengan fungsi kehumasan mereka sebagai Humas Kraton.

Permasalahan yang seringkali ikut terseret arus konflik perebutan kekuasaan tersebut antara lain persoalan Pasar Cinderamata, dalam persoalan ini salah satu himpunan pedagang yang ada meminta dukungan kepada PB XIII Tedjowulan. Selain itu, ada juga persoalan sertifikat hak tanah yang ada di Baluwarti. Dalam persoalan ini, beberapa warga Baluwarti merasa tidak setuju dengan keputusan Kraton Surakarta yang memungut pajak pasiten atas tanah yang mereka tinggali. Selain itu, Humas Kraton Surakarta dari kedua pihak raja juga ikut mengeluarkan statement seputar permasalahan Museum Radya Pustaka. Tidak hanya persoalan yang ada di local Solo, persoalan penyelenggaraan Festival Kraton Nasional (FKN) tahun 2006 juga tidak luput terseret arus konflik perebutan kekuasaan dua raja ini. Hingga persoalan yang paling baru yaitu permasalahan senjata stengun dan dana warisan.



Fakta-fakta yang ada di lapangan semakin membuktikan bahwa adanya konflik dua raja ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Karena seperti yang diungkapkan oleh Dr. William Hendric, bahwa pada konflik tahap kedua ini orang adalah masalah. Sehingga yang menjadi tantangan bagi mereka yang berkuat di dalam konflik adalah bagaimana me-manage orang tersebut.

## **B. Analisis Peranan Humas Kraton Surakarta**

### **1. Empat kategori peranan Humas dalam organisasi**

Menurut Dozier & Broom peranan Public Relation dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu :

#### **1. Penasehat Ahli (Expert Prescriber)**

Seorang praktisi PR yang sudah berpengalaman dan mempunyai kemampuan yang tinggi dapat membantu menyelesaikan masalah yang timbul dan berkaitan dengan publik suatu organisasi. Dalam hal ini, pihak management bersifat pasif, artinya tinggal menerima, mempercayai dan menjalankan apa yang sudah diusulkan oleh penasehat ahli tersebut untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

#### **2. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator)**

Dalam hal ini, PR bertindak sebagai seorang mediator yang membantu pihak manajemen mengetahui apa yang diinginkan publiknya sekaligus juga bisa bertindak yang sebaliknya, yaitu untuk bisa menjelaskan tujuan dari pihak manajemen kepada publiknya, agar tercipta saling pengertian antara kedua belah pihak.

### 3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator)

Dalam proses pemecahan masalah, praktisi PR adalah bagian dari tim manajemen, yang bertugas untuk membantu pimpinan, baik sebagai penasehat hingga proses pengambilan keputusan. Biasanya dalam menghadapi krisis yang menimpa suatu perusahaan atau organisasi, akan dibentuk suatu tim yang dikoordinir oleh praktisi PR yang melibatkan berbagai departemen dan berbagai keahlian.

### 4. Teknisi Komunikasi (Communication Technician)

Peranan PR sebagai teknisi komunikasi ini berbeda dengan tiga peranan lainnya. Peranan ini hanya menjadikan PR sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi.

(Rosady Ruslan, 1999:13)

Dengan menggunakan penjelasan dari Dozier & Broom diatas tentang pengkategorian peranan PR atau Humas dalam suatu organisasi, Peneliti mencoba menerapkannya untuk melihat bagaimana peranan Humas Kraton Surakarta, baik pihak PB XIII Hangabehi maupun PB XIII Tedjowulan, dijalankan selama ini.

Dibawah ini tabel tentang peranan Humas Kraton Surakarta, yang akan Peneliti coba analisis dengan penjelasan Dozier & Broom berdasarkan wawancara dengan narasumber dan hasil pengamatan di lapangan. Tanda (+) berarti peranan tersebut dijalankan pada lembaga kehumasan yang bersangkutan, sedangkan tanda (-) berarti peranan tersebut tidak dijalankan atau kurang dijalankan pada lembaga kehumasan yang bersangkutan.

Kategori peranan PR dalam organisasi	Humas Kraton Surakarta	
	PB XIII Hangabehi	PB XIII Tedjowulan
Penasehat Ahli (Expert Prescriber)	-	+
Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator)	+	+
Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator)	-	+
Teknisi Komunikasi (Communication Technician)	+	+

Gambar 4. 1

(Tabel Kategori Peranan Humas)

Tabel diatas menunjukkan bagaimana Humas Kraton Surakarta, dari kedua pihak raja menjalankan peranannya di dalam struktur organisasi Kraton. Peranan yang pertama yaitu sebagai Penasehat Ahli (Expert Prescriber), penjelasannya :

- **Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi**

Dari tabel diatas untuk peranan yang pertama ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh Peneliti, Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi, mendapatkan tanda (-) yang berarti peranan tersebut tidak dijalankan atau kurang dijalankan. Terkait dengan peranan ini, fakta yang berhasil diperoleh Peneliti menunjukkan bahwa Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi memang tidak berperan secara aktif terkait konflik perebutan kekuasaan antara 2 raja ini. Keadaan tersebut dipicu oleh alasan tertentu yang membuat Humas

Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi tidak bisa berperan aktif. Diantara alasan tersebut adalah kesibukan Petugas Humas yang lebih banyak tersita oleh kegiatan di luar konflik Kraton dan juga akibat dari konflik yang semakin melebar ke masalah keluarga serta melibatkan individu yang lebih intens. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 3 berikut :

*“E.. Begini memang e.. itu juga salah satu alasan mengapa kami tidak terlalu aktif. Itu karena saya masih bekerja disini jadi saya tidak mempunyai cukup waktu untuk involve secara penuh waktu disana. Dan itu menyebabkan memang kontribusi saya sangat sedikit... Humas terutama itu akan sangat sulit berperan karena tidak bisa kita masuk ke pribadinya, begitu. E.. dalam konteks misalnya permasalahan antara keluarga Gusti Mung dalam arti adik-adiknya Sinuhun, dan kemudian e.. Tedjowulan dan adik-adiknya. Itu kemudian muncul statement-statement yang itu sangat pribadi, yang sebetulnya tidak terkait dengan kehumasan...”*

Selain itu, juga ada faktor tugas dan peranan “turunan” dari Humas atau Juru Penerang Kraton yang terdahulu. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 5 berikut :

*“Ya yang penting memberikan penjelasan tentang keberadaan Kraton. Mungkin melayani siapapun yang datang meminta penjelasan tentang keberadaan Kraton gitu. Penjelasan tentang bangunan-bangunan, tentang sejarah Kraton secara singkat dan lain sebagainya... Kami mengarahkan kesana. Itu fungsinya seperti itu sebenarnya.”*

Mengenai faktor tugas dan peranan “turunan” ini, Informan 4 juga memberikan penjelasan seperti berikut :

*“He'em, tidak diberdayakan. Karena itu memang turunan dari dulu. Jadi Humas itu ya mung di-nggo wong sing nerangke yen ono wong takon tentang gunung itu apa. Jadi masih tradisional.”*

Selain berdasarkan wawancara dengan narasumber, pengamatan yang dilakukan selama proses penelitian juga memberikan fakta bahwa peranan Humas sebagai Penasehat Ahli dalam kaitannya dengan konflik ini ternyata memang sudah

dilakukan oleh pihak kerabat Kraton Surakarta yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 7 berikut :

*“...Lebih dominan para pengagengnya daripada Humas. Malah disini saya tahu persis Humas yang, Humasnya pihak yang dalam ini malah mengeluh. Artinya tidak difungsikan. Jadi lebih dominant kepada pengagengnya-pengagengnya.”*

Kurang berperan dan difungsikannya Humas dalam peranannya sebagai Penasehat Ahli dalam konflik ini, bisa jadi sebagai imbas dari semakin berkembangnya konflik ke arah konflik individu dan keluarga. Jika Humas ikut berperan aktif, yang dikhawatirkan adalah akan munculnya anggapan bahwa Humas tersebut adalah juru bicara-nya mereka yang berkonflik dan kemungkinan akan munculnya statement dari Humas sendiri yang keluar dari fungsi kehumasan akan semakin besar jika Humas benar-benar berperan aktif sebagai Penasehat Ahli.

- **Humas Kraton Surakarta PB XIII Tedjowulan**

Dari tabel diatas untuk peranan yang pertama ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh Peneliti, Humas Kraton Surakarta PB XIII Tedjowulan mendapatkan tanda (+) yang berarti peranan tersebut sudah dijalankan, walaupun juga belum bisa dikatakan maksimal.

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, Humas memang dibentuk untuk mengatasi konflik ini. Dilihat dari alasan dibentuknya Lembaga Kehumasan yang memang dari awal diposisikan sebagai pihak yang bisa me-manage konflik sekaligus me-manage pencitraan yang positif bagi keberadaan PB XIII Tedjowulan sebagai raja diluar tembok Kraton. Sehingga siap atau tidak siap, Humas memang

harus menjalankan peranan sebagai Penasehat Ahli dengan baik, karena di tangan Humas-lah, PB XIII Tedjowulan menyerahkan pencitraan diri beliau sekaligus upaya penyelesaian konflik. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 1 berikut :

*“...bahwa bicara konflik maka bicara manajemen konflik. Maka tugas saya sebagai PR adalah bagaimana me-manage konflik itu dengan sebaik-baiknya, tentu untuk kepentingan kelompok kami gitu ya, tidak bisa tidak. Tapi sebetulnya tidak berpikir pada kelompok kami, bagaimana ke-PR-an yang kami munculkan itu bisa memberi pengaruh yang positif bagi masyarakat juga. Jadi selama ini kita mencoba untuk mengkonsep bagaimana gerak langkah Kraton yang ada di luar, atau raja yang ada di luar Kraton ini itu memberi nilai yang positif... Jadi yang pasti kan kita berusaha untuk memberikan pencitraan yang positif kepada masyarakat terhadap peranan atau keberadaan raja yang di luar. Banyak lah yang bisa kita lakukan, salah satu diantaranya, sebetulnya konsep ini munculnya dari Sinuhun sendiri, PB XIII Tedjowulan, bagaimana Kraton ke depan itu mampu menjawab semua permasalahan dan tantangan di masyarakat. Lha ini yang kami sebagai PR itu mengolah keinginan dari PB XIII Tedjowulan...”*

Fakta yang berhasil dikumpulkan Peneliti di lapangan memang menunjukkan bahwa Humas sudah cukup menjalankan peranannya sebagai Penasehat Ahli pada khususnya dan sebagai PR pada umumnya. Dapat dilihat dari usaha Humas yang selalu berusaha mengkonsep pencitraan positif bagi PB XIII Tedjowulan, mulai dari press release kegiatan PB XIII Tedjowulan hingga evaluasi bagaimana seharusnya PB XIII Tedjowulan bersikap di hadapan publik. Namun, terkadang apa yang dilakukan Humas juga keluar dari koridor kehumasan, sehingga terkadang lebih condong menjadi juru bicara-nya orang yang sedang berkonflik bukan Humas Kraton. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 7 berikut :

*“...Karena gini e.. kapasitas Humas ini sebagai juru penerang budaya apa kehumasannya? Menyuarakan kraton? Karena ini tidak jelas... Yang di luar pun sebatas kalau itu ada kegiatan. Ya misalnya menjelang kegiatan apa, Humas baru menyampaikan. Kalau tidak ya udah, vakum.”*

Peranan yang kedua adalah PR sebagai Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator), penjelasannya :

- **Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi**

Dari tabel diatas untuk peranan yang kedua ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh Peneliti, Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi, mendapatkan tanda (+) yang berarti peranan tersebut sudah dijalankan.

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa peranan yang kedua ini memang bisa relatif berjalan, walaupun sebagian besar secara teknis tidak dilakukan oleh Humas. Walaupun pihak PB XIII Hangabehi tidak mau mengakui kondisi konflik, tetapi kerabat Kraton khususnya para Pengageng di Kraton, tetap berusaha untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana yang sebenarnya terjadi dan apa yang benar menurut adat dan angger-angger.

Peranan sebagai mediator, dijalankan dengan usaha menerbitkan buku yang diterbitkan khusus untuk kalangan internal Kraton, baik Sentana Dalem ataupun Abdi Dalem. Buku yang berjudul *“Yang Sah & Yang Resmi Susuhunan Paku Buwono XIII”* tersebut menjadi alat bagi pihak PB XIII Hangabehi untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar konflik perebutan kekuasaan 2 raja tersebut. Sehingga walaupun tidak mengakui konflik, pihak PB XIII Hangabehi tetap merasa perlu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 3 berikut :

*“Ya sebetulnya begini, kalau itu kan jelas. Jadi apa yang sudah berjalan e.. mulai ada Sinuhun baru tahun 2004 itu kan karena terjadi permasalahan yang memerlukan penerangan yang sejelas-jelasnya dari Kraton kepada*

*masyarakat tentang apa yang terjadi dan tentang apa yang harus di e.. dilakukan oleh lembaga Kraton ini sendiri kan akhirnya kan kita butuh untuk menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada di dalam Kraton ngaten... Lha ini bentuk sebetulnya juga e.. pertanggungjawaban lembaga ini khususnya memberi penerangan kepada kekerabatan kita sendiri dan kepada pihak lain itu karena kita sampaikan kepada ulang tahun kenaikan tahta raja itu kepada tamu undangan, yang notabenenya adalah masyarakat umum gitu.”*

Hal menarik adalah, walaupun fungsi ini berjalan tetap saja bukan Humas yang berperan besar dan dominan. Peranan seperti ini dijalankan oleh Pengageng dan juga Sasana Wilapa secara umum, karena memang selama ini Humas berada di bawah struktur lembaga Sasana Wilapa.

- **Humas Kraton Surakarta XIII Tedjowulan**

Dari tabel diatas untuk peranan yang kedua ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh Peneliti, Humas Kraton Surakarta PB XIII Tedjowulan, juga mendapatkan tanda (+) yang berarti peranan tersebut sudah dijalankan.

Pihak manajemen dalam hal ini adalah PB XIII Tedjowulan pribadi yang memerlukan keterangan dari Humas bagaimana sebaiknya bertindak untuk menciptakan image positif di mata publik. Sebaliknya Humas juga bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi pihak luar yang memang menawarkan diri untuk membantu penyelesaian konflik ini. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 berikut :

*“...bulan-bulan sekitar Juni, saya malah dipanggil langsung oleh pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden. Jadi, apa namanya, tentu salah satu peran Humas itu adalah menjaga hubungan atau menjalin relasi dengan semua pihak ya, semua unsur ya.”*



Humas juga berperan sebagai mediator ketika PB XIII Tedjowulan merasa perlu untuk ikut memberikan kontribusinya pada berbagai masalah yang timbul yang menyangkut Kraton, kebudayaan, dan masyarakat. Seperti pada kasus Pasar Cinderamata dan Radya Pustaka. Karena seperti yang dijelaskan oleh Informan 1 bahwa Humas ingin memperlihatkan keunggulan PB XIII Tedjowulan, serta mendorong agar PB XIII Tedjowulan untuk berperan aktif di masyarakat. Seperti penjelasan Informan 1 berikut :

*“Ya budaya. Ya karena memang kraton kan budaya. Tapi budaya itu kan sekarang luas ya. Tidak hanya bicara tarian ya, tapi juga masalah kehidupan. Ya termasuk system, system kemasyarakatan itu kan bagian dari budaya. System pemerintahan juga budaya, system politik juga budaya. Pernah mendengar negoro mowo tata, deso mowo cara. Ini kan sebetulnya menjadi focus kita...”*

Upaya-upaya yang dilakukan Humas terkait peranannya sebagai fasilitator komunikasi membuat Humas mencanangkan program kerja yang memungkinkan PB XIII Tedjowulan berinteraksi dengan banyak pihak untuk tetap mempertahankan citra positifnya. Seperti penjelasan Informan 1 berikut :

*“Ya, setidaknya-tidaknya keterwakilan ya. Jadi keterwakilan itu kita masih berusaha untuk menangkap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, memang kita coba tangkap. Contoh ketika keprihatinan masalah hilangnya arca-arca Museum Radya Pustaka ya, kita mencoba untuk tanggap. Ikut serta secara tidak langsung, ini sebetulnya bagian dari program kerja. E... untuk mengembalikan barang-barang yang hilang itu, apa namanya di Museum Radya Pustaka dan bagaimana membangun image terhadap museum itu menjadi lebih baik. Kan sekarang ini lagi terpuruk. Salah satu diantaranya. Dan sebetulnya masih banyak lagi persoalan-persoalan yang kemarin kita masuk secara langsung di tengah-tengah masyarakat.”*

Dengan program kerja yang seperti itu, diharapkan dapat membuat PB XIII Tedjowulan semakin dekat dengan publiknya sekaligus dapat menampilkan pencitraan yang positif terhadap diri raja di luar Kraton tersebut di mata masyarakat Solo pada khususnya.

Peranan yang ketiga adalah sebagai Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator), penjelasannya :

- **Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi**

Dari tabel diatas untuk peranan yang ketiga ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh Peneliti, Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi, mendapatkan tanda (-) yang berarti peranan tersebut tidak dijalankan atau kurang dijalankan. Terkait dengan konflik ini dan dihubungkan dengan peranan PR yang ketiga sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, yang secara jelas menyebutkan bahwa dalam peranan ini, Humas adalah bagian dari tim yang bertugas untuk menghadapi krisis serta turut dalam proses pengambilan keputusan, maka dapat dilihat bahwa Humas tidak berhasil menjalankan peranannya dengan maksimal.

Seperti yang diungkapkan Informan 4, Humas tidak diberdayakan untuk hal-hal semacam ini. Segala macam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan konflik tidak melibatkan Humas di dalamnya. Humas hanya difungsikan dalam artian teknis, yang hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan. Berikut pernyataan Informan 4 :

*“Kalau Kraton menjalankan e.. apa namanya menjalin kerjasama dengan lembaga lain, iya. Banyak sekali, tetapi dalam konteks Humas itu*

*diberdayakan ikut di dalam apa namanya negoisasi, ikut dalam e.. pembuatan kontrak, ikut dalam pengambilan keputusan itu tidak.”*

Jika berbicara mengenai tim yang bertugas untuk menghadapi konflik ini, Humas ataupun Pengageng yang menjalankan peran Humas di dalam Kraton juga tidak membentuk tim khusus, karena kembali lagi ke awal pemikiran pihak PB XIII Hangabehi yang sejak awal tidak mengakui adanya konflik. Sehingga untuk menghadapi konflik ini hanya menekankan pada kerja individu-individu kerabat Kraton.

- **Humas Kraton Surakarta PB XIII Tedjowulan**

Dari tabel diatas untuk peranan yang ketiga ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh Peneliti, Humas Kraton Surakarta PB XIII Tedjowulan mendapatkan tanda (+) yang berarti peranan tersebut sudah dijalankan, walaupun juga belum bisa dikatakan maksimal.

Melihat maksud dan tujuan awal dibentuknya Humas oleh PB XIII Tedjowulan, maka sudah jelas peranan ketiga ini juga termasuk salah satu diantara program kerja yang dibuat oleh Humas. Yang perlu diketahui, Humas PB XIII Tedjowulan sebenarnya ada dua. Yang pertama memang ditempatkan di Surakarta, untuk me-manage konflik dan kondisi di Surakarta. Sedangkan yang kedua ditempatkan di Jakarta, sebagai penyeimbang mobilitas PB XIII Tedjowulan sekaligus difungsikan sebagai penghubung Kraton dengan kerabat-nya yang ada di Jakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 2 berikut :

*“Nah kemudian pada tahun 2005, karena sesuai dengan e.. apa.. aksesibilitasnya dari PB XIII Tedjowulan itu semakin e.. berkembang untuk*

*mempertahankan eksistensinya maka dibuat dua e.. lokasi yang pertama ada di Jakarta dan di Solo... Di Solo dijabat oleh KRHT Bambang Pradotonagoro, SH yang itu memfungsikan Humas secara definitif untuk Solo dan definitif untuk Jakarta dipegang oleh GPH Suryowicaksono. Keduanya melakukan koordinasi dalam bidang kehumasan yang fungsi dan tugasnya sama e.. untuk apa kegiatan-kegiatan menjaga eksistensi dan citra PB XIII Tedjowulan...”*

Humas yang berada di Solo pun, bertindak sebagai penasehat. Walaupun untuk proses pengambilan keputusan juga tidak bisa sepenuhnya di-jalankan oleh Humas, karena bagaimanapun Kraton tetaplah lembaga adat yang masih menggunakan sistem kepemimpinan yang tradisional. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 1 berikut :

*“Ini perbedaannya antara PR sebuah instansi dengan PR di Kraton... Apalagi di tempat kami, bagaimanapun juga akar budaya masih kuat, bahwa yang namanya raja itu sabda pandita ratu tan keno wola-wali, apa yang sudah diucapkan oleh raja itu adalah sebuah sabda yang harus dilakukan, hukumnya wajib. Nah ini yang membedakan mbak, walaupun sekarang sudah nggak seperti itu lagi, kita nggak mungkin seperti itu ‘harus ikut apa yang kita konsep’. Tentu apa yang kita konsepkan, apa yang persiapkan, kita rancang itu harus kita komunikasikan. Ketika kita komunikasikan, itu kan kita mencoba menyesuaikan juga sehingga unsur keselarasan dan keharmonisan itu yang kita kedepankan. Raja maunya apa, kita punya apa. Bisa ngga ini dipadukan, kalau ndak bisa, ya bisa kita mengalah atau mungkin kita bisa memberi masukan. Maka disini manajemen modern kita pakai juga.”*

Dari data dan fakta yang ada, Humas memang memegang peranan sentral di dalam konsep pemerintahan yang digunakan oleh PB XIII Tedjowulan. Karena alasan utama awal pembentukan Humas yang memang difokuskan untuk me-manage konflik ini, sehingga walaupun peranan yang ketiga ini juga belum dapat berjalan maksimal tetapi paling tidak Humas masih memegang kendali atas arus informasi

yang berkaitan dengan konflik dan eksistensi PB XIII Tedjowulan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 berikut :

*“...Alasannya dibentuk kehumasan itu karena untuk memberikan informasi, untuk menjalin hubungan komunikasi dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan konsolidasi secara internal di pihak PB XIII Tedjowulan agar dapat memberikan satu citra bahwa eksistensi PB XIII Tedjowulan itu didukung oleh 3 Lembaga Pengageng. Yaitu, Pengageng Putra Sentana, Pengageng Parentah Kraton dan Pengageng Keputren. Sehingga fungsi Humas disini itu memberikan justifikasi terutama terhadap eksistensi PB XIII Tedjowulan sebagai raja yang dinobatkan di luar tembok Kraton. Sehingga fungsi Humas disini sangat sentral sekali.”*

Peranan yang keempat adalah sebagai Teknisi Komunikasi (Communication Technician), penjelasannya :

- **Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi**

Dari tabel diatas untuk peranan yang keempat ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh Peneliti, Humas Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi, mendapatkan tanda (+) yang berarti peranan tersebut sudah dijalankan.

Selama ini, mulai sebelum Humas secara resmi dilembagakan hingga sekarang pada masa PB XIII Hangabehi yang sudah resmi dilembagakan, tugas utama yang selalu dijalankan oleh Humas memang sebagai teknisi komunikasi yang bertugas untuk memberikan penerangan dan layanan kepada masyarakat seputar Kraton dan budaya-nya. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 berikut :

*“Ya tadi sebagai juru penerang. Kadang-kadang di Kraton diundang untuk memberikan penerangan dimana-mana. Seminar dimana gitu. Ya seperti itu, sekedar kebudayaan seperti itu.”*

Seperti Humas di lembaga yang lain pada umumnya, peranan sebagai teknisi komunikasi sebenarnya juga meliputi kegiatan Humas untuk mengkliping atau mendokumentasikan kegiatan Kraton atau berita seputar Kraton. Tetapi hingga saat ini yang menjalankan peran tersebut bukan Humas, tetapi Badan Pengelola Kraton dan beberapa kerabat Kraton yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 4 berikut :

*“Dulu fungsi dokumentasi itu biasanya dilakukan oleh Sasana Pustaka, perpustakaan Kraton. Tapi kenyataannya yang mendokumentasikan Kraton ini adalah Kantor Badan Pengelola Kraton, ya. Jadi sekarang ini Humas Kraton tidak melakukan fungsi kliping koran dsbnya itu. Karena fungsi itu ada sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Kraton... Jadi itu dilakukan sendiri oleh Kantor Badan Pengelola Kraton atau orang yang disitu. Gusti Mung dan Mas Edi Wirabumi sebagai salah satu pengurus atau ketua di Badan Pengelola Kraton itu.”*

Jadi memang sudah jelas kenyataannya, bahwa kegiatan mendokumentasikan Kraton dan mengkliping berita seputar Kraton ternyata memang tidak dijalankan oleh Humas, karena sejak dulu memang sudah di pegang oleh Badan Pengelola Kraton beserta Pengageng-nya. Selain itu, peranan sebagai journalist in resident yang menyediakan layanan teknis, semestinya juga termasuk memberikan keterangan kepada pers ataupun juga mengirimkan press release, tetapi sekali lagi fungsi tersebut juga kurang optimal dijalankan oleh Humas jika terkait dengan konflik. Penyebabnya sekali lagi adalah karena konflik ini semakin melebar ke ranah individu yang sangat pribadi. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 4 bahwa pihaknya tidak ingin ada kesimpangsiuran informasi, berikut ini :

*“...memang sampai sini barangkali masyarakat belum bisa mengharapkan peran optimal ini seprti humas-humas lembaga lain ya. Karena memang*

*situasinya seperti ini, e.. kami juga tidak ingin meng-share informasi yang justru sebetulnya menambah runyam suasana, begitu. Meng-asimetris informasi. Jadi e.. barangkali agar supaya kita membantu e.. apa namanya segera ada cooling down, syukur-syukur ada solusi begitu.”*

Informan 5 juga menambahkan bahwa semua statement keluar yang berkaitan dengan konflik ini, sebelumnya dibicarakan dulu di tingkat Pengageng, baru kemudian dikeluarkan ke publik atas nama Sasana Wilapa. Seperti yang dijelaskan Informan 6 berikut :

*“E.. Statement-statement ke media ini e.. apa namanya dari secretariat bisa, dari Humas juga bisa. Jadi memberi satu apa namanya pemahaman untuk.. kalau Humas itu pun harus ada apa namanya instruksi dari berbagai elemen yang ada... Untuk memberikan statement gitu lho. Memang juru bicara-nya bisa Humas. Kalau Humasnya baru repot bisa secretariat. Nah mereka kan biasanya minta tahu dari beberapa putro dhalem atau kepala birokrasi yang bermasalah itu untuk memberikan masukan untuk nanti statement-nya disampaikan...”*

- **Humas Kraton Surakarta PB XIII Tedjowulan**

Dari tabel diatas untuk peranan yang keempat ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh Peneliti, Humas Kraton Surakarta PB XIII Tedjowulan mendapatkan tanda (+) yang berarti peranan tersebut sudah dijalankan.

Humas PB XIII Tedjowulan menerapkan prinsip manajemen konflik untuk menghadapi konflik ini, sehingga peran sebagai journalist in residence memang benar-benar diterapkan, seperti tugas untuk mendokumentasikan kegiatan dan berita seputar Kraton dan konflik, serta tugas untuk membuat press release maupun

mengeluarkan statement ke media massa. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 berikut :

*“Yang pasti kami pasti mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan Kraton, baik dalam bentuk foto, kliping, ataupun film ya. Itu pasti. Karena itu, satu memang bagian dari tugas Humas, kedua juga untuk evaluasi. Jadi kita mencoba untuk melakukan evaluasi-evaluasi apalagi dengan, hmm... bagian dari manajemen konflik. Makanya fungsi dokumentasi semua kegiatan itu menjadi perlu.”*

Terkait dengan tugas untuk memberikan statement ke media massa, walaupun memang tugas pokok Humas, tetapi terkadang Humas juga memberikan kesempatan kepada kerabat Kraton yang lain untuk berbicara sesuai dengan kapabilitasnya. Sepanjang konflik berlangsung, yang sering dilihat di media massa adalah munculnya statement-statement dari Humas yang banyak memberikan komentar seputar permasalahan yang sedang menghangat di kota Solo, menurut Humas hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa PB XIII Tedjowulan adalah individu yang peduli terhadap eksistensi kebudayaan kota Solo. Tetapi hal tersebut dipandang berbeda oleh Informan 7 yang menyatakan bahwa statement tersebut keluar dari koridor kehumasan. Seperti kutipan berikut :

*“Lebih banyak e.. diam tapi nimbrung. Artinya gini, dia tidak mengikuti pergolakannya atau memberikan solusi, tetapi lebih kepada nimbrung permasalahan. Ya seperti memberi lontaran-lontaran yang kurang membuat kritik yang membangun.”*

## **2. Ke-khas-an dalam Lembaga Humas Kraton dan Peranannya**

Kraton adalah lembaga adat yang mempunyai sistem organisasi dan kepemimpinan yang berbeda dengan lembaga dan organisasi yang lain. Sehingga



dengan demikian Lembaga Humas yang dimilikinya pun mempunyai struktur serta peranan yang berbeda pula. Berdasarkan data dan fakta yang berhasil dikumpulkan oleh Peneliti, Humas Kraton Surakarta mempunyai beberapa ciri khas yang menarik dan membedakannya dengan Humas pada lembaga lain.

Fakta menarik seputar Humas Kraton yang pertama adalah mengenai mekanisme pengangkatan Petugas Humas Kraton tersebut. Jika di lembaga lain, seorang Humas atau PRO diangkat berdasarkan sistem kerja yang modern, dengan kata lain sesuai kinerja, prestasi, usia, dan melalui proses promosi jabatan atau rekrutmen, di dalam Kraton, Humas diangkat berdasarkan keinginan raja atau *sabda pandita ratu*. Jadi, tidak ada alasan khusus atau kriteria khusus untuk bisa menjadi Humas. Tentu saja yang terpenting adalah orang itu harus benar-benar paham dan mengerti kehidupan serta filosofi Kraton. Namun, ada juga Juru Penerang (sebutan bagi Humas sebelum masa PB XIII Hangabehi) yang diangkat berdasarkan keturunan. Seperti yang dialami oleh Informan 5, beliau diangkat menjadi Juru Penerang untuk menggantikan orangtuanya. Berikut kutipan wawancara dengan Informan 5 :

*“...Jadi memang e.. terus terang yang pertama RT Taryokusumo itu orangtua saya, lha waktu KRMH Yosodipuro meninggal dunia, memang oleh Pengageng Parentah Kraton, dulu Kanjeng Condronegoro, saya dipanggil. Tapi waktu itu saya dipanggil sebagai juru bicara atau MC Kraton, bilanganya gini dulu ‘koe tak tetepke dadi pamiwara Kraton, nggenteni bapakmu’ saya waktu itu juga belum, belum tahu maksudnya apa, tapi sampai sekarang jujur saya dibebani atau dilimpahi tugas sebagai Humas itu...”*

Melihat statement diatas dan kenyataan bahwa raja berhak menunjuk siapa saja untuk menjadi Humas, maka akan timbul satu pertanyaan tentang keabsahan

pengangkatan tersebut. Jika di organisasi modern. Surat Keterangan (SK) atau Surat Pengangkatan menjadi sesuatu yang sangat penting, maka di dalam Kraton keberadaan SK bukanlah sesuatu yang mutlak diperlukan. Bukan berarti tidak penting, hanya saja Kraton dan raja mempunyai cara tersendiri untuk mengangkat seorang pejabat.

*Dawuh dhalem* atau perintah langsung dari raja sudah dianggap sebagai SK yang sah di dalam organisasi lembaga adat seperti Kraton. Hal ini tidak hanya berlaku di Kraton PB XIII Hangabehi tetapi juga berlaku di Kraton PB XIII Tedjowulan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 berikut :

*“...Nah dengan demikian kalau ditanyakan mengenai SK pengangkatannya, di dalam satu struktur dan sistem kekuasaan di Kraton, yang namanya SK itu bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tertulis. Secara tertulis itu sudah ada dalam satu struktur yang di tandatangani langsung oleh Raja. Secara lisan itu juga merupakan dawuh bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugas kehumasan.”*

Informan 1 juga memberikan penjelasan terkait masalah pengangkatan ini, berikut kutipan wawancaranya :

*“...Jadi gini di kelembagaan Kraton ada yang namanya perintah atau dawuh dhalem. Dawuh dhalem itu sudah menjadi SK. Lalu yang kedua secara kelembagaan memang kemudian di Kraton sendiri dibikin e.. lembaga kehumasan, itu ada. Dari dulu belum ada. Baru sekarang ada lembaga kehumasan.”*

Terlepas dari permasalahan kurang diperhitungkannya SK tertulis dalam kelembagaan Kraton, sistem penunjukkan secara lisan seperti itu ternyata juga cukup efektif untuk membuat individu yang ditunjuk agar menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Faktor yang melandasi sikap kepatuhan tersebut adalah

loyalitas terhadap Kraton dan rajanya, serta perasaan tanggung jawab sebagai bagian dari Kraton. Beberapa narasumber mengatakan tidak keberatan, karena apa yang dilakukan memang adalah tugas dari Kraton dan untuk mempertahankan Kraton. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 berikut :

*“...Tapi ini adalah kewajiban. Lha itu adalah bentuk salah satu cara saya untuk apa? Melestarikan dan menjaga kewibawaan Kraton. Itu Kraton itu seperti ini.”*

Perintah seorang raja merupakan hukum wajib yang harus dipatuhi. Demikian juga terkait masalah jabatan yang ada di Kraton. Mekanisme pengangkatan yang khas tersebut, ternyata juga berpengaruh terhadap masa jabatan, ruang lingkup tugas dan struktur kelembagaan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 bahwa masa jabatan seorang Humas tergantung pada kehendak raja. Jadi tidak ada batasan waktu yang tetap seperti pada lembaga modern. Berikut cuplikan wawancara dengan Informan 2 :

*“...Kemudian e..lama menjabatnya ya sampai e.. ada perintah selanjutnya atau ada dawuh berikutnya dari seorang raja untuk melaksanakan e.. jabatannya itu sampai kapan. Jadi tidak ada tenggat waktu bahwa ini harus berhenti dsbnya. Semuanya tergantung dari e.. apa perintah atau kehendak dari Raja itu sendiri.”*

Kehendak raja yang bersifat mutlak juga berlaku pada ruang lingkup tugas Humas yang bersangkutan. Apa yang menjadi pekerjaan atau tanggung jawab Humas tergantung apa yang diminta oleh raja. Dalam kasus ini, Humas PB XIII Tedjowulan juga bisa bertindak sebagai wakil dari raja, jika memang dikehendaki demikian oleh raja. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 2 berikut :

*“...dan mewakili PB XIII Tedjowulan dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang mengundang PB XIII Tedjowulan. Sehingga fungsi Humas disini bukan hanya sebagai fungsi Public Relations tapi juga sebagai protokoler, juga sebagai wakil dari Raja. Semuanya tergantung dari e.. apa perintah dan kehenak raja itu sendiri. Dan sistemnya bisa melalui sekretaris atau berdasarkan e.. perintah langsung kepada pejabat Humas tersebut. Jadi fungsinya sangat luas sekali.”*

Dari keterangan diatas, tampak bahwa memang walaupun sudah berdiri sebagai lembaga yang mempunyai struktur sendiri, namun tetap saja Humas PB XIII Tedjowulan harus menurut terhadap kewenangan raja. Inilah yang terkadang membuat kehadiran Humas PB XIII Tedjowulan, tampak seperti Humas-nya raja dan bukan Humas-nya Kraton. Kondisi inilah yang memancing reaksi dari Informan 4 berikut ini :

*“Nah ini mbak, celakanya lagi kemudian e.. ada Humasnya Gusti Tedjo, ya to? Itu kan juru bicaranya gitu. Tapi kemudian diberi label Humasnya Kraton gitu. Ya bagi saya, bagi dunia luar, ya sah-sah saja, monggo gitu. Tapi dalam konteks kalau ditarik dari sisi kehumasan Kraton ki wis ora gathuk meneh. Kan begitu?... Ora gathuk meneh karena yang diperjuangkan itu kepentingannya Gusti Tedjo. Yang saya perjuangkan bukan kepentingannya keluarganya Gusti Mung, yang saya perjuangkan kepentingan Kraton. Kebetulan dari sisi hukum adat itu kakak-nya Gusti Mung yang menjadi raja gitu lho...”*

Jika dari hasil temuan di lapangan menunjukkan Humas Kraton PB XIII Tedjowulan lebih aktif berperan dalam menangani konflik dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, maka kondisi yang berbeda terjadi pada Humas Kraton PB XIII Hangabehi, walaupun tidak diberdayakan secara aktif dalam menangani konflik, beliau lebih cenderung berperan sebagai Humas budaya-nya Kraton. Selain memberikan penjelasan seputar kebudayaan Kraton, beliau juga aktif berperan mengisi acara seminar kebudayaan di daerah-daerah serta menjadi pengajar pada

kursus *pambiwara* di Kraton pada malam hari. Seperti yang diungkapkan oleh

Informan 4 berikut :

*“Kalau pasca konflik, tetep kebudayaan masih. Dan kami e.. kan biasa diundang kemana-mana. Kebetulan kami yang berbicara tentang kebudayaan Kraton. Saya belum pernah melihat humasnya e.. Gusti Tedjo itu bicara tentang kebudayaan ya. jadi makanya saya kadang-kadang mengatakan, dalam konteks ini marilah kita menempatkan sebagai Humas budaya, bukan sebagai jubir-nya orang konflik gitu lho. Saya kalau diharapkan menjadi jubir-nya orang konflik, saya tidak akan melakukan. Anda tahu, saya lebih banyak diam dan lebih tidak bicara di mass media tentang konflik, tapi kalau ada bicara tentang budaya silakan tanya saya.”*

Informan 7 juga menjelaskan seputar peranan Humas sebagai juru penerang

kebudayaan ini, sebagai berikut :

*“Iya, kalau yang wetan tidak berfungsinya Humas. Karena lebih yang keluar itu lebih kepada e.. apa? Pembela hukumnya ataupun mungkin e.. malah bidang-bidang pariwisata, lha ini.. atau mungkin malah pengageng sasana wilapanya.”*

Peranan kedua Humas tersebut, memang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Walaupun bisa dikatakan yang satu lebih aktif daripada yang lain, seperti penjelasan

Informan 7, tetapi kedua Humas tersebut tetap menjalankan fungsinya menurut

perintah yang sudah diterima sejak awal, terlepas apakah itu sebagai Humas yang

menangani konflik secara aktif ataupun sebagai Humas yang berfungsi sebagai juru

penerang kebudayaan.

### **3. Humas dalam Manajemen Krisis**

Seperti yang dijelaskan oleh Jim Mcnamara, ada 6 langkah dalam manajemen

krisis yang bisa dilakukan oleh Humas jika organisasi yang menaunginya sedang

berada dalam kondisi konflik atau mengalami krisis. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Scenario development*

Pada tahap yang pertama ini, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi dan memperkirakan kemungkinan yang dapat terjadi dan dampak yang mungkin akan timbul.

- **Humas PB XIII Hangabehi**

Pada tahap ini yang dilakukan oleh pihak PB XIII Hangabehi adalah menyangkal adanya konflik. Karena dalam kasus perebutan kekuasaan ini Humas tidak diberdayakan secara aktif, maka pihak Kraton yang menjalankan fungsi kehumasan menyatakan bahwa pihak PB XIII Hangabehi tidak mau menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah konflik. Sehingga, menurut penjelasan narasumber, mereka pun tidak melakukan proses identifikasi permasalahan.

- **Humas PB XIII Tedjowulan**

Berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh pihak lawan, Humas PB XIII Tedjowulan mengakui dan menyadari bahwa kondisi perebutan kekuasaan tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga mulai awal dibentuknya Humas oleh PB XIII Tedjowulan sudah dipersiapkan strategi untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik ini.

b. *Preparation*

Pada tahap ini yang bisa dilakukan oleh Humas adalah : 1. Mempersiapkan petunjuk layanan telepon 24 jam untuk semua pihak yang berkepentingan. 2. Memiliki dan melatih beberapa orang untuk menghadapi media massa sehingga selalu siap untuk memberikan informasi jika dibutuhkan. 3. Mendirikan ruangan tertentu yang digunakan sebagai crisis center bagi tim penanggulangan krisis. 4. Mempersiapkan segala informasi selengkap mungkin yang berkaitan dengan krisis.

- **Humas PB XIII Hangabehi**

Walaupun selama ini tidak menganggap bahwa apa yang terjadi yaitu perebutan kekuasaan 2 raja ini sebagai suatu konflik, tetapi pihak PB XIII Hangabehi tetap melakukan beberapa tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan untuk menghadapi adanya konflik. Dari empat poin di atas, yang sejauh ini telah dilakukan oleh pihak PB XIII Hangabehi adalah poin kedua dan keempat. Untuk memberikan keterangan atau informasi seputar kondisi perebutan kekuasaan yang terjadi di Kraton, pihak PB XIII Hangabehi memang menempatkan beberapa Pengageng Kraton yang memang mengetahui dengan jelas apa yang terjadi. Sehingga jika media atau masyarakat umum ingin penjelasan, maka yang berwenang untuk menjawab dan memberikan statement ke media adalah para Pengageng yang ditunjuk untuk memberikan keterangan. Untuk poin yang keempat, pihak PB XIII Hangabehi mempersiapkan informasi seputar suksesi dan konflik ini dengan menerbitkan buku. Buku yang berjudul “Yang Sah & Yang Resmi Susuhunan Paku Buwono XIII” tersebut diterbitkan oleh Kraton untuk menjawab pertanyaan seputar suksesi dan

konflik yang terjadi. Namun sayang, buku tersebut hanya diterbitkan untuk kalangan dalam Kraton saja. Sementara untuk memberi pengertian dan informasi bagi masyarakat luas, pihak PB XIII Hangabehi memilih mengeluarkan statement di media massa yang isinya secara garis besar sama dengan buku “Yang Sah & Yang Resmi Susuhunan Paku Buwono XIII” tersebut.

- **Humas PB XIII Tedjowulan**

Yang dilakukan oleh Humas PB XIII Tedjowulan sebenarnya juga tidak berbeda jauh dengan pihak lawannya. Humas PB XIII Tedjowulan membuat persiapan untuk poin pertama dan keempat. Kondisi tersebut bisa dilihat dari upaya untuk mengoptimalkan fungsi Humas yang ada. Untuk itulah, pihak Tedjowulan mempunyai dua Humas yang berada di Solo dan Jakarta. Namun untuk tugas-tugas kehumasan, sejauh ini diberikan kepada Humas yang ada di Solo. Untuk memberikan segala informasi tentang konflik, semuanya adalah tanggung jawab Humas. Begitu juga dengan langkah dan usaha pencitraan melalui media massa, juga merupakan tanggung jawab Humas.

c. *Monitoring*

Dalam hal ini yang dilakukan adalah pemantauan. Pemantauan yang efektif diperlukan untuk mendapatkan peringatan atau data-data awal krisis. Termasuk di dalamnya adalah pemantauan terhadap berita-berita yang muncul di media massa.



- **Humas PB XIII Hangabehi**

Sejauh ini, peran Humas juga kurang berperan dalam fungsi mendokumentasikan peristiwa yang terjadi Kraton. Untuk *monitoring* terkait konflik yang terjadi, pihak PB XIII Hangabehi memanfaatkan keberadaan kliping. Kliping tersebut merupakan inisiatif pribadi seorang *putra dhalem* (anak Alm. PB XII) yang pengerjaannya diberikan kepada Kantor Badan Pengelola Kraton. Kliping tentang krisis yang terjadi, digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus bahan yang akan dibawa ke rapat besar para *putra dhalem*.

- **Humas PB XIII Tedjowulan**

Untuk melakukan *monitoring*, Humas PB XIII Tedjowulan juga mengandalkan keberadaan kliping dan dokumentasi dalam bentuk yang lain. Dokumentasi tersebut tidak hanya berasal dari kegiatan PB XIII Tedjowulan, tetapi juga dari pihak PB XIII Hangabehi. Dokumentasi kegiatan dan peristiwa Kraton tersebut, selain digunakan sebagai evaluasi internal juga berguna untuk menyusun strategi bagaimana menghadapi konflik yang terjadi. Menurut Informan 1, kegiatan mendokumentasikan ini juga berguna untuk melihat apa dan bagaimana langkah yang diambil pihak lawan. Jika di pihak Hangabehi yang menjalankan fungsi ini adalah salah satu *putra dhalem* dibantu oleh Badan Pengelola Kraton, maka di pihak Tedjowulan yang menjalankan fungsi ini adalah Humas sendiri.

d. *Networking*

Pada saat terjadi krisis, tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan adanya mitra yang dapat memberikan dukungan. Dukungan yang datang dari mitra tersebut dapat

membantu suatu organisasi untuk memulihkan kembali kredibilitasnya. Hubungan dengan pihak luar tersebut harus sudah terjalin dengan baik sebelum adanya krisis. Sehingga memang sudah seharusnya suatu organisasi mempunyai program untuk membangun jalinan hubungan dengan pihak luar.

**- Humas PB XIII Hangabehi**

Sejauh ini berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan, belum terlihat usaha maksimal dari pihak Hangabehi untuk mempunyai program kehumasan yang mengarah pada pembentukan jaringan, karena memang secara umum belum ada penataan fungsi kehumasan yang jelas. Sehingga selama ini bentuk kerjasama yang terjalin dengan pihak luar hanyalah untuk tujuan yang berada di luar konflik yang terjadi. Dukungan dari lembaga lain atau mitra yang dimiliki oleh pihak Hangabehi dalam konflik ini juga tidak diketemukan datanya.

**- Humas PB XIII Tedjowulan**

Pihak Tedjowulan merupakan kebalikan dari Hangabehi, dalam konflik ini terlihat bahwa Humas Tedjowulan berupaya untuk mencari dukungan sebagai upaya pengakuan dari pihak lain. Hal ini memang menjadi salah satu program kehumasan pihak Tedjowulan yang berkeinginan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lembaga lain maupun dengan individu-individu. Hubungan yang terjalin pun tidak hanya seputar konflik tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang lain, seperti sosial kemasyarakatan, kebudayaan, dan lain-lain.

e. *Focusing*

Pada saat krisis akan muncul banyak sekali tekanan dan isu yang berkembang di masyarakat. Organisasi tentu saja tidak bisa memberikan perhatian kepada semua pihak yang berusaha menarik perhatian. Sehingga kunci dari manajemen krisis adalah memusatkan perhatian pada isu utama yang berkembang.

- **Humas PB XIII Hangabehi**

Yang dilakukan pihak Hangabehi memang hanya terfokus pada isu utama perebutan kekuasaan dengan tetap memberikan statement dan pengertian kepada publik bahwa tidak pernah terjadi konflik di dalam Kraton. Namun yang terjadi belakangan, konflik ini semakin melebar ke arah konflik keluarga yang mulai menyangkut ke individu yang ada di dalamnya. Sehingga tidak lagi bisa terfokus untuk penyelesaian konflik yang sebenarnya.

- **Humas PB XIII Tedjowulan**

Sama seperti yang dilakukan pihak Hangabehi, Humas Tejowulan juga focus pada persoalan yang utama yaitu bagaimana menyelesaikan konflik ini. Usaha yang ditempuh antara lain dengan mengusahakan islah atau perdamaian dan mengajak berunding pihak Hangabehi. Namun, dengan semakin melebarnya konflik ini maka perhatian dan statement yang dikeluarkan oleh Humas juga menjadi tidak terfokus hanya pada konflik perebutan kekuasaan saja.

f. *Implement a plan*

Diperlukan rencana dan langkah yang tepat untuk menjalankan manajemen krisis agar tidak berimbas pada citra organisasi yang bersangkutan. Yang harus dilakukan adalah penanggulangan dan penanganan kerusakan; manajemen yang proaktif; pemulihan citra. Tiga langkah tersebut belum sepenuhnya bisa diterapkan dalam organisasi Kraton, karena faktor kepemimpinan dan struktur organisasi serta iklim organisasi yang jelas berbeda dengan organisasi modern. Tetapi yang jelas, usaha untuk kembali menaikkan citra atau dalam hal ini bisa disebut pamor Kraton, sudah dilakukan oleh masing-masing Humas walaupun belum optimal mengingat yang dihadapi dan di-*manage* bukan sekedar konflik tetapi manusia dan adat.

#### **4. Mekanisme Kerja Humas Kraton**

Berbicara tentang mekanisme kerja pada lembaga kehumasan yang berada di Kraton tentu saja berbeda dengan mekanisme kerja lembaga kehumasan pada organisasi modern. Jika pada organisasi modern mekanisme kerja bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan iklim dan budaya kerja, tidak begitu halnya dengan Humas yang ada di Kraton. Inilah yang juga menjadi ciri khas yang membedakan Humas Kraton dengan Humas yang ada di lembaga modern.

- **Humas PB XIII Hangabehi**

Lembaga kehumasan Kraton Surakarta PB XIII Hangabehi, secara resmi dilembagakan di bawah Sasana Wilapa (Keseekretariatan) Kraton Surakarta. Pada struktur organisasi Kraton tertulis bahwa di bawah Sasana Wilapa terdapat bagian

yang diberi nama Penerangan. Inilah yang menjadi menarik, karena berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, sejak masa pemerintahan PB XIII Hangabehi keberadaan Humas sudah resmi dilembagakan dengan nama Humas Kraton Surakarta.

Fakta di lapangan menyatakan bahwa nama “Humas” seakan-akan hanyalah menjadi atribut belaka. Jika pada organisasi modern, seorang Humas masuk ke jajaran *top management* tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi Kraton. Kerja Humas adalah hanya sebagai juru penerang. Komunikasi dengan raja dan mekanisme pengambilan keputusan yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di Kraton dilakukan oleh Sasana Wilapa. Demikian juga jika Humas mendapatkan pertanyaan seputar peristiwa yang terjadi di Kraton, maka tidak bisa langsung memberikan jawaban, semuanya harus dilakukan atas *dawuh* atau perintah dari Sasana Wilapa dan harus dikoordinasikan terlebih dahulu.

Seperti yang dijelaskan oleh Informan 6 berikut :

*“kalau Humas itu pun harus ada apa namanya instruksi dari berbagai elemen yang ada... Memang juru bicara-nya bisa Humas. Kalau Humasnya baru repot bisa sekretariat. Nah mereka kan biasanya minta tahu dari beberapa putro dhalem atau kepala birokrasi yang bermasalah itu untuk memberikan masukan untuk nanti statement-nya disampaikan... Jadi mengeluarkan data dari berbagai sektor yang juru bicaranya bisa kesekretariat atau dari juru bicara Humas tadi minta ke sekretariat apa datanya.”*

Melihat pernyataan yang disampaikan oleh Informan 6 diatas dapat dilihat jika Humas memang hanya menerima perintah dari Sasana Wilapa, tidak langsung dari atas (raja). Inilah yang membuat peran Humas juga kurang maksimal di dalam pemerintahan PB XIII Hangabehi. Selama konflik inipun, mekanisme kerja Humas

juga tidak berubah, tetap menjadi Humas yang sebagai juru penerang kebudayaan. Tidak ada statement langsung dari Humas yang berbicara tentang konflik, yang ada adalah statement dari para Pengageng yang ada di Kraton yang memberikan jawaban seputar konflik yang terjadi.

Dari keterangan informan dan fakta di lapangan, maka Humas bertanggung jawab kepada Pengageng Sasana Wilapa sebagai tempat dimana Humas dilembagakan. Karena itulah, jika Humas berhalangan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya maka tugas dan kewajiban Humas itu akan diambil alih oleh Sasana Wilapa.

Mekanisme kerja lembaga kehumasan juga dipengaruhi oleh tujuan pencitraan Kraton yang mereka inginkan. Di pihak PB XIII Hanngabehi, yang mereka inginkan adalah agar citra Kraton di masyarakat tetap terjaga, agar kewibawaan Kraton tetap terjaga. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 berikut :

*“E..Saya selalu menjaga kewibawaan Kraton, itu yang utama yang disampaikan oleh bapak saya. ‘koe tugas pertama dadai anak ratu kuduisoh njogo kawibawaanne Kraton’ nah itu kawibawaanne Kraton itu apa? Jangan membikin corengan e.. Kraton menjadi image orang itu jelek, begitu. Nah karena apa? Kraton itu sendiri kan tempat tatanan, aturan, unggah-ungguh, tatakrama, ini kalau kamu tidak sadar hidup di dalam Kraton seperti itu dan tanggung jawab dan kewajiban, ya silakan pergi. Gitu kan? lha ini yang sekarang kita lakukan bahwa e.. sampaikan ke mereka itu...”*

Ketika disinggung tentang apa yang ingin dicitrakan oleh Humas ke masyarakat, Informan 3 mengatakan bahwa Kraton hanya ingin memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya ke masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi

dan keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam Kraton. Seperti kutipan wawancara berikut :

*“Ya sebetulnya begini, kalau itu kan jelas. Jadi apa yang sudah berjalan e.. mulai ada Sinuhun baru tahun 2004 itu kan karena terjadi permasalahan yang memerlukan penerangan yang sejelas-jelasnya dari Kraton kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dan tentang apa yang harus di e.. dilakukan oleh lembaga Kraton ini sendiri kan akhirnya kan kita butuh untuk menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada di dalam Kraton ngaten. Lha pasti ini yang e.. perlu kita sampaikan begitu...”*

Sementara Informan 4 juga menjelaskan bahwa pencitraan yang diinginkan pihak Kraton untuk disampaikan kepada masyarakat luar adalah agar masyarakat memahami fungsi dan peran Kraton kekinian dan di masa depan. Seperti kutipan wawancara berikut :

*“E.. Kalau secara umum kita ingin masyarakat memahami fungsi dan peran Kraton kekinian dan dimasa datang. Tetapi dengan memahami situasi yang ada, yang berlaku saat ini di.. orang memahami kan tidak mudah itu, e.. tapi kita mencoba untuk tidak tergesa-gesa karena kita ingin situasinya smooth supaya juga di masyarakat tidak apa namanya, tidak ada e.. konflik, sampai terjadi konflik karena dukung-mendukung itu...”*

Karena fungsi dan peran Kraton sudah jauh berubah, sehingga citra Kraton di mata masyarakat juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang kondisi dan fungsi Kraton sekarang hingga kebiwabawaan Kraton tetap akan terjaga.

Dari statement-statement yang telah diberikan oleh Informan 3, 4 dan 6 diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam struktur Kraton PB XIII Hangabehi keberadaan Humas memang hanya difungsikan sebagai juru penerang yang memberikan penjelasan-penjelasan dengan instruksi dari Sasana Wilapa, oleh sebab itu Humas

tidak bisa berperan secara aktif dalam upaya menangani konflik ini. Lebih jauh lagi, keberadaan Humas Kraton PB XIII Hangabehi memang tidak difungsikan selayaknya Humas. Terkait permasalahan citra dan image yang ingin dibentuk oleh pihak Kraton PB XIII Hangabehi, Humas juga tidak dilibatkan dalam mekanisme pengambilan keputusannya. Pihak Kraton PB XIII Hangabehi sendiri, melalui Pengagengnya memfokuskan citra Kraton yang ingin mereka tampilkan adalah citra Kraton yang tetap terjaga wibawanya serta agar masyarakat bisa memahami bagaimana Kraton berfungsi dan berperang di masa sekarang dan mendatang.

- **Humas PB XIII Tedjowulan**

Mekanisme kerja yang ada di lembaga kehumasan PB XIII Tedjowulan relative lebih tertata jika dibandingkan dengan lembaga kehumasan PB XIII Hangabehi. Tertata dalam artian Humas memang dijalankan sesuai dengan predikat “Humas”-nya walaupun juga terkadang masih keluar dari koridor kehumasan dengan statement-statement yang dibangunnya.

Jika pada lembaga kehumasan PB XIII Hangabehi yang lebih banyak tampil adalah Pengagengnya, maka di lembaga kehumasan PB XIII Tedjowulan Humas memang diberdayakan. Mekanisme *dawuh* atau perintah bisa langsung turun dari raja atau melalui Sekretaris Pribadi raja. Jika keadaan mendesak, maka yang terjadi adalah *dawuh* turun langsung dari raja kepada Humas, tapi jika tidak dalam kondisi mendesak maka *dawuh* turun dulu ke Sekretaris Pribadi baru kemudian ke Humas. Hal seperti ini, memungkinkan interaksi antara raja sebagai *top management* dengan



Humas bisa terjadi secara langsung dan lebih intens. Selain itu juga memungkinkan Humas berada dalam posisi yang bisa terlibat di dalam usaha pengambilan keputusan.

Humas pada PB XIII Tedjowulan berada di bawah lembaga Pengageng Parentah Kraton yang langsung berada di bawah raja. Di dalam struktur Humas sendiri terdapat tiga bagian, yaitu dokumentasi, informasi dan publikasi, serta penerbitan, dan semuanya berada di bawah Pengageng Humas. Dengan demikian maka peranan sebagai *journalist in resident* atau peranan teknis juga dilakukan oleh Humas.

Selain yang telah dijelaskan diatas, Humas juga mendapat peran yang sentral yaitu sebagai pengganti raja jika berhalangan hadir dalam suatu acara yang mengundang PB XIII Tedjowulan. Selain itu Humas juga berfungsi sebagai protokoler. Jadi tidak hanya menjalankan tugas-tugas kehumasan tetapi juga bisa berfungsi sebagaimana yang dikehendaki raja.

Mekanisme kerja Humas PB XIII Tedjowulan yang lebih tertata dan bisa berjalan baik, juga dipengaruhi oleh tujuan pencitraan yang sejak awal ingin dibangun oleh pihak PB XIII Tedjowulan. Sebagai raja yang berada dan dinobatkan di luar tembok Kraton maka persoalan utama yang menjadi focus dari tujuan awal pencitraan adalah bagaimana raja yang diluar ini mendapatkan pengakuan, baik local ataupun nasional. Inilah yang menjadi dasar dari segala usaha pencitraan yang dilakukan oleh Humas. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 berikut :

*“...Bahwa yang namanya pencitraan kita karakternya adalah dengan menggunakan apa yang dimiliki. Nah kemudian awareness untuk branding image pencitraannya adalah e.. kita ingin ada perubahan. Karena sesuai*

*dengan amanat dari PB XII, bahwa bagaimana eksistensi Kraton ke depan di dalam menjawab tantangan perkembangan zaman itu bisa benar-benar terwujud. Karena Kraton ke depan tidak bisa hanya bicara bahwa Kraton itu punya 3D 'dawuh-dawuh, dangu-dangu, duka-duka' Kraton ke depan harus lebih dari 3D tadi, bagaimana Kraton ke depan itu pada globalisasi tapi eksistensi Kraton itu masih dipegang..."*

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa pencitraan yang diinginkan oleh pihak PB XIII Tedjowulan berbasis pada apa yang ada di dalam karakter Tedjowulan sendiri dan salah satu tujuan pencitraan yang ingin dicapai adalah perubahan dalam Kraton agar sesuai dengan perkembangan zaman sehingga Kraton dapat mempertahankan eksistensinya.

Namun, semua usaha membangun citra positif yang dilakukan oleh pihak PB XIII Tedjowulan tetap menuju ke satu tujuan yaitu adanya pengakuan dari semua pihak terhadap keberadaan PB XIII Tedjowulan sebagai raja yang ada di luar tembok Kraton. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 berikut :

*"Citra itu ada atau target ada jangka pendek ada jangka panjang. Kraton target jangka pendek jelas saya harus memberikan pencitraan yang positif ya. Terutama bagaimana kami diakui keberadaannya. Sementara jangka panjang bagaimana menyelesaikan konflik ya. Saat ini yang sudah kita upayakan dan masih terus kita lakukan adalah pencitraan yang jangka pendek tadi ya. Untuk bukan jadi jangka pendek ya, akhirnya jadi jangka menengah. Karena kan kalau konflik ini nggak selesai-selesai kan kita tetep harus menjaga citra kita kan? Tentu tanpa meninggalkan jangka panjangnya, bagaimana penyelesaian konflik ini."*

Walaupun tetap berusaha untuk mencari cara penyelesaian konflik, tetapi tujuan pencitraan yang dilakukan oleh Humas PB XIII Tedjowulan tetap mengarah kepada adanya pengakuan dari berbagai pihak.

Dari statement-statement diatas, dapat dilihat bahwa mekanisme kerja Humas PB XIII Tedjowulan lebih tertata dan lebih menempatkan Humas pada posisi yang berdekatan dengan *top management* dan mekanisme pengambilan keputusan. Inilah yang membuat Humas terlihat bisa berperan aktif dalam usaha penyelesaian konflik ini. Statement-statement diatas juga menunjukkan bahwa mekanisme kerja Humas sangat dipengaruhi oleh tujuan awal pencitraan PB XIII Tedjowulan. Dengan tujuan pencitraan yang mengarah pada pengakuan pihak lain terhadap eksistensi PB XIII Tedjowulan, maka semua usaha yang dilakukan Humas, baik itu dalam koridor kebudayaan atau masalah yang lain akan kembali lagi ke tujuan awal yaitu mendapatkan pengakuan atas eksistensi PB XIII Tedjowulan sebagai raja di luar tembok Kraton.

Penjelasan tentang mekanisme kerja Humas PB XIII Hangabehi dan Tedjowulan diatas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas diantara kedua Humas tersebut. Baik dalam struktural organisasi, mekanisme kerja, maupun hubungan dengan *top management*, dan juga mekanisme *dawuh* atau perintah. Yang terjadi pada Humas PB XIII Hangabehi adalah tidak dilibatkannya Humas dalam mekanisme kerja yang sesungguhnya, sehingga kedudukan Humas pun hanya sebagai juru bicara dengan perintah dari Sasana Wilapa. Sementara yang terjadi pada Humas PB XIII Tedjowulan adalah sebaliknya, lebih tertata dengan kedudukan Humas yang juga lebih jelas baik dalam struktur maupun dalam mekanisme kerjanya. Perbedaan mekanisme kerja tersebut juga dipengaruhi oleh tujuan pencitraan yang ingin dibentuk oleh kedua pihak. Pihak dalam Kraton (PB XIII Hangabehi) memfokuskan

pada tetap terjaganya wibawa Kraton di mata masyarakat dan bagaimana memberi penjelasan yang selengkapnyanya kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di pihak luar Kraton (PB XIII Tedjowulan) pencitraan yang dilakukan adalah dengan focus mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak tentang eksistensi PB XIII Tedjowulan dengan melakukan usaha-usaha yang disesuaikan dengan kondisi terkini serta disesuaikan dengan kepribadian dan kelebihan yang dimiliki oleh Tedjowulan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Konflik dalam suatu lembaga adalah hal yang lumrah terjadi dan sering dijumpai di kehidupan berorganisasi, apalagi jika konflik tersebut mengacu kepada sebuah kekuasaan yang besar. Kraton Surakarta sebagai lembaga adat yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan konflik perebutan kekuasaan.

Akan tetapi keadaan bisa jadi sangat berbeda jika konflik perebutan kekuasaan tersebut muncul pada saat ini. Zaman dimana modernisasi sangat diagungkan dan kekuasaan Kraton tidak lagi seperti dulu. Tidak bisa dipungkiri, modernisasi juga telah menyentuh kehidupan dalam Kraton, sehingga secara kelembagaan Kraton pun harus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.

Kehadiran Humas sebagai salah satu badan yang ada di kelembagaan Kraton, tentu menjadi sorotan begitu konflik mulai terjadi. Dengan langkah-langkah yang telah dipersiapkan sebelumnya, Humas kedua raja mulai menjalankan perannya. Di pihak PB XIII Hangabehi, walaupun di depan publik selalu menyangkal adanya konflik yang terjadi, tapi tetap saja menerapkan langkah-langkah yang digunakan untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang apa yang benar menurut adat yang berlaku. Menerbitkan buku, membuat laporan tahunan, mengirimkan press

release tentang identitas PB XIII yang sah dan resmi menjadi beberapa langkah penanganan yang ditempuh oleh pihak PB XIII Hangabehi.

Sementara itu, di pihak PB XIII Tedjowulan, sebagai raja yang bertahta di luar tembok Kraton, juga mengambil langkah-langkah yang dinilai dapat mempertahankan eksistensi Tedjowulan sebagai raja sekaligus sebagai alat untuk menciptakan citra positif Tedjowulan di mata masyarakat. Berbagai langkah yang diambil antara lain :

- Menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, yang dinilai akan semakin memperkuat posisi Tedjowulan sebagai raja di luar Kraton.
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pejabat tentang apa kronologis peristiwa.
- Ikut memberikan kontribusi pada persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat
- Mengeluarkan statement dan press release di media massa tentang kegiatan PB XIII Tedjowulan serta apa yang benar menurut pihak mereka.

Selain beberapa hal diatas, masih banyak langkah-langkah lain yang telah dilakukan oleh Humas PB XIII Tedjowulan.

Ketika konflik semakin memanas, ruang lingkup konflik pun menjadi melebar. Tidak hanya sebatas konflik perebutan kekuasaan, tetapi sudah mengarah ke konflik keluarga dan pribadi. Keadaan tersebut memicu keluarnya statement yang keluar dari koridor kehumasan. Kemudian fakta yang ada membuktikan bahwa

Humas PB XIII Hangabehi tidak diberdayakan, dimana hal tersebut sangat berkebalikan dengan keadaan Humas PB XIII Tedjowulan.

Keadaan ini dilatarbelakangi awal mula pembentukan Humas yang memang mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Humas PB XIII Tedjowulan memang dibentuk untuk menangani konflik ini, sementara keberadaan Humas PB XIII Hangabehi sudah ada sejak dulu dan memang dari awal berfungsi sebagai juru penerang kebudayaan. Inilah yang membuat peranan Humas PB XIII Hangabehi di dalam konflik dijalankan oleh pihak lain, yaitu Pengageng yang ada di Kraton. Kenyataan ini membuat beberapa pihak berpendapat bahwa Humas PB XIII Hangabehi tidak berperan sama sekali, karena semasa konflik tidak ada gaungnya.

Dari semua data dan fakta yang telah dikumpulkan, bisa diambil kesimpulan bahwa Humas Tedjowulan berperan lebih aktif dalam usaha mempertahankan citra positif di tengah konflik. Sementara Humas Hangabehi lebih condong ke arah Humas sebagai juru penerang kebudayaan. Namun, terlepas dari penilaian secara terpisah, kedua Humas tersebut belum bisa dikatakan berhasil menjalankan peranan mereka sebagai Humas yang sesuai dengan koridor kehumasan.

Hasil analisis peranan kedua Humas tersebut tidak bisa dilepaskan dari mekanisme kerja yang ada di lembaga kehumasan baik PB XIII Hangabehi ataupun PB XIII Tedjowulan. Pada pihak Hangabehi yang terjadi Humas hanya menerima perintah dari Sasana Wilapa sebagai tempat dimana Humas bernaung, Humas juga tidak dilibatkan dalam mekanisme pengambilan keputusan terkait permasalahan yang terjadi di Kraton. Inilah yang menyebabkan Humas menjadi sulit berperan dan tidak

mendapatkan tempat yang semestinya di dalam struktur organisasi Kraton. Sementara yang terjadi pada Humas PB XIII Tedjowulan adalah yang sebaliknya. Humas PB XIII Tedjowulan lebih dilibatkan dalam mekanisme penanganan masalah yang ada di Kraton, terlihat dari bagaimana Humas bekerja selama konflik.

Citra yang ingin ditampilkan oleh pihak PB XIII Hangabehi pun lebih mengarah kepada bagaimana Kraton tetap terjaga wibawanya dan agar masyarakat luar memahami kondisi dan fungsi Kraton sekarang sehingga eksistensi dan wibawa Kraton tetap terjaga. Semua usaha yang dilakukan oleh pihak PB XIII Hangabehi mengarah pada tujuan pencitraan tersebut.

Sementara apa yang ingin dicitrakan oleh pihak PB XIII Tedjowulan adalah bagaimana membentuk image positif dari seorang Tedjowulan sendiri. Sehingga semua usaha yang dilakukan oleh Humas PB XIII Tedjowulan, baik itu dalam hal kebudayaan, sosial kemasyarakatan, dan hal-hal yang lain akan tetap mengarah kepada tujuan awal pencitraan yaitu diakuiinya Tedjowulan sebagai raja di luar tembok Kraton.

Tujuan pencitraan inilah yang akhirnya menjadi kunci yang membedakan peranan Humas, usaha-usaha yang dilakukan Humas, serta bagaimana mekanisme kerja Humas diterapkan secara berbeda di kedua pihak raja.

## **B. SARAN**

Melihat keadaan yang ada di lapangan sekarang dan gelagat dari kedua pihak tidak menutup kemungkinan bahwa konflik ini tidak akan pernah selesai, dalam



artian, ada perdamaian dan salah satu pihak mengalah. Dibutuhkan niat yang tulus dan kuat dari masing-masing pihak untuk dapat menciptakan perdamaian. Untuk itulah Peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran, antara lain :

- Agar keadaan seperti ini tidak terulang di masa mendatang, lebih baik jika suksesi yang akan datang benar-benar dipersiapkan dengan matang. Dilakukan perembugan yang intens antar kerabat Kraton. Walaupun masih ada angger-angger, tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang bisa dibuat lebih fleksibel dan sesuai keadaan.
- Perlunya revitalisasi organisasi Kraton yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini, tentunya dengan tidak meninggalkan akar budayanya.
- Pada dasarnya lembaga adat seperti Kraton-pun juga perlu mempunyai Humas yang kuat, yang benar-benar mengerti bagaimana seharusnya Humas bekerja sekaligus mengetahui apa yang menjadi kehendak raja. Dengan demikian akan tercipta suatu keadaan dimana Humas benar-benar bisa merepresentasikan Kraton itu sendiri.
- Perlunya penataan fungsi Humas yang sejelas-jelasnya, agar di masa mendatang Humas benar-benar berfungsi layaknya Humas.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Hendricks, William. 1998. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta:Bumi Aksara.

Jefkins, Frank. 1992. *Public Relations, Edisi ke-4*. Jakarta:Erlangga.

Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Moore, Frazier. 1993. *Hubungan Masyarakat, prinsip, kasus, dan masalah*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2004. *Ilmu Komunikasi, suatu pengantar*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Nurhajarini, Dwi Ratna. 1999. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. Jakarta:Departemen pendidikan dan Kebudayaan.

Panuju, Redi. 2002. *Krisis Public Relations, wawasan memahami macam krisis menuju organisasi yang sehat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Rakhmat, Jalaluddin. 1993. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Ruslan, Rusady. 1997. *Praktik dan Solusi Public Relations dalam Situasi Krisis dan Pemulihan Citra*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Ruslan, Rusady. 2003. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

- Ruslan, Rusady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeratman, Darsiti. 2000. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta:Yayasan Untuk Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Mulyanto. 2004. *Dibalik Suksesi Keraton Surakarta Hadiningrat*. Surakarta:Solopos
- Wirabhumi, Edy. 2004. *Mas Behi, Angger-angger dan Perubahan Zaman*. Surakarta:Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus, desain dan metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **2. Artikel di Website**

- Public Relations Journal Vol. 3, No. 1, Winter 2009 © 2009 Public Relations Society of America, Cognitive Processing of Crisis Communication: Effects of CSR and Crisis Response Strategies on Stakeholder Perceptions of a Racial Crisis Dynamics, Hye Kyung Kim and Sung-Un Yang (diakses 21 April 2009)
- Public Relations Journal Vol. 3, No. 1, Winter 2009 © 2009 Public Relations Society of America, Learning from Past Crises – Do Iconic Cases Help or Hinder? Tony Jaques (diakses 21 April 2009)



## **CURICULLUM VITAE NARASUMBER**

### **Informan 1**

Nama Lengkap	: Bambang Ary Wibowo, SH
Tempat, tanggal lahir	: Solo, 5 Oktober 1970
Alamat Rumah	: JL. Hordenasan II / 89 RT 02/03, Baluwarti Solo
No. Telp / Handphone	: 0271-644755 / 081904522507
Pekerjaan	: Konsultan Komunikasi / Dosen
Alamat Kantor	: JL. Hordenasan II / 46, Baluwarti Solo
No. Telp kantor	: 0271-644755
Pengalaman Organisasi	: KADIN, ASPPRO, P3I, FMKI
Kegiatan Sekarang	: - Ketua FMKI Kota Solo - Bidang Advokasi ASPPRO - Humas Kraton Surakarta Hadiningrat
Pendidikan Formal Terakhir	: FH-UNS / Sedang menyelesaikan tesis S2 FISIP-UNS

**Informan 2**

Nama Lengkap : Drs. Tundjung W Sutirto, MSi.

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 25 Desember 1961

Alamat Rumah : JL. Sriwijaya 13 Solo

No. Telp / Handphone : 0271-735334 / 081329371113

Pekerjaan : Staff pengajar

Alamat Kantor : FSSR-UNS Jurusan Sejarah

No. Telp kantor : 0271-632485

Pengalaman Organisasi : Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia 2000-sekarang

Kegiatan Sekarang : - Staff Peneliti Pusat Penelitian&Pengembangan Pariwisata UNS  
- Staff Peneliti Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNS  
- Pembina Marching Band UNS  
- Sekretaris Pribadi PB XIII Tedjowulan

Pendidikan Formal Terakhir : Magister Sains Bidang Ilmu-ilmu Sosial UNPAD

**Informan 3**

Nama Lengkap : Dra. GKR.Wandansari, M.Pd. (G.Ray. Koes Moertiyah)

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 1 November 1960

Alamat Rumah : Karaton Surakarta

No. Telp / Handphone : 0811285050

Pekerjaan : Pengageng Sasana Wilapa

Alamat Kantor : Karaton Surakarta

No. Telp kantor : 645412 / 641243

Pengalaman Organisasi :

Kegiatan Sekarang :

Pendidikan Formal Terakhir : S2 PKLH

**Informan 4**

Nama Lengkap : Drs. BRM. Bambang Irawan, MSi.

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 23 Mei 1967

Alamat Rumah : Perum Griya Aji Raharja E6. Widoro Rejo, Makamhaji, Kartasura.

No. Telp / Handphone : 08122686970

Pekerjaan : Staff Pengajar FE UNS, Jurusan EP

Alamat Kantor : JL. Ir. Sutami 36A, Ketingan, Surakarta

No. Telp kantor : 0271-647481

Pengalaman Organisasi : - Ketua BKKT UNS (saat mahasiswa)  
- Ketua PUSPARI-LPM UNS (1995-1997)  
- Sekjur EP FE UNS (2001-2005)  
- Anggota Badan Pengurus PDAM Solo (2000-2007)  
- Koordinator Radityo Art Community / RAC (2003- sekarang)  
- Divisi SDM & Investasi ISEI Solo (2008-2013)  
- Humas UNS (2001-2005)

Kegiatan Sekarang : Mengajar, Meneliti Menulis

Pendidikan Formal Terakhir : S2 IESP, FE UGM



**Informan 5**

Nama Lengkap : KRA. Winarnokusumo

Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 11 Februari 1949

Alamat Rumah : JL. Slamet Riyadi No.21 Kartasura

No. Telp / Handphone : 08122655305

Pekerjaan : Wakil Pengageng Sasana Wilapa

Alamat Kantor : Baluwarti RT 01 RW 01, Pasar Kliwon, Surakarta

No. Telp kantor : 0271-645412

Pengalaman Organisasi : Melayani masyarakat dalam budaya Jawa

Kegiatan Sekarang : Memetri Kebudayaan Jawi

Pendidikan Formal Terakhir : SMA

**Informan 6**

Nama Lengkap	: KGPH. Puger
Tempat, tanggal lahir	: Surakarta, 22 Desember 1955
Alamat Rumah	: Kraton Surakarta
No. Telp / Handphone	: 0271-7027273 / 08562812578
Pekerjaan	: Pengageng Museum Pariwisata
Alamat Kantor	: Kraton Surakarta
No. Telp kantor	: 0271-7027273
Pengalaman Organisasi	: Paguyuban Setia Kawan Surakarta
Kegiatan Sekarang	: Siaran radio / Pengelola Radio Karti Budaya
Pendidikan Formal Terakhir	: B.A di Sastra UNS

**Informan 7**

Nama Lengkap : Winarso Kalinggo

Tempat, tanggal lahir : Solo, 21 Maret 1949

Alamat Rumah : Gandekan Kiwo RT 05/1 Solo

No. Telp / Handphone : 0271-714245 / 0271-9185440

Pekerjaan :

Alamat Kantor : JL.Slamet Riyadi

No. Telp kantor :

Pengalaman Organisasi : - Penasehat Kebudayaan Indonesia-China  
- Anggota KPUD Solo thn 2003-2008

Kegiatan Sekarang : Ketua Komite Museum Radya Pustaka

Pendidikan Formal Terakhir : SMA

## **INFORMAN**

1. Bambang Ary Wibowo, SH (KRHT. Bambang Pradotonagoro)

Adalah pejabat Humas Kraton Surakarta versi Raja Tedjowulan, berusia 39 tahun. Dengan pendidikan formal terakhir S1 Hukum UNS dan sedang menyelesaikan tesis S2 FISIP UNS, beliau mulai menjabat sebagai Humas Kraton Surakarta versi Raja Tedjowulan mulai tahun 2005, atau satu tahun setelah konflik perebutan kekuasaan terjadi di tahun 2004.

2. Drs. Tundjung W Sutirto, MSi.

Adalah Sekretaris Pribadi Paku Buwono XIII Tedjowulan. Berusia 48 tahun, beliau juga merupakan staff pengajar Jurusan Sejarah FSSR UNS. Dengan pendidikan formal terakhir Magister Sains bidang Ilmu-Ilmu Sosial UNPAD, beliau mulai menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Paku Buwono XIII Tedjowulan sejak tahun 2004.

3. Dra. G.Ray. Koes Moertiyah, M.Pd. (GKR. Wandansari)

Beliau dari salah satu dari Putro Dhalem Paku Buwono XII. Berusia 49 tahun, dengan pendidikan terakhir S2 FKIP UNS. Beliau adalah Pengageng Sasana Wilapa Kraton Surakarta sejak masa Paku Buwono XIII Hangabehi.

4. BRM. Bambang Irawan (Radityo Lintang Sasongko)

Beliau adalah Humas Kraton Surakarta yang berada di bawah struktur Sasana Wilapa Kraton Surakarta. Berusia 42 tahun dan juga merupakan staff pengajar Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UNS.

5. KRA. Winarnokusumo

Beliau adalah Wakil Pengageng Sasana Wilapa Kraton Surakarta, berusia 60 tahun. Dengan pendidikan terakhir SMA, beliau merupakan salah satu abdi dhalem Kraton Surakarta yang banyak memberikan penerangan kepada masyarakat umum seputar kebudayaan dan kehidupan di dalam Kraton.

6. KGPH. Puger

Beliau adalah salah satu dari Putro Dhalem Paku Buwono XII. Berusia 54 tahun, beliau adalah Pengageng Museum Pariwisata dan juga pengelola Radio Karti Budaya Kraton Surakarta.

7. Winarso Kalinggo

Beliau adalah seorang budayawan Kota Solo yang cukup terkenal. Selain berprofesi sebagai budayawan, beliau juga adalah Ketua Komite Museum Radyapustaka Surakarta. Berusia 60 tahun, beliau juga mantan Humas Kraton Surakarta di masa Paku Buwono XII.

**Hasil wawancara Pak Bambang Ary. 12 Januari 2009.**

MEDIA

Peneliti : “Ini pak, langsung saja, bagaimana dengan pertanyaan pertama?”

Narsum : “Yang pasti kami pasti mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan Kraton, baik dalam bentuk foto, kliping, ataupun film ya. Itu pasti. Karena itu, satu memang bagian dari tugas Humas, kedua juga untuk evaluasi. Jadi kita mencoba untuk melakukan evaluasi-evaluasi apalagi dengan, hmm... bagian dari manajemen konflik. Makanya fungsi dokumentasi semua kegiatan itu menjadi perlu.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer dua pak?”

Narsum : “Ya pasti otomatis Humas.”

Peneliti : “Tapi tidak dibagi-bagi lagi?”

Narsum : “Nggak, karena memang itu tugas Humas. Jadi mulai dari membuat release, sampai release itu dimuat atau tidak dsb-nya itu adalah tugas Humas. Atau mungkin kita tidak membuat release, kita diwawancarai-pun, kita akan mencoba untuk hmm.. melihat atau mengevaluasi dari berita yang kemudian dimuat. Contoh kasus, katakanlah kami diwawancarai karena sebuah kegiatan / suatu peristiwa itu, kita kan melihat wartawan yang mewawancarai siapa saja, media dari mana saja, baik itu media elektronik maupun media cetak ya. Karena nanti saya sebagai Humas akan meminta. Kalau itu media televisi ya itu ditayangkan nggak. Kalau ditayangkan saya minta copy-nya. Karena itu kaitannya apakah berita yang ditayangkan itu atau dimuat itu ada penyimpangan atau tidak. Karena pernah terjadi statement yang kita keluarkan ternyata oleh media tersebut mungkin salah tafsir ya, saya tidak mengatakan penyimpangan. Ada salah tafsir sehingga berita yang dimunculkan menyimpang dari apa yang dikatakan itu.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer tiga, itu kategori berita yang seperti apa?”

Narsum : “Ya, yang berkaitan dengan kegiatan Kraton ya. Baik itu kegiatan Kraton secara hubungan internal, maupun kegiatan Kraton dalam arti luas. Contoh arti luas,

umpamanya saingan kita membuat kegiatan apa, saingan kita membuat statement apa, saingan kita dapat apa. Dapat apa maksudnya gini, karena dia di Kraton, tau-tau dapat bantuan dsb-nya. Itu tetep kita akan awasi berita-berita itu dan kita akan klip. Karena kan kaitannya, hmm.. tentu butuh pertanggungjawaban ya, contoh kasus umpamanya, hmm.. kasus museum Radya Pustaka, ketika waktu itu pemerintah merencanakan untuk membuat konsorsium yang sekarang sudah dibentuk itu. Di awal-awal kan mereka gencar sekali, dan kita mengevaluasi. O.. keinginan dia apa sih. O.. keinginannya seperti ini. Dari evaluasi berita itulah kemudian hmm.. menjadikan sebuah strategi, ini contoh. Sehingga pada saat titik tertentu kami membuat opini juga. Kami membuat berita juga yang kemudian ditangkap pemerintah bahwa kedua Kraton ini harus dilibatkan konsorsium itu. Tapi ketika ketemu di dalam ruangan yang terjadi kan dari kelompok mereka marah, waktu itu saya mewakili langsung. Marah mereka, tidak mau menerima kehadiran saya. Itu terjadi di ruang walikota, disaksikan oleh wartawan, jadi kasus di dalam ruangan aja akhirnya muncul. Nah itu, ini salah satu diantaranya.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer empat?”

Narsum : “Sudah kan. Untuk evaluasi dan sebagai bentuk pelaporan kita.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer lima pak?”

Narsum : “O.. tidak. Tidak hanya satu media. Kami tidak eksklusif ya. Kami menggunakan semua jaringan media. Karena kalau saya menggunakan satu media, jelas itu bertentangan dengan konsep-konsep atau kaidah pemberitaan. Jadi saya harus membuat jaringan seluas mungkin. Karena yang namanya PR itu kan semakin banyak jaringan semakin bagus. Nah itu, jawabannya itu.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer enam pak?”

Narsum : “Sering tidak. Tetapi mengadakan iya. Karena kan Anda menanyakan kata ‘sering’ ya. Kata ‘sering’ kan artinya berulang kali kan. Saya katakan tidak sering, tapi iya. Jelas kita akan mengadakan konferensi pers, sesuai dengan kebutuhan.”

Peneliti : “Tapi biasanya ada agenda berkala nggak pak untuk melaksanakan konferensi pers gak pak?”

Narsum : “Berkala. Dianggap berkala bisa, dianggap tidak juga bisa. Yang tentu kan untuk kegiatan-kegiatan adat, itu pasti ya ada penjelasan ya. Pasti ya, temen-temen sendiri juga menanyakan kan, ‘pak ada 1 suro?’ katakanlah seperti kemarin ya, I suro kemarin pas, ini off the record sedikit, saya tidak ada di Solo ya. Saya ada di Jakarta, temen-temen media kan telfon saya, lha daripada saya pusing-pusing, saya bikin release, saya ketik, saya sms-kan, saya kirimkan. Ini kan sebetulnya bagian dari bentuk penjelasan juga kan.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 7?”

Narsum : “Ya otomatis saya sebagai Humas ya. Tetapi ya, tidak harus bahwa Humas langsung yang memberi statement atau pernyataan atau penjelasan. Kadang kala, saya juga minta Sinuhun sendiri, PB XIII Tedjowulan sendiri yang memberi. Jadi kan melihat peran saya, Humas itu kan sebenarnya hanya mengatur ya. Hmm.. karena kan arahan dari atau tujuan dari Humas itu kan bagaimana membuat pencitraan. Nah, jadi pada saat tertentu wah ini biarkanlah saya yang bicara, tapi pada titik tertentu, untuk sebuah pencitraan yang menjadi tujuan saya, target saya, maka saya akan meminta langsung PB XIII untuk bicara dengan teman-teman wartawan.”

Peneliti : “Pernah itu pak?”

Narsum : “O..sering. Sering, justru kadang saya lebih banyak ketika ada kegiatan secara langsung dimana beliau hadir, saya akan membuka pintu untuk melakukan pertanyaan secara langsung. Tapi kalau press conference, memang saya. Jarang beliau memberikan press conference. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti Suro gitu, pasti saya ‘nuwu sewu Sinuhun, ini temen-temen wartawan mau minta keterangan’ kadang ya mohon maaf, off the record juga, ‘ah males ah’ tapi saya pasti akan paksa ‘1-2 menit saja’. Jadi itu yang sebenarnya saya inginkan.”

Peneliti : “Terus nomer 8 pak?”

Narsum : “O..iya. jelas perang statement itu pasti. Pernah.”

Narsum : Nggak banyak. Karena gini ya, prinsip saya sebagai Humas Keraton, saya itu tidak mau ber.. bukan berpolemik ya, atau beropini bukan. Tapi saya tidak mau



ketika e.. statement yang bikin itu dipakai untuk menjatuhkan pihak lain secara kasar ya. Jadi saya lebih menghindar ketika mereka sudah emotional statement, kalau saya boleh membuat sebuah pernyataan baru ya, emotional statement. Mereka muncul, saya lebih baik tidak akan memberi komentar apapun. Tapi ketika bicara opini, pasti saya akan memberi opini. Dan opini yang saya bikin sejauh mungkin untuk menghindarkan pada emotional statement, walaupun kadang itu juga tidak bisa ya. Tapi saya tetep berusaha untuk tidak melakukan emotional statement.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 9 pak? Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk menghadapi media?”

Narsum : “Ya saya media relationship, udah itu aja. Sejauh mungkin saya berusaha untuk mempermudah akses temen-temen. Jadi mau telfon ke rumah monggo, mau maen ke rumah silakan. Jadi saya tidak membatasi. Bahkan saya di luar kota pun, sepanjang saya tau situasi, saya pasti akan langsung menjawab. Kalaupun saya tidak tau, saya akan minta informasi dari Solo, ada apa, baru nanti akan saya jawab.”

Peneliti : “Kemudian bagaimana pak evaluasinya terkait kliping dan dokumentasi?”

Narsum : “Membantu. Membantu dalam kami menyusun strategi. Itu aja. Sangat membantu. Karena dengan adanya kliping, dengan adanya apapun itu, kita bisa melihat, umpamanya untuk kegiatan saja. Untuk kemarin kegiatan tinggalan jumenengan atau memperingati kenaikan tahta itu pesertanya sampai 7000. wah ternyata kita ada kedodoran di sisi ini, ini, ini. O.. fotonya dsbnya, bisa kita lihat. Gampangnya saja saya sebagai Humas, dari foto kegiatan itu saya lihat ‘o.. Sinuhun nuwun sewu, kemarin kurang senyum’ terus ‘dandanane Sinuhun kurang pas’ atau bagaimana dsbnya. Ini kan sebagai evaluasi juga sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi kami selain kliping media ya terutama ya. Kliping media itu kita pakai untuk menyusun strategi.”

#### HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN DAN MASYARAKAT

Peneliti : “Kemudian tentang hubungan dengan lembaga lain dan masyarakat?”

Narsum : “Iya. Kita pasti menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Minimal dengan media. Lembaga lain kan dengan media saya berhubungan, dengan kepolisian kami juga berhubungan, kami juga e.. MA kami juga pernah. Maaf ya, e.. bulan-bulan sekitar Juni, saya malah dipanggil langsung oleh pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden. Jadi, apa namanya, tentu salah satu peran Humas itu adalah menjaga hubungan atau menjalin relasi dengan semua pihak ya, semua unsur ya. Termasuk masyarakat juga. Ya kadangkala kami juga diundang e.. diskusi dsb.”

Peneliti : “Kemudian yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut pak Bambang juga?”

Narsum : “Ya nggak. Ga 100%. Ya memang 100% saya. Tapi saya juga didukung oleh teman-teman yang lain ya. Contohnya sekretaris pribadi beliau, lalu juga saya pasti juga tergantung, ketika saya menjalankan tugas atau harus melaksanakan tugas tersebut, e.. apa yang harus saya hadapi. Umpamanya bicara tentang aspek-aspek budaya yang lebih rinci, ya mungkin saya akan minta tolong ke adik-adiknya Sinuhun. Kaya Gusti Dipo dsb, ‘Gusti panjenengan yang bicara ya’ dsb. Atau ‘panjenengan yang nanti mewakili ya’ atau kemudian juga saya bisa bicara dengan menggunakan unsur-unsur lain yang ada di dalam Keraton. Umpamanya, ketika bicara tentang keris, saya bisa minta empunya keris Keraton untuk bicara.”

Peneliti : “hubungan dengan pemerintah bagaimana pak? Kerjasama yang terjalin?”

Narsum : “Baik-baik saja, buktinya kita masih diakui. Kita masih dapat bantuan dari Pemerintah Provinsi. Walaupun sekarang, ini off the record ya, walaupun sekarang apa namanya, banyak berkurang ya, boleh dikatakan. Tapi bagi kami bukan nilai rupiahnya, tapi nilai pengakuannya. Itu saja. Karena bagaimanapun juga, kan kita orang yang di luar Kraton kan. Kalau orang di dalam Kraton, enak. ‘lha wong yang menguasai kraton saya kok’. Kami kan di luar kraton. Kami butuh pengakuan. Nah ketika teman-teman, baik itu pemerintah dsb-nya, lembaga-lembaga memberi pengakuan pada kami, itu lebih dari cukup. Lha buktinya kraton sendiri juga diundang oleh Presiden pada saat jamuan makan malam. Mereka tidak, kita malah yang diundang. Yang setelah selesai dari Bali. Saya pribadi diundang mewakili kraton ke pak Yusuf Kalla, untuk berdiskusi dengan pak

Yusuf Kalla. Berarti kan ada pengakuan kan? Termasuk juga kami diundang MK masih pak Jimly, tepatnya satu tahun yang lalu. Persisnya tanggal 26 Desember 2008. Solo banjir itu pas saya ada di ruangan pak Jimly dsb. Ini contoh.

Peneliti : “Kemudian kerjasama yang terjalin ya seperti tadi ya pak?”

Narsum : “Ya, jangan dipikirkan kerjasama kemudian kita buat MoU, tidak ya. Tidak. Tapi yang namanya kerjasama itu adalah pemahaman atau pengertian bahwa kita ada. Kadang-kadang kita dibutuhkan karena pemikiran-pemikiran kita, e... seringkali juga diterima. Contoh, ya mohon maaaf, e... sebagian teman-teman kan punya latar belakang akademisi ya, sehingga kolaborasi itulah yang menguntungkan kami. Jadi umpamanya pada saat pak Jimly Assidique itu mengumpulkan hukum-hukum adapt yang berlaku di Indonesia untuk dibuat menjadi sebuah kajian hukum Nasional berbasis hukum adat, itu kadang-kadang juga diminta ikut.

Peneliti : “Kemudian hubungan dengan LSM atau paguyuban atau perkumpulan masyarakat bagaimana pak?”

Narsum : “Jalan. Umpamanya ya contoh kasus saja, e.. apa namanya beberapa waktu lalu ada satu kelompok masyarakat ya, entah itu sebuah LSM atau paguyuban atau apa. E... meminta kita untuk berperan secara aktif. Contoh kemarin pada saat, kelompok apa ya? Lupa namanya. E.. forum lintas agama itu seringkali meminta kita untuk berpartisipasi secara aktif. Terus secara individual juga banyak dari pihak-pihak kraton yang terjun secara aktif di kelembagaan masyarakat ya. Contohnya, Gusti Dipo itu kan sebagai pengurus PMI Surakarta. Dia juga e... apa namanya pengurus, saya lupa itu satu lagi. Banyak lah, jadi baik secara institusi maupun secara pribadi, secara individual kita memang banyak menjalin kerjasama. Contoh kasus juga, e.. saat ini menjelang PEMILU. Sinuhun kan sering didatangi partai-partai politik untuk berdiskusi. Saya tidak mengatakan minta restu. Supaya direstui dsbnya secara langsung. Tetapi setidaknya e... saya dan teman-teman yang membantu Sinuhun berusaha agar posisi Sinuhun, menjaga kenetralisasi Sinuhun dalam menjelang PEMILU ini memang kita coba

berusaha. Jadi semua partai kita terima. Mau Hanura-nya Wiranto, Pak Wiranto sendiri. Mau Gerindra-nya Prabowo. Mau Hidayat Nur Wahid. Mau Bang Yos,dsb. Mohon maaf, karena posisi Sinuhun tidak saya bidik local ya, jadi memang kita dorong ke Nasional ya. Jadi kemarin yang banyak berinteraksi adalah temen-temen di Nasional. Kemarin ketemu dengan Pak Wiranto, Bang Yos. Kemarin ketemu dengan Sri Edy Swasono, Prabowo, dsb. Itu memang kita dorong. Tapi tentunya tetap dengan menjaga netralitas.”

Peneliti : “Kemudian pandangan-pandangan mereka dari paguyuban dsbnya terhadap adanya kenyataan bahwa ada 2 raja gimana pak?”

Narsum : “Ya, mereka menyayangkan. Kenapa bisa terjadi. Dan ada beberapa justru berusaha menawarkan untuk membantu menyelesaikan konflik ini. Dan itu kami ucapkan terima kasih. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan dan sebetulnya itu kerugian ya. Kalau saya boleh membuat satu pernyataan secara implicit, bahwa dengan adanya konflik dua raja itu sebenarnya yang rugi adalah kratonnya sendiri, lalu yang kedua pemerintah, dan yang ketiga adalah masyarakat.”

Peneliti : “Kenapa pak pemerintah?”

Narsum : “Kenapa? Karena begini, bahwa Kraton adalah bagian dari situs cagar budaya. Kraton bagian dari keberadaan Bangsa Indonesia. Karena kan sejarah membuktikan bahwa Bangsa Indonesia ada karena kraton juga, salah satunya Kraton Surakarta. Nah, salah satu tanggung jawab dari pemerintah adalah bagaimana ikut serta melestarikan baik secara langsung ataupun tidak langsung atas keberadaan kraton. Pada saat sekarang ini, mereka mau berperan secara aktif jadi bingung kan? ‘ini yang mau saya bantu yang mana?’. Katakanlah sudah dianggarkan di APBD, APBN, kemudian ‘ini yang mau saya serahkan kepada siapa? Mengko tak serahke di sini, yang sini meri.’ Dsbnya. Sebetulnya yang rugi bukan hanya kraton. Emang nomer satu adalah kraton ya, krtaon itu secara utuh rugi. Dirugikan dengan adanya konflik 2 raja yang tidak berkesudahan ini. Makanya kenapa citra kraton sebagai tempat yang adiluhung, tempat pusernya,

punjering budaya Jawa itu hilang. Lha wong budaya Jawa itu tidak mengenal adanya seperti ini. Lalu yang kedua adalah rakyat, eh sori pemerintah. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat akhirnya terpecah. Seperti panjenengan lihat, mungkin tidak begitu kelihatan di luar, tapi di dalam tembok kraton, itu nyata sekali perpecahan itu. Mana yang nge-blok sana, mana yang nge-blok sini. Kan itu ga bagus.”

Peneliti : “Daerah sini yang kelihatan nge-blok sekali emang daerah mana pak?”

Narsum : “Gampangnya aja pokoknya bagian barat itu nge-blok ke barat. Bagian barat itu banyak yang nge-blok nya ke Tedjowulan. Sementara bagian timur, sebagian nge-blok ke timur. Walaupun sini juga ada yang sebagian nge-blok ke timur. Sebaliknya juga timur nge-blok ke barat, tapi nyata gitu lho. Tokoh-tokohnya barat ada di bagian barat. Jadi tokoh-tokohnya Tedjowulan itu ada di bagian barat. Sementara kelompoknya timur, orang-orang yang ini kebanyakan di timur. Ini kan sebenarnya juga kerugian. Kerugian bagi kelurahan Baluwarti lho. Asal mau mempersatukan gak gampang. ‘emoh aku yen kerjo karo kae’ gitu salah satunya.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 5 pak?”

Narsum : “Kan sudah kan tadi saya jelaskan? Bahwa kita, bentuknya banyak, bisa beranekaragam. Kita bisa dimintai pandangan, pendapat. Kita juga bisa dimintai berperan serta. Mengirim delegasi seperti kita diminta ke, baru-baru ini sih Denpasar. Kita mengirim delegasi penari ke sana. Lalu juga ke Indra Giri Hilir, kita juga mengirimkan delegasi penari kesana,dsb. Salah satu bentuk saja ya.

Peneliti : “E..tapi yang paling penting adalah tadi ya pak, pengakuan?”

Narsum : “Iya. Yang kita kejar kan itu. Gampang kok, simpel. Kalau saya kerja itu bagaimana citra dari Kraton itu diakui dan diterima oleh masyarakat. Pencitraannya hanya disitu, salah satunya.”

Peneliti : “Kemudian tentang ini pak, kok saya pernah baca tentang penyelenggaraan Festival Kraton yang sempat tertunda gara-gara Pemkot bingung ada 2 raja disini, siapa yang akan diikutsertakan.”

Narsum : “Justru itukan, saya katakan siapa yang rugi? Diawal tadi, yang rugi pemerintah.”

Peneliti : “Kalau untuk itu kan yang menyelenggarakan apa pak? Forum Komunikasi Kraton itu ya pak?”

Narsum : “Nah jadi gini, sedikit agak menyimpang ya. Untuk saat ini di Indonesia itu kan sedang giat-giatnya e.. mulai menggali budaya-budaya local ya. Budaya-budaya daerah. Budaya-budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan Nasional. Salah satunya kan bahwa harus diakui Indonesia terbentuk dari berbagai kerajaan, berbagai Kraton. Nah makanya dalam hal ini ada Depdagri dan ada Dinas Pariwisata, yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya. Nah di Depdagri itu fungsinya adalah bagaimana di era otonomi ini, pemberdayaan terhadap kraton, kasultanan, terus kerajaan, ada suku, dsbnya itu bisa diberdayakan secara menyeluruh, bukan utuh ya. Kalau orang mengatakan utuh itu menurut saya kurang pas ya. Menyeluruh. Menyeluruh itu ya dia sebagai situs cagar budaya diberdayakan, mungkin bisa menjadi potensi wisata yang nantinya akan dikelola oleh Departemen Pariwisata. Tapi di luar itu adalah bahwa disitu diharapkan nilai-nilai budaya local masih terpelihara. Nah, maka yang ada saat ini kan semacam pendataan terhadap keberadaan kraton, kerajaan, kasultanan dsbnya yang ada di Indonesia. Dan menurut catatan yang saya ketahui itu, hampir 150-an sendiri. Nah ini yang kemudian memunculkan sekarang ini banyaknya kelompok-kelompok asosiasi. Tercatat ada 3 asosiasi. Ada Forum Komunikasi Kraton Nusantara (FKKN) yang dipimpin salah satu diantaranya adalah kratonnya Hangabehi. Lalu yang kedua ada Forum Silaturahmi Kraton Nusantara (FSKN) itu salah satu penasehatnya adalah Sinuhun Tedjowulan. Lalu yang ketiga, saya baru dengar ketika ada di Kick Andy kemarin, ada Asosiasi Kraton Nusantara Indonesia. Itu koordinatornya keturunan dari raja Sriwijaya. Kalau tadi pertanyaannya kegiatan yang di Solo itu jadi mundur gara-gara ada 2 raja ya karena itu tadi. Karena masing-masing punya pasukan. Masing-masing punya pengikut. FKKN punya pengikut, walaupun mungkin hanya belasan. FSKN punya

pengikut karena di bawah Depdagri. Jadi mohon maaf FKKN itu secara tidak langsung berada di bawah binaan Departemen Pariwisata. Sementara kalau FSKN itu dibawah binaan Depdagri karena kita terdaftar di Kesbaglimas-nya Depdagri, bahkan punya akte notaries dsb. Jadi perbedaannya dengan yang dua, itu kan tidak ada akte notaries. Sebetulnya hanya paguyuban itu, namanya kan juga forum, forum berarti kan bisa paguyuban. Terus akibatnya apa? Akibatnya ketika mereka menyelenggarakan atau ketika Pemkot menyelenggarakan itu ya berhubung kami tidak diundang, ya akhirnya kelompok kami tidak ada yang datang. Demikian juga sebaliknya, ketika penyelenggaraannya di Bali melibatkan FSKN maka kelompoknya FKKN nggak mau datang dsb-nya. Seperti itu.”

Peneliti : “Kemudian yang keenam?”

Narsum : “Ya tadi kan, pencitraan to. Udah itu aja. Jadi pencitraan karena bagaimanapun juga kan bentuk pengakuan, fungsinya itu.”

Peneliti : “E.. Kemudian yang nomer 8 pak?”

Narsum : “Ya sebagaimana mungkin saya harus bisa e.. apa namanya menjalin kerjasama dengan baik. Jadi bagaimana saya menjalin relationship, atau relationship saya harus saya tingkatkan kualitas. Jadi ya seringkali e.. apa namanya kita berperan aktif.”

Peneliti : “Walaupun mereka masih sering kali menanyakan e.. tentang konflik ini?”

Narsum : “Oiya, iya. Tapi sebetulnya saat ini sudah pada tahapan anu sudah empat tahun lebih ya. Orang sudah ‘yo wis’ gitu aja. Jadi kalau di lingkungan kota Solo seperti itu. Kalau di luar memang masih banyak.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 9 pak ?”

Narsum : “Ya, sesuai tupoksinya aja. Tugas pokok dan seksinya ya. Jadi e.. Humas dalam hal ini memberikan penjelasan ya apa adanya. Jadi kita ga usah mengada-ada lah. Fakta sejarah bahwa Kraton Surakarta itu pernah punya dua raja kan juga ada. Bahkan sejarah lebih tinggi lagi, Mataram punya 2 raja juga pernah ada. Sehingga sebetulnya gak harus kaget kita dengan situasi seperti ini gitu lho. Jadi justru ini bagian dari kalau saya boleh mengatakan, dinamika kraton ya. Bahwa saat ini

kraton seperti ini. Hanya saja yang kami, atau pribadi saya menyayangkan adalah ketidakinginan membuka diri dan berusaha untuk apa namanya menyelesaikan konflik ini. Karena semua punya dasar, mereka bicara bahwa 'saya punya hak' itu juga punya dasar. Kita bicara dan mengatakan punya hak juga punya dasar. Justru kenapa sih kita tidak mau mendengarkan, barang semenit. Orang mendengarkan itu paling susah lho. Jadi walaupun saya, maaf ini off the record, walaupun saya humas kraton Tedjowulan, tapi pada titik-titik tertentu saya memang berusaha untuk menyelesaikan ini. Karena bagaimana pun juga keturunan saya kan juga bagian dari keberadaan adanya kraton di Jawa, khususnya Mataram maupun Mangkunegaran. Makanya saya berusaha untuk gimana caranya menyelesaikan persoalan-persoalan ini.”

Peneliti : “Nomer 11 itu tentang eksternal PR pak”

Narsum : “Ya salah satu diantaranya seperti tadi saya bicara barusan. Bukan hanya kerjasama mbak, tapi saya hanya bicara bahwa ini kan berkaitan dengan masyarakat yang masih berkaitan dengan kraton kan? Bahwa masyarakat itu dirugikan dengan adanya konflik 2 raja. Apakah ini bukan sebuah PR? Nah, saya kan pasti ketika ditanya oleh masyarakat, pejabat dsb. Tentu saya akan membela bahwa eksistensi kraton saya harus tetap saya junjung, saya pertahankan kan? Tapi bukan berarti kemudian saya gelap mata kan? Bahwa dan itu sudah menjadi kebijakan dari kraton bahwa penyelesaian, pengedepanan penyelesaian konflik 2 raja ini menjadi salah satu tugas pokok.”

Peneliti : “Tugas pokok dari humas?”

Narsum : “Bukan tugas pokok dari Humas, tugas pokok dari seluruh elemen di kraton. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Jadi kalau orang boleh bilang gimana caranya, kita me-apa ya? Ibaratnya kalau saat ini kita kan perang ya. Tapi perang tanpa menjatuhkan ya. Apa.. menang kanthi tanpa ngasorake. Jadi bagaimana kami bisa menang-nya itu bukan berarti kami harus jadi raja, tidak. Tapi dalam kontekstual, bagaimana kami menyelesaikan konflik ini tanpa salah satu pihak itu merasa direndahkan atau dijatuhkan, gitu lho.



Peneliti : “Kemudian yang soal nomer 12?”

Narsum : “Ya budaya. Ya karena memang kraton kan budaya. Tapi budaya itu kan sekarang luas ya. Tidak hanya bicara tarian ya, tapi juga masalah kehidupan. Ya termasuk system, system kemasyarakatan itu kan bagian dari budaya. System pemerintahan juga budaya, system politik juga budaya. Pernah mendengar negoro mowo tata, deso mowo cara. Ini kan sebetulnya menjadi focus kita. Tadi kan di depan saya jelaskan. Menjelang pemilu ini, kita mendorong Sinuhun untuk berperan secara aktif kan? Dalam konteks aktif disini adalah e.. ketika teman-teman partai itu mengajak diskusi, itu kita justru memberi gambaran ini lho apa yang sudah terjadi di Negara kita ini sudah salah. Harus ada perbaikan, perbaikannya seperti ini. Jadi semacam memberi masukan. Ini yang menjadi focus perhatian kita, jadi budaya dalam konteks yang luas.”

Peneliti : “Kemudian lebih khususnya lagi tentang kasus Pasar Cenderamata itu gimana?”

Narsum : “Ya gini, mungkin saya spesifik untuk kasus Pasar Cenderamata kan begini ya mbak ya, e.. kembali pada tata budaya. Saat ini yang terjadi di lingkungan kraton itu sudah e.. pendekatan budaya itu kalah disbanding pendekatan ekonomi. Sehingga wajah kraton itu sekarang sudah bukan wajah kraton sebagai tempat budaya lagi. Tapi sudah mengarah pada tataran lebih ke perhitungan ekonomi. Itu dasarnya. Lalu yang kedua, kita sangat menyayangkan bahwa di situ itu sudah tatanannya dirusak dengan munculnya tekanan ekonomi yang lebih, ini kok malah mau dibuat lagi untuk menekan lebih jauh. Lha kalau menambah kios, membangun lagi disitu untuk tempat-tempat berjualan apa tidak menekan? Sementara persoalan dampak yang muncul itu kayaknya tidak dipikirkan. Selain lalu-lintas macat, lha itu kan suatu dampak ya. Tapi juga munculnya dampak-dampak sosial yang lain. Iya to? Ini yang sangat kita sayangkan. Dan menurut acuan dari kita, dasar kita, kenapa kita begitu getol menentang pembangunan di pasar cenderamata, pemerintah sudah melanggar dasar hukumnya kok. Pembangunan itu apa? Kan ada UU No. 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Disitu jelas pada pasal 15-nya, barang siapa mau membangun di

lingkungan situs cagar budaya harus mendapat izin dari menteri terkait dan harus dilakukan analisa dampak lingkungan. Dua poin ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Lho apakah tempat itu termasuk situs cagar budaya? Anda bisa baca sendiri BP3, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jateng, menyatakan itu situs. Situs Kartiprojo kan? Itu berarti disitu kan tempat benda cagar budaya, kenapa justru pemerintah sendiri yang membangun? Kenapa pemerintah sendiri yang merusak? Justru tidak mengayomi. Makanya kan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kan terjadi perbedaan pandangan. Itu yang kami betul-betul sampai sekarang pun kami masih fight. Kami masih tetap melakukan berbagai upaya. Bahkan kami, ini saya buka aja biar teman-teman juga tahu ya, kami sudah melihat salah satu UU lagi dimana celah kita untuk menyatakan pembangunan di situs cagar budaya alun-alun utara itu melanggar aturan hukum yang luar biasa. Itu UUNo. 26 tahun 2007, tentang Tata Ruang. Dan ancaman hukumannya pada salah satu pasal dari UU itu adalah walikota bisa dipecat dengan tidak hormat. Sebetulnya bukan sebuah ini ya, tapi ini sebuah penggambaran bagaimana pertanyaan tadi adik ke saya, ke kami. Kenapa kita begitu fight? Karena kita ingin melestarikan. Kalau Anda masuk ke Solo? Yang Anda lihat PGS, BCA semuanya pantatnya menutupi kraton. Begitu masuk ke lingkungan kraton sendiri apa yang terjadi? Kiwo tengen-ne pasar mbak. Ini yang kita sangat menyayangkan. Makanya kan Anda tadi menanyakan, apa yang menjadi titik berat, focus utama? Kita, budaya. Termasuk di salah satu sisinya ada di sini.”

Peneliti : “Kemudian lebih terkait dengan nomer 13 pak? Itu tadi yang dilakukan selain tentunya memberi statement-statement gitu ya pak, lapor ke pihak-pihak terkait gitu gak ya?”

Narsum : “Oiya, iya. Kami sudah melapor kepada menteri terkait. Kami sudah melapor kepada Gubernur. Kami juga sudah melapor ke walikota.”

Peneliti : “Responnya pak?”

Narsum : “Ya sejauh ini pernah respon itu dibatalkan kan IMB-nya? Ya, tapi nggak tahu kok kemudian muncul lagi. Saya sendiri nggak ngerti ya. Mungkin kalau pemahaman atau pendekatannya lebih mengarah pada investasi saja tanpa melihat keberadaan Kraton. Mohon maaf, ini saya agak menyindir pak Wali ya, katanya Solo Future Solo Past kan? Ini past-nya dimana? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau mau bicara Solo Future Solo Past harusnya tahu dong. Dan ini saya sedikit keluar dari konteks ya, saya sebagai Humas Kraton. Saya sebagai masyarakat kota Solo sendiri, melihat saat ini di Solo itu bangunan-bangunan benda cagar budaya itu sudah hilang. Dan ini menjadi focus juga dari Kraton.

Peneliti : “Kemudian tentang bagaimana Kraton berhubungan dengan masyarakat itu diagendakan atau tidak pak?”

Narsum : “Oiya, pasti dong. Kita pasti mengagendakan. Ya contoh kasus, 1 Suro itu kan hubungan kita dengan masyarakat kan? Kita agendakan. Tinggalan Jumenengan pasti kita agendakan juga salah satunya.”

Peneliti : “Ada agenda dari Kraton seperti itu?”

Narsum : “Iya, dan diluar itu kan juga umpamanya dalam rangka PEMILU ini, kan kita juga mengagendakan juga umpamanya e.. seperti kemarin kan ada pertemuan, diundang keman Jakarta dan Denpasar Bali juga kita agendakan. Sinuhun bisa, oke kita datang.”

Peneliti : “Ya, kemudian yang nomer 16 pak?”

Narsum : “Ya, setidaknya keterwakilan ya. Jadi keterwakilan itu kita masih berusaha untuk menangkap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, memang kita coba tangkap. Contoh ketika keprihatinan masalah hilangnya arca-arca Museum Radya Pustaka ya, kita mencoba untuk tanggap. Ikut serta secara tidak langsung, ini sebetulnya bagian dari program kerja. E... untuk mengembalikan barang-barang yang hilang itu, apa namanya di Museum Radya Pustaka dan bagaimana membangun image terhadap museum itu menjadi lebih baik. Kan sekarang ini lagi terpuruk. Salah satu

diantaranya. Dan sebetulnya masih banyak lagi persoalan-persoalan yang kemarin kita masuk secara langsung di tengah-tengah masyarakat.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 17 pak?”

Narsum : “Ya, yang pasti kalau ke Humas-nya ngga ya. tapi ke Kraton-nya iya. Ya tadi kritiknya, kapan bisa rukun. Hanya itu aja. Intinya hanya itu aja. Persoalannya hanya seperti itu aja.”

### KEBUDAYAAN

Peneliti : “Kemudian tentang budaya pak? Yang nomer 1?”

Narsum : “Masih. Semua upacara adat masih ya. Kecuali satu-dua yang berkaitan dengan pusaka ya. Karena pusaka kita tidak pegang ya. Ada di kraton sini. Tapi kita tetep, Suro ya kita tetep melakukan. Pada saat harus e.. apa namanya ke Laut Selatan juga ya kita lakukan. Pada saat sesaji opo kuwi jenenge, Krendowahono ya kita lakukan,dsb. Tetep kita lakukan upacara-upacara itu. Termasuk ketika selama bulan puasa, apa saja yang kita lakukan. Cuma dalam konteks yang lain ya. Kalau Suro, di sini bisa ngirabke kebo, mosok saya ya meh ngirabke kebo, kan jadi lucu kan. Tapi kita buat dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin saat ini e.. kraton lebih.. lebih apa ya, lebih menitikberatkan pada tingkat peningkatan nilai-nilai spiritualitas. Jadi ketika Suro kemarin ya, yo wis kita pake untuk berdzikir ya. Yang mungkin dalam kontekstual yang lebih luas, antara berdzikir dengan tirakatan ya. Dalam tirakatan kan kita bisa berdzikir, dalam tirakatan itu kita juga bisa instropeksi dsbnya.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 2 pak?”

Narsum : “Meluruskan, salah satu diantaranya. Apabila ada persoalan-persoalan yang muncul ya, termasuk diantaranya munculnya persoalan pasar cinderamata.”

Peneliti : “Yang nomer 3 pak?”

Narsum : “Ya kita hanya menyebarluaskan informasi-informasi kepada masyarakat. Ya mungkin agak jauh lagi ya tadi, yang barusan saya jelaskan. Saya memberi penjelasan pada temen-temen media di Jakarta.”

Peneliti : “Kalo yang no empat bagaimana pak?”

Narsum : “Perubahan.. Kalau dikatakan perubahan dari susunan acara / agenda kegiatan ritual adapt, tidak. Tetapi tentunya akan berbeda di dalam penyajiannya ya. Jadi umpamanya kemarin 1 Suro, kami tidak berkirab. Tapi kami justru mengadakan lebih lebih banyak kepada tirakatan. Trus kalau malam selikuran, kita tidak perlu membawa tumpeng sewu. Tapi kita justru malem selikuran lebih bayak berdzikir. Kami selama empat tahun berada di luar ini, kami malem selikuran selalu di masjid agung. Karena apa? Kontekstual kita, itu kan malem turunya lailatul qodar ya? Nah apakah lailatul qodar itu selalu diinikan dengan tumpengan? Tumpeng itu kan mohon maaf, lebih pada simbolisasi, tontonan, belum sampai pada tuntunan. Karena masyarakat hanya menonton, belum bisa memaknai tumpengnya. Terus begitu sampai di sriwedari, tumpenge direbut masyarakat dsbnya. Tapi justru kita mencoba untuk, Sinuhun dalam hal ini, mencoba untuk lebih realitas, bahwa ketika lailatul qodar itu kita mencoba untuk mendekatkan. Lha ini yang coba ditarik. Jadi perubahan bukan perubahan ya, mungkin penyesuaian ya mbak.”

#### SELAMA KONFLIK

Peneliti : “Yang nomer satu pak?”

Narsum : “Ya, berusaha untuk membantu menyelesaikan konflik itu dengan membuat manajemen konflik ya. Tapi kalau sampai sekarang belum ya, kita hanya, mungkin bagaimana mengedepankan pencitraan dan eksistensi dari Kraton sendiri. Itu saja.”

Peneliti : “Kalau misal diukur dengan persentasi, manajemen konflik yang dibangun sama pak Bambang kira-kira berjalan berapa persennya pak?”

Narsum : “Ya, yang pasti ukurannya mungkin saya sendiri tidak bisa persentasi ya. tapi ukurannya adalah bahwa keberadaan dari Kraton Badran dalam hal ini, e.. ternyata semakin diakui. Terbukti kita diminta masukan juga waktu kemarin ketemu pak Jimly Assidique. Kita juga diminta masukan juga ketika ketemu Pak Yusuf Kalla. Bahkan kita juga dimintai masukan-masukan yang lain, dalam konteks yang lebih luas.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 2 dan 3?”

Narsum : “E.. Ya ini ya susah jawabnya. E.. gini ya mbak, e..kalau boleh digaris besar bahwa e.. pimpinan itu kan pasti punya anak buah. Dan tentu dari sekian banyak anak buah pasti ada yang dipercaya. Lha sehingga mungkin lebih baiknya adalah persoalan-persoalan yang panjenengan tanyakan tadi diserahkan kepada masing-masing pembantu. Pembantu dalam hal ini adalah yang membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari dari kraton, e.. untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya. Jadi, e.. apakah ada yang secara khusus ya secara otomatis ada yang secara khusus ya. Umpamanya bagian e.. apa namanya kirim sesaji setiap malam jumat, pasti sudah ditugaskan abdi dalem. Yang memahami tentang keris ya sudah ada empu. Kalau nanti urusan prajurit, sudah ada dsbnya. Jadi semacam itu.”

Peneliti : “Kalau di luar tembok kraton, masih ada nggak pak bentrokan di internal sendiri? Maksudnya di kubu Tedjowulan sendiri?”

Narsum : “Kalau bentrokan nggak ada. Tapi perbedaan pandangan iya. Ya kita tahu sendiri disini bentrokannya seperti apa ya, tapi kalau perbedaan pandangan iya. Karena begini mbak, selama ini mereka sudah puluhan tahun berada di dalam tembok kraton, ya kan? Tentu kan e.. apa namanya environment atau lingkungannya kan akhirnya mendukung untuk lifestyle-nya, gaya hidupnya juga kan. jadi umpamanya, ‘wah kalau tata adapt kraton tu kaya gini’ eh ndilalah ternyata rajanya yang di luar itu, setelah lulus SMA itu kehidupannya lebih banyak di luar tembok. Karena dia seorang militer, sehingga dia banyak bertugas di berbagai daerah. Akibatnya kan environment atau lingkungan yang dia bawa juga beda. Sehingga ketika dia memunculkan konsep-konsep seperti tadi saya katakan, e.. malem selikuran di masjid agung, itu pasti Sinuhun datang. Sementara selama ini tuh Sinuhun nggak pernah datang. Itu Sinuhun datang. Dia bicara, Sinuhun itu kan dimata masyarakat, di mata Tuhan kita tu sama. Sehingga bagi dia, membaur di lingkungan masyarakat akan lebih bisa, karena dia juga Muslim, dia bisa menikmati atau menghayati makna dari puasa itu sendiri.

Peneliti : “Kemudian yang nomer empat pak?”

Narsum : “Ya tadi sudah.”

Peneliti : “Kalau nyetak buku pak? Pernah nggak pak?”

Narsum : “Nggak. Saya memang berusaha untuk tidak me.. mohon maaf mereka sudah melakukan ya dengan membuat buku ini itu. Sebenarnya temen-temen di internal sudah mendorong saya, humas Kraton untuk membuat buku. Tapi Sinuhun sendiri, dan kami melihat bahwa e.. efektivitasnya kan nggak apa, kalau kemudian saya membuat buku putih, istilahnya buku putih ya, untuk meluruskan masalah itu kemudian persoalan menjadi selesai? Nggak juga kan? Nah makanya justru cara-cara yang kita lakukan tidak dengan seperti itu, tapi kita membangun pemahaman kepada masyarakat, bahwa ini bagian dari kehidupan. Lha ini yang kemudian kita mencoba menjelaskan bahwa bagaimana pun juga Kraton tidak bisa tidak akan terseret dalam arus. Saat ini sudah terseret dengan munculnya dua raja itu. Nah justru bagaimana sekarang kita mencoba mengembalikan persoalan yang sebenarnya. Bahwa persoalan dua raja ini nggak bisa nggak jangan dipandang sebagai sesuatu yang negative. Tapi memang ini bagian dari proses, bagian dari proses yang harus dijalani oleh Kraton itu sendiri.”

Peneliti : “Nah kemudian yang nomer 5 bagaimana pak?”

Narsum : “O... setuju saya nggak. Kalau ada persiapan jauh-jauh hari kita sudah lebih dulu menduduki Kraton no. Kita punya pemikiran yang positif lah. Mosok mau sampai seperti itu. Lha begitu terjadi ya memang kelompok mereka seperti itu ya, ya itu aja. Mungkin mereka yang lebih persiapan. Karena mereka yang bisa menduduki lebih dulu.”

Peneliti : “Salah satu fungsi Humas kan forecasting ya pak. Nah ini berkaitan dengan yang nomer 6 pak, bagaimana?”

Narsum : “Iya, dampak yang timbul ya pasti ya itu, sudah jelas. Di awal kita bicara tadi, kan nggak hanya kraton yang terkena, pemerintah dan masyarakat juga. Itu sudah menjadi hitungan kita sendiri. Forecasting kita atau konsep kita kedepan, e.. kalau boleh mengambil bahasa komunikasi, planning kita kedepan, justru saat ini kita berpikir bagaimana menyelesaikan. Terus yang kedua, kalau seandainya itu sudah

terselesaikan, otomatis kita akan berpikir kraton kedepan. Ini yang saat ini sedang kita pikirkan. Jadi kita, karena kan gini mbak, untuk menyelesaikan konflik kan alami ya, nggak bisa nggak, kecuali kita mencoba kekerasn ya, kita duduki dsbnya. Tapi kalau kita mencoba secara alami, itu ka nada sebuah proses ya. Proses dimana masyarakat akan menjadi dewasa. Kalau di dalam politik kan, ada teori V ya. Bahwa saat ini yang terjadi adalah degradasi dari Kraton ya. Kalau dulu kan Kraton dipuja-puja, ini terjadi degradasi. Degradasi di mana arahnya adalah menuju ke bawah. Dan ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan / dijalani oleh Kraton. Sehingga pada titik tertentu dia akan balik lagi, semacam itu. Lha ini yang terjadi. Dan samapai kapan? Lha ini yang sayangnya kita tidak bisa memprediksi secara jelas. O.. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Karena ini bicara adalah watak, bicara emosi, bicara psikologi, bicara manusia. Tidak bisa ditebak. Siapa yang bisa menebak Hangabehi besok bangun tidur, o.. yo wis tak damai. Kan nggak ada yang tahu kan?”

Peneliti : “Dampak apa sih pak yang paling terasa timbul?”

Narsum : “Ya itu tadi. Tiga itu tadi.”

Peneliti : “Kalau yang menjadi focus tadi ya pak? Bagaimana menyelesaikan konflik?”

Narsum : “Iya. Iya betul”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 9 pak?”

Narsum : “Wah ya bukan direncanakan. Sudah direncanakan dan sudah dilaksanakan. Banyak mbak, kita mencoba (kaset mati). Jadi gini, tidak hanya direncanakan, tapi sudah dilaksanakan. Baik melalui pihak ketiga, terutama memang kecenderungan kita adalah melalui pihak ketiga. Soalnya kalau kita direct atau langsung tu ya susah ya. Karena dengan situasi masing-masing bersikukuh dengan argumentasinya yang paling bener bakal susah. Kita sudah banyak melakukan mediasi. Di-mediasi, di-mediatori baik itu oleh tokoh-tokoh Nasional ya. Jangan salah Gusdur, Amien Rais, Wiranto itu udah mencoba semua untuk mediator. Malah terakhir pak Yusuf Kalla minta mencoba untuk menjadi mediator penyelesaian kasus ini. E.. jadi bagi kami ya, kita dari dulu sampai sekarang kita



mencoba untuk menawarkan penyelesaian konflik ini dengan jalan duduk bersama. Saya sebagai Humas selalu mengedepankan, bahwa sekali-sekali kita mau mendengarkan. Kami akan mau mendengarkan kok argumentasi mereka. Tapi cobalah mereka juga bisa mendengarkan argumentasi kita. Lepaskan semua atribut, lepaskan semua kepentingan-kepentingan sesaat. Tapi pikirkan kepentingan jangka panjang tentang budaya Jawa, bukan kratonnya. Karena budaya Jawa akan hilang dengan sendirinya seiring dengan hilangnya kraton. Kalau budaya Jawa masih kuat, kraton hilang nggak masalah mbak. Tapi ketika budaya itu hilang, otomatis kraton hilang kan? Kraton hanya sebagai bangunan bisu yang menjadi tontonan bukan tuntunan lagi. Nah itu yang kalau ditanya strateginya apa, atau apa yang sudah direncanakan. Kami merencanakan dengan semua jalan. Bagaimana cara mempertemukan kedua raja itu dsbnya. Secara langsung dsbnya. Ya tapi samapi sejauh ini belum ada. Bahkan melalui beberapa kerabat, itu kita juga melakukan upaya-upaya terakhir kemarin e.. pas syawalan atau halal bihalal, kita mengundang mereka. Jadi bukan kita ya, melalui pihak ketiga mereka diundang, kita diundang di Jakarta untuk duduk bersama. Tapi faktanya yang datang? Pokoknya kalau sepanjang masih ada factor kepentingan, itu yang kami percaya tidak pernah akan terselesaikan.”

Peneliti : “Jadi selama empat tahun ini belum pernah sekalipun dua pihak bertemu pak?”

Narsum : “Ketemu pernah, dua pihak. Tapi itu saat penyerbuan. Apakah harus dilakukan dengan upaya seperti itu? Upaya paksa? Apakah tidak nanti citranya semakin jatuh? Iya kan?”

Peneliti : “Dalam keadaan yang mau bicara-bicara gitu?”

Narsum : “Nah justru itu pertanyaannya, nomer telfon kita sudah coba cari atau Tanya. Tapi begitu dikontak tidak pernah mau diangkat dsbnya. Kita mencoba lagi dengan jalan halal-bihalal di Jakarta kemarin. Kalau mengaku sebagai Muslim kan harusnya halal-bihalal datang. Tapi kenyataannya? Kan tidak? Sekali lagi, kalau sepanjang disitu masih ada unsure kepentingan pribadi dan ego pribadinya masih dikedepankan, tidak akan selesai. Saya percaya sekali, ada orang-orang tertentu di

lingkungan itu yang lebih mengedepankan pada ego ketimbang kepentingan jangka panjang. Dan sebenarnya mereka tidak pantas disebut sebagai kerabat Kraton, apalagi kalau sampai mengaku putra-putra Kraton. Saya sebagai orang diluar struktur kerabat Kraton ya, apa ya, merasa sangat sayang.”

Peneliti : “Jadi selama ini upaya untuk mempertemukan kedua pihak bukan dalam konteks kekerasan belum berhasil ya pak?”

Narsum : “Belum berhasil. Dan itu kita usahakan terus sampai sekarang. Bahkan kami disakiti seperti apapun, kami tetap mengedepankan pola-pola penyelesaian. Seperti contoh kasus penemuan senjata kemarin. Kalau saya mau, saya bisa minta penggunaan pasal pencemaran nama baik. Tapi kan kita bicara jangka panjang, bukan berarti kita takut. Tidak. Yang kita kedepankan itu tadi. Tapi kalau lama mereka nggak mau ya sudah. Tukel sisan. Putus sisan. Kan orang itu ada batasnya ya. Kalau kita sudah sampai pada tahapannya. Mohon maaf aja, bisa nggak karuan itu nanti.”

Peneliti : “Nah pak, ini pertanyaan saya yang terakhir. Bagaimana pak dengan nomer 10?”

Narsum : “Citra itu ada atau target ada jangka pendek ada jangka panjang. Kraton target jangka pendek jelas saya harus memberikan pencitraan yang positif ya. Terutama bagaimana kami diakui keberadaannya. Sementara jangka panjang bagaimana menyelesaikan konflik ya. Saat ini yang sudah kita upayakan dan masih terus kita lakukan adalah pencitraan yang jangka pendek tadi ya. Untuk bukan jadi jangka pendek ya, akhirnya jadi jangka menengah. Karena kan kalau konflik ini nggak selesai-selesai kan kita tetap harus menjaga citra kita kan? Tentu tanpa meninggalkan jangka panjangnya, bagaimana penyelesaian konflik ini.”

Peneliti : “Terima kasih pak”

Narsum : “Oke, sori ya tadi telat lama”

## **Hasil wawancara Pak Bambang Ary. FSSR UNS.**

Peneliti : “Itu kan sering disebut Kraton Badran, kenapa pak?”

Narsum : “Ya karena tempatnya di Badran. Itu sebenarnya rumah pribadi kemudian untuk sementara waktu ini kita gunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan bagi Kraton.”

Peneliti : “Rumah pribadi milik siapa pak?”

Narsum : “Milik ibu Mooryati Soedibyo, yang punya Mustika Ratu itu.”

Peneliti : “Digunakan sebagai tempat aktivitas mulai kapan pak?”

Narsum : “Ya sejak terjadi peristiwa itu, ontran-ontran itu. persisnya tanggal 31 Agustus 2004.”

Peneliti : “E.. apakah Humasnya Sinuhun Tedjowulan itu dilembagakan pak?”

Narsum : “Secara formal dilembagakan”

Peneliti : “Kalau iya, mulainya kapan pak?”

Narsum : “Semenjak itu. Sebetulnya saya Humas yang ke-4. Mungkin itu untuk pertama kali Kraton punya lembaga Humas ya.”

Peneliti : “Jadi pak Bambang adalah PR yang ke-4 sebenarnya?”

Narsum : “Iya. Saya PR yang ke-4.”

Peneliti : “Yang sebelumnya siapa pak?”

Narsum : “Ada Ibu Koes Arumdaluh, yang pertama. Terus GPH Suryowicaksono, terus yang ketiga Gembong, saya lupa namanya siapa. E.. Gembong itu bukan PR ding, cuma asisten. Yang ketiga saya.”

Peneliti : “Kemudian kalau itu dilembagakan secara resmi berarti ada SK pengangkatan pak?”

Narsum : “Ada. Jadi gini di kelembagaan Kraton ada yang namanya perintah atau dawuh dhalem. Dawuh dhalem itu sudah menjadi SK. Lalu yang kedua secara kelembagaan memang kemudian di Kraton sendiri dibikin e.. lembaga kehumasan, itu ada. Dari dulu belum ada. Baru sekarang ada lembaga kehumasan.”

Peneliti : “Terus berdiri sendiri atau di bawah lembaga yang lain?”

Narsum : “Berdiri sendiri langsung di bawah Sinuhun. Tapi memang di dalam kerjanya berkoordinasi dengan semua instansi atau kelembagaan yang lain.”

Peneliti : “Kalau struktur organisasinya sendiri?”

Narsum : “Kuwi sing nggowo Pak Tundjung, sekretarisnya kan?”

Peneliti : “Kemudian alasan mendasar kenapa kok Tedjowulan membentuk lembaga kehumasan ini pak?”

Narsum : “Ya karena pencitraan, satu. Dibutuhkan pencitraan karena kan ini terjadi sengketa. Lalu kedepannya, dalam konteks kedepannya, itu setelah berjalan, setelah berlangsung yang muncul adalah dibutuhkan seseorang yang mampu manage konflik atau manajemen konflik. Dan itu dipercaya pada bidang kehumasan.”

Peneliti : “Ya, tapi sebenarnya ada SK-nya ya pak?”

Narsum : “He’eh yen aku ra nduwe SK yo mesti diteriaki orang-orang no.”

Peneliti : “Dan ini, pak Bambang aktif sejak kapan pak?”

Narsum : “Saya Januari 2006. Saya mulai dipakai tenaganya Oktober 2005. itu paling lama jadi Humas ya saya. Kita pun ada tupoksinya, tugas pokoknya, diantaranya satu, mengelola kegiatan. Kedua, mengelola media relationship. Ketiga, e.. apa mengelola situasi dan kondisi terkini di Kota Solo terutama berkaitan dengan Kraton. Keempat, ya mengelola konflik, permasalahan. Situasinya lagi seperti ini, kan pasti konflik selalu muncul. konflik dikelola, bagaimana bisa menguntungkan. Memang itu manajemen konflik baru saya perkenalkan ke Kraton ketika saya masuk aktif sebagai Humas. Jadi bagaimana mengelola konflik agar bisa menguntungkan terutama kelompok saya. Atau dengan kata lain bagaimana Kraton bisa mendapat nilai lebih pencitraan dari konflik yang muncul.”

Peneliti : “Ya pak. Sementara ini dulu pak pertanyaannya. Terimakasih nggih pak”

Narsum : “Ya sama-sama. Sorry ya tadi nunggu kelamaan.”

## **Hasil wawancara Pak Bambang Ary, 14 Juli 2008.**

Peneliti : “E.. Pak kenapa di Kraton selalu terjadi perpecahan?”

Narsum : “Ya gini, kalau kita melihat kenapa Kraton ada terjadi perpecahan, kita akan mencoba melihat dari sisi faktor sejarah ya. Kalau kita melihat dari sisi factor sejarah sejarah itu memang e.. apa ya, bukan kok sebagai suatu keharusan, tidak ya. Tetapi muncul beberapa peristiwa yang serupa pada, pada sejarah masa lampau dari leluhur trah Mataram, lha kita mengambil yang terdekat saja aja mulai dari trah Mataram pas Kraton Kartasura, sejak dari Amangkurat saja sudah muncul perpecahan ketika e.. terjadi peralihan kekuasaan. Bahkan di zaman di PB II itu sempat muncul perpecahan Mas Garendi dengan bantuan pasukan orang Cina itu ya, yang dikenal dengan Kudeta Kuning itu ya, atau perebutan kekuasaan oleh orang-orang Cina. Yang mengakibatkan Kraton Kartasura pindah Surakarta. Lalu juga e.. pada zaman Kraton Surakarta Hadiningrat baru berdiri, masih zaman PB II, juga muncul perpecahan yang kemudian menjadikan perjanjian e.. apa namanya Perjanjian Giyanti 1775, yang menjadikan Surakarta dipecah menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta, yang notabene menjadi raja Hamengkubuwono I adalah pamanda PB II, Pangeran Mangkubumi itu sebagai HB I. Kemudian setelah itu pun masih memunculkan perpecahan lagi yang menjadikan Perjanjian Tuntang atau Salatiga itu, dimana menjadikan Surakarta dipecah menjadi Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran. Ini ni sudah terlihat sekali bahwa dari sisi factor sejarah, itu ada semacam apa namanya sebuah gen, kalau boleh dikatakan, selalu ketika terjadi pergantian kekuasaan memunculkan konflik baru. Ini yang nyata sekali terlihat dan sebetulnya di alam merdeka ini pun Kota Solo juga e.. konflik selalu muncul. Kita lihat aja ketika terjadi pergeseran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, peristiwa '66, itu kan satu-satunya walikota yang PKI kan Solo.”

Peneliti : “E.. tadi karena mungkin sejarah gitu ya pak, sebenarnya apa yang membedakan citra dari Kraton sendiri dengan citra instansi yang lain? Mungkin ada sesuatu

yang beda, sesuatu yang dicitrakan ada yang membedakan Kraton dengan yang lain?”

Narsum : “Maksudnya gimana?”

Peneliti : “Satu citra yang benar-benar khas, artinya yang membedakan Kraton dengan citra instansi yang lain?”

Narsum : “O.. Maksudnya dalam sisi PR ya? Gini mbak, kalau jelas. Kalau kita bicara dari sisi PR itu ada perbedaannya yang sangat, kalau orang bilang, sangat khas antara (pause). Oke saya lanjutkan, kalau kita bicara PR dalam Kraton dengan PR di perusahaan, itu kan sebetulnya hampir sama. Cuma kan, perbedaannya adalah apa ya namanya di dalam kenyataannya, kalau mungkin kita bicara pada konflik kedua raja ini, ada ke-khas-an yaitu kan disini lebih banyak me-manage tentang manajemen konflik, ketimbang PR yang sebelumnya. Lalu yang kedua, kalau kita bicara yang lebih biasa, atau yang lebih ke-PR-an pada umumnya, bahwa di dalam PR Kraton sendiri sebetulnya kan yang dipegang adalah manusia dan adat. Bukan sebuah struktur, beda dengan kalau PR perusahaan ya. Ya perusahaan kan yang dijual kan produk, baik itu produk / jasa ya. Sementara kalau di ini kan beda, lha ini yang membedakan antara PR perusahaan dengan PR Kraton. Sehingga ketika kita bicara PR Kraton dan PR perusahaan itu tentu yang muncul adalah bagaimana mengelola sebuah kelompok manusia dengan tingkat adat istiadat yang berbeda. Itu yang jelas.”

Peneliti : “Kemudian ini pak, kalau biasanya e.. orang-orang luar kraton itu memandang kalau ada keluarga kraton yang menjual asset kraton untuk kepentingan mereka adalah sesuatu yang biasa, kraton ga punya dana dsbnya. Nah itu adalah pencitraan yang lain dari kraton sendiri, pencitraan yang bisa dimaklumi. Itu gimana pak?”

Narsum : “O..salah. Itu pencitraan yang negative mbak. Apapun itu yang namanya penjualan benda cagar budaya, tidak bisa di, itu adalah suatu hal yang wajar, kan mungkin dikatakan seperti itu ya, perlu diingat mbak, munculnya stigma seperti itu di tengah masyarakat kan sebenarnya masyarakat sudah tahu di kraton itu yang

namanya jual beli benda-benda cagar budaya itu sudah lazim, udah wajar. Lha ini yang beda, yang menjadikan permasalahan gitu lho, karena kalau kita mau bicara jujur, merujuk pada UU benda-benda cagar budaya kan nggak boleh. Apapun alasannya, kalau dia bilang untuk menghidupi Kraton, wong Kraton juga dapat dana bantuan, stimulant dari pemerintah kok setiap tahunnya, iya kan? Sementara yang menjadi persoalannya paling gampang, ya mohon maaf aja, harusnya dari diri Kraton sendiri yang memikirkan, bagaimana nguri-uri budaya yang ada di Kraton itu dengan sebaik-baiknya. Lha kalau budaya Kraton sudah hilang, terus gimana. Sekarang nggak usah jauh-jauh, orang mengatakan untuk menjadi seorang raja di Kraton itu ada wahyu turun-temurun. Nanti dengan munculnya keris X ini yang bergerak kesana mencari siapa kira-kira, konon katanya seperti itu. Lho kok kemudian keris itu dijual? Dan diganti dengan keris palsu seperti itu, terus cara menggerakkannya gimana? Memahami pengertian kewahyuan, memahami atau pemahaman tentang pergantian kekuasaan itu mereka memikirkan dari cara yang sangat sempit. PB XII sebelum meninggal, beliau sempat berpesan, pada satu wawancara, coba tengok atau liat sebuah jam. Kalau kita melihat jam kan paling tinggi angka 12, terus kembali ke angka 1. walaupun ada angka 13-24, itu satu. Lalu kedua, sebetulnya kalau kita disuruh menengok kepada jam, jam itu kan ada batasnya, manusia itu dibatasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa 1 hari itu hanya ada 24 jam, nggak mungkin ditambah jadi 28 jam. Dengan kata lain, sebetulnya kontekstual yang harusnya bisa dipahami itu kan kewahyuan itu tidak harus diwujudkan dalam sebuah kerajaan, bahwa pergeseran kekuasaan ke yang sekarang ini bukan berarti bahwa itu terjadi masih sama seperti pergeseran dari PB XI ke PB XII, itu harus dipahami. Ini yang kadangkala tidak dipahami oleh yang saat ini memangku, hamengku ning Kraton Surakarta Hadiningrat. Saya mengatakan apakah hanya satu, bisa saja dua-dua rajanya. Hanya saja memang dari kami upaya untuk semacam islah itu sudah kita upayakan berkali-kali. Tapi mereka selalu bicara yang angger-angger dsbnya, nah itu.”

Peneliti : “Selanjutnya pak, tentang PR Tedjowulan sendiri, bagaimana bapak selaku PR-nya Tedjowulan bekerja selama konflik berlangsung?”

Narsum : “Seperti tadi di awal saya jelaskan, bahwa bicara konflik maka bicara manajemen konflik. Maka tugas saya sebagai PR adalah bagaimana me-manage konflik itu dengan sebaik-baiknya, tentu untuk kepentingan kelompok kami gitu ya, tidak bisa tidak. Tapi sebetulnya tidak berpikir pada kelompok kami, bagaimana ke-PR-an yang kami munculkan itu bisa memberi pengaruh yang positif bagi masyarakat juga. Jadi selama ini kita mencoba untuk mengkonsep bagaimana gerak langkah Kraton yang ada di luar, atau raja yang ada di luar Kraton ini itu memberi nilai yang positif. Salah satu nilai positif yang ingin kita tampilkan, yang ingin coba kita gambarkan disini adalah (pause). Jadi yang pasti kan kita berusaha untuk memberikan pencitraan yang positif kepada masyarakat terhadap peranan atau keberadaan raja yang di luar. Banyak lah yang bisa kita lakukan, salah satu diantaranya, sebetulnya konsep ini munculnya dari Sinuhun sendiri, PB XIII Tedjowulan, bagaimana Kraton ke depan itu mampu menjawab semua permasalahan dan tantangan di masyarakat. Lha ini yang kami sebagai PR itu mengolah keinginan dari PB XIII Tedjowulan. Karena kan, kalau kita boleh bicara jujur, kita ini kan di awal sudah saya katakana, yang kita manage ini adalah orang dan adat, system atau budaya. Beda kan kalau produk, kalau produk sudah jelas ya. Kalau produknya bagus tidak perlu PR yang perlu promosi. Tapi ketika produk itu jelek, baru kita butuh PR dan promosi. Disini perbedaannya dengan PR institusi atau perusahaan. Yang jelas kami e.. apa namanya berusaha agar pencitraan yang muncul adalah pencitraan yang positif. Sebagai contoh e.. kita mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah dan pelaksanaan rencana pemerintah dengan Solo World Heritage. Nah yang mana tentu kapasitas yang kita miliki karena kita berada di luar tembok Kraton ya kita mencoba untuk membangkitkan kembali, menunjukkan kembali, menumbuhkan kembali bahwa budaya Kraton atau budaya Surakarta itu nilainya sangat tinggi. Nah karena itu, bagaimana kita nguri-uri, merawat untuk tidak menjual barang-barang pusaka,



tidak menghancurkan peradaban lama. Lha ini yang coba kita soundingkan, kita keluarkan. Lha itu salah satu diantaranya, karena kan kalau tadi panjenengan tanya pada saya, kan sudah ada stigma tentang biasa orang jual, lha ini yang justru kita coba konter, kan ini konflik, nah kita konter jangan, jangan dijual. Lha kalau dijual terus bagaimana? Jangan dihancurkan, sebagai contoh seperti kasus kenapa PB XIII Tedjowulan itu berada di belakang penolakan pembangunan penambahan kios pasar cinderamata. Itu adalah salah satu-nya itu. Tidak pengen, tidak punya tendensi ekonomi sama sekali, kita tidak ada tendensi ekonomi. Justru mohon maaf saja, lawan politik kita punya tendensi ekonomi. Membangun kios kan otomatis mendapat duit, nah gitu lho. Tapi dia menghancurkan peradaban. Disitu kekuatan ekonomi, atau di sekitar alun-alun kekuatan ekonomi lebih dominant ketimbang kekuatan budaya. Sementara dulu orang datang ke alun-alun kekuatannya adalah budaya, bukan ekonomi. Ini sekarang terjadi pergeseran luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah alun-alun utara itu sudah sangat kumuh. Nah ini yang salah satu apa yang kita laksanakan. Bagi kami harga mati menolak untuk membangun. Kalau membangun sudah wujud nyata dari bentuk pekapalan. Itu disitu kan ada sebuah situs kan ya, situs benda cagar budaya namanya pekapalan. Pekapalan itu joglo-joglo itu. Dulu itu digunakan sebagai tempat istirahat ketika ada bupati dari luar kota mau menghadap raja. Kenapa sekarang menjadi potensi ekonomi? Itu yang kita coba untuk itu.. ini yang menjadikan keprihatinan kita. Bukan berarti kita menolak, tidak. Tetapi alangkah baiknya jika tekanan ekonomi dan tekanan budaya itu harus seimbang. Sekarang yang terjadi tekanan ekonomi yang luar biasa akibatnya manusia apa, kemaruk kalau bahasa Jawa, tahu kan? rakus, tamak. Yang ada adalah ekonomi dan ekonomi.”

Peneliti : “E.. ini pak tentang image building. Bagaimana sih membangun image building-nya Tedjowulan, usaha-usaha apa saja yang dilakukan sama bapak dan teman-teman di PR?”

Narsum : “Ya apa namanya image building, kalau saya mungkin bukan image building ya, kalau saya character building ya. Saya kan membangun sebuah karakter, sebelum

menjadikan image building. Maka muncul-lah kemudian dalam konsep kehumasan kami, bagaimana mengubah karakter dari seorang Sinuhun Tedjowulan yang notabene adalah seorang tentara, militer. Kita mencoba karakter yang dia miliki yang sudah ada. Kita nggak mungkin membangun sebuah karakter baru, orang karakter-nya memang dia sudah ada. Itu memberi nilai positif dan menunjukkan bahwa sebenarnya mohon maaf ya karena posisi kami sebagai PR raja yang diluar dan saat ini konfliknya kan bagaimana menjadikan dua raja ini menjadi satu raja kan? Ya kita wujudkan itu dalam pembentukan karakter dari Sinuhun Tedjowulan untuk kemudian tadi image building ya tadi. Sebuah pencitraan karakter yang pertama adalah bahwa yang namanya militer itu selalu disiplin ya, lalu karakter yang kedua yang dimiliki dalam seorang militer adalah jalur komando. Karakter yang dimiliki militer yang ketiga itu hierarki. Ya karakter yang keempat yang dimiliki oleh seorang militer lagi adalah ketika dia mendapat belajar, itu dia mendapatkan semua pendidikan yang tidak diberikan kepada masyarakat. Nah ini yang keunggulan-keunggulan komparasinya ini yang akan coba kita olah. Dengan kita coba membuktikan, satu, hampir di semua Negara-negara monarki yang, baik itu yang sudah dihapus atau yang masih jalan, itu selalu putra-putra mahkota atau calon raja itu di sekolahkan di akademi militer. Contoh Inggris. Nah ini yang menjadikan nilai-nilai keunggulan tersebut kita coba untuk kita wujudkan bahwa PB XII pun juga mempersiapkan putra mahkotanya dengan memasukkan ke dalam akademi militer. Karena apa? Karena ke depan Kraton itu tidak bisa dipersiapkan oleh seseorang yang tidak punya basic yang nyata. Tidak punya pemahaman atau pandangan yang lebih luas, karena orang militer selalu punya pandangan yang lebih luas gitu. Kalau kita coba ungkap lebih jauh, bahwa yang namanya angger-angger, lha ini kita bicara mereka, apakah yang namanya angger-angger itu sudah dijalankan secara penuh? Atau sudah dijalankan secara hukum wajib di dalam pergantian pergantian kekuasaan di Kraton Surakarta Hadiningrat. Ayahandanya saja bukan putra nomer satu kok. Itu yang nomer satu, lalu yang kedua, yang juga perlu diingat bahwa di dalam kraton

itu ada semacam deputi atau pengageng. Deputi inilah yang selama ini menjalankan roda pemerintahan di Kraton Surakarta Hadiningrat. Nah justru ketika raja mangkat, yang diangkat oleh ketiga deputi ini adalah Tedjowulan, bukan disini. Sebetulnya disini kudeta, kalau kita mau bicara dalam konteks pemerintahan, apa yang dilakukan mereka kudeta dengan menutup pintu pada saat pelantikan Sinuhun Tedjowulan,dsbnya. Mungkin mbak masih ingat tahun 2004? Kami merasakan sekali. Mohon maaf waktu itu posisi saya memang belum menjadi seorang Humas mbak. Karena apa yang dilakukan oleh mereka sudah melanggar dari angger-angger Kraton sendiri. Itu yang harus diingat itu. Mereka sudah melanggar angger-angger Kraton sendiri, mereka tidak sah untuk menjadi raja kok berani mengatakan sah. Wong ayahanda tidak pernah mempersiapkan kok. Kenapa kalau memang betul si Hangabehi menjadi putra pertama, kenapa ayahanda tidak mempersiapkan dari dulu? Pasti kan ada sesuatu kan? saya tidak mau mengatakan apa sesuatu itu, tapi pasti ada sesuatu kan? Lha kalau mau ya mbok sudah dari jauh-jauh hari. Dan saya sendiri sudah membuktikan mbak, kepada apa beberapa e.. apa namanya orang-orang yang selama ini di lingkaran satu,ring satu-nya PB XII dulu. Itu semuanya sudah bercerita bahwa ketika muncul gagasan untuk mencari kembang Wijayakusuma, kata orang Jawa kan untuk menjadi raja harus mencari kembang wijayakusuma di Cilacap, itu yang disuruh adalah Tedjowulan. Itu yang ngomong adalah sekretaris pribadi PB XII. Sayangnya beliau sekarang sudah almarhum. Tapi saya punya rekaman pembicaraan, saya rekam pembicaraan itu. Hanya saja itu tidak bisa berjalan karena beliau, Sinuhun Tedjowulan pada saat itu bersamaan ditugaskan ke Aceh. Nah sebetulnya fakta-fakta sejarah udah ada kan? jadi siapa yang sebenarnya the right man in the right place-nya itu kan sebetulnya sudah kelihatan, bukan bicara angger-angger.”

Peneliti : “Tadi kalau semuanya kan sudah, apa ya pak, kalau di dalam kraton sendiri dan pihak Tedjowulan sudah tahu gimana perjalanannya dsb. Nah bagaimana itu disoundingkan, di e..di wujud nyatakan keluar?”

Narsum : “Lho sudah jelas mbak, hasil ketiga apa, hasil pengangkatan dengan persetujuan tiga Pengageng ini di-akte notarisikan mbak. Ada akte notarisnya dan sekarang sudah dipegang oleh Presiden. Terakhir wapres minta hari Kamis yang lalu, saya datang kesana, saya berikan. Makanya kalau boleh saya utarakan, masyarakat sebetulnya tahu, tidak perlu di-soundingkan, masyarakat tahu. Masyarakat Baluwarti terutama tahu, siapa sih yang sebenarnya layak dan tidak layak. Kan selama ini kita mencoba untuk mengkomunikasikan kepada mereka dengan jalan ‘ayolah kita islah’ mereka berdua-lah tanpa perlu direcoki orang lain. Nggak perlu ada saya, nggak perlu ada siapa saja. Ndilalah kok ya PR-nya Gusti Behi itu namanya Bambang juga gitu lho. Nggak perlu ada dia, nggak perlu ada saya. Demikian juga nggak perlu ada seluruh keluarga yang lain. Biarkan kedua raja itu ping suit kek, apa kek untuk menetapkan rajanya siapa. Itu akan lebih baik mbak. Perlu saya tegaskan ya mbak, bahwa potensi konflik dari munculnya dua raja ini di masyarakat sangat tinggi. Dan itu bisa membahayakan kepentingan masyarakat-nya. Kalau kita tidak mau hati-hati, karena munculnya dua raja ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang maksudnya tidak baik, dan itu sudah kami cium gelagatnya. Kita melihat sekali potensi konfliknya luar biasa berbahaya. Masyarakat yang kasihan. Contoh kasus, masyarakat Baluwarti terbelah menjadi dua kan?”

Peneliti : “Ini pak, sebenarnya citra apa yang ingin dibangun dan ingin disampaikan oleh pihak Tedjowulan?”

Narsum : “Sudah kan tadi? Bahwa yang namanya pencitraan kita karakternya adalah dengan menggunakan apa yang dimiliki. Nah kemudian awareness untuk branding image pencitraannya adalah e.. kita ingin ada perubahan. Karena sesuai dengan amanat dari PB XII, bahwa bagaimana eksistensi Kraton ke depan di dalam menjawab tantangan perkembangan zaman itu bisa benar-benar terwujud. Karena Kraton ke depan tidak bisa hanya bicara bahwa Kraton itu punya 3D ‘dawuh-dawuh, dangu-dangu, duka-duka’ Kraton ke depan harus lebih dari 3D tadi, bagaimana Kraton ke depan itu pada globalisasi tapi eksistensi Kraton itu masih

dipegang. Salah satu yang sudah diberikan contoh PB XII, dia menjadi bapak bangsa perdamaian. Nah inilah yang coba di kembalikan oleh salah satu diantara pencitraan yang kita lakukan. Dengan jalan ya itu tadi kami mencoba mengkomunikasikan, memikirkan bahwa munculnya masalah-masalah yang sekarang terjadi karena kita sudah kehilangan akar sejarah kita.”

Peneliti : “Jadi memang lebih fokusnya ke budaya tadi pak?”

Narsum : “Iya”

Peneliti : “Dan tadi pak sudah dikatakan beberapa karakter dari Tedjowulan. Nah program-program ke-PR-an sendiri bagaimana mengarahkan seseorang Tedjowulan untuk mengikuti program ke-PR-an itu sendiri?”

Narsum : “Ini perbedaannya antara PR sebuah instansi dengan PR di Kraton. Mungkin sebetulnya hampir sama ya. Pimpinan sebuah institusi itu belum tentu dengan mudah akan dengan mengikuti konsep yang dibuat oleh PR-nya dan itu sama sebetulnya ditempat kami juga. Apalagi di tempat kami, bagaimanapun juga akar budaya masih kuat, bahwa yang namanya raja itu sabda pandita ratu tan keno wola-wali, apa yang sudah diucapkan oleh raja itu adalah sebuah sabda yang harus dilakukan, hukumnya wajib. Nah ini yang membedakan mbak, walaupun sekarang sudah nggak seperti itu lagi, kita nggak mungkin seperti itu ‘harus ikut apa yang kita konsep’. Tentu apa yang kita konsepkan, apa yang persiapkan, kita rancang itu harus kita komunikasikan. Ketika kita komunikasikan, itu kan kita mencoba menyesuaikan juga sehingga unsur keselarasan dan keharmonisan itu yang kita kedepankan. Raja maunya apa, kita punya apa. Bisa ngga ini dipadukan, kalau ndak bisa, ya bisa kita mengalah atau mungkin kita bisa memberi masukan. Maka disini manajemen modern kita pakai juga.”

Peneliti : “Usaha-usaha apa yang dilakukan untuk paling tidak mempertahankan citra positif setelah berita-berita penyerangan yang ada di media-media itu?”

Narsum : “Ya saat ini, sebetulnya kemarin munculnya kasus istilahnya penggebrakan ya kelompok dari Sinuhun Tedjowulan itu adalah wujud nyata dari sebuah akumulasi. Jadi kan sebetulnya kita berkali-kali mengajak islah, tapi mereka kan

tidak bergeming untuk itu. Lha ini yang salah. Kalaupun sekarang muncul itu adalah yang kita munculkan tidak seperti itu lho, mohon maaf saja, itu dulu saya belum jadi PR. Nah jadi ketika diminta jadi PR ya saya berusaha mengubah pola-pola yang ada. Jadi pola yang kita wujudkan ya seperti itu tadi, yang saya katakana, bagaimana peranan Kraton kedepan dalam tata kehidupan masyarakat terutama masyarakat Surakarta. Maka yang kita jawab adalah permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan Kraton. Kalau kita tidak memikirkan itu ya susah. Lama-lama Kraton ambleg. Maka muncul kemarin kita menentang pasar cinderamata, bukan berarti kok kita menentang pembangunan, salah. Bahwa yang namanya pembangunan kan tidak harus merusak, kalau pembangunan itu samapai merusak itu namanya bukan membangun. Dan apakah semua kebijakan pemerintah itu harus dituruti oleh masyarakat? Bahwa tidak semua rencana pembangunan bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Pencitraan kita adalah kita melawan, tapi melawan dengan sebuah konsep. Yang kita lawan adalah semua yang terencana dsbnya.”

### **Hasil wawancara Pak Tundjung, FSSR UNS, 12 Desember 2008.**

Peneliti : “Sejarah tentang Humas PB XIII Tedjowulan bagaimana pak?”

Narsum : “Sejarah tentang Humas dari pihak PB XIII Tedjowulan, kapan. Itu dimulai sejak dinobatkannya PB XIII Tedjowulan sebagai raja yang berada di luar e.. Kraton. Tepatnya tanggal 30 Agustus 2004. Sejak saat itulah tersusun sebuah struktur organisasi yang di dalamnya ada fungsi e.. kehumasan atau fungsi pejabat Humas. Yang pada saat itu pertama kali dijabat oleh GPH Suryowicaksono, adik dari PB XIII Tedjowulan dari lain ibu. Alasannya dibentuk kehumasan itu karena untuk memberikan informasi, untuk menjalin hubungan komunikasi dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan konsolidasi secara internal di pihak PB XIII Tedjowulan agar dapat memberikan satu citra bahwa eksistensi PB XIII Tedjowulan itu didukung oleh 3 Lembaga Pengageng. Yaitu, Pengageng Putra Sentana, Pengageng Parentah Kraton dan Pengageng Keputren. Sehingga fungsi Humas disini itu memberikan justifikasi terutama terhadap eksistensi PB XIII Tedjowulan sebagai raja yang dinobatkan di luar tembok Kraton. Sehingga fungsi Humas disini sangat sentral sekali.”

Peneliti : “Apakah Humas tersebut dilembagakan pak? Dibawah apa?”

Narsum : “Nah kemudian apakah itu dilembagakan? Iya. E.. itu berada di bawah struktur Lembaga Pengageng Parentah Kraton. Nah dengan demikian kalau ditanyakan mengenai SK pengangkatannya, di dalam satu struktur dan sistem kekuasaan di Kraton, yang namanya SK itu bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tertulis. Secara tertulis itu sudah ada dalam satu struktur yang di tandatangani langsung oleh Raja. Secara lisan itu juga merupakan dawuh bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugas kehumasan.”

Peneliti : “Kemudian untuk tugas dan ruang lingkup kerja Humas sendiri bagaimana pak? Apakah ada juga batas waktu untuk menjabat?”

Narsum : “Nah kemudian pada tahun 2005, karena sesuai dengan e.. apa.. aksesibilitasnya dari PB XIII Tedjowulan itu semakin e.. berkembang untuk mempertahankan

eksistensinya maka dibuat dua e.. lokasi yang pertama ada di Jakarta dan di Solo. Di Solo yang semula dijabat oleh GPH Suryowicaksono akhirnya dijabat oleh KRHT Bambang Pradotonagoro, SH yang itu memfungsikan Humas secara definitif untuk Solo dan definitif untuk Jakarta dipegang oleh GPH Suryowicaksono. Keduanya melakukan koordinasi dalam bidang kehumasan yang fungsi dan tugasnya sama e.. untuk apa kegiatan-kegiatan menjaga eksistensi dan citra PB XIII Tedjowulan. Kemudian e..lama menjabatnya ya sampai e.. ada perintah selanjutnya atau ada dawuh berikutnya dari seorang raja untuk melaksanakan e.. jabatannya itu sampai kapan. Jadi tidak ada tenggat waktu bahwa ini harus berhenti dsbnya. Semuanya tergantung dari e.. apa perintah atau kehendak dari Raja itu sendiri.”

Peneliti : “Kemudian untuk tugas dan ruang lingkup?”

Narsum : “Tugas dan ruang lingkup kerja Humas PB XIII Tedjowulan itu, satu, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan acara adat yang dilakukan oleh PB XIII Tedjowulan beserta lembaganya yang berpusat di Sasana Purnama Badran. Kedua, memberikan informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan PB XIII Tedjowulan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ketiga, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk kegiatan-kegiatan PB XIII Tedjowulan dan mewakili PB XIII Tedjowulan dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang mengundang PB XIII Tedjowulan. Sehingga fungsi Humas disini bukan hanya sebagai fungsi Public Relations tapi juga sebagi protokoler, juga sebagai wakil dari Raja. Semuanya tergantung dari e.. apa perintah dan kehenak raja itu sendiri. Dan sistemnya bisa melalui sekretaris atau berdasarkan e.. perintah langsung kepada pejabat Humas tersebut. Jadi fungsinya sangat luas sekali.”

Peneliti : “Kalau tentang sejarah Kraton Badran sendiri, bagaimana pak?”

Narsum : “Kemudian yang berkaitan dengan sejarah Kraton Badran, perlu saya sampaikan bahwa Badran itu bukan Kraton. Kratonnya tetep ada di dalam Kraton yang e.. Kasunanan di daerah Kecamatan Pasar Kliwon itu. Di Badran itu adalah suatu



tempat yang digunakan untuk operasional e.. PB XIII Tedjowulan. Itu kira-kira yang berkaitan dengan e.. masalah kehumasan Tedjowulan.”

Peneliti : “Makasih ya pak...”

## **Hasil wawancara Gusti Mung, 27 Januari 2009.**

### MEDIA

Peneliti : “Selamat siang bu, ini daftar wawancaranya.”

Narsum : “Lha akeh banget, langsung iki?”

Peneliti : “Nggih bu..”

Narsum : “Saya bicara Kraton sekarang dan Kraton dulu sangat beda nggih. Kraton sekarang sejak PB XII itu yang dimana dulu Humas lebih di-apa ditunjuk oleh Sinuhun karena memang dianggap menguasai segala sesuatu informasi tentang Kraton ya pada waktu itu Kanjeng Yosodipuro, gitu. Tapi kalau sekarang e.. perkembangannya kesini setelah Kanjeng Yosodipuro tidak ada dan seperti apa yang e.. terjadi di Kraton bahwa SDM-nya itu kan semakin lama semakin.. karena Kanjeng Yosodipuro itu kan karena beliau lebih banyak hidup di dalam Kraton, tahu persis kehidupan Kraton dan tata cara upacara yang berlangsung, mengikuti terus. Terus banyak membaca, banyak mengalami sendiri. Dan itu terekam dalam pikirannya, sehingga akhirnya dia sangat apa menguasai segala sesuatu informasi Kraton. Lha Kraton sejak Republik kan sudah tidak menjadi pusat pemerintahan, yang dimana hanya tinggal sebagai e.. pusat kebudayaan yang masih melakukan segala kegiatan apa upacara adapt, upacara budaya itu. Nah ini yang pasti pergeserannya menjadi sangat banyak gitu.”

Peneliti : “Tapi kalau menjalankan fungsi mendokumentasikan kegiatan-kegiatan seperti itu berjalan juga bu?”

Narsum : “Sebetulnya sejak PB XII, saya sendiri tidak pernah melihat. Jadi dokumentasi itu sendiri banyak dilakukan perorangan, seperti saya sendiri juga e.. melakukan karena saya merasa e.. apa ya membutuhkan informasi itu. Membutuhkan dokumen upacara itu terus seperti gendhing-gendhing saya mendokumen sendiri gitu. Itu lebih pada perorangan dan itu lebih pada e.. kesadaran daripada tanggung jawab sebagai anggota keluarga raja itu.”

Peneliti : “Kalau berita yang dikliping, berita yang seperti apa? Kategori berita yang bagaimana?”

Narsum : “Ya berita yang mengenai Kraton dan mungkin kalau yang diluar Kraton yang ada hubungannya dengan Kraton itu kalau perlu ditindaklanjuti atau perlu diluruskan yang tidak benar informasi tentang Kraton ya kita akan luruskan. Seperti yang terjadi kemarin itu ada pemberitaan di Indosiar itu langsung saya kirim surat, saya minta rekamannya. Karena ini sangat tidak apa lazim dilakukan oleh orang-orang Cina di tanah Jawa ini. Mosok menyebut PB II itu pengkhianat, lha kan kurang ajar ini. Dia membikin opera, terus musiknya Remi Silado. Terus dia mengambil buku karangannya siapa itu, saya dikasih. Katanya sudah beredar, orangnya sekarang di Amerika. Lha sekarang kalau bangsa sendiri itu sudah kurang ajar sama leluhurnya, meng-apa menghujat ini, terus mau jadi apa? Dia itu siapa gitu lho, kok menghujat leluhurnya gitu lho. Apalagi ini raja saya, itu raja dulu adalah Kepala Negara. Memangnya tiba-tiba Republik? Lha itu kan perlu, saya minta hari ini katanya mau dikasih ke kerabat kita, mau kita lihat. Ini sudah memicu SARA lho. Iya to? Dia maunya memperlihatkan ketokohan seorang Cina, dalam ikut mengusir penjajahan. Lha wong dia itu penjajah kok, dia itu yang penjajah, harus diusir. Gitu lho.”

Peneliti : “Iya bu, kemudian tadi kan ibu ngendiko kliping itu adalah tanggung jawab pribadi sebagai keluarga kerajaan. Nah, kalau e.. pribadi ibu sendiri digunakan sebagai apa itu kliping-kliping seperti itu?”

Narsum : “Nah itu kenyataannya kan foto-foto, dokumentasi saya untuk membangun Kraton ini pakai foto-foto saya semua. Jadi dilihat dari hasil foto-foto saya tersebut, e.. 2 bulan sebelum terjadi kebakaran itu karena nggak tahu saya seperti ada yang menggerakkan, saya potretin saja semua. Ya kalau sekarang menulis itu kan lebih kepada berita itu. Kita bicara, kita kliping gitu. Terus sekarang juga sebetulnya dari dawuh-dawuh saya sekarang jadi Pengageng Sasana Wilapa kan. Itu kan semua kegiatan di dalam Kraton itu kan ada dawuhnya. Lha dawuh itu kan bisa menunjukkan apa yang terjadi di Kraton itu. Mulai dari upacara adapt yang

sudah rutin atau tamu atau peristiwa apa yang harus, itu kan semua dawuh dari Sasana Wilapa gitu.”

Peneliti : “E.. Kalau ini bu, apakah Humas Kraton juga menjalin kerjasama dengan salah satu media untuk mengekspos kegiatan Kraton?”

Narsum : “Nggak punya duit.”

Peneliti : “Jadi memang mereka ya bu yang masuk?”

Narsum : “Iya mereka yang masuk. Jadi sudah tahu, kadang-kadang kalau kita ada kegiatan yang diluar rutinitas itu kita kasih tahu wartawan e.. ya harian setempat. Mereka biasanya terus nglumpukke rekan-rekannya untuk kita pers release atau kita ada upacara, ikut terjun meliput gitu.”

Peneliti : “Ngomong-ngomong soal konferensi pers seperti itu, Humas Kraton sering nggak bu melakukan konferensi pers untuk memberikan penjelasan?”

Narsum : “Sekarang itu saya tidak bisa mengatakan e.. lebih kepada Humas ya. Karena semua sekretariat sini itu e.. kita yang ada disini itu kan kebanyakan kan seperti saya dengan Kanjeng Win itu kan memang mau tidak mau menjadi PR-nya Kraton gitu. Dan kalau saya nggak bisa memberi keterangan ya Kanjeng Win, kalau tidak bisa ya Gusti Puger. Nah berdasarkan kita memberikan apa keterangan pada per situ berdasarkan apa kebutuhan dan apa bidangnya masing-masing gitu.”

Peneliti : “Jadi tadi yang biasanya memberikan statement kalau nggak Gusti Mung, Gusti Puger, ya Kanjeng Winarno gitu?”

Narsum : “Iya begitu.”

Peneliti : “Nah kalau ini bu, e..”

Narsum : “Memang sebetulnya disini itu juru penerangnya sendiri e.. adalah abdi dhalem juru penerang itu. Tapi itu kan lebih kepada guide, kerjanya di museum gitu. Tapi kalau Sasana Wilapa itu kan kesekretariatan, jdi meliputi keseluruhan apa kegiatan di dalam Kraton itu, semua yang melakukan, semua yang menekel, yang dhawuh-dhawuh itu semua, surat-menyurat, semua di Sasana Wilapa. Ya otomatis Sasana Wilapa sendiri harus mampu menjadi apa Humas juga, walaupun kemarin juga ada Kanjeng Lintang itu, tapi Kanjeng Lintang karena keberatan apa e..

tugasnya di Fakultas, kan jadi tidak efektif. Jadi ini kalau ada ini terus ndadak ‘o.. dhakem mboten saget’ gitu kan ya sudah, yang bisa saja siapa gitu. Jadi semua serba dilakukan siapa yang mampu, siapa yang ada.”

Peneliti : “Nah bu, dimasa kemarin yang sempet dibilang ada konflik di Kraton seperti itu, sempet terjadi nggak bu perang statement di media massa antara pihak Tedjowulan dengan pihak yang didalam Kraton sendiri?”

Narsum : “Ya pasti itu. Karena itu kan kalau apa media itu kan membangun opini gitu. Jadi memang untuk memanjangkan masalah, jangan mandeg itu kan mesti dibikin. Ya kadang-kadang saya bilang ‘A’ malah digawe ‘B’ yang supaya disini muncul begini, kan selalu begitu. Tapi akhirnya kan itu semua yang kita lakukan itu adalah aturan Kraton. Udah kita nggak urusan mau sana mau ngomong saya akhirnya sudah nggak mau. ‘situ tulis sendiri aja, saya nggak mau. Wong saya bilang A, kamu nulis B, ngapain aku?’ Lha itu pasti karena duit itu dan saya tidak mau dijadikan komoditas apa media untuk kepentingan ekonomi, ya kepentingan media itu sendiri kan gitu. Ya itu berjalan lama tapi sekarang saya nggak pernah mau bicara tentang dia, tentang mereka. Itu bukan bagian lagi dari Kraton.”

Peneliti : “Biasanya yang memberikan penjelasan dulu itu tentang hal seperti itu siapa?”

Narsum : “Saya. Karena saya yang sangat tahu aturan Kraton. Saya yang sangat tahu hukum Kraton. Saya dan Gusti Puger ya gantian terus.”

Peneliti : “Kalau yang selama yang dulu-dulu itu masih rame dsbnya itu ada strategi khusus nggak bu menghadapi media yang gencar sekali memberitakan seperti itu?”

Narsum : “Ya kita lihat apa statement apa disitu ya sekarang mau ikut ngebrukke apa sebuah tatanan budaya apa mau ikut melestarikan? ‘Kalau mau ikut ya silakan tulis yang jelek gitu’ Saya gitukan aja kalau saya. Saya kan orangnya begitu, tegas.”

Peneliti : “Ya. terkait dengan kegiatan kliping tadi ya bu, yang dijalankan secara pribadi seperti itu, dari pribadi sendiri ada evaluasi nggak bu? ‘wah ini berapa bulan sekali harus saya evaluasi klipingnya.’”

Narsum : “Ya pasti itu ada. Karena setiap kita membaca pasti langsung kita evaluasi, gitu lho.”

Peneliti : “Kemudian untuk poin hubungan dengan lembaga lain dan masyarakat. Kalau Kraton sendiri bu juga menjalin hubungan dengan lembaga lain nggak bu di luar Kraton?”

Narsum : “Dalam hal apa?”

Peneliti : “Ya kebudayaan mungkin dalam hal birokrasi?”

Narsum : “Kalau birokrasi yang jelas wong hubungannya dengan pemerintah. Begini kalau dalam melestarikan itu tinggal manusianya itu membutuhkan nggak gitu. Lha sekarang yang saya lakukan, saya memberikan tentang opo kuwi budaya. Opo kuwi wewangunan Kraton, opo kuwi jenenge paes iki. Itu disetiap desa-desa, setiap masyarakat ndeso itu malah masih membutuhkan kawruh seperti itu. Terus masih menjalankan laku budayanya, dalam arti apa dia itu juga sebagai masyarakat adat, gitu lho. Itu yang dilakukan Kraton untuk ajak-ajak untuk melestarikan apa kebudayaan. Nah itu kita langsung dengan masyarakat yang memang dia menginginkan begitu. Nah kalau dengan lembaga, sebuah lembaga itu umpamanya kalau sekarang tarian, kita mementaskan tarian lha itu baru kita berhubungan dengan lembaga lain.”

Peneliti : “Yang bertanggung jawab terhadap hal kerjasama seperti itu siapa bu?”

Narsum : “Ya kalau dulu nggak pernah ada ya sejak ada kita pentas-pentas keluar Kraton itu kan sejak tahun 1984. Itu mulai keluar negeri kan tahun itu. Nah itu ya karena harus berbadan hukum, lha kita membikin yayasan Pawiyatan Kebudayaan Kraton Surakarta. Itu yang e.. menjalankan untuk perjanjian-perjanjian, ikatan yang ada hukumnya itu tadi, dengan pihak lain untuk menjalankan kegiatan kebudayaan. Kalau disini, di dalam negeri, itu Kraton sebagai lembaga adat karena diakui bisa, tapi untuk keluar negeri harus memakai berbadan hukum, karena itu menyangkut kalau ada kekeliruan atau kesalahan yang jita bisa menuntut secara hukum.”

Peneliti : “Kemudian hubungan dengan pemerintah bu? Kerjasama seperti apa bu yang terjalin dengan pemerintah?”

Narsum : “Ya pemerintah itu sebetulnya, seharusnya ngerti, negoro itu dulunya punya sopo gitu. Ya kalau saya dibilang bekerjasama e.. dalam hal ini ya kita melakukan itu sudah kewajibannya Kraton kok. Nah itu, lha kerjasama itu biasanya seperti ini nanti kita diminta, karena ternyata masyarakat itu kalau ada apa ya.. ternyata apemnya itu masih dari Kraton begitu, ternyata masyarakat itu masih begitu. Terus pemerintah kabupaten itu minta kerjasama dengan Kraton, itu.. untuk apem itu ya dibikin dari sini di bawa kesana.”

Peneliti : “Kalau hubungan dengan LSM, paguyuban, atau perkumpulan masyarakat seperti itu wonten bu?”

Narsum : “Ya biasanya masyarakat itu malah yang datang ke Kraton untuk menyampaikan apa yang dia inginkan untuk bekerja sama dengan Kraton. Umpamanya seperti seminar-seminar tentang apa e.. kebudayaan itu sendiri, tentang e.. bedah buku, tentang opo jenenge e.. seminar tentang tata rias manten, tentang busana, yo wis yang bersangkutan dengan itu adalah ciptaan eyang-eyang saya. Tapi kalau Kraton memang sudah dibuka untuk bisa dilihat oleh umum, terus bisa diketahui sejarah tentang Kraton itu, sudah menjadi rujukan untuk apa peneliti-peneliti. Nah itu kan akhirnya bekerjasama itu dengan e.. universitas dengan lembaga-lembaga itu ada MoU-nya.”

Peneliti : “Kalau pas rame-rame kemarin nggih bu, konflik dsbnya itu, bentuk hubungannya Kraton sendiri gimana?”

Narsum : “Itu, itu jangan dibilang itu konfliknya Kraton ya. Itu wong edan sing ora ngerti nggone begitu. Lha iya no? Dia bukan konflik dengan Kraton, wong Kraton itu aturannya seperti itu kok. Dia aja yang nggak mau mengikuti aturan Kraton.”

Peneliti : “Tapi cara dari pihak dalam Kraton sendiri bu? Memberikan penjelasan keluar, memberikan pemahaman, ini lho yang bener seperti itu, dengan langkah-langkah yang gimana saja?”

Narsum : “Kita kan bolak-balik pers release. Tapi pers release pun diplintir-plintir to? Karena ben dowo. Kan kalau di daerah sini semuanya tahu, kabeh ngerti, mudeng. Wong mereka ikut upacara opo jumenengan itu. iki piye to jane.”

- Peneliti : “Kemudian membuat hal seperti apa lagi agar penjelasan ke masyarakat semakin jelas?”
- Narsum : “E.. Saya hanya satu kalau masalah itu ya. Dia, mereka itu bukan lagi bagian dari Kraton, udah cukup. Jadi saya sudah tidak mau membicarakan dia, untuk apa? Wong bukan bagian dari Kraton kok. Saya bukan masalah apa-apa lho mbak. Saya yang bertanggung jawab di Kraton untuk menjaga kelestarian Kraton, itu.”
- Peneliti : “Kemarin saya sempet dapat buku bu dari Kraton ‘Yang Sah dan Yang Resmi’ itu sendiri e.. penerbitannya dilakukan setelah penobatan?”
- Narsum : “Oiya. Itu karena memang kita perlu dibukukan, karena itu tidak tertulis. Yang tertulis disitu itu bahwa sopo sing ketitik, bakal dadi jumeneng ratu kuwi, emapt nama itu. Itu di Sasana Pustaka ada. Terus aturan-aturan apa tata cara upacara apa yang tercatat disana kan bisa dilihat.”
- Peneliti : “Jadi penerbitan buku itu dimulai setelah penobatan raja nggih bu?”
- Narsum : “Iya, juga itu untuk pegangan e.. sentana dan abdi dhalem sini gitu.”
- Peneliti : “Jadi buku itu adalah untuk meluruskan?”
- Narsum : “Yo ben ngerti. Karena pemberitaan kan tidak benar. Ya kita membikin buku ya untuk komunitas itu sendiri. Ini lho yang bener. Kalau kemarin Yusuf Kalla itu nanyain ini, tak ke’i surat, tak ke’i bukune kuwi. Rampung. Pelajarono dhewe kono. Dan itu bukan urusan Yusuf Kalla, bukan urusannya pemerintah.”
- Peneliti : “Jadi memang langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan penjelasan keluar selain pers release juga menerbitkan buku seperti itu?”
- Narsum : “Ya itu. Jadi kita selalu memberitahukan kepada seseorang yang akan belajar, yang akan mengetahui tentang Kraton, ini yang ada di Kraton seperti ini. kita tidak mau diperbandingkan dengan yang di luar Kraton. Baik itu tatanan upacara, ya ini bakunya Kraton seperti ini.”
- Peneliti : “Iya. Selain berperan dalam urusan internal Kraton sendiri bu, apakah Humas Kraton juga berperan dalam hal-hal lain di masyarakat. Semisal kaya e..”
- Narsum : “Gini ya, kalau Panjenengan mengatakan Humas, itu yang tahu persis permasalahan dan berani bicara tentang kebenaran yang ada dalam Kraton itu



kan? lha itu. Jadi ya kalau saya karena Pengageng disini dan bertanggung jawab ya terus jadi dobel-dobel kan? Jadi untuk ditunjuk sebagai Humas itu sendiri, tidak bisa. Karena kemampuan yang kita tunjuk itu belum tentu seperti yang kita inginkan. Karena kita kan selalu berunding, kita selalu belajar, kita mengalami kehidupan itu. Saya kebetulan Sastra Jawa dan banyak diberi pesan dari bapak, itu kan jadi tahu gitu lho aturan Kraton seperti apa. Lha yang perlu disampaikan kepada masyarakat itu seperti apa gitu. Batasan-batasan jug ada gitu.”

Peneliti : “E.. Kalau ini bu permasalahan atau aktivitas yang di masyarakat luar Kraton sendiri yang jadi focus perhatian dari Kraton itu sebenarnya permasalahan yang seperti apa bu?”

Narsum : “Yang masih melakukan apa ya, kehidupan berbudaya dalam arti masih melakukan apa e.. aktivitas yang menitu di Kraton, gitu. Ya mulai kelahiran, mulai dari mitoni, itu kan perlu e.. makanya terus saya jadi punya sanggar. Sanggar itu sendiri kan bertujuan untuk menyampaikan apa yang benar, tentang tata cara upacara adapt yang ditiru oleh orang luar yang itu berasal dari Kraton begitu. Biar tidak opo jenenge e.. salah juga itu nanti persepsi e.. orang yang tidak tahu terus nanti dianggap musrik, terus itu makani setan. Padahal itu semua tidak ada di dalam Kraton gitu. Jadi ini yang Kraton yang apa yang mengawal makanya bikin sanggar. ‘yen kowe arep niru Kraton yo sing bener gitu’ sanggar kan mengajarkan itu.”

Peneliti : “Dan kalau biasanya ada acara kebudayaan seperti selikuran atau mungkin sekaten dsbnya, itu Humas Kraton mengadakan konferensi pers nggak bu?”

Narsum : “Ya wong konferensi pers akeh dute kok mbak. Ndak. Ya biasanya kalau upacara besar dan perlu ada pers release itu baru kita, karena yang tidak rutin yang lain yang e.. harus dipahamkan dulu kepada pers itu baru kita adakan. Kalau yang itu sudah rutin kan tinggal biasanya kalau wartawan itu kan umure wis 20 tahun dibawah saya, jadi kalau saya, kalau dia ujug-ujug jadi wartawan itu kan pertanyaannya ya sama saja seperti yang lalu, kan gitu. Ya akhirnya kan,

pemberitannya itu yo rutinitas-nya seperti itu. karena dari tahun ke tahun itu pun juga wartawannya kan berubah-ubah.”

Peneliti : “Dan ibu ini terkait dengan dengan kemarin kan sempat agak rame pasar cinderamata seperti itu. Peranan Kraton sendiri itu seperti apa bu?”

Narsum : “Ya kita tidak mau beropini di pers. Kita menjalankan e.. aturan hukum perundang-undangan di Republik ini yang berlaku. Karena bagaimana pun Kraton sudah ada di dalam NKRI, tapi Kraton sendiri kan punya aturan yang tidak bisa e.. begitu saja diintervensi dari pihak manapun gitu. Ya monggo kalau Kraton aturannya seperti ini mau nggak. Kalau nggak ya nggak usah, kalau itu memang merugikan Kraton, kenapa? Kan gitu.”

Peneliti : “Saya tanya tentang citra Kraton sendiri. Yang sebenarnya citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat oleh Kraton sendiri itu citra yang seperti apa?”

Narsum : “E..Saya selalu menjaga kewibawaan Kraton, itu yang utama yang disampaikan oleh bapak saya. ‘koe tugas pertama dadai anak ratu kudu isoh njogo kawibawaanne Kraton’ nah itu kawibawaanne Kraton itu apa? Jangan membikin corengan e.. Kraton menjadi image orang itu jelek, begitu. Nah karena apa? Kraton itu sendiri kan tempat tatanan, aturan, unggah-ungguh, tatakrama, ini kalau kamu tidak sadar hidup di dalam Kraton seperti itu dan tanggung jawab dan kewajiban, ya silakan pergi. Gitu kan? lha ini yang sekarang kita lakukan bahwa e.. sampaikan ke mereka itu. Ojo melihat orangnya, orang itu seperti bapak sendiri kan begitu ‘koe ojo nonton aku, aku ki isih poho koe, mangan sego. Neng opo sing neng njero Kraton kuwi, opo piwulang, opo aturan kabeh hukum eyang-eyang sing kudu mbok jalani’ nah itu. Dengan itu kan kita mempelajari apa to Kraton itu, gitu. Ini yang sekarang saya sampaikan ke mereka-mereka itu. ‘kraton iku koyo ngene lho, iki wis seko kono ngene, artine ngene, iki artine ngene’ semua kan kita sampaikan seperti itu.”

Peneliti : “Ini pertanyaan terakhir bu. E.. mungkin gara-gara konflik ini, selama ini ada dampak yang sangat nyata nggak bu? Dampak yang terlihat baik di Kraton maupun di luar sana?”

Narsum : “Ya pasti dong”

Peneliti : “Seperti apa bu?”

Narsum : “Sebetulnya seperti yang terjadi penjenengan lihat seperti ini kan juga karena ada penerangan dari Kraton, bahwa Kraton itu dibuka untuk umum, e.. terbatas ya dalam arti terbatas. Terus orang melihat seperti ini kan pasti akan tahu sejarahnya Kraton terus pasti ketika dia beranjak dewasa mungkin seperti panjenengan ‘o..saya pengen nulis untuk apa.. karya tulis saya’ itu kan banyak sekali. Ya seperti saya sekarang yang saya lakukan, dadi guru ngene iki. Dadi dosen, mben dino kon ngoceh, ra eneng sing mblonjo. Tapi ini adalah kewajiban. Lha itu adalah bentuk salah satu cara saya untuk apa? Melestarikan dan menjaga kewibawaan Kraton. Itu Kraton itu seperti ini.”

Peneliti : “Untuk menampilkan citra positif?”

Narsum : “Nah, wong Kraton kuwi ora owah.”

Peneliti : “Matur nuwun bu..”

**Hasil wawancara Gusti Puger, 19 Januari 2009, Radio Karti Budaya, 12.30 WIB**

MEDIA

Peneliti : “Sampun pak”

Narsum : “Kalau ditanya apakah Humas Kraton juga menjalankan fungsi mendokumentasikan kegiatan Kraton ya, seperti kliping atau foto-foto peristiwa, e.. itu pada.. pada dasarnya e.. pada waktu itu terjadi Humas Kraton itu e.. apa namanya dipegang Kanjeng Yosodipuro, itu sudah meninggal. Jadi dibawahnya itu belum diaktifkan sebetulnya. Jadi secara umum, apa namanya, e.. seperti kliping itu dijalankan melalui pribadi-pribadi, kemauan pribadi. Mungkin Gusti Mung itu memerintahkan anak buahnya, siapa lagi, siapa lagi. Gitu.. Jadi dulu malah belum terbentuk kan. Masih jalan, tapi kan Humasnya tidak aktif pada waktu itu. Sehingga tidak ada kegiatan dokumentasi itu sendiri.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 2 pak?”

Narsum : “Yang bertanggung jawab siapa? Ini saya jawab yang nomer 2. Akhirnya ya setelah itu menjadi sebagai e.. apa namanya, umpamanya ada saya, ada Gusti Wandan, ada gusti yang lain itu. Tanggung jawab sebagai ya sebagai orang Kraton, apalagi sebagai putro dhalem atau sebagai apa namanya.. melihat bahwa ini ada peristiwa Kraton semua kerabat kerajaan berhak untuk mengkliping itu. Andaikata itu digunakan untuk informasi ke kerajaan nantinya, itu nomer dua, lha itu.”

Peneliti : “Tapi kalau sekarang pak? Humas yang sekarang?”

Narsum : “Sekarang tentu sudah ada perjalanan itu. Cuma saya tidak tahu persis karena tugas saya beda ya. Cuma kadang-kadang saya juga cek. Kayaknya ada itu, tetep jalan itu. Kalau itu setelah terbentuk strukturnya, akhirnya ada di bagian-bagian itu. Mungkin di sub-sub lain juga ada yang mengkliping untuk kepentingan sub itu sendiri, untuk kepentingan pribadi atau anggotanya dsb.”

Peneliti : “Lha biasanya apa aja berita yang disimpan atau dikliping itu?”

Narsum : “Ya tentang budaya, tentang birokrasi tentu. Ya to? Perkembangan birokrasi pemerintah dengan kebijakan-kebijakan adat itu, tentu sedikit kita kliping untuk nanti dalam perjalanan Kraton dan pemerintahan ini kan punya sejarah tersendiri gitu. Itulah yang nanti untuk mencoba kalau ada yang tidak lurus kita luruskan atau kalau ada yang terlalu over ya kita berikan rambu-rambu. Supaya adat dengan birokrasi yang jalan sekarang ini diperjelas kembali. Itu gunanya itu.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 4 pak?”

Narsum : “Digunakan sebagai apa kliping-kliping tersebut oleh Humas Kraton? Ya tadi, digunakan untuk mendata bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada. Ketika ada satu kebijakan birokrasi atau ada permasalahan dengan kraton dengan luar. Nanti untuk meluruskan atau apa namanya untuk merembug bagaimana peristiwa itu terjadi. Sebelum kita dapat kesempatan ya kita sebagai dokumen saja. Kan begitu?

Peneliti : “Evaluasi juga ya pak?”

Narsum : “Iya, evaluasi”

Peneliti : “Yang nomer 4 pak?”

Narsum : “E.. Statement-statement ke media ini e.. apa namanya dari secretariat bisa, dari Humas juga bisa. Jadi memberi satu apa namanya pemahaman untuk.. kalau Humas itu pun harus ada apa namanya instruksi dari berbagai elemen yang ada.”

Peneliti : “Jadi tidak bisa langsung?”

Narsum : “Ya bisa, Cuma ada satu-dua yang perlu di-sarasehkan dulu. Untuk memberikan statement gitu lho. Memang juru bicara-nya bisa Humas. Kalau Humasnya baru repot bisa secretariat. Nah mereka kan biasanya minta tahu dari beberapa putro dhalem atau kepala birokrasi yang bermasalah itu untuk memberikan masukan untuk nanti statement-nya disampaikan. Mudeng ya?”

Narsum : “Jadi mengeluarkan data dari berbagai sektor yang juru bicaranya bisa kesekretariat atau dari juru bicara Humas tadi minta ke secretariat apa datanya.”

Peneliti : “Yang nomer lima pak?”

Narsum : “Kalau menjalin, saya kira tidak punya dana ya. jadi karena kegiatannya e.. sudah media sendiri yang minta data untuk diekspos informasinya gitu.”

Peneliti : “Yang nomer enam pak?”

Narsum : “Iya, jadi kesekretariatan Kraton, yang .. semua. Jadi kalau sering juga ini apa namanya.. tidak begitu. Cuma kalau ada acara apa dsbnya. Tapi kalau yang terkait dengan itu, e.. apa namanya dengan tadi klipring daripada itu mungkin ada perlu diluruskan, Kraton berhak untuk memanggil pers untuk mengatakan pers release kan begitu. Untuk memberikan suatu penjelasan.”

Peneliti : “E.. yang nomer 8 pak?”

Narsum : “Iya, kalau saya lihat di media ada beberapa statement yang muncul di media, gitu. Entah apakah itu yang dibuat oleh apa namanya bahasa e.. apa namanya e.. si penulis atau memang asli. Karena apa namanya kita tidak merasa ada perang statement. Hanya memberikan suatu pemahaman bagaimana e.. apa namanya terjadinya e.. perjalanan apa namanya tatanan atau aturan, atau disebut angger-angger di Kraton bagaimana. Itu saja. Kalau ini mau diretorika-i atau di silat lidah-i, itu bisa saja, kan dalilnya ada. Ketika dalilnya ada, itu masih utuh dan belum diamandemen ya ini untuk acuan dulu. Karena dalilnya untuk itu ada. Lha ini perlu di-anu-kan dulu, supaya itu tidak, kalau tidak jelas ya kita rembug bersama. Nah makanya yang terjadi itu e.. apakah kita sudah menengok itu belum, keburu meledak-ledak, ya sudah jadinya sekarang perlu kita mencoba membenahi. Supaya nanti semua pihak bisa paham bahwa ini ada semacam hal yang tidak di-indahkan, emosional, dsbnya. Ini perlu dipahami, karena saya yakin e.. dalam masa saya kecil sampai segede ini yang namanya itu tidak pernah dibaca. Namanya statement angger-angger dsbnya itu. Ini juga, ini kalau udah fatwa raja ya udah menjadi patokan bagaimana akhirnya kita masukkan ke angger-angger. Tatanan itu menjadi pendidikan kejiwaan atau perjalanan kita semua. Dalam tanda petik adalah warga kerajaan juga kawula-nya, mestinya juga nyampe sana, gitu. Jadi kalau kita bicara statement saya kira kalau kita di kacamata umum itu memang menjadi statement. Tapi di kacamata dalam itu sifatnya hanya menjelaskan. Menjelaskan supaya ini dipahami sehingga ada semacam e.. perembugan. Sebetulnya itu.”

Peneliti : “Tapi yang biasa e.. memberikan statement penjelasan ke media seperti itu siapa pak?”

Narsum : “Biasanya dari sekretariat, tapi itu pun ada musyawarah dulu biasanya. Musyawarah, pendapat itu bagaimana cari data dulu. Akhirnya semua masuk, kita olah baru secretariat udah ada datanya, begini begitu.”

Peneliti : “Dari Sasana Wilapa ya?”

Narsum : “Iya, dari sekretariat. Karena Humas ada disana juga.”

Peneliti : “Yang nomer 9 pak?”

Narsum : “Kalau strategi khusus dibidang tentu orang akan mengatakan ‘iya’ begitu. Strateginya ya kita itu e.. sebetulnya ingin e.. menjaga supaya Kraton ini tetep apa namanya utuh dulu. Ada semacam yang menjaga dulu. Perkara ini ada ketimpangan, ada apa, nanti sambil jalan kita benarkan, kita luruskan. Semua kan begitu. Nah kita jelaskan permasalahannya, penjelasan itu utus kita upayakan supaya e.. yang pemimpin dan yang dipimpin terus keluarga terus kawula ini nanti secara berkala kita berikan pemahaman sebetulnya. Ini supaya nanti yang memimpin juga mengerti terhadap dirinya itu siapa, sehingga tidak terjadi yang di Wulangreh tadi, adigung, adiguna, kumawasa dsbnya. Ini berjalannya begitu. Yang penting itu dulu. Biar ada yang seperti itu. Nanti kita atur dengan aturan. Nek wis ra isoh diatur ya sudah, ga usah jadi aja kan gitu. Harusnya kan gitu. Karena e.. apa namanya, kalau Negara ini bukan pribadi kan? kalau dia bicara pribadi ga bener kan? ini yang harus kita luruskan.”

Peneliti : “Yang nomer 10 pak?”

Narsum : “Jadi evaluasinya begitu, kita tetep jalan untuk memberikan suatu warna untuk e.. meyakinkan bahwa Kraton ini betul-betul ditata. Nah ini juga tantangan buat Kraton sendiri e.. untuk membina dalam dan memberikan pembinaan di luar. Kalau ini nunggu-nunggu ya kita harus bareng-bareng. Karena kesenjangan yang sangat panjang sejak kemerdekaan sampai sekarang ini pembinaan itu amburadul. Saya sebagai seorang birokrasi di Kraton, itu saya tidak menata kebijakan karena saya jatuh dibawah terus. Kalau rapat, kadang saya usul ke Pengageng juga

diabaikan. Itu yang membikin kesenjangan yang sangat jauh. Untuk menjadi pasti ini sangat jauh. Saya sebagai birokrasi atau sentana pernah usul bagaimana kita merekrut sentana dengan baik, membina mereka bagaimana. Yang penting dipahami bahwa ini tuh harus kita jaga bersama, kan gitu? Yang penting itu. Tapi keburu ada semacam rasa yang e.. terprovokasi dengan ego kolo wau. Ya sehingga terjadilah prasangka-prasangka yang tidak murni, sebab semua pun itu kalau kita bersama dalam satu titik angger-angger yang ada ini bisa diatur, gitu lho sebetulnya. Lha ini, ke-khawatiran itu kan muncul dulu. Karena tadi di depan saya bilang, bahwa tidak ada yang membaca itu. Dikira nggak ada angger-angger, ada. Yang bilang nggak ada angger-angger karena tidak membaca. Tidak pernah membaca, tidak pernah tahu gitu lho, itu ada. Bagaimana raja itu mencetak sebagai calon penggantinya dan bagaimana nanti kedepan dan bagaimana aturan yang harus ditaati, itu ada. Jadi kalau orang bilang nggak ada itu, lha wong saya sebagai yang pernah membaca dan tahu persis dimana itu. Nah kesenjangan yang sangat jauh ini birokrasi udah ambyar semua, kita berpikiran buruk semua, Kraton tidak punya birokrasi yang mapan. Nah terprovokasi. Mungkin ada semacam ego dsbnya. Akhirnya tidak pernah jalan mulus. Nah terjadilah masalah. Karena ego-ego yang muncul 'aku iyo, aku iyo'. Semua juga berhak tapi ada aturannya. Jadi gampang kan sebenarnya? Tidak perlu di-nggo padu, di-nggo ngoyo-ngoyo. Kita rembugan dadi sebetulnya. Ya tadi karena emosi, kurang ada pemahaman sehingga terjadilah suatu, mutung, serikan aten dsbnya wong jowo itu. Itulah yang, kedewasaannya memang, bagaimana kita mencerna suatu masalah itu menjadi item untuk dirembug. Itu yang paling penting. Jadi jangan mundur 'abstain wae' itu nggak boleh. Sifat apatis itu nggak boleh, itu tanggung jawab kita."

#### HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN & MASYARAKAT

Peneliti : "Sekarang poin yang hubungan dengan lembaga lain dan masyarakat. Pertanyaan yang pertama pak?"



Narsum : “Jadi lembaga yang lain itu sifatnya adalah hanya pelestarian budaya. Jadi nggak ada hal-hal yang lain. Untuk membina mereka yang dulu pernah terbina, dia merasa dulu kedekatan dengan kerajaan itu. Ya e.. kita bina kembali untuk mereka bisa tetap menjalankan sebagai orang Jawa. Inilah, jangan sampai dia kehilangan gitu. Fungsinya kan itu tadi didepan.

Peneliti : “Biasanya dengan lembaga apa sih pak kalau Kraton kerjasamanya?”

Narsum : “Lembaga ya yang di luar ya banyak itu. Banyak, lembaga kemasyarakatan dll. Macam-macam itu, lembaga-lembaga itu macam-macam. Kalaupun lembaga-lembaga pemerintah e.. pemerintah ya apa namanya terkait dengan apa namanya e.. perjalanan birokrasi pemerintah sendiri dengan Kraton itu apa. Sehingga jalinan itu terjadi juga karena pemerintah memahami betul bahwa ini harus ada sentuhan kepada adat, sehingga jalinan itu terjadi. Kalau kita menjalin pun, tidak sebenarnya, tapi mereka itu kan datang. Ada lembaga kebudayaan, ada lembaga sosial, dsbnya. Macam-macam. Kalau lembaga birokrasi pemerintah ya tentu dia akan datang.”

Peneliti : “Yang nomer 2 pak?”

Narsum : “Jadi begini, kalau itu sangat khusus ya, tentu sebenarnya kita hadapkan kepada Sinuhun ya, dalam hal ini ketua umum ya. Untuk diberitahu bahwa ini ada apa namanya, mau dari lembaga pemerintah atau apa dsbnya, supaya dipahami dsbnya. Akhirnya nanti kan direbug di birokrasi, kan harusnya seperti itu. Kalaupun terjadi kemacetan, lha ini perlu kita upayakan supaya tadi, supaya ego itu tidak muncul. Karena ego-ego ini muncul terus ya macet. Karena kalau ditandhangi dhewe nggak bisa, ya matur tadi. Jadi nggak bisa raja itu atau Sinuhun itu lelaku tok itu nggak bisa, di angger-angger seperti itu. Apalagi itu pengambil keputusan, kebijakan Negara tidak bisa”

Peneliti : “Jadi sebenarnya Humas di masa PB XIII ini pun apakah juga bertanggung jawab terhadap hal-hal kerjasama seperti itu pak?”

Narsum : “Ya. e.. apa namanya masih jalan, gitu. Cuman yang paling berkepentingan secretariat. Humas itu kalau secretariat semua jadi baru dia penerangan saja.”

Peneliti : “Tapi kalau pak Bambang masih aktif ya pak?”

Narsum : “Masih. Masih diaktifkan cuma apa namanya karena secretariat itu sudah mampu memberikan pemahaman ya, istilahnya Humas itu hanya memberikan suatu ulasan-ulasan tertentu, yang memberi penjelasan seperti yang ada ya.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 3 pak?”

Narsum : “Ya kalau hubungan itu tentu ada beberapa sektor yang berjalan ya. Cuma pemerintah belum bisa maksimal karena e.. apa namanya pemerintah itu menganggapnya itu mungkin ada kekeliruan nggih. E.. jadi kebijakan pemerintah ini mungkin ada kekeliruan anggapan yang perlu ini nanti kedepannya kita amandemen, dalam tanda petik. Tentu e.. kerjasama dengan apa namanya pemerintah atau hubungan seperti itu lebih bisa terpadu sehingga hak-hak adat, masyarakat ulayat ini juga dihormati. Sehingga hubungan ini saya rasakan agak tersingkir ya setelah kemerdekaan itu sampai sekarang itu juga begitu. Jadi pemerintah itu cenderung kumawasa, dia lupa bahwa sejarah itu, secara kalau kita menjalankan roda apa namanya UUD, karena kita itu Negara hukum, dia lupa. Bahwa ini bisa dituangkan dalam hukum. Merambah tempat orang lain tanpa dan seenaknya sendiri ini kan kena hukum, maka jalinannya sebenarnya menerangkan. Tapi kenyataannya mereka memang kadang-kadang ya bandel. Ini yang perlu nanti panjenengan sebagai mahasiswa, tentu nanti bisa dipelajari, bagaimana kok itu bandel. Tapi begitu ada konflik dia lepas tangan. ‘itu urusan intern’. Kan ga bisa?nggih to? Harusnya kan mereka turun tangan bagaimana ini penyelesaiannya, kan gitu. Golekki kuwipiye to angger-angger’e, ayo dirembug bareng kan gitu. Tapi ternyata lepas tangan. Seperti Gubernur juga begitu, ya malah marah-marah dia. Kalau saya anggapannya dia tidak berhak marah to? Wong saya datang hanya untuk memberi pemahaman, ya harusnya lha bagaimana enaknya, ya sudah kita upayakan atau kita rembug bersama. Atau kita bina mereka. Lha yang salah ya kita sadarkan yang keliru. Yang benar jangan merasa benar. Kalau semua salah ya ayo kita benarkan, kan harusnya begitu. Jadi nggak bisa pemerintah itu apatis, ‘serahkan itu konflik intern’. Intern yang mana kalau begitu? Dia bicara konflik

intern, ya serahkanlah kekuasaan saya, punya saya balekke wae. Tak urusanne diri saya. Kan begitu? Ini yang jadi nggak bener ini. Iya to? Wong dulu itu sebelum ada NKRI, ada kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara.”

Peneliti : “Yang nomer 4 pak?”

Narsum : “Kalau LSM sih e.. tidak begitu jelas saya. Cuma LSM apa namanya mereka mengadakan kegiatan yang e.. apa namanya kesosialan, tapi tidak begitu. Saya belum begitu e.. ada. Selama ini kok belum ada. Tapi kalau paguyuban memang Kraton punya paguyuban, yang disebut POKOSO itu. Sudah sejak PB X itu dibentuk. Ketika Kraton ini e.. apa namanya merasa mempunyai rakyat, dimana rakyat itu adayang bisa bekerja, ada yang tidak di Negara. Nah dibentuk suatu pagutuban kawula. Lha kalau di Indonesia meniru seperti itu ketika ada yang bisa pegawai negeri ada yang tidak. Bentuklah paguyuban rakyat Indonesia. Itu bisa begitu. Paguyuban itu adalah Kawulo Surakarta. Jadi semua yang merasa pernah jadi rakyat Mataram supaya dia bisa ikut dalam derap upacara adapt, dalam kegiatan adat dsbnya. Tidak hanya yang birokrasi pegawai tok saja. Karena ora mungkin sak Mataram diwadahi kabeh. Seperti Indonesia juga gitukan, Negara kita. Ora mungkin kabeh jadi pegawai negeri kan gitu. Lha inilah paguyuban tadi. Kalau paguyuban yang lain yang urusannya tentang ke-sosialan, kepedulian dsbnya, mungkin ajakan itu supaya kita apa namanya ingin melestarikan budaya, dia paguyuban itu mengajak Kraton dsbnya.”

Peneliti : “Kalau Forum Kraton Nusantara itu gimana pak?”

Narsum : “Nah kalau forum ini beda lagi. Forum ini adalah suatu e.. pertemuan masyarakat-masyarakat adapt yang notabene adalah bekas mantan-mantan Kerajaan Nusantara ini. Untuk kita berkumpul bersama-sama unutm mendukung NKRI ini, kalau bisa didukung kan begitu? Kalau nggak, ya kita sampaikan bahwa kita itu juga punya hak untuk berbicara, juga punya hak untuk dihormati. Sehingga mereka harus bikin aturan, bagaimana dengan masyarakat adat ini, kan begitu? Nah ini diupayakan supaya tadi saya matur, biar tidak terjadi sesuatu e.. pelepasan pemikiran. Pengalaman ini, yang terjadi konflik dimana-mana ini

karena pemerintah tidak ikut cawe-cawe dalam tanda petik. Tidak ikut me-monitor gitu lho. Nah karena tidak ikut me-monitor, tidak ikut membina akibatnya ya itu. Tapi kawasannya dipakai semua, kan lucu.”

Peneliti : “Kalau yang pertanyaan nomer 5 bagaimana pak? Ada dukungan-dukkungan gitu nggak pak?”

Narsum : “Ya, saya kira nggak. Nggak ada dukung-mendukung. Ini sifatnya kan hanya memberi penjelasan bahwa e.. kewajiban pemerintah terhadap tanah adat itu yang ditulis di UU adalah e.. supaya itu dijalankan. Jadi budaya dilindungi dengan UU. Ketika itu dilindungi dengan UU, ketika budaya itu mengajukan suatu permasalahan atau kegiatan, berdasarkan UU itulah pemerintah memberitahu kepada DPR untuk uang pemerintah membantu kegiatan itu kan. Jadi kita hanya sifatnya mengacu kepada UU. Supaya kegiatan ini bisa dikucuri dana bantuan kan gitu. Itu aja. Kalaupun tidak dikucurkan, ya kita mencari peduli yang lain. Kalau kasarannya kita cari sponsor kan begitu. Tapi kadang-kadang sponsor nggak usah diajak dia emang peduli, datang sendiri menawarkan.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 6 pak?”

Narsum : “Kalau fungsinya jelas e.. bahwa e.. kita apa namanya memberikan suatu e.. penjelasan melalui lembaga yang ada. Itu fungsinya. Terus apa namanya e.. keberuntungannya adalah mereka itu akan tahu dan akhirnya mengagendakan dan kalau ada perembugan disana ya akan mengagendakan itu saja. Keberuntungan dia sudah mencatat dan kita sudah memberi tahu kalau ada apa-apa kita tidak disalahkan.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 7 pak?”

Narsum : “Kegiatan? Ya ada. Umpamanya lembaga pemerintah dalam kaitannya dengan pelestarian bangunan umpamanya. Ya itu kita dengan pemerintah menyelamatkan bangunan-bangunan yang dulu. Umpamanya dengan e.. kaitannya dengan catatan mungkin arsip ya itu dari Arsip Nasional mungkin bisa membantu. Kalau dengan busana mungkin pemerintah juga membantu dalam kegiatan Kraton, apa namanya melengkapi busana prajuritnya atau busana keseniannya bisa begitu. Kalau

lembaga yang lain, yang dibawahnya birokrasi pemerintah ya itu seperti itu ikut membantu dalam kegiatan budaya Kraton.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 8?”

Narsum : “Jadi kalau kita ditanya, kita itu tidak menganggap konflik kok. Jadi hanya salah pemahaman saja. Kalau orang memang tetap dibidang itu konflik, wong itu terjadi salah persepsi kan terjadi konflik itu. Kalau saya menganggap tidak konflik, hanya suatu e.. kesalahan berpikir saja. Ya kedepan tentu e.. penjalinan-penjalinan akan menjadikan suatu kedewasaan, sehingga semua yang terlibat itu sadar bahwa kita semua ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan. Jadi jangan ego, jangan takut untuk apa namanya berembug sebetulnya begitu. Nah ini harus diupayakan kedepan. Nah yang tadi menjadi media, tadi saya matur pemerintah harus segera turun untuk memberikan suatu pembinaan.”

Peneliti : “Ikut menyelesaikan?”

Narsum : “Iya. Jadi jangan bilang ‘konflik intern’. Intern yang mana? Lha wong ini neng negoro, kalau kita berbicara ini KTP-nya rakyat kamu, kan begitu?”

Peneliti : “Jadi selama ini belum pernah ada pak dari pemerintah?”

Narsum : “Lha ya ini kan pemerintah apa namanya, lepas tangan ya. Ya secara ulas-ulas saja, dulu DPR datang kesini. Tapi kan nggak ada penyelesaian, karena nggak ada tindak lanjut yang jelas.”

Peneliti : “Belum ada mediasi?”

Narsum : “Iya. Karena dia tidak pernah mengirimkan tim untuk meneliti bagaimana to sebetulnya tatanan angger-angger Kraton gitu, belum ada. Ini belum ada tim pemerintah yang peduli gitu nggak ada. Inilah yang menjadi tanda tanya kan itu sehingga saya juga tidak mau juga konflik itu berkepanjangan dalam tanda petik kita ajur. Kenapa? Gitu lho.”

Peneliti : “Yang nomer 9 pak?”

Narsum : “Ya kalau kita menjelaskan pada lembaga atau pemerintah terkait konflik itu ya kita mencoba menjelaskan bahwa tatanan yang ada di Kraton itu sudah ada. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang diluar tatanan itu tentu kita jelaskan bahwa

itu perlu diluruskan, supaya kegiatan ini tidak menjadi liar begitu. Maksud saya, nanti setiap ada pergantian terjadi begitu, kan ada tatanannya. Sebetulnya ya kita rembugan saja selesai kok. Kalaupun kita menganggap ini tidak pas ya wong ini.. lungguhke dulu yang berhak dulu. Udah selesai. Nanti aturan itu kita sampaikan. Kalau dia nggak mempermasalahkan aturan yang sudah nanti kita pahami. ‘kamu bisa mengikuti aturan nggak, kalau nggak ya sudah.’ Mohon untuk tidak disitu. Kan gitu gampang. Ini yang kedepan kan begitu. Jadi karena e.. masyarakatnya sudah, Kraton ini sudah berkembang menjadi masyarakat yang madani gitu lho. Berpikirnya sudah lebih positif. Lebih maju, semua bisa digarap dengan baik-baik, tidak hanya e.. nurut-nurutke sendiko gitu ya ada begitu. Tapi ini harus juga e.. perkataan itu didasarkan dengan e.. ya tersirat dari raja itu sendiri. Dia memegang teguh dalam e.. aturan, memegang teguh dalam kebijakan dsbnya. Akhirnya orang kan akan sendiko. Kalau ini nggak ya mana mau orang. Lha itu terjadi sejak sejarah perjalanan Mataram itu juga terjadi. Makanya ketika begitu, maka lebih baik kita rembugan, bagaimana kita atur mereka. Ya supaya dia itu, ya tadi saya matur, belum terjadi itu yang jelas sudah keburu emosi dsbnya. Nah saya khawatir itu memang terjadi ego yang tidak pas gitu.”

Peneliti : “Yang nomer 10 pak? Evaluasi terhadap kerjasama tersebut sejauh ini gimana?”

Narsum : “Ya kalau evaluasi tentu ada yang perlu e.. ditindaklanjuti secara garis tebal, ada yang perlu ya biar gitu aja dulu. Kan gitu. Karena melihat satu ya nggak mungkin dananya barangkali, atau mungkin kepentingannya barangkali. Iya to? Waktunya mungkin, dsbnya. Ini evaluasinya. Supaya nanti dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga atau kerjasama dengan lembaga pemerintah itu bisa terschedule e.. dengan baik dan schedule yang ada di Kraton ini tidak goyang, gitu. Karena Kraton punya schedule sendiri juga. Agenda yang sudah jalan, tinggal didukung.”

Peneliti : “Yang nomer 11 pak?”

Narsum : “Ya banyak. Kadang-kadang juga e.. tidak. Karena masyarakat sendiri kebanyakan langsung ke item, maka kebanyakan masyarakat itu di peneliti, itu

lebih ke buku. Kalau dia wawancara cenderung ke birokrasi. Dengan Humasnya itu juga kadang-kadang dilakukan, e.. namun tidak kerep sekali. Jadi secara e.. internal juga mencatat kegiatan Kraton untuk nantinya persiapan ke eksternal, sehingga itu apa namanya e.. tentu dilakukan Humas itu. Sehingga dia mencatat.”

Peneliti : “Tapi yang jelas, Humas Kraton tetap berperan untuk masalah eksternal gitu?”

Narsum : “Iya. Iya tetep.”

Peneliti : “Nah kemudian yang nomer 12 pak?”

Narsum : “Jadi begini, Humas, hubungan masyarakat itu kan e.. biasanya dikaitkan dengan juru bicara. Padahal Humas itu tidak hanya itu. Humas itu ya mengupayakan bagaimana dia itu e.. menyentuh pada mereka atau disentuh oleh mereka untuk melaksanakan itu. Akhirnya e.. hal itu akan disodorkan oleh sekretariat. Sekretariat akan muncul menjadi control titik yang paling besar sehingga terjadilah sesuatu kegiatan yang terpadu antara e.. luar dan dalam. Jadi apa namanya e.. aktivitasnya yang dilakukan oleh Humas itu tentu harus , disamping mencatat kegiatan-kegiatan Kraton untuk memberi penjelasan, dia juga harus aktif sebetulnya untuk e.. berbicara di luar untuk menjalin kebersamaan. Ya sekarang ini focus yang paling dilakukan sementara dia menunggu sifatnya, jadi menunggu kalau ada emergency dia berbicara.”

Peneliti : “Kemudian kalau saya pernah baca di koran-koran kemarin pak, kayaknya sempet rame permasalahan pasar cinderamata ya pak. Itu Humas Kraton berperan serta nggak pak?”

Narsum : “Humasnya sifatnya hanya menerangkan, jadi hanya menjadi juru bicara. Untuk itu sudah ditangani kesekretariatan langsung. Jadi Humas hanya sebagai nanti memberi, ikut dalam menjadi mediator untuk masyarakat.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 13 pak? Ini terkait dengan permasalahan yang menjadi focus perhatian Humas tadi”

Narsum : “Tindakannya adalah satu, e.. juga memberikan suatu penerangan ke intern, supaya kalau bikin statement itu yang kompak, supaya nanti Humas itu juga bisa menjelaskan yang tidak di-amandemen lagi oleh pihak lain, kan gitu. Ini yang

perlu kita garis bawahi. Nah sehingga agendanya Humas adalah e.. tetep melihat atau mencari data dari e.. sekretariat. Karena semua terpusat di sekretariat. Supaya nanti Humas itu bisa memberikan suatu penilaian sehingga walaupun ini ada tidak kekompakan, bisa segera e.. untuk mengadakan konsolidasi. Sehingga Humas bisa e.. menghubungkan dengan masyarakat itu tidak mindo gaweni atau tidak berulang-ulang.”

Peneliti : “Masih berkaitan dengan nomer 13 pak, eh pernah nggak Humas memberikan laporan ke pihak lain, semisal pemerintah atau LSM terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat seperti itu?”

Narsum : “Sebetulnya e.. kalau apa namanya di area itu tidak banyak. Tapi pernah juga dilakukan, tapi tidak aktif banget.”

Peneliti : “Contohnya apa pak?”

Narsum : “Contohnya ya penjelasan tentang berjalannya adat itu sendiri, berjalannya pemerintah itu sendiri terus urutannya bagaimana, perjalanan birokrasi itu juga e.. apa namanya e.. keterangan itu sudah tercover di media-media kan. Sehingga e.. memberikan penjelasan itu juga sudah doublemaker. Jadi ke media juga ke lembaga juga, ke masyarakat juga pernah. Jadi masyarakat yang langsung mendengar juga bisa. masyarakat yang melalui membaca juga bisa.”

Peneliti : “Kemudian nomer 14?”

Narsum : “Ya, karena Kraton sendiri, biasanya sudah punya calendar event. Sehingga biasanya sudah bisa terbaca oleh masyarakat. Kecuali ada emergency itu baru ada pengumuman yang sifatnya emergencial itu.”

Peneliti : “Itu agenda-agenda kebudayaan seperti itu pak?”

Narsum : “Iya biasanya itu.”

Peneliti : “Tapi kalau, agenda-agenda kebudayaan seperti itu Humas juga ikut campur pak?”

Narsum : “Ya, dia ikut campur dalam tanda petik adalah mencatat untuk kegiatan itu kalau ditanya oleh media, karena kalau sudah ada secretariat dan sudah ke praktisi



langsung biasanya udah cukup ya sudah. Tergantung masyarakatnya atau tergantung medianya, biasanya seperti itu.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 15 pak?”

Narsum : “O.. itu ada. Ya kita dibantu oleh beberapa orang yang peduli, membuka pengobatan gratis, terus memberikan sembako, terus memberikan pembinaan tentang kebudayaan. Jadi ada yang membantu Kraton. Jadi orang yang peduli, tapi atas nama Kraton.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 16 pak?”

Narsum : “Ya tetep biasa saja. Ya tetep kita apa dia yang saya tahu dia jalan menjelaskan kegiatan yang sekarang.”

Peneliti : “Lebih berkaitan dengan budaya gitu ya pak?”

Narsum : “Iya, bisa begitu dan juga birokrasinya.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 17 pak?”

Narsum : “Saya belum tahu untuk kritik yang disampaikan pada Humas. Tapi ada memang yang disampaikan pada rapat-rapat besar itu tadi, kritiknya memang jangan ada pembicaraan yang sifatnya tidak terseleksi. Itu keluhan dari Humas supaya nanti keluarnya itu juga sudah terseleksi sehingga penjelasannya itu bisa tidak merugikan sana-sini.”

### KEBUDAYAAN

Peneliti : “Kemudian untuk item kebudayaan, yang nomer 1 pak?”

Narsum : “Kalau adat itu banyak. Itu tari untuk peringatan ulang tahun kenaikan tahta raja itu, bedaya ketawang itu. Terus tari-tari yang lain. Terus musik gamelan yang dilakukan tiap senin-kamis, rabu-sabtu dsbnya. Terus tentang kegiatan perawatan benda-benda, seperti ada wayang, pakaian-pakaian prajurit, pusaka dan segalanya itu, yang bisa dilakukan. Terus upacara-upacara adat, ada gunungan, ada mahesa lawung, ada labuhan, ada Suro dsbnya. Ada peringatan hari jadi Kraton dsbnya. Atau apa namanya haul raja-raja dan istri-istri raja dsbnya. Terus kegiatan lain selain tari dan musik, ada seni suara, tembang dsbnya.”

Peneliti : “Tapi sudah ada jadwal-jadwal pastinya ya pak?”

Narsum : “Iya sudah ada.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 2 pak?”

Narsum : “E.. kalau kita lihat perannya, ya dia menjelaskan bagaimana agenda budaya itu dilakukan oleh Kraton. Kalaupun dia tahu tentang item yang ditanyakan dari e.. penanya tentu dijawab. Kalau nggak tahu tentu dia pasti nanya dari yang berkepentingan.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 3 pak? Apakah hanya sebagai juru penerang atau gimana”

Narsum : “Ya, dia disamping mengikuti upacara, dia juga menjadi juru penerang global sebetulnya. Tapi kalau media ingin bertanya pada praktisi-praktisi tadi ya boleh saja, tapi global dia yang menerangkan. Dalam rapat-rapat besar itu supaya individual-individual ini menjelaskan pada pengalaman-pengalaman pribadi saja. Supaya tidak merancu keterangan Humas.”

Peneliti : “E.. kalau ini pak masa konflik dengan kenyataan ada dua yang bertahta sebagai raja seperti itu, kalau pelaksanaan upacara adat yang rutin apa ada perbedaan, perubahan?”

Narsum : “Nggak, disini berjalan terus. Lha wong kita sifatnya itu e.. melaksanakan yang sudah ada. Sudah jadi nggak ada perubahan. Jadi kalaupun ada e.. apa namanya ada perubahan, mungkin dikarenakan biaya barangkali, itu saja.”

Peneliti : “Tapi tidak berpengaruh pak dengan apa ya karena mungkin ada beberapa elemen Kraton yang lebih maaf berpihak kesana gitu?”

Narsum : “Nggak, kita sudah tidak berbicara itu. Kita harus berbicara kedewasaan. Jadi kedewasaan dalam tanda petik tentu perlu ada semacam e.. istilahnya itu pelapangan dada. Supaya kita sama-sama memahami, yang paling penting kita harus membangun e.. kedisiplinan, keberhasilan di dalam intern dulu. Supaya nanti orang lain juga bisa memahami dan akhirnya terjadi suatu e.. kepercayaan yang global. Awalnya dari kepercayaan tidak? Tidak kepercayaan dulu mengakibatkan suatu reaksi. Dengan demikian, tentu ini harus e.. solid ya. Maka

di dalam apa namanya penjelasannya juga harus e.. urut. Nah sebagai praktisi harus konsekuen. Ini yang harus kita bina, walaupun belum urut ya kita berusaha terus agar urut.”

### SELAMA KONFLIK

Peneliti : “Sekarang item yang terakhir pak? Masa konflik. Nah bagaimana yang nomer 1 pak?”

Narsum : “Ya, disampaikan ya apa namanya Humas Kraton tentu yang disampaikan mencoba jelaskan bahwa e.. kejelasan atau sementara yang dianggap sah itu ya yang lenggah disini. E.. jadi karena berdasarkan angger-angger yang ada itu. walaupun ada penyimpangan tentu e. perlu kita rembug bersama gitu. Itu langkah-langkah yang dijelaskan begitu. Supaya orang memahami bahwa berdasarkan aturan adapt itu kaya gitu. Walaupun ada penyimpangan yang perlu diluruskan dan memang harus ada kebijakan, kebijakan apa yang harus dilakukan untuk bisa begitu. Apakah ada sesuatu yang bisa menjadikan penggantinya dari kebijakan itu.”

Peneliti : “E.. Kemudian pak yang nomer 2?”

Narsum : “Jadi begini kalau kita mensiasati orang Jawa, itu mesti ya kita urutkan dari yang sesepuh. Lha itulah sebetulnya beliau ini yang dianggap sepuh untuk bisa memberikan suatu pitutur atau memberikan petuah. Ya kalau secara umum untuk e.. secara umum kita tentu yang kita anggap adalah yang bisa memberikan petuah. Yaitu kalau kita lihat adalah eyang saya sementara. Tapi secara umum kita sebetulnya sudah mengetahui bagaimana e.. petuah-petuah yang disampaikan.”

Peneliti : “Kalau yang nomer 3? Dengan banyaknya berita yang simpang siur seperti itu? siapa yang ditugaskan?”

Narsum : “Ya kita ada berbagai kewajiban. Jadi instruksinya itu tidak ada yang khusus ya. Jadi semua sudah didoktrinkan untuk memberikan pemahaman itu supaya apa namanya tidak simpang siur satu terus dari Lembaga Hukum Kraton juga ikut menerangkan. Juga apa namanya dalam menjelaskan keluar itu juga Humas. Jadi

semua bahu-membahu untuk e.. apa namanya mengatasi masalah ini, dengan pemahaman yang sama. Kalaupun ya tadi saya mengatakan, ada sesuatu yang kurang pas, tentu kita sampaikan dengan cara-cara yang ada. Jadi kalau khususnya itu tidak kita tunjuk. Cuma instruksi itu semuanya bisa memberikan pembinaan eksternal dan internal untuk menjaga keutuhan Kraton.”

Peneliti : “Jadi untuk eksternal masing-masing pribadi dari putro dhalem ya?”

Narsum : “Ya, itu karena pembinaan itu.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 4 pak? Mungkin kayak cetak buku atau bagaimana?”

Narsum : “E.. apa namanya cara-cara yang untuk Humas itu ya apa namanya adanya surat-surat dhawuh itu, dari sekretariat itu. Itu yang disampaikan kepada masyarakat, dengan cara-cara yang ada di Kraton.”

Peneliti : “Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan yang beredar di masyarakat, Humas Kraton atau mungkin kesekretariatan mungkin menerbitkan buku?”

Narsum : “Ya kalau menerbitkan buku sih e.. apa namanya e.. tidak untuk umum ya. tapi dulu khusus itu. dulu diterbitkan melalui kesekretariatan ya. Tapi ada kelihatannya.”

Peneliti : “Kemudian nomer 5 pak?”

Narsum : “Ya kalau ditanya persiapan e.. tetep dia mencatat agenda-agenda Kraton itu untuk jelaskan. Dan tatanan-tatanan yang ada di Kraton itu untuk menjelaskan terus kepada masyarakat. Dasarnya itu, dasar aturannya itu. kegiatan-kegiatan itu yang dijalankan.”

Peneliti : “Jadi memang tidak ada persiapan khusus ya pak?”

Narsum : “Ya kalau persiapan khusus, ya saya kira ya persiapan harian itu sebagai Humas tentu sudah dipersiapkan.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 6 pak?”

Narsum : “Ya sebetulnya e.. apa namanya kalau kita lihat bahwa itu adanya itu baru setelah ada e.. pelantikan dsbnya itu. Tentu sebetulnya dia sudah tahu ada proses akibat dari pada e.. terjadinya konflik itu sendiri. Namun karena ada satu patokan yang bisa untuk menjawab, ya udah sementara itu dipakai, pakai aturan itu aja.”

Peneliti : “Itu patokannya apa pak?”

Narsum : “Ya patokannya ada semacam yang disebut angger-angger tadi. Satu, bagaimana prosesi tentang jalannya pergantian raja itu sendiri. Bagaimana menjalankan tugasnya itu yang penting. Kalaupun itu ada beberapa yang meleset tentu Humas harus memberikan pertanyaan ke secretariat, bagaimana ini kok tidak ada kegiatan. Kan Humas sendiri juga e.. kewenangannya menerangkan terbatas dari Kraton. Ada batasan-batasannya yang tidak bisa diterangkan yang mana.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 7 pak?”

Narsum : “Ya dampak dari konflik itu sendiri, akhirnya juga sentana sendiri sudah terpecah-pecah, kawula juga begitu. Sehingga merusak citra Mataram dalam tanda petik e.. karena apa namanya dia tidak paham betul tentang tatanan atau angger-angger itu sendiri. Karena kesenjangan pembinaan yang sejak awal pun tidak pernah disampaikan di grass root atau level bawah. Itu hanya diketahui birokrasi tertentu sehingga kesannya, penasbihan itu hanya orang di atasan. Lha ini yang akhirnya ini mudah terprovokasi. Jadinya e.. tidak berbicara tentang e.. ketatanegaraan, dalam tanda petik Negara Mataram tadi kan. Tapi dia melihat ada semacam kekuatan yang bisa berbuat, lha dampaknya macam itu. Sehingga banyak kekuatan-kekuatan yang e.. berbicara lain, dalam tanda petik ya dengan kekuatan finansialnya, kekuatan dananya, kekuatan politisnya, membuat orang ini berkolaborasinya juga bervariasi untuk kepentingan teman dsbnya. Sehingga akhirnya kacau. Dampaknya juga akan e.. akan menjadi dampak sosial secara nasional tentu. Disamping secara intern Kraton ada dampak tersendiri.”

Peneliti : “Kalau untuk dampak yang dirasakan masyarakat sendiri pak? Pernah sampai mengeluh nggak wah gara-gara konflik,dsbnya?”

Narsum : “Ya sebetulnya masyarakat ya juga mengeluh. Cuma belum ada cara / media apa / fasilitator apa yang memfasilitasi mereka untuk bisa bicara. Kadang-kadang yang bicara ada yang terprovokasi. Seperti kemarin ada masyarakat Baluwarti yang kemarin juga minta hak atas tanah. Ini kan juga tidak sangat substansial. Karena substansinya tanah adat, ini tidak bisa. Sehingga ngawur gitu lho. Nah ini

kita himbau, jangan dicampurlah urusan itu apa namanya, kalau pun itu dicampur ya berjalanlah di rel yang bagus. Tadi saya bilang pemerintah harus segera memberikan pembinaan secara global kepada mantan-mantan kerajaan Nusantara.”

Peneliti : “Ya, dan yang nomer 8 pak?”

Narsum : “Ya fokusnya penyelesaiannya itu adalah e.. kalau itu bisa diselesaikan, ya harus e.. semua memberikan suatu pemahaman. Karena tidak seorang pun / siapa pun yang bisa mengesahkan raja. Itu nggak ada. Ya bisa itu angger-angger. Tapi raja sendiri juga bisa memberikan suatu symbol sehingga itulah sudah disepakati. Nah aturannya harus dilaksanakan, kalau tidak ya sudah. Berarti kita bisa menganggap bahwa ini sak-karepe dhewe. Akhirnya kita bisa memberikan pelurusan.”

Peneliti : “Tapi yang jelas fokusnya adalah memberikan pelurusan terhadap apa yang terjadi sekarang gitu?”

Narsum : “Ya fokusnya itu supaya apa namanya yang bengkok-bengkok tentu kita pahami. Jangan menganggap ‘aku yo isoh, kono yo isoh’. Dengan berbagai cara itu kan tidak urut. Emang semuanya bisa, tapi keurutannya itu yang harus kita rembug, kita miskin rembugan. Rembug aja bisa kok. Kenapa harus ya gitu, rembugan kan enak. Kita buat komitmen dulu.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 9 pak?”

Narsum : “Kalau direncanakan itu memang ndak ada. Tapi kita itu sudah menganggap nggak ada konflik. Kita anggap nggak ada, lha daripada ngurut-ngurutke. Ya udah kita jalan terus. Pokoknya warisan leluhur kita jalankan, kalau apa namanya, mau omongan ya kita tanggepin baik-baik. Lha ini kewajibannya dua sisi. Di luar juga harus kita tanggepin, di dalam juga pembenahan dsbnya. Nah ini kan berat ya. Cuma kita harus kuat.”

Peneliti : “Ya, ini yang terakhir pak, nomer 10?”

Narsum : “Sebetulnya bukan citra ya, kalau citraitu nge-pop sekali. Sebetulnya e.. mengembalikan lagi e.. citra itu kan apa namanya penilaian ya. Mengembalikan lagi penilaian warna warga masyarakat supaya dia tidak meninggalkan apa

namanya kegiatan budaya itu sendiri. Karena dia sebenarnya juga hidup dengan budaya itu ya dan dia juga merasakan bahwa budaya ini dibangun juga untuk masyarakat, bukan untuk siapa-siapa. Jadi tujuannya apa namanya penjelasan itu adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kamu harus memahami atas jasa-jasa Kraton yang sudah memberikan. Jadi konflik ini jangan kamu tambah-tambahi kalau nggak tahu udah diam aja, netral. Nunggu kebijakan, jangan ikut-ikutan. Masyarakat jangan ikut-ikutan seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi walaupun paguyuban kawula Surakarta itu kita bina itu bukan ikut-ikutan namanya. Tapi kalau orang yang diluar itu ikut-ikutan terus demo dsbnya e.. apa namanya itu tidak pas lah. Itu akan kita kembalikan lagi ke Negara sebagai pengayom kebudayaan.”

Peneliti : “Tapi sebenarnya pernah ada nggak pak mediasi-mediasi dengan pihak yang sana pak untuk menyampaikan ini?”

Narsum : “Ya, sebenarnya ada sedikit itu apa namanya slentingan, kabar burung gitu apa namanya mau kembali. Tapi untuk mencabut itu nggak mau ya udah, lha mau gimana ngga mau dicabut kok ikut. Cabut dulu baru kita rembug bersama.”

Peneliti : “Udah pernah duduk bersama pak untuk mediasi?”

Narsum : “Dulu pernah. Tapi ga ngomong apa-apa katanya. Tidak ada tindak lanjut atau bagaimana.”

Peneliti : “Iya pak, sampai sini dulu pak, terimakasih.”

### **Hasil wawancara Pak Bambang Irawan, Selasa 2 Maret 2009.**

Peneliti : “Oiya pak. Untuk media relation-nya Humas Kraton itu menjalankan fungsi dokumentasi nggak pak? Seperti kliping dsbnya?”

Narsum : “Dulu fungsi dokumentasi itu biasanya dilakukan oleh Sasana Pustaka, perpustakaan Kraton. Tapi kenyataannya yang mendokumentasikan Kraton ini adalah Kantor Badan Pengelola Kraton, ya. Jadi sekarang ini Humas Kraton tidak melakukan fungsi kliping koran dsbnya itu. Karena fungsi itu ada sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Kraton.”

Peneliti : “O..Jadi sebenarnya dari pertama kali Bapak diangkat-pun tidak ada hal seperti itu? Mendokumentasikan?”

Narsum : “Ndak ada. Belum, belum ada. Jadi istilahnya e.. belum ada penataan fungsi kehumasan yang ada di Kraton. Karena dari dulu Humas itu, Kraton hanya identik dengan, sebenarnya dulu Humas tidak ada dik, yang ada hanya Kantor Penerangan ya. Kantor Penerangan Kraton itu mulai ada sejak berdirinya Museum Kraton. Jadi kalau tidak salah tahun 1961, kalau tidak salah ya.. Jadi sejak berdirinya Museum itu, Kraton itu kemudian, jadi e.. Kraton itu dulu Kantor Penerangan, lalu Kantor Penerangan itulah kemudian dianggap sebagai Humasnya Kraton. Lalu lebih e.. lebih establish menggunakan istilah Humas itu ketika KRMH Yosodipuro kemudian menjadi Humas Kraton. Tapi saya tidak tahu menjadi Humas Kraton itu diangkat oleh Kraton, artinya diangkat oleh Kraton dengan SK, dia sebagai Humas, atau sekedar nama dari Kantor Penerangan Kraton itu. Karena dulu Kantor Penerangan Kraton juga merangkap, dulu Kantor Penerangan Kraton itu letaknya di sebelah barat Kamandungan, sebelah barat Brojonolo, jadi sekarang yang dipakai untuk poliklinik. Nah itu dulu Kantor Penerangan Kraton itu. Lalu untuk tiketnya museum itu ada di museum, jadi berbeda. Tapi Kantor Penerangan itu kemudian lambat laun tutup, karena hampir sebagian besar orang yang bekerja disana, di Kantor Penerangan itu menjadi guide di Museum ya, kecuali Kanjeng Yoso ya. Yang tidak punya kantor akhirnya tapi beliau masih



sebagai orang yang di Kantor Penerangan. Juga tidak jelas Kepala Kantor Penerangan siapa juga tidak jelas tapi itu Kanjeng Yoso itu. jadi sejarahnya gitu.”

Peneliti : “Jadi selama Bapak menjabat kemarin itu tadi ya pak, belum ada penataan fungsi kehumasan ya pak? Tadi itu katanya yang mengkliping dsbnya itu di Badan Pengelola Kraton, lha itu ada dawuh atau yang ndawuhi gitu atau gimana?”

Narsum : “O.. Tidak. Jadi itu dilakukan sendiri oleh Kantor Badan Pengelola Kraton atau orang yang disitu. Gusti Mung dan Mas Edi Wirabumi sebagai salah satu pengurus atau ketua di Badan Pengelola Kraton itu.”

Peneliti : “Jadi memang selama ini fungsi seperti itu dijalankan oleh Badan Pengelola Kraton, mungkin lebih individunya ke Gusti Mung seperti itu?”

Narsum : “Ya Kantor Badan Pengelola Kraton yang saya tahu, ya karena inisiatif beliau ya.”

Peneliti : “Pak, kalau selama menjabat kemarin ini nggak pak, maksudnya Kraton itu sempat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain nggak pak? Misalnya dalam hal melestarikan kebudayaan atau menyelenggarakan apa gitu?”

Narsum : “Kalau Kraton menjalankan e.. apa namanya menjalin kerjasama dengan lembaga lain, iya. Banyak sekali, tetapi dalam konteks Humas itu diberdayakan ikut di dalam apa namanya negoisasi, ikut dalam e.. pembuatan kontrak, ikut dalam pengambilan keputusan itu tidak.”

Peneliti : “O..gitu. jadi walaupun sebenarnya ‘iya, Kraton menjalin kerjasama dengan banyak lembaga lain’ tapi Humas sendiri tidak diikutsertakan dalam hal seperti itu pak?”

Narsum : “He’em, tidak diberdayakan. Karena itu memang turunan dari dulu. Jadi Humas itu ya mung di-nggo wong sing nerangke yen ono wong takon tentang gunung itu apa. Jadi masih tradisional.”

Peneliti : “Tapi kalau hubungan dengan lembaga lain atau pemerintah sendiri ada pak?”

Narsum : “Secara kelembagaan, iya dengan pemerintah. Tetapi kalau pemerintah-pun juga pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan di Kraton juga e.. tidak melibatkan Humas secara maksimal gitu.”

Peneliti : “Nah kalau seperti itu pak, seberapa apa ya pak, seberapa vital sebenarnya peranan Humas di Kraton itu sendiri? Mungkin dalam hal kebudayaan atau dalam hal ya memberikan statement keluar, berhubungan dengan lembaga lain, itu seberapa vital pak sebenarnya?”

Narsum : “E.. Saya pribadi melihat sebetulnya Kraton itu butuh Humas yang kuat ya, tetapi begini butuh Humas yang kuat dengan syarat ada e.. revitalisasi organisasi di Kraton dan itu yang sampai saat ini relative tidak bisa berjalan optimal, karena juga banyak kendala. Nah itu yang saya lihat seperti itu. jadi memang bagi saya Humas Kraton sangat penting. Factor kedua e.. konflik yang dipandang pihak luar masih berjalan itu juga agak sulit untuk memaksimalkan proses pengambilan keputusan yang ada di Kraton itu.”

Peneliti : “Nah tadi kan sebenarnya memang diperlukan e.. mungkin Pak Bambang sendiri punya apa ya pikiran buat kedepannya benar-benar butuh nggak sih pak? Maksudnya Humas yang benar-benar berfungsi sebagai seorang Humas, bukan Humas yang berfungsi sebagai seorang juru penerang?”

Narsum : “E.. sangat penting. Tapi ya itu syaratnya, kalau ada revitalisasi lah. Organisasinya sudah ada, dan disitu sebetulnya kepemimpinan menjadi factor yang penting, mempengaruhi semua. Jadi tidak hanya leader tapi leadership. Yang kedua memang e.. SDM yang ada di dalam situ perlu, barangkali kalau boleh bicara lagi Kraton mesti udah punya visi dan misi yang jelas. Itu baru kita bisa masuk kesana. Nah ini dalam pandangan modern ya, jadi Anda itu pakai kacamata modern, seperti saya. Kraton ini e.. tradisi modern, tapi dulu sebenarnya organisasi itu yang menata juga karena pengaruh Belanda to? Lha mestinya organisasi itu berkembang seperti itu, berkembang itu tidak dalam arti orangnya saja, tetapi lembaganya juga.”

Peneliti : “Nah kalau yang orang sebagian ngomong konflik dsbnya. Nah sebenarnya seberapa besar pak peranan Humas disitu di dalam masa konflik empat tahun kemarin itu? Semisal dalam hal memberikan statement ke media, memberikan penjelasan dan penerangan ke masyarakat?”

Narsum : “Kalau saya begini, e.. saya selalu mendudukan bahwa Humas ini adalah Humas kelembagaan Kraton. Kalau ketika bicara mengenai konflik pertanyaannya kemudian, pertanyaan yang paling mendasar kan siapa sih yang sah, kan? Itu sudah ada bukunya yang menjawab. Kalau Humas Kraton akan berpegang, kalau saya berpegang pada yang namanya angger-angger. Ya itu, sudah. Angger-anggernya begitu ya harus dijalankan. Nah permasalahan ini sekarang dalam menjalankan angger-angger, dijalankan secara membabi-buta dalam arti menjalankan apa adanya. Atau kita menjalankan secara dengan ada inovasi dan atau sebagainya, itu kan pertanyaan kedua. Nah, ketika bicara tentang angger-angger ini lalu yang terjadi konflik itu bicara tentang organisasi Kraton, konflik itu adalah kepemimpinan di Kraton. Karena kepemimpinan-nya tradisional berdasarkan keturunan, keturunannya banyak itu yang menjadi konflik gitu. Jadi saya sebagai Humas, tetep harus membawa jarak bahwa Humas Kraton itu tetap didudukan dalam konteks tidak memenangkan konflik ini atau memenangkan pihak ini, kedua pihak ini. tapi mendudukan bahwa Kraton punya aturan yang namanya angger-angger. Angger-angger itu hukum adat, sejauh mana adat itu dipenuhi, ya mestinya kalau kita itu menganggap hak adat itu ada, lalu organisasi adat itu ada, tanah adat itu ada, selama itu ya kita pegang gitu. Dan selama membawa ini, bahwa hukum adat ini harus bisa membuktikan bahwa hukum adat ini membawa kemaslahatan begitu.”

Peneliti : “Sejauh ini yang kelihatan sangat berperan dalam memberikan statement bahkan menerbitkan buku seperti itu adalah Gusti Mung dan Badan Pengelola Kraton. Nah itu gimana pak Humas sendiri gitu?”

Narsum : “E.. Begini memang e.. itu juga salah satu alasan mengapa kami tidak terlalu aktif. Itu karena saya masih bekerja disini jadi saya tidak mempunyai cukup waktu untuk involve secara penuh waktu disana. Dan itu menyebabkan memang kontribusi saya sangat sedikit. Dan itu saya juga merasa bersalah karena itu. Jadi (pause)”

Peneliti : “E.. kalau ini pak, dalam hal kebudayaan sendiri itu apakah peranannya Humas juga e.. sedemikian besar atau...”

Narsum : “Sik..sik pertanyaanne mau sing sebelumnya tadi..”

Peneliti : “Oiya ini, yang tadi lho pak. Kan selama ini yang semasa konflik kemarin yang sejauh ini yang memberikan statement keluar adalah kebanyakan Gusti Mung atau suaminya kalau nggak yang lain gitu. Nah saya melihat peranan Humas yang agak sedikit terpinggirkan begitu.”

Narsum : “Hmm, begini e.. karena saya itu melihat juga ini sudah tidak disalahkan dari sisi orangnya sendiri kan, misalnya keluarganya e.. Gusti Mung dalam satu ibu dengan keluarganya Tedjowulan yang satu ibu. Karena juga ada pengaruh media. Jadi bagaimanapun juga media memberi ruang untuk apa namanya berkembangnya konflik itu. Dan tidak hanya memberi ruang, tapi juga e.. memberi stimulus bagi berkembangnya konflik. Nah e.. di lain pihak SDM-nya sendiri e.. memang ada potensi konflik yang besar di masa lalu ya. Lalu yang kedua, itu saja kadang tidak menyadari bahwa e.. terbawa oleh sebuah apa namanya ruang tadi, terbawa ke dalam ruang yang itu. Sehingga kemudian yang saya sangka kemudian konflik itu tidak bicara pada angger-angger tapi bumbunya kemudian bergeser pada konflik keluarga ya. Nah ketika konflik keluarga terjadi kemudian tereduksi lagi menjadi konflik antar pribadi-pribadi dalam keluarga gitu. Ini yang kemudian menjadi e..saya tidak bisa, Humas terutama itu akan sangat sulit berperan karena tidak bisa kita masuk ke pribadinya, begitu. E.. dalam konteks misalnya permasalahan antara keluarga Gusti Mung dalam arti adik-adiknya Sinuhun, dan kemudian e.. Tedjowulan dan adik-adiknya. Itu kemudian muncul statement-statement yang itu sangat pribadi, yang sebetulnya tidak terkait dengan kehumasan. Nah mestinya kalau bicara kehumasan ya sudah ini angger-angger. Kalau angger-angger sudah, udah tidak ada alasan lain lagi. Tidak ada alasan you capable atau tidak, you mampu atau tidak. Yang terjadi kalau capable seperti apa, kalau tidak capable ada inovasi apa di dalam lembaga adat gitu lho. Harusnya begitu, gitu lho. Jadi e.. kemarin kan kemudian bergeser, bergesernya

itu yang mampu yang mana gitu, yang pantes yang mana gitu. Kalau adat kan tidak bilang begitu. Adat yo wis putra tertua, kalau tidak ada yang dari permaisuri, laki-laki dari permaisuri, yo dah putra tertua. Nah urut-urutannya waktu itu KGPH Hangabehi ya sudah itu yang dijadikan raja, selesai. Nah sekarang permasalahannya kalau itu dianggap mampu atau tidak dsbnya kemudian derivatifnya seperti apa? Mestinya begitu kalau bicara Humas Kraton. Tapi ini kan sudah bergeser, yang terjadi kan perang seperti itu kan? dan itu Humas begitu. Nah ya itulah yang sebetulnya bagaimanapun juga kalau saya e.. saya merasa bahwa ada peran media di dalam konflik ini yang kadang-kadang media juga tidak mendudukan kembali dalam membawa dalam adat. Tapi justru memberi ruang ke dalam konflik yang telah pribadi. Ning yo kuwi ra isoh disalahke, wong makannya dari situ, yo repot.”

Peneliti : “Nah kalau tadi bapak bilang seperti itu, jadi secara tidak langsung memang sebenarnya ada penyimpangan dalam ini ya bagaimana menjalankan kehumasan itu sendiri ya?”

Narsum : “Tidak penyimpangan, ada ketidakberdayaan. Bukan penyimpangan mbak, ketidakberdayaan. Pada saat itu, ketika konflik itu terjadi. Iya kan? karena ketika, anu media kan lebih tertarik statement-nya gusti-gusti daripada statement-nya saya iya kan? Saya juga tidak tertarik lagi, karena sudah tidak ada yang bisa dijual dari statement saya. Kalau statement saya kan jelas, kalau angger-angger ya seperti itu ya sudah. Lha kalau bicara itu nanti, yen wis ono waktu. Kalau sekarang ya bagaimana prose situ gitu lho. Kalau saya gitu. Lha proses itu kan tidak dilalui.”

Peneliti : “Nah kalau sejauh ini pak, peranan terbesarnya Humas itu mungkin kalau di area konflik memang e.. seperti itu kondisinya, memang tidak bisa, nah kalau untuk..”

Narsum : “Nah ini mbak, celakanya lagi kemudian e.. ada Humasnya Gusti Tedjo, ya to? Itu kan juru bicaranya gitu. Tapi kemudian diberi label Humasnya Kraton gitu. Ya bagi saya, bagi dunia luar, ya sah-sah saja, monggo gitu. Tapi dalam konteks kalau ditarik dari sisi kehumasan Kraton ki wis ora gathuk meneh. Kan begitu?”

Peneliti : “Maksudnya opo ora gathuk meneh?”

Narsum : “Ora gathuk meneh karena yang diperjuangkan itu kepentingan-nya Gusti Tedjo. Yang saya perjuangkan bukan kepentingannya keluarganya Gusti Mung, yang saya perjuangkan kepentingan Kraton. Kebetulan dari sisi hukum adat itu kakak-nya Gusti Mung yang menjadi raja gitu lho. Nah masalah secara sosial, secara pribadi saya lebih dekat dengan Gusti Mung dan keluarga itu masalah lain. Jadi kalau Anda tanya pada saya, saya masalah pribadi itu relative sedikit meskipun ada dengan keluarganya. Dan saya tidak care, saya tidak terlalu dekat dengan beliau, mungkin kecuali Gusti Dipo ya. karena memang di Kraton sebagai pejabat dan tinggalnya di Kraton. Jadi tidak hanya saya tok yang dekat, Gusti Mung juga dekat, gitu lho. Tapi memang kalau hubungan-nya dari sisi budaya kan saya secara pribadi kan saya bekerja dengan beliau, karena memang e.. dari dulu begitu. Tapi belum tentu juga e.. pandangan-pandangannya, paradigmanya berpikir sama. It may be different dan perbedaan itu biasa.”

Narsum : “Jadi memang sejauh ini kalau di konflik seperti itu, peranan terbesarnya Humas Kraton selama bapak menjabat adalah di bidang kebudayaan?”

Peneliti : “Oiya, iya di bidang kebudayaan. Tapi kan karena sekarang ini informasi kan sudah lebih terbuka, lalu banyak orang yang sudah mendapatkan terpaan dari informasi tentang tata cara upacara Kraton sehingga kadang-kadang juga....., mereka sudah punya file. Yo wong wit mbiyen gunungane ki dari tahun ke tahun ya seperti itu, misalnya ya. gunungane itu kan memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, yow is gari semangatnya syiar Islam, kan begitu. Ya sekarang kalau terjadi inovasi, misale gunungane jadi 12, ini kan inovasi di dalam itu kan kalau saya melihat nilai instrumental. Jadi di Kraton itu, kalau saya pribadi, ada nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar ini yang sebetulnya harus kita lestarikan dan sifatnya universal. Salah satunya suksesi. Ya sudah kalau itu kita anggap sebagai nilai dasar, harus kita lestarikan. Nah mestinya belajar dari suksesi-suksesi itu akan mempersiapkan the next succession itu more better than nowadays. Mestinya seperti itu. Jadi sebenarnya variasi banyak banyak yang kita bisa lakukan, itu nilai

dasar. Lha kalau nilai instrumental itu tadi, ditambah liong ya bisa, mau ditambah apa itu instrumental, tergantung situasi kondisi sesaat. Tetapi dari sisi nilai dasarnya misalnya tata cara gunungan itu ya memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, yo wis. Lha itu yang orang sudah banyak tahu. Jadi kalau sekarang ini Humas tidak perlu ngomong lagi, memberikan penjelasan. Yo wis sak mestine.”

Peneliti : “Kalau dari hasil pengamatan saya selama ini, Humas Tedjowulan itu dengan bersemangat, selalu ikut serta dalam hal-hal yang ada ya..”

Narsum : “Ya karena dia berada di pihak keluarga, bukan di pihak Humas Kraton.”

Peneliti : “Kalau ini pak, semisal ada masalah apa, misal masalah pasar cinderamata dan Museum Radyapustaka, beliau juga ikut memberikan penjelasan. Kalau menurut bapak sendiri?”

Narsum : “Nah itu, kalau saya memang mendudukan permasalahannya dalam koridor yang benar. Artinya positioning-nya mesti bener dulu lokasinya. Kalau lokasinya nggak bener, kita ngomong juga ikut nggak bener. Ya kan? oke misalnya masalah cinderamata. Ini sebenarnya masalahnya hanya kecil, tapi dibesarkan. Masalahnya apa to? Pembagian hak pendapatan, ya itu. Kemudian dibesarkan dalam konteks untuk mencari isu, karena itu sudah keluarga. Kalau sudah mencari isu keluarga, sing salah keluarga kono, itu saya sudah tidak mau. Tapi kalau dari Kraton mestinya dikembalikan ke Kraton dulu to? Baru Kraton kemudian ada kebijakan, jangan di by-pass. Tapi ya sekali lagi, organisasi kan tergantung leadernya juga. Nah proses pengambilan keputusan bisa cepet, bisa tidak. Harus cepat, tapi bukan berarti memby-pass. Cepat itu ada jalurnya, kalau saya seperti itu. Radyapustaka juga demikian, beberapa kali saya diajak rapat dengan Gusti Mung. Di situ kita juga ingin tahu, sebetulnya dari sisi manajemen Gusti Mung ingin tahu sebenarnya duduk masalahnya. Emang begitu harusnya, setelah itu baru tergeser. Lha kalau sudah tergeser, seolah-olah Radyapustaka dikuasai Gusti Mung. Bukan, bukan dikuasai Gusti Mung. Itu Gusti Mung sebagai representative dari Kraton,

gitu lho. Tetapi karena latar belakang konflik sing wis kebacut antar pribadi, ngono lho.”

Peneliti : “Tapi memang sebenarnya langkah-langkah pendekatan sendiri untuk masalah-masalah seperti itu Kraton pernah ada sebenarnya?”

Narsum : “O ada.. ada. Tapi kan tidak dilakukan Humas dan tidak..... Yang terjadi karena kan kemudian arahnya sudah tidak konsepsional, kemudian akhirnya kepentingannya sudah tidak hanya antar keluarganya Tedjowulan dan keluarganya Sinuhun lalu ada kepentingan Pemkot. Ini kepentingan masyarakat ini yang repot. Kadang-kadang masyarakat juga tidak netral, ada keberpihakkan. Mereka tidak bicara mengenai keberpihakkan lembaga, tapi karena sudah melihat pribadi-nya. ‘aku seneng pribadine karo Gusti Tedjo, aku ngewangi Gusti Tedjo. Aku seneng Gusti Mung, aku ngewangi Gusti Mung’ Kita tidak bicara seperti itu, kita bicara kehumasan. Let’s talk about Kraton. Seperti contoh, saya selalu ngomong dengan orang yang dekat dengan pak Wali. Saya tidak punya..... yang saya butuhkan ketegasan Anda dan kontribusi Anda ke Kraton, misalnya ya. Anda membantu Kraton..... diberikan kepada manajemen lalu diberi kepada Supervisor. Kalau itu sudah sesuai dengan tujuan yo wis kita tidak bicara lagi. Kalau situasinya memang mau begitu bisa.”

Peneliti : “Jadi memang kalau selama ini, kalau berhubungan dengan kasus-kasus yang di luar Kraton seperti Pasar Cinderamata dan Radya Pustaka ada ya pak? Tapi Humas tidak terlibat secara intens?”

Narsum : “Intens, ya. dalam arti karena itu sudah digeser. Jadi ketidakterlibatan bukan karena tidak mau, tapi karena ranahnya sudah digeser kepada konflik itu, gitu lho. Jadi repot.”

Peneliti : “Nah memang jadi selama ini, selama bapak menjabat memang secara intens Humas tidak terlibat karena memang konfliknya sudah mengarah pada konflik keluarga tadi, jadi salah kaprah.”

Narsum : “Ruangnya digeser. Jadi sebetulnya hanya permasalahan arep ngikuti angger-angger atau tidak, tapi kemudian menjadi..”



Peneliti : “Konflik seperti itu tadi?”

Narsum : “Iya begitu. Jadi intinya Humas Kraton tidak bisa berfungsi secara optimal.”

Peneliti : “Tapi kalau bapak sendiri, ada kritik dan saran untuk kedepannya menjadi lebih baik?”

Narsum : “O.. saya selalu memberikan kritik secara internal, bahkan saya sering memberi pendapat di rapat. Kalau saya mengharapkan ada perbaikan, ada pembaharuan. Karena bagaimanapun juga Kraton adalah lembaga besar, potensinya besar, apa namanya masih memberi harapan kepada masyarakat. Tidak hanya dari sisi material, tapi juga spiritualnya. Sekarang kalau orang bodon melihat, ngurusi diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana memberi pengaruh positif ke orang lain? Sebenarnya pertanyaan seperti itu kan juga bisa diajukan oleh masyarakat. Nah itu memang berat. Sebagai sebuah keluarga besar kami juga malu, seperti itu. Ya kuncinya kalau saat ini menurut saya, ya elitnya Kraton. Saya pun secara pribadi akhirnya juga menjadi orang yang tidak disukai oleh keluarganya Tedjowulan, seperti itu. Saya juga memahami itu, saya juga tidak ada masalah bagi saya. Selama mereka tidak memahami posisi saya, tidak mengerti yo rapopo. Tidak ada masalah bagi saya. Saya selalu menjalankan yang menurut saya benar dalam konteks.... Kraton ya itu saya jalankan.”

Peneliti : “Tapi walaupun lembaga adat, kemungkinan Kraton dimasuki sebuah kehumasan modern bisa pak?”

Narsum : “Bisa. wong dari dulu yo wis modern.”

Peneliti : “Ini dalam konteks kehumasan modern yang saat ini”

Narsum : “O.. bisa. Sangat bisa. Why not? Dan harus, dan sebuah keharusan. Memang benar, tiap individu dalam Kraton itu menjadi Humasnya Kraton, ning yen mempunyai visi yang sama. Lha visi yang sama seperti apa? Ya ada pembinaan. Pembinaan itu banyak macamnya, banyak faktornya.”

## **Hasil wawancara Gusti Mung**

Peneliti : “Ibu bisa menceritakan tentang Humas Kraton?”

Narsum : “Luas sekali nggih. Luas sekali e.. bahkan sebetulnya yang kita tempatkan disitu sendiri, mas Bambang Irawan, Kanjeng Lintang itu sendiri juga waktu itu menyampaikan kalau namanya PR itu kan terlalu luas gitu. Tapi ya itu kan bahasa umum, tapi e.. nanti sebatas apa dan apa yang perlu disampaikan kan pasti akan dibatasi dengan pertanyaan atau keadaan gitu. Lha sebetulnya kan apa yang ada di dalam kraton sendiri pasti ada pergeseran, ada e.. karena kebutuhan dari kraton itu sendiri untuk e.. disampaikan kepada public kan gitu. Jadi e.. akhirnya kan, kalau zaman bapak saya dulu (PB XII) e.. ada KRMH Yosodipuro karena beliau juga ini kan disamping juru penerang Kraton itu juga bertugas dari Kraton untuk mengisi e.. ceramah atau siaran tentang kebudayaan kraton di RRI gitu. Tapi sekarang kan banyak radio swasta dan pihak kraton juga menjalin kerjasama dengan radio swasta. Ada Karavan, ada Slank, ada RRI masih terus jalan. Ini yang akhirnya, yang namanya juru penerang ya pasti kita ambil yang orang yang mumpuni. Mumpuni dalam arti pasti yang pertama yang berkaitan dengan Kraton, dengan kebudayaan, e.. yang bisa memberikan penjelasan, penerangan kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Lha kalau masalah-masalah yang ada di dalam Kraton itu yang e.. dalam konteks atau dalam garis yang itu memang rutinitas Kraton, lha itu e.. mestinya itu tanggung jawab juru penerang itu sendiri bukan yang ada di radio, itu kan siaran. Mestinya begitu, tapi karena memang e.. situasinya pribadinya yang ditempatkan disitu sendiri kan banyak sekali pekerjaan yang akhirnya e.. judul sebagai juru bicara atau PR itu sendiri tidak pernah tertangani atau dilakukan oleh si petugas itu sendiri kan. Tapi bagaimana pun kan Kraton tetap harus memberi penerangan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu bahkan kalau ada masalah Kraton sendiri juga wartawan itu sendiri juga pasti akhirnya akan datang ke Kraton dan kita biasanya terus menunjuk dalam posisi ini ada masalah ini, jadi tolong bicara dengan ini, gitu. Akhirnya begitu sesuai dengan e.. masalah yang ada. Kalau masalah hukum, kraton kan punya lembaga hukum ya

dengan Kanjeng Wiro, kalau masalah kelembagaan ya dengan saya, kalau masalah yang umum bisa dengan Kanjeng Winarno. Gitu jadi akhirnya semua itu tertangani dan apa bisa memberikan apa yang diinginkan masyarakat, informasi tentang apa yang ada di dalam Karton apa atau apa masalah dan apa yang terjadi di dalam Kraton.”

Peneliti : “Jadi itu informasi yang disampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada begitu? Sesuai dengan orang dan kapabilitasnya?”

Narsum : “He’em. Kecuali kalau itu sudah rutinitas itu biasanya kalau Kanjeng Lintang nggak bisa itu ke Kanjeng Winarno. Itu seperti upacara-upacara adat, bulan ini ada apa saja, ini makna artinya apa. Itu kan sudah ada sendiri.”

Peneliti : “Saya mau tanya, dalam kapasitas ibu sebagai Pengageng Sasana Wilapa nggih, tentang Humas Kraton sendiri kan yang sekarang dijabat oleh Pak Bambang itu kan dilembagakan di bawah Sasana Wilapa, itu mulai kapan bu?”

Narsum : “Ya mulai pemerintahannya Sinuhun yang sekarang gitu. Kalau dulu e.. seperti Kanjeng Yosodipuro itu juga secara kelembagaan tidak, tidak menjadi abdi dhaem di-dinas gitu, kalau di Kraton di salah satu kadipaten. Tapi dia juga berhubungan langsung dengan Sasana Wilapa dan dengan Sinuhun pada waktu itu.”

Peneliti : “Jadi belum dilembagakan nggih bu?”

Narsum : “Ya belum. Belum tapi sudah, sudah seperti tugas itu sendiri secara lisan gitu. Karena dianggap Kanjeng Yosodipuro ini menguasai permasalahan apa saja yang diinginkan informasi dari Kraton oleh masyarakat gitu.”

Peneliti : “Kalau yang melemparkan ide untuk melembagakan bu? Sinuhun PB XIII?”

Narsum : “Ya bersama lembaga ini gitu. Jadi apa yang kita butuhkan itu apa dalam satu e.. badan yang di dalam Kraton itu apa saja ini o.. berarti perlu ada PR-nya gitu. Juru penerang disini lain dengan juru penerang yang ada di Museum gitu.”

Peneliti : “Kalau untuk job description-nya sendiri bu? Untuk Humas yang sekarang sudah dilembagakan itu, apa saja bu?”

Narsum : “Ya akhirnya juga dia sendiri juga tidak bisa memenuhi apa yang menjadi apa ya jabatannya begitu. Karena juga e.. banyak sekali yang dia, nopo pak Bambang itu kegiatannya di kampus-nya itu terlalu banyak yang tidak bisa di-sambi gitu lho. Nah akhirnya kan juga setiap e.. permasalahan yang dbutuhkan penerangan dari Kraton ya pada waktu itu siapa yang ada, siapa yang bisa itanya itu jadinya juga lepas lagi dari.. tapi tetep pasti e.. pejabat di Kraton.”

Peneliti : “E.. Kalau sejauh ini bagaimana bagian Humasini bekerja? Mungkin dari kinerja atau mungkin ada komplain?”

Narsum : “Ya tidak, belum maksimal begitu.”

Peneliti : “Tapi kalau saya baca di koran-koran yang banyak memberikan statement ibu ya, pak Edi begitu?”

Narsum : “Yak arena kan secara umum saya yang bertanggung jawab e.. atas institusi ini secara kelembagaan.”

Peneliti : “Sebetulnya kalau berbicara tentang citra e.. oleh Humas Kraton sendiri ini bu yang ingin dicitrakan keluar atau ke masyarakat seperti apa bu? Terkait dengan keberadaan Sinuhun yang baru?”

Narsum : “Ya sebetulnya begini, kalau itu kan jelas. Jadi apa yang sudah berjalan e.. mulai ada Sinuhun baru tahun 2004 itu kan karena terjadi permasalahan yang memerlukan penerangan yang sejelas-jelasnya dari Kraton kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dan tentang apa yang harus di e.. dilakukan oleh lembaga Kraton ini sendiri kan akhirnya kan kita butuh untuk menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada di dalam Kraton ngaten. Lha pasti ini yang e.. perlu kita sampaikan begitu. Kita sendiri tiap tahun ada semacam nopo nggih buku yang kita cetak untuk e.. masa kerja atau masa. Istilahnya setahun ini apa saja yang sudah kita kerjakan, jadi kan ada ini bukunya. Yang kemarin juga kita bikin, belum dapet ya, yang kecil itu? Lha ini bentuk sebetulnya juga e.. pertanggungjawaban lembaga ini khususnya memberi penerangan kepada kekerabatan kita sendiri dan kepada pihak lain itu karena kita sampaikan kepada

ulang tahun kenaikan tahta raja itu kepada tamu undangan, yang notabenenya adalah masyarakat umum gitu.”

Peneliti : “Dan terkait dengan konflik sendiri bu yang sampai saat ini masih ada, peranan apa bu yang sebenarnya dijalankan oleh Humas Kraton?”

Narsum : “Sebetulnya sejak semula itu saya selalu mengatakan bahwa Kraton itu tidak ada konflik. Makanya Kraton ber nopo ya.. apa ya harus menerangkan bahwa Kraton itu tidak ada konflik.”

Peneliti : “Jadi itu langkah yang ditempuh oleh Humasnya sendiri?”

Narsum : “Ya Kraton menjalankan aturan Kraton ya seperti itu, kalau ada yang di luar Kraton itu nggegeri itu bukan urusan Kraton itu lho. Sebetulnya seperti itu. Cuma karena itu menjadi menarik sekali di masyarakat kita sekarang ini. itu menjadi polemic e.. berkepanjangan di media. Lha waktu itu kan wartawan itu sendiri datang, itu seperti ini kita memberi penerangan gitu. Dalam arti pada waktu kita memberi penerangan itu sebetulnya menyampaikan bahwa ini atauran Kraton seperti ini gitu. Jadi ini tidak perlu di-konflik-i gitu. Karena ini bukan konflik gitu. Kalau toh ada yang pengen jadi raja itu urusan dia, ngaten lho. Sebetulnya seperti itu, lha Kraton itu kan akhirnya juga yang terakhir sekali kira-kira tahun lalu itu kan ada pihak sing rumangsane meng-konflik-i masalah apa Kraton ini kan kesana (Mendagri) supaya pemerintah itu merampungkan konflik di dalam Kraton gitu. Lha akhirnya kan pemerintah sendiri e.. menjawabnya begitu, ini bukan e.. urusan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Mendagri ya yang bertugas. Karena Kraton memakai aturan adat. Lha udah, selesai to kalau begitu. Nah cuma mereka itu kan tidak mau menuruti aturan adat gitu lho. Jadi seakan-akan dia itu konflik. Ya sudah, kalau dia di dalam itu konflik ha dia dd luar kok. Bukan urusan kita gitu. Harusnya begitu, dia mau jadi ratu neng kono, yo wong bukan disini kok, bukan di RT 01 RW 01 Baluwarti, Pasar Kliwon kok.”

Peneliti : “Jadi memang seperti itulah ya bu, apa yang sebenarnya pengen disampaikan pihak Kraton kepada pihak luar, bahwa sebenarnya nggak ada konflik gitu bu?”

Narsum : “Ga ada konflik. Kalau ada yang ngomong konflik itu, karena ada apa muncul keinginan yang kandane katanya itu anaknya Sinuhun yang nggak punya hak, pengen punya hak, gitu lho. Ini kan aneh. Lha kalau sekarang terjadi konflik itu ya berarti internalnya anak-anak Sinuhun PB XII. Jangan dibawa ke lembaga. Karena lembaga nggak pernah punya konflik. Karena semua harus tunduk pada aturan adat, siapapun. Sinuhun juga gitu, karena Sinuhun ini pun juga tidak membikin dan mengisi Kraton gitu.”

**Hasil wawancara Kanjeng Winarno, Sasana Wilapa, 15 Desember 2008.**

Peneliti : “Selamat siang pak, mungkin bapak bisa menceritakan sejarah awal mula berdirinya Lembaga Humas Kraton atau mungkin cikal bakalnya?”

Narsum : “Humas Kraton Surakarta Hadiningrat, setahu saya dulu pada waktu almarhum Sinuhun PB XII itu yang menjadi juru penerang Kraton itu RT Taryokusumo, itu yang pertama. Kemudian setelah RT Taryokusumo meninggal dunia, digantikan KRMH Yosodipuro. Lha KRMH Yosodipuro itu kemudian meninggal dunia, sebenarnya yang di-SK-ni ya itu Kanjeng Lintang Sasongko itu, mas Bambang Irawan. Tapi kenyataannya memang karena beliau sangat sibuk di kampusnya jadi dosen, akhirnya dilimpahkan, disamperkan kepada saya memang dalam hal penjelasan-penjelasan apapun yang mungkin diminta oleh para mahasiswa atau masyarakat yang ingin mendapat penjelasan. Jadi saya sendiri, saya sebenarnya bukan sebagai Humas memang, tetapi hanya melaksanakan e.. tugas sebagai Humas tapi SK saya adalah sebagai Wakil Pengageng Sasana Wilapa. Jadi memang e.. terus terang yang pertama RT Taryokusumo itu orangtua saya, lha waktu KRMH Yosodipuro meninggal dunia, memang oleh Pengageng Parentah Kraton, dulu Kanjeng Condrongoro, saya dipanggil. Tapi waktu itu saya dipanggil sebagai juru bicara atau MC Kraton, bilanganya gini dulu ‘koe tak tetepke dadi pambiwara Kraton, nggenteni bapakmu’ saya waktu itu juga belum, belum tahu maksudnya apa, tapi sampai sekarang jujur saya dibebani atau dilimpahi tugas sebagai Humas itu, tapi yang baku ya itu Wakil Pengageng Sasana Wilapa itu. Ya saya ndak pa-pa, emang itu juga saya juga melaksanakan tugas Kraton, sama saja. Mas Bambang Irawan juga seringkali kalau dimintai penjelasan, asalkan dia pas longgar ya pasti memberikan. Jadi setahu saya itu mbak.”

Peneliti : “E.. kalau awal mula-nya Kantor Penerangan Kraton itu pak? Itu tahun berapa pak?”

Narsum : “O.. Itu sejak dulu memang ya secara resmi memang sejak jaman PB II itu sudah ada. Hanya strukturnya memang tidak sebagus setelah disusun secara tertib oleh PB X. Jadi PB X itu yang melengkapi segala-galanya. Struktur organisasi pemerintahan itu PB X yang sampai sekarang pun sebenarnya gaya model pemerintahan PB X dipakai Negara kita, itu. Ada macam-macam lembaga itu dari PB X. Jadi sejak awal sudah ada itu.”

Peneliti : “Jadi bisa dibilang itu cikal bakalnya Humas gitu pak?”

Narsum : “Iya, karena istilahnya dulu itu Pujangga. Pujangga itu kan disamping juga mereka mencatat apa kegiatan dan memberikan penjelasan-penjelasan itu memang Pujangga pada saat itu berkompeten. Lha sekarang sejak zaman setelah PB X kan sudah tidak ada lagi yang namanya Pujangga, lha Humas itu. Tapi sejak awal sudah ada, karena Pujangga itu sekarang fungsinya ini Humas, juru penerang. Lha monggo istilahnya apa itu.”

Peneliti : “Berarti hampir semua tanggung jawabnya Humas dilimpahkan dari Pak Bambang ke Kanjeng Winarno seperti itu?”

Narsum : “Iya, jadi sepertinya itu. Karena mas Bambang juga jarang sekali ke Kraton, dosen UNS to? Ekonomi to? Itu memang, sangat sibuk. Ya akhirnya ya sudah apa boleh buat. Karena kebetulan memang saya, orangtua saya sendiri dulu di bidang itu.”

Peneliti : “Kalau sebenarnya e.. tugas-tugasnya dari Humas Kraton sendiri nopo pak?”

Narsum : “Ya yang penting memberikan penjelasan tentang keberadaan Kraton. Mungkin melayani siapapun yang datang meminta penjelasan tentang keberadaan Kraton gitu. Penjelasan tentang bangunan-bangunan, tentang sejarah Kraton secara singkat dan lain sebagainya. Walaupun kan ada beberapa mahasiswa itu yang seringkali penelitian tidak hanya masalah budayanya, masalah arsitekturnya, masalah e.. apa itu teritorialnya, itu macam-macam. Jadi ada yang khusus mempelajari masalah tari bedaya ketawangnya, ada. Terus nanti kami mendelegasikan ‘o.. ini nanti kepada siapa’ gitu. Jadi tidak harus saya sendiri. Biasanya masalah e.. beksan itu pasti saya limpahkan pada Gusti Mung. Masalah



perpustakaan saya limpahkan kepada Gusti Puger,dsbnya. Kami mengarahkan kesana. Itu fungsinya seperti itu sebenarnya.”

Peneliti : “Jadi lebih ke budaya-nya?”

Narsum : “Iya, lebih ke budaya. Karena memang Kraton Surakarta itu bangunan budaya mbak. Jadi bangunan yang seluas 42 hektare, mulai dari Gladag sampai Alun-alun Kidul itu semua bentuk bangunan budaya, ada makna simbolis disana.”

Peneliti : “Iya, terimakasih pak.”

Narsum : “Ya, sama-sama mbak.”

**Hasil wawancara Pak Bambang Irawan, Senin 21 Juli 2008.**

Peneliti : “Ya pertanyaan yang nomer satu pak?”

Narsum : “Kenapa di Kraton terjadi perpecahan dan perebutan kekuasaan, saya menyarankan Anda untuk membaca bukunya De Graaf, ada banyak judul itu.”

Peneliti : “Apa yang membedakan citra Kraton dengan citra lembaga yang lain pak?”

Narsum : “Kalau dulu sebelum kehilangan kekuasaan, Kraton kan Negara to? Dulu tapi, sebelum merdeka. Sehingga tidak ada urusan dengan citra ya karena Negara. Kemudian setelah kemerdekaan Kraton juga tidak banyak berurusan dengan citra, artinya e.. karena dia pelaku, Anda baca buku yang terbaru dari penelitian orang UGM. Justru citra Kraton itu yang melihat orang lain, tapi karena Kraton sendiri dia bergulat di dalam sebuah rangkaian sejarah mabk, opo jenenge sejarah yang hidup, sehingga e.. tidak banyak berpikir tentang citra. Jadi lebih banyak berpikir apa yang harus dilakukan dalam konteks kekinian apa gitu. Jadi di dalam konteks membangun citraitu apa namanya tidak, maksud saya tidak dilakukan secara terencana dalam konteks Manajemen Citra.”

Peneliti : “Jadi itu merupakan suatu gerakan yang bisa dikatakan spontan gitu pak?”

Narsum : “Iya jadi natural. Bukan spontan, tapi natural, alamiah.”

Peneliti : “Maksudnya natural dari dulu yang dilakukan sama, stagnan?”

Narsum : “Bukan stagnan, ya sesuai dengan zaman to mbak. Jadi sesuai dengan gerakan zaman.”

Peneliti : “Terus untuk zaman yang sekarang ini pak, maksudnya semakin kesini, semakin modern itu, bentuk perwujudan apa yang dikatakan natural tadi seperti apa pak?”

Narsum : “Ya seperti kemarin to? Jumenengan itu kan natural. Pergantian kekuasaan, suksesi itu kan berjalan natural. Ya sebetulnya banyak hal yang e.. apa namanya dari sisi alur logika normal sebenarnya saya secara pribadi juga mempertanyakan, tetapi itulah yang terjadi. Ketika saya masuk di sebuah lembaga adat, masuk di lingkungan itu maka yang terjadi saya punya kedudukan atau posisi dimana saya e.. tidak bisa menyalurkan aspirasi saya secara terbuka seperti sekarang. Meskipun

sebetulnya saya sudah berusaha, saya pernah membuat tulisan tentang suksesi, waktu tahun, jauh sebelum ini terjadi, tahun 92 kalau nggak salah. Jadi sebetulnya relatif tidak dipersiapkan secara baik. Tapi itulah yang terjadi, gitu lho mbak. Ini tidak bicara mengenai citra. Kalau e.. orang memang sadar tentang citra pasti itu tidak terjadi. Iya kan? kalau itu terjadi memang e.. ada semacam, bukan ketidakpedulian, tapi e.. tidak ada ke-koneksi antara apa yang dilakukan oleh pelaku sejarah dengan citra itu sendiri.”

Peneliti : “Berlaku ngga sih pak anomaly pencitraan atau pencitraan yang tidak biasa di dalam Kraton gitu?”

Narsum : “contohnya?”

Peneliti : “Gini pak, maaf sebelumnya, kalau ada anggota keluarga Kraton yang memperjualbelikan benda-benda pusaka, maka mereka yang diluar yang tidak tahu, itu bilang ‘ah biasa, kan kraton butuh dana’ dsbnya. Terus maaf juga nih pak, kalau raja beristri banyak itu biasa, karena emang..”

Narsum : “Saya tanya, kalau Nabi kok nggak di protes? Orang Arab punya istri lebih dari 250 nggak diprotes? Kyai disini banyak yang punya istri lebih dari 20 juga nggak diprotes. Kenapa kok Anda mempermasalahkan citra seperti itu? kakek saya punya istri lebih dari 40. Kalau Anda menanyakan itu, saya tersinggung.”

Peneliti : “Lha makanya saya tanya pak, itu tadi berlaku nggak?”

Narsum : “Itu kan natural. Kenapa? Konteks sosialnya. Konteks sosialnya pada waktu itu bisa. Iya kan? Nabi bisa, Aa’ Gym, walau di-afirmasikan oleh aturan agama, tapi apa masyarakat mau? Nggak mau kan? apa dia peduli citra? Nggak juga kan? gitu.. jadi konteks sosialnya.”

Peneliti : “Jadi bisa dibilang lazim?”

Narsum : “Bukan lazim. Lazim pada zamannya. Istrinya raja sekarang, PB XIII, banyak. Karena ada permasalahan, dia tidak mengambil istri sebelum bercerai. Jadi Anda melihat istrinya banyak. PB XII yang lalu istrinya enam, karena pada masanya itu memungkinkan dan mampu, baik secara fisik atau ekonomi. Karena waktu itu anak raja kaya, bisa menghidupi istri banyak. Jadi gini lho sebetulnya kalau bicara

tentang PR kan bicara sejarah juga. Anda tidak bisa sekali jadi. Anda harus banyak baca tentang Kraton.”

Peneliti : “Itu tadi pak? Kalau menjual benda-benda?”

Narsum : “Menjual benda? Apakah sudah ada bukti di pengadilan bahwa terjadi jual-beli itu? Gini mbak, saya beli keris, Anda sudah pernah ke alun-alun? Udah pernah liat keris yang ada cap Kratonnya? Nah Anda harus kesana dulu agar bisa melihat situasi. Lha saya bawa keris, tak cap Kraton. Saya bawa ke Jakarta, saya katakana ini keris dari Kraton. Percaya nggak orang? Percaya kan? Lalu apa kata orang? Mas bambang menjual keris dari Kraton. Iya to? Padahal itu saya beli di alun-alun, saya cap Kraton. Oke? Jadi belum ada bukti yang tertulis, kecuali mbah Hadi. Justru bukan dalam konteks anak raja, jadi seperti itu. kalau jual gelar, mungkin ya. Mungkin ya, tapi yang jual gelar nggak cuma Kraton, sekolah juga, UNS juga jual gelar.”

Peneliti : “Kemudian yang nomer 4 pak? Bagaimana PR bekerja sebelum konflik 2 raja?”

Narsum : “ Oke begini, jadi sebetulnya dulu itu tidak ada kantor PR ya mbak, yang ada hanya Kantor Penerangan Kraton, jadi itu tahun 1961 itu ketika Museum Kraton didirikan, didirikan Kantor Penerangan Kraton karena berkaitan dengan guide. Mulai itu seolah-olah Kraton memiliki PR. Padahal sebetulnya Kraton sendiri, bukan PR itu, tapi juru penerang. Karena perlu menerangkan kepada masyarakat apa-apa yang perlu diketahui masyarakat tentang Kraton. Terutama tata cara upacara adat.”

Peneliti : “Jadi lebih ke budaya-nya?”

Narsum : “Lebih ke budaya-nya. Jadi mulai disitu, sampai sekarang Kantor Penerangan Kraton ternyata tidak ada. Karena guide sudah melebur jadi satu di apa namanya loket Kraton. Itu yang terjadi dan ketika setelah PB XIII ini baru PR dilembagakan dibawah Kantor Sasana Wilapa ya.”

Peneliti : “Jadi adanya PR ini baru setelah adanya PB XIII?”

Narsum : “Humas ya, iya. Dulu orang luar menyebut Humas Kraton, waktu sebelum ini PB XIII. Tapi sebetulnya itu adalah Kantor Penerangan Kraton, yang menyebut

orang luar karena identik dengan Kanjeng Yosodipuro itu. Karena Kanjeng Yosodipuro kebetulan mantan penyiar RRI, kemudian beliau meng-create sebuah acara e.. apa namanya malem Selasa Kliwon, kemudian ini khusus berbicara mengenai menerangkan tentang budaya Kraton, misal Kraton mau ada Mulud-an, itu kemudian beliau menerangkan Mulud itu seperti ini, ada tinggalan jumenengan beliau menerangkan seperti ini.”

Peneliti : “Jadi itu e.. awalnya tanggapan orang luar, dipikirkannya sebuah Humas ternyata tidak begitu ya pak?”

Narsum : “He’em iya. Jadi begini ya mbak. Anda jangan piye yo frame Anda kan konsepsi PR sekarang, ya kan? Dulu kan orang nggak ngeh terhadap apa sih PR itu. Opo meneh mbak?”

Peneliti : “Jadi ini kan berarti adanya setelah PB XIII e.. kalau struktur organisasinya sendiri pak?”

Narsum : “Struktur organisasinya sendiri ada. Coba mengko tak golekke mbak.”

Peneliti : “Berarti yang nomer 4 ini?”

Narsum : “Sebelum ini bekerja dia di Kantor Penerangan Kraton, ya sebagai juru penerang saja, lebih kepada kebudayaan Kraton.”

Peneliti : “Kalau yang pertanyaan kelima? Adanya kan pas PB XIII kenapa kok tiba-tiba dilembagakan, menjadi sebuah lembaga Humas Kraton?”

Narsum : “Ya, lebih baik kan itu supaya, supaya maksudnya ke depan nanti fungsinya bisa dijalankan lebih optimal gitu. Meskipun sekarang, belum optimal juga.”

Peneliti : “Kalau ini pak, ruang lingkup dan kewajiban? Seperti itu?”

Narsum : “Jadi job descriptionnya, belum ada secara organisasional. Yang jelas bahwa kalau apa namanya yang perlu e.. yang kita share kepada masyarakat itu sebetulnya bahwa ini harus dipahami, konflik ini gitu ya, jadi ya konflik ini dipahami e.. dalam konteks adat, satu. Lalu yang kedua, tidak lepas dari sebetulnya konflik keluarga. Sehingga sebetulnya pihak luar, masyarakat umum yang tidak mengetahui persis tentang ini, e.. tidak perlu memberikan sebuah apa namanya e... apa namanya sebuah kontribusi yang justru memperuncing konflik

ini. Pengennya kita seperti itu. Jadi.. tetapi waktu itu, kalau menurut saya, itu ditangkap media sebagai sebuah komoditas. Justru itu di-create. Kalau saya, konflik itu akhirnya di-create.”

Peneliti : “Media yang meng-create gitu pak?”

Narsum : “Ya. ya akhirnya jadi boom kan, e.. di-boom ke masyarakat. Sehingga e.. apa namanya tapi akhirnya, menurut saya, ada ketidak-konsisten-nan sampai saat ini. Dia tidak memberi justifikasi apa-apa, dia hanya menjual konflik, akhirnya tidak memberi justifikasi apa-apa. Dan ini nampaknya juga dibiarkan dan saya tidak tahu sebetulnya e... apa namanya, menurut kami, ada frame besar apa di balik itu. Ya saya tidak ingin menuduh siapapun, tetapi e.. insting saya Solo ini kan apa namanya sangat menarik untuk dijual apapun yang ada di Solo. Salah satu adalah konfliknya dijual dan akhirnya jadi buku kan, VCD kan? betul itu saksi sejarah, betul. Mungkin 200 tahun lagi sangat berguna, tapi dalam konteks yang berlaku sebetulnya saya sebagai anggota keluarga Kraton, kalau andaikata boleh, saya sebetulnya sangat apa namanya sangat terpukul. Bagaimana kalau keluarga Anda konflik lalu kemudian dibuat buku, VCD? Pernahkah media berpikir sampai sejauh itu? saya tidak tahu siapa-siapa yang bercokol di balik itu. Tapi let's see apa yang terjadi. Karena apa bahwa keluarga saya dan barangkali leluhur-leluhur saya juga tidak akan terima kalau Kraton diperlakukan tidak adil. Betul kami itu dalam tanda kutip ada di dalam perjalanan waktu ada kesalahan sejarah. Coba kita lihat sejarah secara obyektif. Ada orang / ahli yang mengatakan bahwa sekarang Kraton sudah tidak punya power apa-apa lagi, tapi kenapa orang masih datang wakt Suro, jumenengan? Kalau mau berkontribusi kepada Kraton, beri masukan pada SDM-nya, kalau perlu beri sanksi sosial. Why not? Kenapa tidak dilakukan? Justru menjula konflik ini? berikan ruang gerak, biar konflik ini tidak menyebar kemana-mana, konflik ini tidak mengatasnamakan siapapun. Yah begitu, kalau saya pribadi seperti itu.”

Peneliti : “Terkait konflik ini sebetulnya juga sudah mulai menyebar ya pak?”

Narsum : “Sekarang tidak lagi. Orang sudah mulai melihat bahwa dulu yang saya dukung apa sebetulnya, kemudian apa yang saya cari. Kan begitu? Saya pikir orang mendukung 100% juga tidak ada. Mereka punya alasan masing-masing untuk memberikan dukungan gitu. Termasuk yang disini sama, kita kan harus obyektif. Tapi Anda lihat sebetulnya misalnya dari pihak Gusti Tedjo, apakah ndukung seperti dulu? Juga tidak, iya kan? banyak pendukung yang kecewa dsbnya. Nanti dalam perjalanan waktu, ada sebuah masalah, orang melihat ada 2 raja ya itu sah-sah aja mereka melihat seperti itu.”

Peneliti : “Terkait dengan organisasi Humas Kraton, berkedudukan dimana pak? Maksudnya dibawah apa?”

Narsum : “Di Sasana Wilapa, memang sampai sini barangkali masyarakat belum bisa mengharapkan peran optimal ini seprti humas-humas lembaga lain ya. Karena memang situasinya seperti ini, e.. kami juga tidak ingin meng-share informasi yang justru sebetulnya menambah runyam suasana, begitu. Meng-asimetris informasi. Jadi e.. barangkali agar supaya kita membantu e.. apa namanya segera ada cooling down, syukur-syukur ada solusi begitu.”

Peneliti : “Kemudian ini pak, terkait dengan konflik apa yang sudah dilakukan di masa konflik, saat ini?”

Narsum : “Ya intinya sebetulnya kita meng-share sebenarnya apa, satu, supaya masyarakat tidak terprovokasi, tidak jelas juntrungannya, yang tidak mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Meskipun dia tahu omongannya dari pihak A dan B yang saling dkonfrontasikan di media, tapi sebetulnya mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam konteks kesejarahan itu dan banyak orang berkepentingan atas konflik ini. Dan itu sekarang pun juga kelihatan gitu. Lha yang dikerjakan ya itu bahwa masyarakat kita share agar tidak terprovokasi, supaya masyarakat supaya tidak menambah runyam permasalahan.”

Peneliti : “Tapi kalau saya boleh tanya pak, sebenarnya konflik ini merambah ranah politik di luar Kraton ga?”

Narsum : “Nggak ada hubungannya dengan politik sebetulnya. Justru dari politik yang apa namanya jujur saja politik pasti melihat Kraton sebagai potensi untuk menangguk suara, itu pasti.”

Peneliti : “Terus pak, terkait dengan awal konflik sendiri, Humas Kraton bekerjanya seperti apa pak?”

Narsum : “Ya tadi sebagai juru penerang. Kadang-kadang di Kraton diundang untuk memberikan penerangan dimana-mana. Seminar dimana gitu. Ya seperti itu, sekedar kebudayaan seperti itu.”

Peneliti : “Kalau pasca konflik pak?”

Narsum : “Kalau pasca konflik, tetep kebudayaan masih. Dan kami e.. kan biasa diundang kemana-mana. Kebetulan kami yang berbicara tentang kebudayaan Kraton. Saya belum pernah melihat humasnya e.. Gusti Tedjo itu bicara tentang kebudayaan ya. jadi makanya saya kadang-kadang mengatakan, dalam konteks ini marilah kita menempatkan sebagai Humas budaya, bukan sebagai jubir-nya orang konflik gitu lho. Saya kalau diharapkan menjadi jubir-nya orang konflik, saya tidak akan melakukan. Anda tahu, saya lebih banyak diam dan lebih tidak bicara di mass media tentang konflik, tapi kalau ada bicara tentang budaya silakan tanya saya.”

Peneliti : “Nah kalau tadi bicara tentang jubir selama konflik ini pak, siapa yang begitu aktif memberikan komentar-komentar ke masyarakat?”

Narsum : “Semua orang. Kan seneng wartawane gitu makin banyak komen, makin seneng.”

Peneliti : “Kalau dari dalam Kraton pak maksud saya?”

Narsum : “Gusti Mung memberikan statement juga, bukan jubir. Kadang Gusti yang lain juga memberi statement kalau ditanya. Karena saya juga sebagai Humas, saya khawatir bahwa ketika saya omong saya juga keliru, karena sekali lagi ketika kita reduksi menjadi konflik keluarga. Sebetulnya itu saya tidak ingin bicar banyak. Karena banyak faktornya. Karena komunikasi di Kraton itu beda, nggak seperti saya dengan Anda, ada equality. Kalau di Kraton ada struktur dan kadang-kadang itu menjadi sebuah noise dalam menyampaikan sebuah pesan.”



Peneliti : “Ini pertanyaan terakhir pak, sebetulnya citra apa yang ingin diciptakan oleh Humas Kraton untuk Kraton secara keseluruhan dan untuk PB XIII pada khususnya?”

Narsum : “E.. Kalau secara umum kita ingin masyarakat memahami fungsi dan peran Kraton kekinian dan dimasa datang. Tetapi dengan memahami situasi yang ada, yang berlaku saat ini di.. orang memahami kan tidak mudah itu, e.. tapi kita mencoba untuk tidak tergesa-gesa karena kita ingin situasinya smooth supaya juga di masyarakat tidak apa namanya, tidak ada e.. konflik, sampai terjadi konflik karena dukung-mendukung itu. Jadi biar masyarakat kemudian juga melihat e.. kenyataan yang ada sambil belajar, karena kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa sebetulnya yang Anda bisa ambil dari Kraton dan apa yang Anda bisa berikan untuk Kraton sebagai lembaga yang masih eksis. Ya take and give lah.. orang sekarang mencaci-caci Kraton dengan buku. Tapi toh itu juga mengambil dari Kraton kan? karena ada Kraton kan? kalau nggak ada Kraton, bisa dia membuat buku? Jadi tidak perlu apriori terhadap Kraton. Jadi mari kita lihat sesuai kenyataannya saja. Jadi yang ingin kita share kepada masyarakat seperti itu ya. Juga apa namanya, kami secara pribadi pengen masyarakat bisa memahami posisi PB XIII.”

Peneliti : “Tapi kalau dari Humas ada program nggak pak?”

Narsum : “Belum ada program. Karena citra itu kan kalau tidak berbasis realita itu juga tidak bisa. Apakah berani saya mencitra-citrakan PB XIII yang tidak sesuai dengan fakta, kan tidak berani? Apalagi orangnya kan ada begitu.”

Peneliti : “Tapi beliau tidak meminta Humas untuk melakukan program ini itu? agar saya lebih dekat dengan masyarakat dsbnya?”

Narsum : “Nah itu Anda pakai kacamata organisasi modern. Di Kraton itu juga modern ning sakjane komunikasi dalam organisasi masih ada ranah-ranah yang tradisional, tidak begitu. Kalau ke saya, dawuh. Jadi konteksnya seperti itu. jadi lebih ke top down daripada bottom up. Hanya memang kita masih berusaha juga supaya ini bisa lebih baik lagi. Ya memang tadi saya mengatakan belum ada

program yang relative established kesana dan kami juga tidak ingin penitran itu tidak didukung realita yang ada. Nah sekarang saya tanya, apa Gusti Tedjo itu juga melakukan pencitraan? Menurut Anda citra-nya seperti apa yang ingin di share? Nggak ada kan? sama juga. Jadi gini lho, angel, yo memang rodo angel, karena ini sebuah lembaga yang hidup, ada dinamika disitu, ada kesejarahan disitu, ada konteks politik dsbnya. Memang agak multi disipliner, jadi Anda sudut pandangnya harus agak banyak.”

Peneliti : “Iya pak.. terimakasih ya pak”

**Hasil wawancara dengan Pak Winarso Kalinggo. 22 Januari 2009. Museum Radya Pustaka. Pukul 12.00 WIB.**

Peneliti : “Ini pertanyaan pertama pak, apakah bapak mengetahui tentang konflik atau keberadaan dua raja di kota Solo pak?”

Narsum : “Ya tau,e..keberadaan itu dan juga e.. kebetulan dulu juga di intercircle-nya”

Peneliti : “Kenapa pak?”

Narsum : “Di dalam intercircle-nya”

Peneliti : “O... keraton nggih pak?”

Narsum : “He'em”

Peneliti : “Nah, kemudian ini, pandangan bapak sebagai seorang budayawan yang independent di luar kraton. Menurut bapak sebenarnya yang melandasi kenapa sih kok sampai seperti itu, apa ya pak mungkin ya?”

Narsum : “Weiz, sebenarnya tahu persis saya. Cuma mau cerita itu ya kurang begitu relevan lah. Tahu persis saya, karena pernah dekat dengan PB XII, dan pernah dkempit beliau saya. Artinya dengan semua putra-putra dhalem itu tahu.

Peneliti : “Tapi mungkin, mungkin ga pak nih kalo ada faktor-faktor kepentingan pribadi di belakang ini?”

Narsum : “O... jelas sekali ada. Kepentingan-kepentingan pribadi itu ada dan semua mempunyai kepentingan.”

Peneliti : “Baik yang di dalam maupun yang di luar?”

Narsum : “Iya”

Peneliti : “Nah kalau tadi kan bapak ngendikanipun sangat dekat dengan almarhum, dan dekat juga dengan putra-putra dhalem, e... berarti bapak mengenal sosok kedua raja tersebut seperti apa?”

Narsum : “Tau persis”

Peneliti : “Seperti apa pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit”

Narsum : “Ya nuwun sewu kalo itu saya buka, ya kurang enak didengar kepada yang tidak senang. Artinya begini, dari masing-masing, yang satu latar belakangnya adalah

militer, yang satu dengan latar belakang konco mbeling saya, zaman masih mudanya.”

Peneliti : “Bapak bisa sedikit cerita, seperti apa sih pribadinya begitu?”

Narsum : “Ya semuanya sebenarnya lebih kepada momong ya. Bisa ngemong semuanya. Cuma karena ada kepentingan di luar dari beliau-beliau itu kan ada kepentingan-kepentingannya. Dugaan saya muncul memang ini sangat anu sekali artinya dengan keluarga, tidak bisa lepas dari semua keluarga begitu.”

Peneliti : “Berarti pernah pak berinteraksi dengan keduanya atau salah satunya?”

Narsum : “Saya semuanya e... pernah dan sering berinteraksi dengan keduanya.”

Peneliti : “Sampai sekarang pak?”

Narsum : “E... kalo sekarang sudah mulai berkurang, karena sudah kegiatan saya lebih banyak kegiatan di luar. Malah dalam hal ini pernah juga e.. ada yang menawarkan istilahnya ya mengajak bergabung. O... ndak, selama itu belum rukun saya sendiri juga tidak akan bergabung kepada kelompok yang manapun.”

Peneliti : “Yang mengajak siapa itu pak?”

Narsum : “Ya, saya tidak perlu saya jelaskan di sini”

Peneliti : “Tapi ada ya pak?”

Narsum : “Ada, jelas ada. Dan kebetulan saya sendiri kan pernah mengajar di pawiyatan Kraton, ya karena dianggap tidak sepaham sehingga saya dikeluarkan.”

Peneliti : “Kalo dalam pandangan pribadi bapak nih pak, anggap saja sebagai orang luar begitu ya, sosok kedua raja itu seperti apa pak? Bagaimana gitu?”

Narsum : “Persyaratan apakah itu sudah memenuhi syarat atau belum gitu maksudnya?”

Peneliti : “E... ya ga sih pak. Bukan masalah memenuhi syarat atau tidak, cuma sosoknya aja bagaimana gitu.”

Narsum : “Ya.. dari dulu kan sebenarnya permasalahan e.. yang jumeneng itu kan tidak ada yang mulus. Kecuali dari PB IX ke PB X, karena memang sudah dipersiapkan sejak dini. Selebihnya pasti terjadi e.. apa, kepentingan-kepentingan yang, termasuk ayahandanya sendiri dulu kan juga ya ada saudaranya juga kan. Jadi

untuk seperti, kenyataan seperti ini kalau melihat sejarahnya itu juga tidak apa e... yo ora nggumun meneh gitu.”

Peneliti : “Biasa gitu ya pak?”

Narsum : “Ya, karena setiap kali pergantian, kalau dulu dengan kepentingan Belanda-nya, lha sekarang kan kepentingan-kepentingan pribadi masuk.”

Peneliti : “E.. kemudian pak lepas dari kedua sosok raja tersebut. Apa bapak mengenal ga pak, orang-orang atau tokoh-tokoh pembantu yang ada di belakang kedua raja tersebut, pendukung-pendukungnya?”

Narsum : “Menenal. Menenal sekali.”

Peneliti : “Dari kedua-duanya?”

Narsum : “Dari kedua-duanya. Baik dari pihak Hangabehi maupun Tedjowulan. Jelas sekali menenal”

Peneliti : “Tapi pernah ga pak, berinteraksi dengan salah satu dari pembantu-pembantunya?”

Narsum : “Gak pernah. Artinya memang e.. tidak diperlukan. Soalnya apa? Soalnya mereka sudah tidak bisa diberi masukan lagi.”

Peneliti : “Dua-duanya atau salah satu?”

Narsum : “Ya,e.. yang terang salah satu itu nyata. Yang satunya itu masih e.. bisa. Ya bisa ya tidak. Tapi yang terang, masukan unsur dari anu sudah tidak bisa di anu lagi.

Peneliti : “Sudah tidak bisa mendengarkan saran dari orang lain?”

Narsum : “Tidak bisa”

Peneliti : “Tapi mungkin secara pribadi bapak pernah ngasih saran begitu?”

Narsum : “Sudah”

Peneliti : “Ke pendukung-pendukungnya pak?”

Narsum : “Malah langsung. Justru pendukung-pendukungnya yang di belakang latar itu yang justru menolak dan menganggap saya tidak sejalan. Sebenarnya kita pernah mengusulkan pada saat itu, karena dari ibu enam. Kalau waton memang Hangabehi, terus apa salahnya Tedjowulan pada waktu itu diangkat sebagai adipati anom. Wong kenyataan adipati anom yang sudah itu juga belum tentu

jadi raja. Terus dari ibu yang lain ini menempatkan posisi pos pengageng masing-masing. Itu saran yang pernah saya lontarkan pada tahun 2004.”

Peneliti : “Tapi ternyata pak sarannya tadi?”

Narsum : “Malah disobek-sobek dianggap tidak sejalan”

Peneliti : “Itu dari salah satu pihak atau dua-duanya?”

Narsum : “Yang satu pihak nyuwek-nyuwek, yang satu pihak malah agak menggunakan unsure nabok nyilih tangan. Artinya menggunakan dengan mengatasnamakan orang lain tapi sebenarnya itu pekerjaannya dia. Demo, ternyata yang suruhan sana tapi justru nama saya yang digotong.”

Peneliti : “Pernah ya pak seperti itu?”

Narsum : “Pernah, dan saya yang kena awu anget.”

Peneliti : “Kemudian kalau menurut bapak sendiri, keberadaan dan peranan mereka sendiri, tokoh-tokoh di belakangnya itu gimana sih menurut bapak?”

Narsum : “Wah ya, ya nuwun sewu memang barangkali juga sudah bisa menilai secara langsung. Artinya ya, kepentingan pribadi itu lebih di tonjolkan sekali ya. Karena apa, e... latar belakang ya satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Latar belakang dalam arti e.. kegiatan. Ya kalau wong njobo itu ya gawean, pekerjaan gitu lah. Kalau di pihak yang lain kan ada yang menjadi guru lah, ada yang menjadi e... militer, ada yang menjadi pegawai, dll. Sementara di lain pihak kan kurang jelas. Jadi untuk dalam hal ini lebih, kalau saya bicara ya lebih dominan ke situanya.”

Peneliti : “Tapi kalau keberadaan dan peranan para tokoh-tokoh atau pembantu-pembantu di belakang dua raja tersebut itu sendiri lebih banyak membantu menyelesaikan atau malah semakin memperunyam?”

Narsum : “Semakin memperburuk situasi. Jadi kompor itu malah lebih dikipasi, tidak membuat penyelesaian.”

Peneliti : “Itu dari kedua belah pihak atau salah satunya pak?”

Narsum : “Yang salah satu itu jelas sekali. Yang salah satu iya dan tidak”

Peneliti : “Tapi sebenarnya pribadi masing-masing raja itu sebenarnya mau menyelesaikan ini atau tidak pak?”

Narsum : “Kalau pribadi dua rajanya mau. Pribadi kedua raja. Lepas dari orang di belakangnya.”

Peneliti : “Jadi ternyata keberadaan peranan mereka itu malah semakin memperunyam?”

Narsum : “Iya malah semakin runyam. Lha wong saya menyelenggarakan ini saja, kemarin itu Jamasan Rojomolo itu, juga jadi molo.”

Peneliti : “Kenapa pak?”

Narsum : “Karena, artinya kan tidak di-apa.. artinya kan pihak kraton keberatan”

Peneliti : “Karena?”

Narsum : “Karena dianggap barang tuo. Lha kan kita sudah mensurvey lebih jauh. Melibatkan BP3, sehingga kalo tidak diopeni malah makin rusak. Tapi dengan adanya jamasan itu kan lebih mengedepankan ngopeni-nya to? Jadi kemungkinan lebih bisa terawat. Tapi bagi kalangan anu kan lebih dikedepankan ora senenge sik, daripada perawatannya. Muncul kok di koran. Ya kalau saya membela, malah saya jadi anak kecil. Gitu ya biarlah, tidak memahami secara menyeluruh.

Peneliti : “Nah kalau tadi pak, kedua raja tadi kan sekarang sama-sama punya Humas gitu ya. Itu pernah gak pak berinteraksi dengan masing-masing dari Humas itu sendiri pak?”

Narsum : “Ya, dan yang satu Humasnya berfungsi, yang satu Humasnya tidak berfungsi. Lebih dominan para pengagengnya daripada Humas. Malah disini saya tahu persis Humas yang, Humasnya pihak yang dalam ini malah mengeluh. Artinya tidak difungsikan. Jadi lebih dominant kepada pengagengnya-pengagengnya.”

Peneliti : “Kalau berinteraksi dengan Humas yang di luar kraton sudah pernah juga pak?”

Narsum : “Oiya sering komunikasi. Dan Humas yang sana juga sering komunikasi. Kebetulan istrinya dulu pernah menjadi staff saya di KPUD.

Peneliti : “Nah kalau bapak tentu sudah sangat mengenal ya, dan berinteraksi dan tahu sepak terjangnya Humas seperti apa. Kalau bapak melihat kinerja Humas sepanjang konflik dari tahun 2004 sampai sekarang gimana pak?”

Narsum : “Tidak hanya sepanjang konflik, jauh sebelum anu pun e... artinya tidak begitu tertopang. Karena gini e.. kapasitas Humas ini sebagai juru penerang budaya apa kehumasannya? Menyuarakan kraton? Karena ini tidak jelas. Kalau itu menyuarakan kraton, Humas tidak berfungsi, jelas. Tapi kalau hanya sebatas juru penerang budaya, mungkin masih bisa. Nah di kraton seperti itu. Jadi lebih dominan pengagengnya. Kalau dulu ya pengageng parentah kratonnya, kalau sekarang ya pengageng sasana wilapa-nya, atau wakilnya gitu. Jadi Humasnya tidak berfungsi sama sekali.

Peneliti : “Itu yang di dalam ya pak?”

Narsum : “Yang di dalam. Yang di luar pun sebatas kalau itu ada kegiatan. Ya misalnya menjelang kegiatan apa, Humas baru menyampaikan. Kalau tidak ya udah, vakum.”

Peneliti : “Tapi kalau, semisal ini, bapak melihat statement-statement yang mereka berikan ke media kaya gitu. Kan kemarin-kemarin itu sering ya pak, yang pihak ini ngomong apa, yang pihak ini nglempar ganti ngomong apa. Kalau bapak melihat statement-statement yang mereka berikan ke media seperti itu, bapak menganggap Humasnya itu seperti apa kerjanya?”

Narsum : “Itu bukan Humas. Itu kan karena mereka ditugaskan. Bukan karena kehumasannya tapi lebih kepada ontran-ontrannya. Bukan kehumasan lho itu malah yang berfungsi, tapi lebih menyuarakan saling melempar.

Peneliti : “Nah kalau peranan mereka berdua dalam hal kebudayaan sendiri gimana pak? Baik yang di dalam atau yang di luar”

Narsum : “Ya sebenarnya masih sama-sama kuat. Artinya masih bisa mempertahankan peninggalan-peninggalan. Ya hanya saja mungkin e... seperti lontaran-lontaran kemarin juga tidak..tidak..apa, kegiatannya itu e...hanya sebatas untuk lingkungan kraton sendiri tidak untuk kepentingan masyarakat. Ya artinya



begini lah, jadi misalnya kalau itu apa e..membuka diri, semua kegiatan-kegiatan kraton yang dianggap baik oleh masyarakat kan ditiru oleh masyarakat. Ternyata kan mereka tidak, orang yang di dalam kan tidak senang malahan. Terus memberikan batasan, o... ini yang hanya boleh kraton, di luar dari orang kraton tidak boleh buat gunung, suruh buat tumpeng. Lha ini kan juga, iya to?"

Peneliti : "Tapi kalau, apa ya pak, dilihat lagi diantara kedua Humas tadi ya pak, yang lebih, apa ya pak, mungkin lebih bisa membaur ke masyarakatnya untuk mensuarakan rajanya itu kira-kira yang mana?"

Narsum : "Yang kulon"

Peneliti : "Badran?"

Narsum : "Iya, kalau yang wetan tidak berfungsinya Humas. Karena lebih yang keluar itu lebih kepada e.. apa? Pembela hukumnya ataupun mungkin e.. malah bidang-bidang pariwisatanya, lha ini.. atau mungkin malah pengageng sasana wilapanya."

Peneliti : "Nah ini pak, kalau ngomong-ngomong soal, persoalan yang terjadi di masyarakat Solo, kan kalau saya wawancara dengan salah satu Humas dan Humas yang lain, kan mereka saling wah...ya kami berperan. Tapi sebenarnya mereka berperan ga sih pak?"

Narsum : "Enggak"

Peneliti : "Enggak pak? Dalam kasus-kasus misal Radya Pustaka kemarin, atau Pasar Cinderamata?"

Narsum : "Enggak. Itu kan lebih kepada e.. bidang hukumnya. Bukan Humas. Jadi yang Humas yang ditunjuk kan Bambang Irawan, Radityo Lintang Sasongko itu. Kan ndak pernah anu, muncul kapasitasnya sebagai Humas. Lebih kepada akademisnya. Gitu.

Peneliti : "Kemudian kalau yang satunya pak?"

Narsum : "Si Bambang Pradoto? Itu lebih kepada anu saja, kalau tidak ada muatan dawuh, ya tidak."

Peneliti : “Tapi kalau, kemarin kan sempet rame juga pak, kasus Radya Pustaka sempet ga pak ngobrol-ngobrol sama Pak Kalinggo terus berusaha untuk membantu mencari jalan keluar dsb?”

Narsum : “Ndak ada satupun, tidak ada satupun.”

Peneliti : “Gak ikut dalam apa namanya, konsorsium pemerintah?”

Narsum : “Tidak ada”

Peneliti : “Tidak mengusulkan apa-apa?”

Narsum : “Tidak. Malah pada waktu itu diundang dua kubu, malah terjadi berantem di ruang Walikota. Karena itu gagal, maka diambil pembentukan komite.”

Peneliti : “Kalau sampai saat inipun, seberapa concern mereka sama kasus-kasus di masyarakat ini, menurut bapak?”

Narsum : “Lebih banyak e.. diam tapi nimbrung. Artinya gini, dia tidak mengikuti pergolakannya atau memberikan solusi, tetapi lebih kepada nimbrung permasalahan. Ya seperti memberi lontaran-lontaran yang kurang membuat kritik yang membangun.”

Peneliti : “Iya. Nah ini pak, bapak sebagai warga kota Solo juga, bapak melihat gak pak adanya dampak gara-gara ada dua raja?”

Narsum : “Oya jelas sekali. Jelas sekali. Justru masyarakat menjadi bingung. Mana yang harus diakui? Sementara e... lebih banyak masyarakat itu melihat fisik kratonnya, bukan kepada penguasanya.”

Peneliti : “Tapi kalau, mungkin sejauh ini pak, bapak kan banyak berhubungan dengan orang-orang luar Solo juga. Pernah gak mereka menanyakan pada bapak, ini gimana to?”

Narsum : “Banyak sekali. Hampir setiap kali ketemu masyarakat saya jadi sasaran pertanyaan. Karena dianggap e.. orang yang di dalam. Sementara saya sendiri, non-aktif sama sekali. Tapi bisa memberikan penjelasan secara gamblang. Artinya ya kalau alur, artinya kalau e.. apa dari baku emang Hangabehi. Tetapi, lha itu yang penting di dalam tetapi.”

Peneliti : “Tetapi apa pak?”

Narsum : “Ya misalnya harus didampingi anaknya yang bisa mengemban. Atau mungkin pengageng-pengageng yang harus menyeluruh. Ini kan di dalam tetapi tadi.”

Peneliti : “Dampaknya selain masyarakat bingung untuk mana sih yang harus diakui, kira-kira apa lagi pak?”

Narsum : “Ya, di dalam sendiri. Masyarakat yang di dalam Baluwarti.”

Peneliti : “Kenapa pak?”

Narsum : “Ya mereka kan adanya peraturan-peraturan baru yang dianggap masyarakat memberatkan. Pajak pasiten. Iya kan?”

Peneliti : “Okelah di dalam Baluwarti sangat terasa sekali, tetapi kalau di luar-luar ini seperti apa pak?”

Narsum : “Ya memang, terasa kalau pada saat ada kepentingan. Jadi begini, e.. misalnya kraton menyelenggarakan hajatan. Sama-sama malem selikuran, yang satu ngirim kesini (sriwedari), yang satu selikuran di Masjid Agung. Krendo Wahono, itu juga ada dua. Lha ini kan e... bagi masyarakat juga perlu anu to? Penjelasan yang lengkap?”

Peneliti : “Lha tapi kalau pemerintah sendiri gimana pak sejauh ini?”

Narsum : “O.. Tidak bisa. Pemerintah dalam hal ini kan sebatas ini saja, tetapi tidak bisa berani menentukan. Karena itu intern keluarga. Yo jane sih isoh-isoh wae lah. Campur tangan pemerintah itu bisa saja. Karena ini lebih kepada kepentingan keluarga. Jadi seperti saya nanti. Pemerintah memberikan solusi, dianggap memusuhi gitu.”

Peneliti : “Nah kalau bapak kan, semasa PB XII tadi kan sebagai juru penerang dsb-nya ya pak? Nah kalau menurut bapak sendiri, citra kraton Solo selama ini gimana pak?”

Narsum : “Anjlok”

Peneliti : “Itu setelah konflik?”

Narsum : “Iya”

Peneliti : “Sebelumnya pak?”

Narsum : “E...Saya pikir pada saat itu justru berada di e.. apa.. masih banyak sebagai panutan.”

Peneliti : “Panutan untuk?”

Narsum : “Tata cara jawa-nya. Karena semua masih bersumber pada kraton. Karena PB XII itu masih Sinuhun Mardika. Jadi raja yang sesungguhnya di alam kemerdekaan.”

Peneliti : “Kemudian setelah konflik ini?”

Narsum : “Ya, wong rukun wae ra isoh. Dalam hal ini kan yo wis menjadi pertimbangan juga kan?”

Peneliti : “tapi memang menurut bapak citranya?”

Narsum : “Ya jauh menurun.”

Peneliti : “Tapi, citra yang dikatakan jauh menurun tadi, menurut bapak sendiri indikasinya apa pak?”

Narsum : “Karena ketidakrukunan dan tidak bisa dibuat panutan. Sementara termasuk ini yang kraton itu kan ketemunya yang nalar dengan yang tidak nalar.”

Peneliti : “Maksudnya pak?”

Narsum : “Aura. Aura itu memang redup.”

Peneliti : “Aura kraton?”

Narsum : “Iya, dengan adanya itu.”

Peneliti : “Dengan adanya konflik ini?”

Narsum : “Ya jelas sekali.”

Peneliti : “Gara-gara konflik ini jadi meredup gitu?”

Narsum : “Meredup”

Peneliti : “Kalau sebelumnya?”

Narsum : “Sebelumnya masih bisa cerah. Bersinar, karena semua menyatu. Disitu, disengkuyung bareng disitu.”

Peneliti : “Tapi memang tanda-tanda perpecahan itu sudah ada pada waktu Sinuhun masih sehat?”

Narsum : “Sudah. Karena apa? Sejak kecil malah mbak. Karena apa? Karena memang sudah ditanamkan oleh para orangtuanya masing-masing. Ndak, saiki sopo sing ikhlas. Manusia lho.. kalo madu sebanyak itu kan semua berkeinginan diakui lebih dekat, gitu. Sementara fungsi Sinuhun ini kan tidak berlaku sebagai bapak. Tapi sebagai Sinuhun. Sampai surutnya beliau kan tidak berfungsi sebagai bapak, tapi sebagai Sinuhun bagi anak-anaknya.”

Peneliti : “Jadi katakanlah itu sebagai pembela kepentingan keluarga ya pak?”

Narsum : “Salah satunya.”

Peneliti : “Tapi kan ibunya sudah meninggal pak?”

Narsum : “Ya hamper semua. Tapi pada saat mereka kecil kan, sing momong masih ketunggon ibunya kabeh.”

Peneliti : “Nah kalau ini pak, pertanyaan terakhir saya pak. Menurut bapak apakah selama ini yang sudah dilakukan oleh Humas kedua raja itu sudah cukup untuk menampilkan / mempertahankan citra positif kraton Solo?”

Narsum : “Tidak”

Peneliti : “Kenapa pak?”

Narsum : “Ya jelas seperti itu kok. Karena tidak berfungsi.”

Peneliti : “Tapi kan tadi yang tidak berfungsi cuma satu pak, yang satunya kan...”

Narsum : “Sama. Kalau tidak di-dawuhi kan yo ndak ada.”

Peneliti : “Jadi kalau menurut bapak memang belum ya pak?”

Narsum : “Tidak. Bukan belum. Kalau belum itu kan pasti ada pengkaderan yang lebih lanjut. Kalau ini kan dibentuk-bentuk sendiri. Yang keluar bukan corongnya Humas.”

Peneliti : “Kalau mungkin menurut bapak sendiri ini pak, yang sudah pernah berkecimpung di dalam sebagai seorang juru penerang, sebenarnya apa ya? Standarisasi biar Humas kedua raja itu bisa berfungsi dengan baik itu harusnya seperti apa? Yang lazim?”

Narsum : “Mestinya gini, bisa menangkap apa yang dikehendaki pola pemikirannya Sinuhun. Sebagai Humas itu harus bisa menjabarkan. Itu yang penting di dalam

kraton. Iya opo to kersane Sinuhun iki? Nah Humas itu harus bisa ngerti karepe. Nah yang kedua, melaksanakan perintah-perintah sesuai dengan kebijaksanaan kraton. Yang ketiga, tahu permasalahan dan seluruh e.. apa filosofi-filosofi kraton yang ada. Tanpa itu semua Humas tidak bisa berfungsi.”

Peneliti : “Jadi kalau menurut bapak, tiga itu tadi adalah yang seharusnya dan kedua Humas tadi belum mendekati ketiga itu kalau gimana pak?”

Narsum : “Ya, nyenggol-nyenggol sih eneng. Tapi belum sepenuhnya. Karena begini contoh, pernah suatu saat yang namanya krobog-nya Nyai Sutomi, Sitihinggil itu dikepruk pring karo wong edan, pecah. Menangkap itu kan saya cerita, wartawan banyak yang tanya. O.. wong edan, boso Jawa-ne kromo-ne “owah”. Iki lho njobo wis eneng owah-owahan, hei sing neng njero ngertio, jumbungno kahanane. Sinuhun suruh mbacakan ini-ini, saya ditimbali, “ojo cetho-cetho”, jangan terlalu jelas menjabarkan mana-mana persoalannya, tapi disuruh dilambangkan saja. Sebagai Humas, juru penerang kan harus tahu, opo kui makna koyo ngono.”

Peneliti : “Bapak kan sempat sebagai humas. Mulai tahun berapa pak?”

Narsum : “1997-2004. Setelah juru penerang budaya-nya kraton, Kanjeng Yosodipuro sedo. Pertanyaaan-pertanyaan itu dilontarkan kepada saya. Maka sejak itulah saya sering memberikan keterangan-keterangan kehumasan. Lha hal itu tanpa ada SK, tapi diakui.”

Peneliti : “Tapi memang ada dawuhnya?”

Narsum : “Ada. Pokoknya memang diijinkan untuk menyampaikan. “yo terusno, ning ojo cetho-cetho” Itu dawuh dhalem seperti itu.”

Peneliti : “Kalau dulu pak, lebih banyak berkecimpung di budaya ya pak?”

Narsum : “Oiya. Karena kegiatan-kegiatannya budaya dan lebih tidak ada perkonflikkan. Sehingga kita kan e.. sikon secara umum kraton dengan alam sekitarnya, gitu.”

Peneliti : “Kalo dulu, kerjasama kraton dengan pemerintah dari dulu?”

Narsum : “E.. waktu itu kan dari unsur pribadinya orang-orang pemerintahan kan lebih banyak ke kraton juga.”

Peneliti : “Jadi lebih baik yang dulu y?”

Narsum : “O...jelas sekali. Sejak dari Gusdur, Megawati, sampai dengan pak Bayan.”

Peneliti : “Balik lagi ke masalah dua Humas tadi, memang belum ya pak?”

Narsum : “Tidak. Nek belum kan menanamkan, mengajari untuk lebih bisa. Kalau ini ora.”

Peneliti : “O... ya sudah pak. Ini dulu. Terima kasih”

Narsum : “Nggih mbak retno”